STUDI DAN TEORI HUBUNGAN INTERNASIONAL: ARUS UTAMA, ALTERNATIF, DAN REFLEKTIVIS

**Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional**

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

STUDI DAN TEORI HUBUNGAN INTERNASIONAL

ARUS UTAMA, ALTERNATIF, DAN REFLEKTIVIS

Bob Sugeng Hadiwinata

**Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional**

Yayasan Pustaka Obor Indonesia
Jakarta 2017

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

**Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional**

Judul:
Studi dan Teori Hubungan Internasional: Arus Utama, Alternatif, dan Reflektivis, Bob Sugeng Hadiwinata

© 2017
Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang
All rights reserved

xii + 304 hlm; 16 x 24 cm
ISBN: 978602-433-5090

Diterbitkan pertama kali oleh Yayasan Pustaka Obor Indonesia

Cetakan pertama: Agustus 2017
YOI: 1402.35.75.2017
Desain sampul: Iksaka Banu

Yayasan Pustaka Obor Indonesia
Jln. Plaju No. 10, Jakarta 10230
Telepon: 021-31926978, 31920114
Faksimile: 021-31924488
Email: yayasan_obor@cbn.net.id
Website: www.obor.or.id

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

KATA PAKAR

"Melalui eksplorasi literatur yang ekstensif, buku ini berhasil menyajikan pemetaan perkembangan teori Hubungan Internasional secara komprehensif dan karena itu sangat bermanfaat untuk akademisi, analist maupun praktisi disiplin ini."

Prof. Dr. Aleksius Jemadu

Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Pelita Harapan

"Isi buku ini menunjukkan kedalaman dan keluasan pemahaman penulisnya tentang Studi dan Teori Hubungan Internasional. Buku ini dapat menjadi teks rujukan bagi peminat Hubungan Internasional di Indonesia".

Prof. Dr. Yanyan Mohammad Yani, MAIR

Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran

"Tidak saja harus dibaca, tetapi juga harus menjadi rujukan. Para mahasiswa, profesional, pembuat kebijakan luar negeri, diplomat serta praktisi bisnis internasional akan mendapatkan pengetahuan dan perspektif yang luas... Buku Studi dan Teori HI ini merupakan suatu produk kerja akademik sangat istimewa. Perkembangan Ilmu HI dan perdebatan yang muncul di dalamnya berhasil terpetakan dan terurai dengan komprehensif dan dapat dipahami dengan mudah".

Dr. Makmur Keliat

Dosen Program Studi Hubungan Internasional Universitas Indonesia

"Buku ini ibarat suluh yang terang tapi tidak menyilaukan untuk membantu pembaca memahami Studi dan Teori Hubungan Internasional yang serba kompleks secara lebih mudah dan lebih baik....".

Dr. Siswo Pramono

Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK)
Kementerian Luar Negeri RI

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

DAFTAR ISI

Kata Pakar v
Daftar Bagan dan Gambar ix
Ucapan Terima Kasih x

Pendahuluan 1

Bagian Pertama: Studi Hubungan Internasional 9
BAB 1 Studi dan Teori Hubungan Internasional 11
BAB 2 Hubungan Internasional di Indonesia: Warisan Sejarah, Intrusi Politik, dan Komersialisasi 27
BAB 3 Perdebatan-perdebatan Besar dalam Studi Hubungan Internasional 54

Bagian Kedua: Teori-teori Arus Utama 77
BAB 4 Liberalisme dan Neoliberal-Institusionalisme 79
BAB 5 Realisme dan Neorealisme 102

Bagian Ketiga: Teori-teori Alternatif 121
BAB 6 Mazhab Inggris (*The English School*): Martin Wight, Hedly Bull, dan Barry Buzan 123
BAB 7 Teori Kritis (*Critical Theory*): Menggugat Pemikiran-pemikiran Menyimpang dan Mendekatkan HI pada Kemaslahatan Manusia 154
BAB 8 Mazhab Kopenhagen (*The Copenhagen School*) dan Teori Sekuritisasi 176

Bagian Keempat: Teori-teori Reflektivis 197
BAB 9 "Pembelokan Linguistik" (*The Linguistic Turn*) dan

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

	Teori-teori Reflektivis dalam Studi Hubungan Internasional	199
BAB 10	Feminisme dalam Studi Hubungan Internasional: Kritik terhadap Maskulinitas Realisme dan Rendahnya Representasi Perempuan	213
BAB 11	Posmodernisme: Menggugat Modernitas dan Mempertanyakan Positivisme	232
BAB 12	Konstruktivisme: Pentingnya Norma, Kepentingan, Identitas, dan Intensi dalam Hubungan Internasional	260
Referensi		283
Indeks		295
Tentang Penulis		303

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

DAFTAR BAGAN DAN GAMBAR

Bagan 1.1.	Sejarah Pemikiran dalam Studi Hubungan Internasional	15
Bagan 3.1.	Segitiga Kantian Pembentuk Perdamaian Abadi	84
Bagan 5.1.	*Zero Sum Game*	114
Bagan 5.2.	*Non-Zero Sum Game*	115
Bagan 6.1.	Tiga Tradisi Mazhab Inggris ala Generasi Klasik	129
Bagan 6.2.	Tiga Tradisi Mazhab Inggris ala Hedley Bull	133
Bagan 6.3.	Tiga Pilar Masyarakat Kosmopolitan ala Barry Buzan	143
Bagan 8.1.	Proses Sekuritisasi Mazhab Kopenhagen	188
Gambar 10.1.	Penyebaran Mitos "Laki-laki sebagai Pelindung, Perempuan yang Dilindungi" melalui Komik *Superman*	228

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam menghasilkan karya ini penulis berhutang budi pada sejumlah teman, kolega, asisten, dan mahasiswa di kelas Teori-teori Hubungan Internasional di Jurusan Hubugan Internasional Universitas Katolik Parahyangan dan Universitas Padjadjaran. Penulis berterima kasih kepada Yulius Purwadi Hermawan, P.Y. Nur Indro, dan I Nyoman Sudira di Jurusan Hubungan Internasional Universitas Katolik Parahyangan yang selalu menjadi rekan diskusi dan lawan berdebat mengenai berbagai hal terkait dengan studi Hubungan Internasional. Penulis sangat berhutang budi pada Mira Permatasari dan Albert Triwibowo yang sempat membantu penulis dalam mengajar matakuliah Teori-teori Hubungan Internasional sebagai dosen kelas paralel. Kolega di Universitas Padjadjaran juga memberi banyak dukungan moril kepada penulis. Ucapan terima kasih sebesar-besarnya penulis haturkan kepada Dr. Arry Bainus yang telah mendorong penulis untuk makin mendalami teori-teori Hubungan Internasional, Prof. Yanyan M. Yani yang telah membuka kesempatan bagi penulis untuk berinteraksi dengan mahasiswa pasca-sarjana di Universitas Padjadjaran, Prof. Obsatar Sinaga yang telah mendorong penulis untuk selalu mengikuti perkembangan terkini isu Hubungan Internasional, dan Prof. Rusadi Kantaprawira yang mengajarkan *wisdom* dan kedisiplinan berpikir.

Sejumlah dosen di Universitas Gadjah Mada juga telah memberikan inspirasi dan pencerahan bagi penulis. Ucapan terima kasih patut disampaikan kepada Prof. Ichlasul Amal yang memberi sumber inspirasi, Prof. Mohtar Mas'oed yang menjadi guru sekaligus rekan diskusi yang baik, Prof. Amien Rais yang pernah memberikan kuliah-kuliah yang inspiratif, dan Prof. Yahya Muhaimin yang telah memberikan kepercayaan kepada penulis untuk terus mengembangkan diri. Penulis juga berterima kasih kepada Prof. Andrew Linklater yang telah membuka wawasan penulis untuk mendalami teori-teori di luar arus utama, terutama Mazhab Inggris dan Teori Kritis. Penulis merasa beruntung pernah menjadi murid beliau di Universitas Monash, Australia, dan

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

menjadi rekan diskusi ketika penulis melanjutkan studi doktoral di Universitas Cambridge, Inggris.

Dalam penulisan naskah buku penulis sangat berhutang budi kepada sejumlah asisten yang telah membantu dalam pengumpulan bahan, penerjemahan, dan pengeditan. Penulis berterima kasih kepada Rizka Diandra, Made Indriani, Iagyani Yogeswari, Duhita Primandhira, Alya Nurshabrina, Dyah Ayu Arini, Natyashina Nandana, Ivana Agustin, Yunita Chandra, Laila Nur Shastra, dan Shafira Ayunindya yang telah memberikan bantuan dalam bentuk yang berbeda-beda dalam proses penyusunan buku ini.

Buku ini bisa hadir di tangan pembaca atas kerja sama yang baik dengan Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Secara khusus saya berterima kasih kepada Ibu Kartini Nurdin, Pak Suparmin, Mas Andreas Haryono yang mengawal proses penerbitan dengan baik.

Bandung, 30 Mei 2017

Penulis

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

PENDAHULUAN

Sejarah Ilmu Hubungan Internasional

Asal mula studi Hubungan Internasional (HI) dapat ditelusuri jauh ke belakang. Pada masa pra-modern, kajian-kajian yang dapat dimasukkan dalam kategori studi HI berada dalam lingkup ilmu strategi militer. Karya sejarawan Yunani kuno, Thucydides (460 BC - 400 BC), *The History of the Peloponnesian War*, dan karya Sun Tzu, *The Art of War* (512 BC) merupakan contoh klasik dari kajian studi HI pada zaman pra-modern.

Pada perkembangan selanjutnya, kajian studi HI mengalami perkembangan pesat terutama di benua Eropa pada masa pasca Perjanjian Westphalia 1648 yang memutuskan untuk memisahkan gereja (agama) dari politik dan memberikan hak bagi negara-bangsa (*nation-state*) untuk menjalankan kedaulatan pada batas teritorial tertentu. Namun demikian, di daerah di mana asal studi HI, yaitu di Britania Raya, hingga tahun 1900 kajian tentang hubungan antar negara berdaulat menjadi sub-kajian dari ilmu-ilmu sosial yang lebih tua, yakni ilmu hukum dan ilmu filsafat.

Studi HI berkembang menjadi ilmu yang berdiri sendiri pada tahun 1919 ketika seorang pakar dan salah satu konseptor Liga Bangsa-Bangsa, Sir Alfred Zimmern, diangkat sebagai Guru Besar Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Wales di Aberyswyth. Sejak saat itulah ilmu Hubungan Internasional yang kita kenal saat ini mulai berkembang tidak saja ke seluruh Eropa, tetapi juga ke Amerika Serikat dan belahan bumi lainnya seperi Amerika Latin, Asia, dan Afrika. Berbagai perguruan tinggi di Eropa, Amerika Serikat, Amerika Latin, Asia, dan Afrika mulai membuka jurusan Ilmu Hubungan Internasional di bawah fakultas ilmu politik atau fakultas humaniora.

Pada masa menjelang pecahnya Perang Dunia Kedua, para pemikir HI di Amerika Serikat merasa gundah dengan kegagalan Liga Bangsa-Bangsa dalam menegakkan perdamaian dunia. Menurut mereka, Liga Bangsa-Bangsa mengalami kegagalan karena dibuat berdasarkan asumsi liberalisme/idealisme

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

yang meyakini bahwa hakikat manusia pada dasarnya kooperatif sehingga secara naluriah akan saling bekerja sama untuk menciptakan perdamaian abadi sebagaimana dinyatakan oleh filsuf Jerman Immanuel Kant. Kegundahan itulah yang mendorong mereka untuk menciptakan perspektif baru, yaitu Realisme klasik. Realisme klasik mendasarkan pada pandangan filosofis Thomas Hobbes dan Niccolò Machiaveli yang menyatakan bahwa hakikat manusia pada dasarnya egoistik dan agresif. Realisme kemudian dipakai sebagai perspektif utama teori HI karena mengemukakan proposisi penting, antara lain: (1) negara merupakan aktor utama (jika bukan satu-satunya aktor) dalam hubungan internasional; (2) dalam melakukan hubungan internasional, negara menggunakan instrumen politik luar negeri yang dituntun oleh kepentingan nasional; (3) politik luar negeri dapat dibedakan dengan politik dalam negeri dengan sangat jelas karena menyangkut dua peringkat analisi yang berbeda; dan (4) hakikat hubungan antar negara adalah perjuangan untuk memperoleh kekuasaan.

Pada tahun 1970-an ada kegalauan baru di kalangan pemikir HI di Amerika Serikat. Mereka merasa bahwa metode tradisional yang mengandalkan pada penelusuran sejarah (*historical tracing*) dirasakan kurang ilmiah dan memiliki daya eksplanasi dan daya prediksi sangat rendah. Karena itu, pada tahun 1979 Kenneth N. Waltz melalui bukunya *Theory of International Politics* mencoba membuat ilmu HI lebih saintifik dengan cara membangun metode saintifik bagi ilmu HI dengan mengusulkan: (1) penelitian HI harus menemukan dan mengukur hubungan antar variabel sebagaimana ilmu ekonomi melakukannya dengan baik; (2) riset HI merupakan sarana untuk menguji teori; (3) dalam situasi anarkis, negara harus mengupayakan kelangsungan hidupnya melalui pembangunan kekuatan militer; (4) tindakan negara dapat diprediksi dengan melihat pada kekuatan nasionalnya (terutama kekuatan ekonomi dan militernya); dan (5) perdamaian dapat tercipta apabila terdapat Keseimbangan Kekuasaan (*Balance of Power*) di mana keseimbangan kekuatan militer dapat mencegah suatu negara untuk memulai peperangan karena pertimbangan rasional kans kekalahan 50:50. Perspektif yang lazim dikenal sebagai Neo-Realisme ini kemudian menjadi perspektif dominan pada masa Perang Dingin, terutama ketika konsep *Balance of Power* menjadi kerangka acuan perdamaian dunia di bawah sistem Bipolar (AS dan USSR).

Setelah Perang Dingin berakhir pada tahun 1990, perspektif Realisme dan Neo-Realisme menghadapi krisis karena teori-teorinya tidak mampu memberikan eksplanasi logis terhadap munculnya aktor-aktor non-negara

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

dalam politik internasional, berkurangnya dimensi militer dalam diskusi tentang keamanan, meningkatnya konflik identitas menggantikan konflik ideologis antar negara, dan situasi pasca Perang Dingin yang membuat batas-batas negara menjadi kurang relevan akibat globalisasi. Dalam situasi demikian, para pakar HI di Skandinavia dan Jerman mencoba meramaikan studi HI dengan memberikan kontribusi.

Dari Denmark, para pakar yang tergabung ke dalam Mazhab Kopenhagen (Copenhagen School) menginisiasi Teori Sekuritisasi (*Securitization Theory*) yang pada dasarnya menyatakan bahwa isu yang tadinya bukan merupakan isu keamanan (*security*) dapat disekuritisasi (dibuat menjadi isu keamanan) apabila aktor pembuat sekuritisasi (*securitizing actors*) melalui seruannya (*speech acts*) dapat meyakinkan publik bahwa isu tersebut sungguh-sungguh isu keamanan karena mengandung unsur ancaman bagi keselamatan manusia. Dengan demikian tampak bahwa Mazhab Kopenhagen telah memperluas konsep keamanan dengan menggabungkan unsur keamanan tradisional (keamanan negara) dan unsur keamanan Non-Tradisional (keamanan manusia). Dari Jerman sejumlah pakar seperti Nicolas Onuf dan Friedrich Kratochwil memperkenalkan Teori Kontruktivis (*Constructivist Theory*) yang menyatakan bahwa hubungan antar aktor internasional tidak hanya dibentuk oleh "kepentingan" (*interests*), tetapi juga oleh unsur penting lain, yakni "maksud" (*intention*), "identitas" (*identity*) dan "bahasa" (*language*). Hubungan antar aktor A dan aktor B merupakan proses sejarah panjang yang melibatkan empat faktor tersebut sekaligus. Semakin intensif interaksi di antara keempat faktor tersebut, maka hubungan tersebut akan mengarah pada pertemanan (*friendship*) seperti hubungan antara AS-Inggris dan AS-Kanada; sebaliknya interaksi yang kurang intensif dari keempat faktor tersebut akan membentuk rivalitas (*rivalry*) seperti hubungan antara AS-Iran dan Indonesia-Australia.

Maka dapat disimpulkan bahwa Ilmu HI yang berkembang di seluruh dunia saat ini mengandung beberapa perspektif krusial yang meliputi:

1. Perspektif Inggris: 1919-sekarang: Metode Historis/Tradisionalis; Liberalisme/Idealisme, English School (Realisme/Hobbes, Rasionalisme/Grotious, Idealisme/Kant), Critical Theory (Andrew Linklater).
2. Perspektif Amerika Serikat: 1940-an-sekarang: Metode Saintifik/ Positivis; Realisme/Neo-Realisme, Neo-liberal Institusionalisme; IPE (paradigma dominan).

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

3. Perspektif Skandinavia: 1970-an - sekarang: Studi Perdamaian dan Resolusi Konflik (Johan Galtung), Teori Sekuritisasi dan Kajian Keamanan Non-Tradisional (Ole Waever, dkk.).
4. Perspektif Eropa Daratan: 1990-an-sekarang: Metode historis interpretif; Posmodernisme; Teori Konstruktivisme dan Masuknya Identitas Budaya dan Intensi Manusia dalam studi HI (Friedrich Kratochwil dan Nicolas Onuf).

Dibandingkan dengan cabang-cabang ilmu sosial lainnya, Hubungan Internasional merupakan ilmu yang paling dinamis. Lingkup kajian studi HI makin meluas sesuai dengan perubahan zaman. Jika pada awal berdirinya pada dekade 1920-an, studi HI lebih memfokuskan pada kajian tentang peperangan dan perdamaian (*war and peace*) dalam hubungan antar bangsa, pada situasi damai dalam suasana Perang Dingin pada dekade 1970-an dan 1980-an studi HI mulai memasukkan kajian tentang politik ekonomi internasional. Di bawah pengaruh teori Neoliberal Institusionalisme, para pakar HI mendalami kerja sama ekonomi internasional yang tidak saja melibatkan aktor-aktor negara melainkan juga aktor-aktor non-negara terutama perusahaan-perusahaan transnasional (*Transnational Corporations*/TNCs) sebagai aktor dalam perpindahan barang, modal, dan jasa antar negara.

Selanjutnya pada awal dekade 1990-an, pada masa jeda (*interlude*) ketika studi HI sedang menghadapi krisis akibat kegagalan Realisme dan Neorealisme untuk memberikan eksplanasi logis situasi politik pasca Perang Dingin, studi HI mulai memberikan perhatian pada peran penting aktor-aktor non-negara lainnya seperti NGO internasional dan masyarakat sipil global (*global civil society organizations*/CSOs) dalam memainkan perannya sebagai investor moral (*norm entrepreneurs*) dalam proses demokratisasi, penegakan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), konservasi lingkungan hidup, kampanye keadilan global, dan sebagainya. Di samping itu, masa *interlude* juga mendorong para ahli keamanan dalam studi HI untuk memperluas lingkup kajian keamanan mencakup isu-isu non-militer seperti kerusakan lingkungan hidup, kemiskinan, penyakit menular, perdagangan manusia, terorisme, dan sebagainya yang menyangkut ancaman bagi keamanan individu. Isu-isu non-militer yang dirangkum ke dalam isu-isu keamanan non-tradisional (*non-traditional security*) ini kemudian menjadi topik penting studi HI pada pasca Perang Dingin, baik di kalangan akademisi, peneliti, maupun praktisi Hubungan Internasional.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

Transformasi aktor dan isu Hubungan Internasional yang terjadi secara masif, terutama pada masa pasca Perang Dingin, membuat studi HI memerlukan teori-teori baru di luar arus utama yang dapat memberikan deskripsi dan eksplanasi logis bagi dinamika hubungan internasional, terutama yang melibatkan aktor non-negara dan isu keamanan non-tradisional. Dalam situasi ini, kehadiran perspektif alternatif seperti Mazhab Inggris (*English School*) yang melihat hakikat hubungan internasional tidak hanya agresivitas antar negara (Realisme ala Thomas Hobbes), tetapi juga dorongan untuk menahan diri dan mematuhi norma/hukum internasional (Rasionalisme ala Hugo Grotius), dan juga dorongan untuk menerobos sekat-sekat negara-bangsa dalam membentuk perdamaian dunia (Revolusionisme ala Immanuel Kant). Perspektif alternatif lainnya yang juga diperlukan dalam konteks ini adalah Teori Kritis (*Critical Theory*) yang tidak saja mengkritisi pemikiran menyimpang (*distorted thoughts*) dalam teori-teori arus utama HI melainkan juga bertujuan untuk makin mendekatkan kajian HI pada kepentingan dan kemaslahatan umat manusia.

Dari sisi penulis, pengalaman mengajar matakuliah Teori-teori Hubungan Internasional selama bertahun-tahun di tingkat sarjana dan pasca-sarjana di Universitas Katolik Parahyangan, Universitas Padjadjaran, dan beberapa kuliah tamu di Technical University Dortmund dan Universitas Geissen, Jerman membawa penulis pada pemikiran untuk melahirkan sebuah buku tentang teori-teori hubungan internasional yang lebih komprehensif dan mudah dibaca. Hal ini tidak berarti bahwa buku-buku teks mengenai teori-teori HI yang sudah ada kurang memadai dan sulit dimengerti. Penulis menganggap bahwa buku-buku teks teori Hi yang ada saat ini kurang bersifat komprehensif dan agak sulit dimengerti, terutama oleh para pembaca yang baru menekuni bidang studi Hubungan Internasional karena memperlakukan semua teori secara sama tanpa memandang posisi masing-masing dalam kajian Hubungan Internasional.

Sebagai contoh, buku hasil karya Scott Burchill, Andrew Linklater, Richard Devetak, Jack Donelly, Mathew Patterson, Chris ReusSmit, dan Jacqui True berjudul *Theories of International Relations*, edisi ketiga (2011) dan buku yang diedit oleh Tim Dunne, Milja Kurki, dan Steve Smith berjudul *International Relations Theories: Discipline and Diversity*, edisi ketiga (2013) memperlakukan semua teori yang dibahas – Realisme, Liberalisme, English School, Marxisme, Teori Kritis, Feminisme, Posmodernisme dan Konstruktivisme – secara sama

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

tanpa mempertimbangkan konteks bagaimana teori-teori tersebut muncul sehingga menempati strata yang berbeda-beda dalam studi HI. Sementara itu, karya teoretis lainnya yang ditulis Michael P. Sullivan berjudul *Theories of International Relations: Transition vs. Persistence* (2001) mencoba memetakan teori-teori HI berdasarkan kadar keilmiahannya dan membatasi pada Realisme dan Liberalisme menunjukkan bias Arus Utama (*mainstream*) yang kental dan kegagalan mengakui eksistensi teori-teori HI di luar Arus Utama, seperti English School, Teori Kritis, Feminisme, Posmodernisme, dan Konstruktivisme yang muncul dan berkembang di Eropa. Karya penting lainnya adalah buku empat jilid yang diedit oleh Stephen Chan dan Cerwyn Moore berjudul *Theories of International Relations Vol. I-IV* mencoba membagi teori-teori HI ke dalam empat kategori: Realisme, Pluralisme, Strukturalisme, dan Reflektivisme memunculkan kebingungan. Terlepas dari pemilihan artikel oleh Chan dan Moore yang brilian, buku itu terkesan memaksakan kategori-kategori tersebut, sehingga tidak tampak perbedaan signifikan antara Realisme, Liberalisme, English School, Teori Kritis, Posmodernisme, dan Konstruktivisme. Dengan demikian, buku-buku teks standar Teori-teori Hubungan Internasional tetap menyisakan 'gap' yang harus segera diisi.

Penulisan buku ini dilandasi oleh keinginan penulis untuk mengisi 'gap' yang ditinggalkan oleh buku-buku teks standar Teori-Teori Hubungan Internasional. Kalaupun ambisi tersebut tidak tercapai, penulisan buku ini didorong oleh keinginan penulis untuk mengatasi kelangkaan teks-teks Teori Hubungan Internasional yang ditulis oleh penulis Indonesia dalam bahasa Indonesia.

Struktur Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan, buku ini dibagi ke dalam empat bagian. Bagian pertama tentang Dinamika Perkembangan Studi Hubungan Internasional yang terdiri dari tiga Bab: Bab pertama tentang awal mula dan perkembangan studi dan teori HI, Bab kedua membahas studi HI di Indonesia, dan Bab ketiga mengulas tentang perdebatan-perdebatan besar dalam studi HI.

Bagian Kedua berbicara mengenai Teori-teori Arus Utama HI yang terdiri dari dua Bab: Bab keempat membahas tentang Liberalisme dan Neoliberal Institusionalisme yang merupakan sumber utama bagi penjelasan terhadap munculnya kerja sama internasional, regionalisme, dan organisasi

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

internasional; Bab Kelima mengulas tentang Realisme dan Neorealisme sebagai paradigma dominan dalam studi HI yang memberikan penjelasan tehadap fenomena konflik dan peperangan antar negara.

Bagian ketiga mencakup Teori-teori Alternatif yang menawarkan eksplanasi fenomena hubungan internasional di luar Teori-teori Arus Utama. Bagian ini terdiri dari tiga Bab: Bab keenam membahas tentang kemunculan dan perkembangan mazhab Inggris (*The English School*) yang memberikan perspektif lebih luas bagi penerapan teori-teori HI pada peringkat analisis yang berbeda-beda (*multiple level of analysis*) - individu, negara, regional, dan internasional - yang menyangkut aktor-aktor internasional yang majemuk - individu transnasional, organisasi non-pemerintah internasional, organisasi pemerintah internasional, kelompok masyarakat sipil transnasional, negara, organisasi regional, dan lain-lain. Bab Ketujuh membahas tentang Teori Kritis dalam studi Hubungan Internasional yang menawarkan pembahasan tentang "pemikiran-pemikiran menyimpang" teori-teori arus utama HI dan mengarahkan studi HI pada upaya untuk memperjuangkan kepentingan manusia (*human interests*) agan menjadi disiplin ilmu yang emansipatoris. Bab kedelapan membahas tentang Teori-teori Reflektivis. Bagian ini diawali oleh Bab Kedelapan yang membahas tentang Mazhab Kopenhagen dan Teori Sekuritisasi yang memperdalam dan memperluas konsep keamanan dari yang tadinya didominasi oleh keamanan negara yang berdimensi militer-strategis menjadi keamanan manusia yang menyangkut pula ancaman non-militer. Bab Kesembilan membahas fenomena pembelokan linguistik (*The Linguistic Turn*) dalam studi HI yang memunculkan perspektif pos-positivis yang dalam studi HI lebih dikenal dengan istilah perspektif Reflektivis yang lebih dari sekadar menawarkan pandangan kritis, tetapi bahkan menggugat dan mempersoalkan kajian Arus Utama HI yang dianggap didominasi oleh oleh kekuatan Maskulinitas, Intertekstualitas (dominasi teks-teks standar HI), determinisme (kebenaran tunggal), dan keyakinan yang telah dibentuk (*preconceived beliefs*). Bab Kesepuluh membahas tentang perspektif Feminisme dalam studi HI yang mempertanyakan rendahnya representasi perempuan (femininitas) dalam teori-teori Arus Utama HI. Bab Kesebelas membahas tentang perspektif Posmodernisme dalam studi HI yang membahas lebih detail tentang bagaimana kaum Posmodernis menggugat Logosentrisme (dominasi para pakar yang mumpuni), Intertekstualitas (dominasi teks-teks standar), dan Determinisme (pemaksaan kebenaran tunggal) dalam studi HI. Bab Keduabelas membabas

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

tentang Konstruktivisme sebagai perkembangan terbaru dalam teori HI yang menawarkan cara pandang baru dalam melihat fenomena HI. Dengan tidak hanya merujuk pada "kepentingan" (*interests*) sebagai dasar hubungan aktor internasional, teoritisi konstruktivis menyatakan bahwa hubungan internasional digerakkan oleh *interests* (kepentingan), *identity* (identitas), *intention* (maksud), dan *language* (bahasa) - menurut Friedrich Kratochwil dan Nicolas Onuf - dan tiga varabel utama (*three master variables*) - menurut Alexander Wendt - yakni *interdependence* (saling ketergantungan), *common fate* (nasib yang sama), dan *homogeneity* (kemiripan budaya) yang akan menentukan apakah aktor-aktor internasional tertentu akan menjalin hubungan "pertemanan/persahabatan" atau "permusuhan/rivalitas". Dengan demikian menurut konstruktivis hubungan antar aktor internasional adalah "proses belajar terus-menerus" yang dikonstruksi oleh manusia.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

**Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional**

BAGIAN PERTAMA: STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

BAB 1

STUDI DAN TEORI HUBUNGAN INTERNASIONAL

Pengantar

Bab ini akan membahas mengenai perkembangan studi Hubungan Internasional sebagai disiplin ilmu dan teori-teori Hubungan Internasional sebagai unsur terpenting untuk memberikan eksplanasi logis terhadap berbagai peristiwa internasional yang menjadi bidang kajian disiplin ilmu ini. Untuk membahas kemunculan dan perkembangan teori HI kita harus melihat bagaimana studi hubungan internasional tumbuh dan berkembang dari Inggris ke Amerika Serikat. Sejarah perkembangan studi hubungan internasional yang berbeda ini pada gilirannya menciptakan tradisi berpikir yang berbeda pula, terutama antara tradisi berpikir Inggris yang historis-filosofis dan tradisi berpikir Amerika Serikat yang saintifik-positivistik. Sementara di Inggris disiplin hubungan internasional muncul dari akar ilmu hukum dan filsafat; di Amerika Serikat studi hubungan internasional berkembang dari akar ilmu politik.

Perbedaan tradisi ini pada gilirannya menciptakan perbedaan semantik dalam penyebutan disiplin hubungan internasional. Perspektif Inggris yang berkarakter moderat cenderung mengutamakan pada metode penelusuran sejarah (*historical tracing*) dan menjelaskan fenomena internasional dengan deskripsi yang meyakinkan (*thick description*) lebih suka menyebut disiplin hubungan internasional sebagai "studi" hubungan internasional. Perspektif Amerika Serikat yang berkarakter saintifik menekankan pada pencarian hubungan kausal antar variabel penelitian dan pengujian teori lebih percaya diri untuk menyebut disiplin ini sebagai "ilmu" Hubungan Internasional

Untuk memudahkan pembaca, Bab ini akan dibagi menjadi beberapa bagian. Bagian pertama akan membahas tentang studi Hubungan Internasional

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

sebagai bagian dari ilmu sosial. Bagian kedua akan membahas tentang sejarah studi hubungan internasional yang dimulai di Inggris Raya pada awal 1900-an yang kemudian kemudian berkembang pesat di Amerika Serikat pada masa Perang Dunia (1920-an-1940-an) dan munculnya pengaruh Eropa daratan dalam kajian HI. Pada bagian ketiga akan dibahas mengenai kegunaan teori HI dalam memberikan eksplanasi logis berbagai peristiwa internasional.

Studi Hubungan Internasional sebagai Cabang Ilmu Sosial[1]

Ilmu sosial adalah ilmu tentang manusia dalam berbagai konteks sosial. Ilmu ekonomi, misalnya, mempelajari perilaku manusia dalam konteks transaksi atau hubungan komersial satu sama lain. Ilmu politik mempelajari perilaku manusia dalam hubungan kekuasaan satu sama lain. Ilmu sosiologi mempelajari interaksi sosial umat manusia. Demikian halnya dengan ilmu Hubungan Internasional yang merupakan bagian dari ilmu sosial yang mempelajari tentang manusia dalam konteks hubungan antar aktor yang melintasi batas-batas negara.

Sebagai bagian dari ilmu sosial, maka ilmu Hubungan Internasional dapat dikatakan merupakan disiplin ilmu yang sangat dinamis. Karena studi ini membahas tentang dinamika peristiwa internasional, maka dengan sendirinya fokus kajian, metode, dan teorinya pun berubah-ubah dengan cepat sesuai dengan perkembangan terbaru peristiwa internasional. Nuansa dinamis studi HI tercermin dalam perbedaan definisi tentang studi HI sejak masa Perang Dingin hingga saat ini. Pada masa Perang Dingin, Stephen Chan (1984) mendefinisikan studi HI sebagai disiplin ilmu yang mengkaji tentang:

> *Interactions of those actors whose actions or conditions have important consequences for other outside the effective jurisdiction of their political units (states)*
>
> (Interaksi antar aktor yang tindakan dan pengaruhnya menimbulkan dampak penting bagi aktor lain di luar jurisdiksi politiknya masing-masing)[2]

1 Penulis cenderung menggunakan istilah "studi" daripada "ilmu" dengan dilandasi oleh kesadaran penuh bahwa kadar "keilmuan" disiplin Hubungan Internasional sebagai sub-disiplin ilmu sosial yang paling muda masih terus diperdebatkan. Selama perdebatan itu belum tuntas, maka penulis menganggap menggunakan istilah yang moderat, yaitu Studi Hubungan Internasional (SHI).

2 Stephen Chan (1984). '*International Relations in Perspective: The Pursuit of Security, Welfare, and Justice*'. London: Macmillan Publishing Company, hlm. 5.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

Dalam konteks ini tampak bahwa studi HI pada saat itu memfokuskan pada peran negara sebagai aktor utama dan bagaimana dia mempengaruhi negara lain dalam suatu pertarungan kekuasaan.

Pada masa pasca-Perang Dingin, Joshua Goldstein (1996) mendefisikan studi HI sebagai disiplin ilmu yang menjadi bagian dari ilmu politik, tepatnya politik internasional, yang mempelajari tentang:

> *Government decisions concerning their actions toward other governments... (a study about) international politics, that is political relations among nations in terms of war, diplomacy, trade relations, alliance, participation in international organizations, cultural exhanges, and so forth.*
>
> (Keputusan-keputusan pemerintah menyangkut tindakan mereka terhadap pemerintah lainnya ... HI juga merupakan studi tentang politik internasional, yakni hubungan politik antar bangsa dalam hal peperangan, diplomasi, hubungan perdagangan, aliansi, partisipasi dalam organisasi internasional, pertukaran budaya, dan seterusnya).[3]

Walaupun pada dekade 1990-an, nuansa perjuangan kekuasaan telah berkurang akibat usainya Perang Dingin antara blok Timur dan blok Barat, maraknya perdagangan internasional, dan intensitas pertukaran budaya, tetapi studi HI merupakan bagian dari ilmu politik dan tetap memfokuskan pada pentingnya peran negara.

Pada tahun 2000-an, ketika muncul aktor-aktor di luar negara – lazim dikenal sebagai aktor non-negara – sebagai kekuatan yang ikut mempengaruhi politik internasional, Karen Mingst (2004) mendefinisikan hubungan internasional dalam perspektif yang tidak lagi berpusat pada negara (*state-centric model*). Menurut Mingst, studi HI adalah studi tentang:

> *Interactions among various actors that participate in international politics which include states, international organizations, non-governmental organizations, sub-national entities like bureaucracy and local government, and individuals. International Relations is the study of the behavior of these actors as they participate individually and together in international political process.*
>
> (Interaksi antar berbagai aktor yang berpartisipasi dalam politik internasional termasuk di dalamnya adalah negara, organisasi internasional, organisasi non-

3 Joshua S. Goldstein (1996). 'International relations and everyday life'. *Occupational science: The evolving discipline*, hlm. 5.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

> pemerintah, entitas sub-nasional seperti birokrasi dan pemerintahan lokal, serta individu. HI adalah studi tentang perilaku aktor-aktor tersebut ketika mereka berpartisipasi baik secara individual maupun bersama-sama dalam proses politik internasional).[4]

Definisi ini sangat dipengaruhi oleh politik internasional pasca Perang Dingin yang ditandai dengan kehadiran aktor-aktor non-negara yang ikut mempengaruhi arah perkembangan politik internasional di mana kelompok-kelompok seperti organisasi non-pemerintah di bidang Hak Asasi Manusia membantu promosi dan perlindungan Hak Asasi Manusia, organisasi non-pemerintah peduli perempuan ikut membantu eliminasi diskriminasi terhadap kaum perempuan, organisasi non-pemerintah peduli lingkungan hidup ikut berkontribusi dalam pembahasan mengenai perubahan iklim, dan berbagai aliansi masyarakat sipil berdemonstrasi menentang ketidakadilan global. Dalam konteks inilah Mingst berupaya mengurangi nuansa *state-centric model* dalam studi HI. Dari berbagai definisi studi HI tersebut tampak bahwa studi HI sebagai disiplin ilmu menunjukkan perubahan yang dinamis dari waktu ke waktu.

Sejarah dan Perkembangan Studi Hubungan Internasional

Sejarah Studi Hubungan Internasional sesungguhnya dapat ditelusuri sejak jaman pra-modern dalam bentuk kajian-kajian tentang strategi peperangan. Karya sejarawan Yunani kuno, Thucydides (460 BC - 400 BC), *The History of the Peloponnesian War*, dan karya Sun Tzu, *The Art of War* (512 BC) merupakan contoh klasik dari kajian studi HI pada zaman pra-modern. Pada perkembangan selanjutnya, kajian studi HI mengalami perkembangan pesat terutama di benua Eropa pada masa pasca Perjanjian Westphalia 1648 yang memutuskan untuk memisahkan gereja (agama) dari politik dan memberikan hak bagi negara-bangsa (*nation-state*) untuk menjalankan kedaulatan pada batas teritorial tertentu. Namun demikian, di daerah di mana asal studi HI, yaitu di Britania Raya, hingga tahun 1900 kajian tentang hubungan antar negara-negara berdaulat menjadi sub-kajian dari ilmu-ilmu sosial yang lebih tua, yakni ilmu hukum dan ilmu filsafat.

4 Karen A Mingst (2004). 'Contending Perspectives: How to Think about International Relations Theoretically'. *Essentials of International Relations*. New York: W.W. Norton & Company, hlm. 2.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

Bagan 1.1
Sejarah Pemikiran dalam Studi Hubungan Internasional

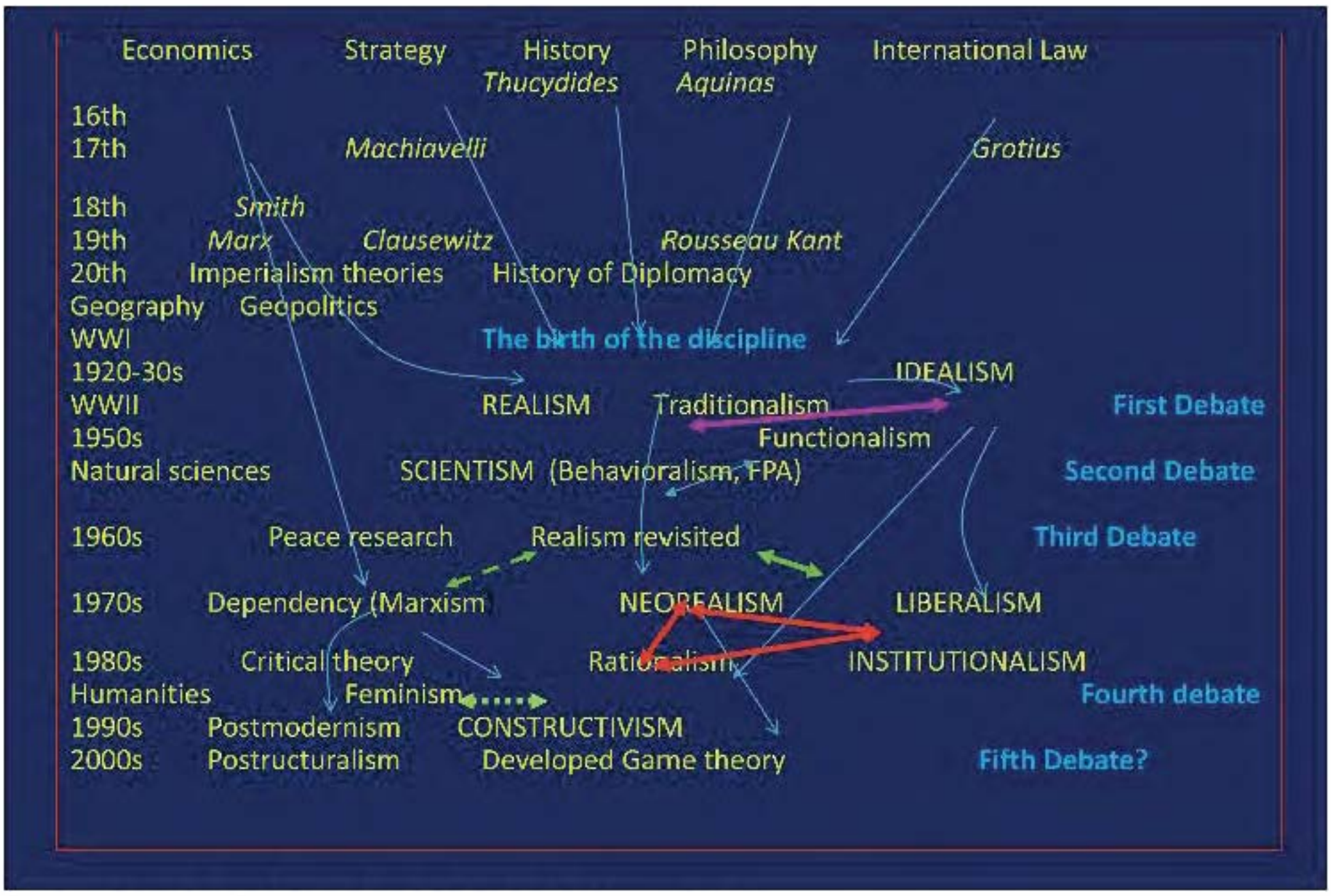

Sumber: Materi Kuliah Teori-Teori HI FISIP-HI Unpar 2014.[5]

Sejarah hubungan internasional sebagai disiplin ilmu yang mandiri muncul di Britania Raya (*Great Britain*), tepatnya di Wales, pada awal abad ke-20 ketika sekelompok pakar filsafat dan hukum internasional di negara tersebut memandang perlunya kajian tersendiri yang mempelajari hubungan antar-bangsa yang dapat memberikan eksplanasi logis mengapa terjadi peperangan dan juga mengkaji berbagai upaya untuk menciptakan perdamaian dunia. Untuk memenuhi tujuan tersebut, *University College of Aberystwyth*, di Wales, Inggris, pada tahun 1919 memperkenalkan jabatan gurubesar (*chair*) yang diberi nama *Woodrow Wilson Professor in International Relations* yang dijabat oleh seorang pakar hubungan internasional Sir Alfred Zimmern, yang dianggap berjasa dalam memberikan sumbangan pemikiran bagi terbentuknya Liga Bangsa-Bangsa (*League of Nations*) sebagai sebuah entitas keamanan kolektif (*collective security*) untuk menjaga perdamaian dunia.

5 Penulis berterimakasih kepada Prof. Dr. Mohtar Mas'oed yang memperkenalkan bagan sejarah pemikiran HI ini untuk pertama kalinya kepada penulis dari sumber yang sulit ditelusuri.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

Bagan 1.1. menggambarkan perkembangan disiplin Hubungan Internasional sejak zaman pra-modern hingga saat ini, dan juga perkembangan teori-teori Hubungan Internasional sejak Liberalisme klasik hingga Konstruktivisme. Bagan tersebut menunjukkan betapa studi Hubungan Internasional sangat terpengaruh oleh cabang ilmu sosial lain seperti ilmu ekonomi, sejarah, filsafat, hukum, politik dan sosiologi. Dibandingkan dengan cabang-cabang ilmu sosial lainnya seperti filsafat, hukum, sosiologi, antropologi, politik, psikologi, dan sebagainya, hubungan internasional adalah cabang ilmu sosial yang muncul belakangan. Tampak bahwa sebelum abad ke-16, kajian HI menempel pada ilmu-ilmu yang sudah ada sebelumnya yakni ilmu ekonomi, strategi peperangan, sejarah, filsafat, dan hukum internasional. Pada abad ke-16 karya filsuf Nicolo Machiavelli dan ahli hukum internasional Hugo Grotious telah ikut mendorong HI untuk menjadi bidang studi yang berdiri sendiri. Pada abad-abad selanjutnya hingga abad ke-20 karya Adam Smith, Karl Marx, von Clausewitz, J.J. Rousseau, dan Immanuel Kant ikut menumbuhkan HI sebagai disiplin ilmu yang mandiri.

Dengan demikian tampak kuatnya nuansa budaya Anglo-Saxon dalam Studi Hubungan Internasional (SHI). Maka tidak mengherankan jika pada awalnya karya-karya SHI sarat dengan muatan nilai-nilai liberalisme yang didasarkan pada asumsi pada hakikat manusia yang berkecenderungan baik dan kooperatif sebagaimana dipersepsi oleh para pemikir Liberal seperti J.S. Mill, Adam Smith, Angus Madison, J.J. Rousseau, dan lain-lain. Kaum liberalis meyakini bahwa perilaku negara merefleksikan hakikat manusia yang serba baik dan kooperatif, sehingga ada alasan untuk merasa "optimis" akan keniscayaan kerja sama antar negara yang dapat menciptakan perdamaian dunia. Karya-karya tokoh Hubungan Internasional pada masa itu seperti tulisan Norman Angell *The Great Illusion* (1933) dan Alfred Zimmern dalam karyanya *The League of Nations and the Rule of Law, 1918-1935* (1935) mencerminkan optimisme sekaligus keyakinan akan kemampuan negara-negara untuk mengikuti kecenderungannya untuk saling bekerja sama demi menegakkan perdamaian dunia.

Optimisme semacam ini bertahan setidaknya sampai pecahnya Perang Dunia Pertama (1914-1918)[6] dan kemudian disusul dengan Perang

6 Pecahnya Perang Dunia Pertama (1914-1939) ditandai dengan insiden pembunuhan putra mahkota kerajaan Austria-Hungaria, Pangeran Frans Ferdinand, dalam perjalanannya menuju Sarajevo (Serbia) pada tanggal 28 Juni 1914. Ketidakpuasan pemerintah Austria-Hungaria dan sekutunya (Jerman dan Italia) terhadap sikap pemerintah Serbia dalam menindaklanjuti peristiwa pembunuhan itu berlanjut dengan

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

Dunia Kedua (1939-1945).[7] Para pakar hubungan internasional menyalahkan lemahnya organisasi Liga Bangsa-Bangsa (LBB) yang disinyalir dibentuk berdasarkan proposisi Liberalis tentang organisasi supra-negara (*super-states*) dalam mendistribusikan kekuasaan secara berimbang (*Balance of Power*) untuk menghindari "kecenderungan untuk berperang" (*preponderance to war*).

Dalam kaitan itu, karya E.H. Carr *The Twenty Years Crisis, 1919-1939* (1939) mengkritik pedas kegagalan Liberalisme – atau idealisme – dalam memahami hakikat manusia yang dianggap sebagai salah satu penyebab pecahnya Perang Dunia pertama dan kedua. Kritik Carr yang menatahkan argumen kaum Liberalis dapat diringkas menjadi butir-butir sebagai berikut: (1) bahwa manusia pada dasarnya berkecenderungan egosentrik dan destruktif sebagaimana digambarkan oleh Nicolo Machiavelli dan Thomas Hobbes, bukannya secara esensial bersifat baik dan kooperatif sebagaimana diyakini kaum Liberalis; (2) bahwa moralitas dalam hubungan antar negara berdasarkan harmoni kepentingan (*harmony of interests*) adalah fiksi belaka karena tindakan negara dituntun oleh kepentingan masing-masing yang sangat egosentrik; dan (3) bahwa prinsip internasionalisme penting bagi terciptanya perdamaian abadi merupakan utopia belaka karena setiap negara akan berjuang untuk kekuasaan demi menjamin keamanan masing-masing.[8]

Perang Dunia dan bubarnya LBB tidak saja memudarkan pengaruh teori Liberalisme Klasik tetapi juga membuka jalan bagi munculnya paradigma baru yang kita kenal sebagai Realisme Klasik yang kemudian mendominasi wacana studi hubungan internasional pasca Perang Dunia Kedua. Maka, bagi banyak kalangan fenomena yang lazim dikenal sebagai *First Great Debate* (Debat Besar Pertama) studi HI ini seringkali dipersepsi sebagai kemenangan Realisme atas Liberal-Internasionalisme dalam memberikan eksplanasi yang lebih logis dan akurat tentang perilaku negara yang berujung pada perang yang luas dan berkepanjangan.[9]

serangan militer besar-besaran yang memobilisasi sekutu Serbia (Uni Soviet, Perancis, dan Inggris) untuk terlibat dalam peperangan.

7 Perang Dunia bermula dari invasi Nazi-Jerman ke Polandia pada 1 September 1939 yang memicu deklarasi perang dari Perancis dan Inggris yang kemudian dilanjutkan dengan peperangan yang melibatkan negara-negara lain di Eropa dan Asia.

8 E.H. Carr (1939). 'The Twenty Years Crisis, 1919-1939'. *An Introduction to the Study of International Relations Edisi Kedua*. New York: Harper Torchbook, hlm. 69-86.

9 Lucian M. Ashworth (2002) 'Did Realist-Idealist Great Debate Really Happen? A Revisionist History of International Relations'. *International Relations*, Vol. 16 No.1, hlm. 34-35.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

Sejalan dengan memudarnya paradigma Liberal-Internasionalisme, kiblat SHI pun berpindah dari Britania Raya ke Amerika Serikat. Pada waktu hampir bersamaan terjadi eksodus para intelektual dari Eropa yang tengah dilanda peperangan ke Amerika Serikat. Banyak di antara para migran tersebut menjadi tenaga pengajar di berbagai perguruan tinggi di Amerika Serikat. Gelombang eksodus tersebut secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada perkembangan pesat studi HI di Amerika Serikat ketika universitas-universitas ternama seperti *Yale, Harvard, Princeton, Chicago*, dan beberapa nama besar lainnya menampung mereka. Maka sejak tahun 1940-an, pemikiran Realisme sebagai paradigma baru dalam studi HI berkembang pesat. Pada masa inilah muncul karya besar H.J. Morgenthau *The Politics Among Nations: the Struggle for Power and Peace* (1948) yang melengkapi tulisan E.H. Carr dengan memberikan konsep-konsep, asumsi-asumsi, dan proposisi-proposisi lebih rinci dari Realisme Klasik.

Pada dekade 1950-an, muncullah gelombang baru dalam ilmu sosial yang ikut mempengaruhi perkembangan studi HI. Kali ini fenomena yang lazim disebut "Revolusi Behavioralisme" diwarnai dengan masuknya teori sistem ke dalam ilmu sosial. Berawal dari tulisan seorang ahli biologi, Ludwig von Bertalanffy berjudul *General System Theory: an Approach to Unity of Science* (1951) yang menyatakan bahwa seluruh ilmu pengetahuan dapat dipersatukan dengan memakai teori sistem sebagai metode yang universal. Teori ini kemudian menginspirasi sejumlah pakar ilmu sosial. Di bidang sosiologi, Emile Durkheim menggagas konsep sistem sosial yang menyatakan bahwa masyarakat berevolusi ibarat organisme yang menjalankan fungsi-fungsi tertentu. Di bidang ilmu politik, David Easton mengembangkan gagasan sistem politik yang menjalankan sejumlah fungsi: agregasi kepentingan, artikulasi kepentingan, rekrutmen, dan pendidikan politik.

Di bidang studi Hubungan Internasional, Kenneth Waltz (1979) mencoba merespons kegalauan para pakar akan kurang ilmiahnya metode studi Hubungan Internasional yang hanya mengandalkan pada proses penelusuran sejarah (*historical tracing*) sebagaimana tercermin dalam perdebatan antara Morton Kaplan dengan Hedley Bull tentang metode HI.[10] Di dalam bukunya berjudul *Theory of International Politics* (1979), Waltz menyatakan beberapa

10 Perdebatan metodologis HI pada dekade 1960-an ini disebut dengan "Debat Besar Kedua" (*Second Great Debate*) menghadapkan Hedley Bull yang membela keabsahan metode sejarah/tradisionalis dengan Morton Kaplan yang membela kesahihan metode saintifik yang dipinjam dari ilmu eksakta. Untuk lebih jelasnya lihat Hedley Bull (1966). 'International Theory: the Case for a Classical Approach'. *World Politics*,

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

hal penting: (1) penyebab perang tidak hanya hakikat manusia yang agresif, tetapi juga struktur politik internasional yang anarkis yang mengharuskan setiap negara memperjuangkan kelangsungan hidupnya; (2) perbedaan identitas budaya antar negara dapat dikesampingkan karena perilaku negara ditentukan oleh kekuatan ekonomi dan militernya; (3) ketertiban dunia dapat tercipta dalam situasi perimbangan kekuatan (*Balance of Power*/BoP) di mana dua kekuatan besar (*super power*) saling menggunakan kekuatan "penggetar" (*deterrence*) untuk menghindari peperangan; (4) dalam situasi anarkis, adalah tidak bijaksana bila suatu negara memaksimalisasi kekuatan militer demi menguasai wilayah tertentu karena sistem internasional akan menghukumnya; dan (5) segala upaya negara untuk menjadi kekuatan hegemonis di tingkat regional maupun internasional merupakan perbuatan bodoh dan tidak direkomendasikan.[11] Perspektif yang melihat negara sebagai model di mana atribut sosial-budayanya dapat dilepaskan ini - yang lazim dikenal sebagai Realisme Struktural atau Neo-Realisme - sempat menjadi perspektif dominan dalam penelitian Hubungan Internasional terutama ketika ilmu sosial Amerika Serikat mendominasi dunia.

Pada masa pasca-Perang Dingin, para pakar HI kembali dilanda kegalauan karena teori-teori arus utama (*mainstream*) HI - terutama Realisme Klasik dan Neo-Realisme - gagal memberikan eksplanasi logis pada berbagai fenomena baru seperti meningkatnya signifikansi aktor non-negara dalam politik internasional, dinamika keterkaitan antara isu keamaan tradisional (militer dan keamanan nasional) dan isu keamanan non-tradisional (perlindungan hak asasi manusia, kriminalitas transnasional, perdagangan manusia, terorisme, lingkungan hidup, penyakit menular, dan lain-lain), dan makin menguatnya nuansa identitas budaya dalam hubungan internasional. Pada saat inilah studi Hubungan Internasional mencoba mengangkat tema-tema moralitas, prinsip keadilan, dan emansipasi ke dalam kajian HI untuk merespons perkembangan terbaru dalam politik internasional.

Di Inggris, pada awal dekade 1990-an, Andrew Linklater menghidupkan Teori Kritis (*Critical Theory*) dalam studi HI dengan menggunakan konsep-konsep Marxis seperti materialisme sejarah, internasionalisme, emansipasi, dan posisi ilmu HI yang harus diabdikan untuk kemaslahatan umat manusia (tesis

Vol. 18 No. 1, hlm.361-377 dan Morton A. Kaplan (1966). 'The New Great Debate: Traditionalism vs. Science in International Relations'. *World Politics*, Vol. 19 No. 1, hlm. 1-20.

11 Kenneth N. Waltz (1986). 'Reflections on Theory of International Politics'. Dalam Robert Keohane (ed.). *Neorealism and Its Critics*. New York: Columbia University Press, hlm. 322-346.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

kesebelas Karl Marx). Dalam bukunya *Beyond Marxism and Leninism: Critical Theory in International Relations* (1989), Andrew Linklater menyatakan bahwa dialog antara Marxisme dan studi hubungan internasional sebagaimana diungkapkan oleh Kubalkova dan Cruickshanktelah "membuka lebar" (*opening up*) pengembangan teori hubungan internasional untuk membahas tema-tema di luar tradisi arus utama - terutama Realisme - yang melulu berbicara tentang isu politik tingkat tinggi (*high politics*) - peperangan dan perdamaian. Dengan memakai konsep-konsep Marx, studi hubungan internasional bahkan dapat berekspansi untuk mulai membahas tema-tema yang menyangkut kebebasan manusia (*human freedom*) dan emansipasi manusia (*human emancipation*).[12] Bahkan dalam karyanya yang mengkritisi Realisme, Alejadro Colas (2002) menyatakan bahwa pemikiran Antonio Gramsci dapat dipakai untuk menjelaskan proses persaingan antara aktor-aktor tradisional yang disebut pemegang hegemoni (*hegemonic forces*) berhadapan dengan masyarakat sipil internasional (*international civil society*) sebagai komponen utama gerakan kontra-hegemoni (*counter-hegemonic movements*) dalam membicaraan masalah perlindungan hak asasi manusia, demokrasi global, keamanan manusia, dan perlindungan lingkungan hidup.[13]

Dalam konteks inilah, tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa teori Kritis dan Marxisme ikut mendorong perluasan (*the extension*) lingkup isu dalam studi hubungan internasional - terutama pada masa pasca Perang Dingin - dengan mulai merambah ke isu-isu non-tradisional seperti hak asasi manusia, kemiskinan global, kesetaraan gender, perlindungan lingkungan hidup, perdagangan manusia, pengungsi, penyakit menular, dan sebagainya yang melibatkan aktor-aktor non-negara (NGOs, aliansi masyarakat sipil, gerakan sosial, dan individu transnasional).

Di Denmark, para pakar yang tergabung ke dalam Mazhab Kopenhagen (Copenhagen School) menginisiasi Teori Sekuritisasi (*Securitization Theory*) yang pada dasarnya menyatakan bahwa isu yang tadinya bukan merupakan isu keamanan (*security*) dapat disekuritisasi (dibuat menjadi isu keamanan) apabila aktor pembuat sekuritisasi (*secritizing actors*) melalui seruannya (*speech acts*) dapat meyakinkan publik bahwa isu tersebut sungguh-sungguh isu keamanan karena mengandung unsur ancaman bagi keselamatan manusia. Dengan

12 Andrew Linkalater (1986). 'Realism, Marxism and Critical International Theory'. *Review of International Studies*, Vol.12 No.1, dalam Stephen Chan dan Cerwyn Moore (ed.) (2006). *Theory of International Relations*. London: SAGE, hlm. 113-117.

13 Alejandro Colas (2002). '*International Civil Society*'. Cambridge: Polity Press, hlm. 13.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

demikian tampak bahwa Mazhab Kopenhagen telah memperluas konsep keamanan dengan menggabungkan unsur keamanan tradisional (keamanan negara) dan unsur keamanan non-tradisional (keamanan manusia).

Di Jerman sejumlah pakar seperti Nicolas Onuf dan Friedrich Kratochwil memperkenalkan Teori Konstruktivis (*Constructivist Theory*) yang menyatakan bahwa hubungan antar aktor internasional tidak hanya dibentuk oleh "kepentingan" (*interests*), tetapi juga oleh unsur-unsur penting lainnya, yakni "maksud" (*intention*), "identitas" (*identity*) dan "bahasa" (*language*). Hubungan antar aktor A dan aktor B merupakan proses sejarah panjang yang melibatkan empat faktor tersebut sekaligus. Semakin intensif interaksi di antara keempat faktor tersebut, maka hubungan tersebut akan mengarah pada pertemanan (*friendship*) seperti hubungan antara AS-Inggris dan AS-Canada; sebaliknya interaksi yang kurang intensif dari keempat faktor tersebut akan membentuk rivalitas (*rivalry*) seperti hubungan antara AS-Iran dan Indonesia-Australia.

Kegunaan dan Komponen Utama Teori Hubungan Internasional

Apa arti teori dalam studi HI? Apakah perbedaan perspektif (antara Inggris dan Amerika Serikat) dalam studi HI berdampak pada perbedaan pemahaman mengenai teori HI? Menurut tradisi klasik HI – yang dibawa oleh pemikir Inggris - teori adalah "*anything that organizes a field systematically, structures questions, and establishes a coherent rigorous set of interrelated concepts and categories*" (segala sesuatu yang mengorganisir suatu bidang studi secara sistematis, merumuskan pertanyaan-pertanyaan, dan membangun serangkain konsep dan kategori yang terangkai secara koheren dan mantap).[14] Di sini tampak pemahaman teori yang agak minimalis di mana mengacu pada proposisi sistematis, perumusan masalah dan rangkaian konsep dan kategori yang koheren, tanpa menuntut adanya eksplanasi logis dan prediksi. Sementara itu tradisi ilmiah yang dibawa oleh pakar HI Amerika Serikat mendefinisikan teori dalam studi HI sebagai: "*an intellectual construct that helps one to select facts and interpret them in such a way as to facilitate explanation and prediction concerning regularities and recurrence or repetitions of observed phenomena*" (konstruksi intelektual yang dapat membantu seseorang untuk menyeleksi fakta

14 Barry Buzan. (2004). 'From International to World Society? English School Theory and the Social Structure of Globalization'. Cambridge: Cambridge University Press, hlm. 6.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

dan menginterpretasikannya sedemikian rupa untuk memfasilitasi pemberian eksplanasi dan prediksi menyangkut regularitas dan perulangan fenomena yang sedang diteliti).[15] Di sini tampak adanya tuntutan ilmiah yang lebih kompleks dari tradisi intelektual Amerika Serikat untuk sekadar memahami arti teori dalam studi HI.

Dalam upayanya untuk menjelaskan kegunaan teori dalam studi HI, Edward H. Carr dalam salah satu karyanya menyatakan: "*a fact is like a sack, it won't stand up till you've put something in it*" (fakta bagaikan sebuah karung, dia tidak akan berdiri tegak sebelum anda meletakkan sesuatu di dalamnya).[16] Perumpamaan ini menunjukkan betapa pentingnya fungsi teori sebagai kerangka (*framework*) dalam memahami fakta-fakta politik internasional. Tentu saja teori yang berbeda akan menyodorkan fakta secara berbeda pula. Karena itu para peneliti Hubungan Internasional harus bijak dalam memilih teori yang akan dipakai dalam menjelaskan fakta-fakta yang menjadi obyek penelitiannya. Pemilihan teori hendaknya ditentukan oleh relevansi dengan fakta yang diteliti. Sebagai contoh, untuk menjelaskan hubungan konfliktual yang berujung pada peperangan antar dua atau lebih aktor internasional sebaiknya menggunakan teori Realisme atau Neo-realisme yang berbicara mengenai hakikat manusia yang agresif, perjuangan untuk mencapai kepentingan nasional, perimbangan kekuatan, dan keharusan setiap negara untuk mempertahankan kedaulatan dan integritas teritorialnya. Sedangkan penjelasan terhadap kerja sama antar-negara di bidang perdagangan, investasi, penyediaan energi, pengembangan teknologi, dan sebagainya lebih memerlukan teori liberalisme atau neo-liberalisme yang berbicara mengenai saling ketergantungan, peran organisasi internasional dalam menggalang kerja sama antar negara, pentingnya tawar-menawar (*bargaining*) dalam hubungan antar negara, dan diplomasi sebagai solusi terbaik dalam konflik internasional.

Dalam konteks ini, maka kita dapat mengidentifikasi kegunaan teori dalam studi HI sekurang-kurangnya menyangkut tiga hal penting. Pertama, mendeskripsikan (*to describe*), yakni mengkonstruksi realitas demi memberi gambaran yang lebih jelas mengenai peristiwa internasional tertentu untuk menciptakan pemahaman yang lebih komprehensif. Kedua, memberikan penjelasan (*to explain*), yakni memberikan eksplanasi logis mengenai apa

15 Paul R. Viotti, Mark V. Kauppi (1999). '*International Relations Theory: Realism, Pluralism, Globalism, and Beyond*, No. 327'. Boston: Allyn and Bacon, hlm. 3.

16 Edward H. Carr (1961). 'The Historian and His Facts'. *What Is History?*. London: Harmondsworth, hlm. 11.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

yang menyebabkan sesuatu terjadi dan bagaimana hal itu terjadi dalam rangka memberikan pemahaman mengenai fenomena intenasional. Ketiga, melakukan prediksi (*to predict*), yakni melakukan postulasi dalam rangka memprediksi masa depan dari suatu fenomena tertentu. Menurut Bruce Bueno de Mesquita, prediksi adalah cara untuk mengevaluasi segala potensi pertanyaan ilmiah untuk menentukan arah perkembangan peristiwa-peristiwa internasional di masa mendatang. Dengan demikian, bagi tradisi keilmuan Amerika Serikat masa depan studi HI ditentukan antara lain oleh daya prediksi teori-teorinya.[17]

Setelah kita membahas definisi dan kegunaan teori dalam studi HI, perlu juga untuk mengetahui komponen-komponen utama teori HI agar dalam menerapkan teori tertentu dalam riset tentang fenomena HI kita dapat menerapkannya dengan baik. Jika kita mengikuti pemikiran Thomas Kuhn dalam *The Structure of Scientific Revolutions* (1962), maka Teori sekurang-kurangnya mengandung lima elemen fundamental, yakni:

1. Konsep-konsep yang didefinisikan dengan jelas (*Well Defined Concepts*): Konsep adalah suatu gagasan yang merangkum berbagai unsur yang rangkaiannya membentuk suatu teori. Sebagai contoh, Teori Realisme memiliki beberapa konsep dasar seperti kekuasaan (*power*), kepentingan nasional, kekuatan nasional, keamanan (*security*), dan sebagainya. Sementara itu, Teori Liberalisme/Neo-liberalisme memiliki sejumlah konsep seperti interdependensi kompleks (*complex interdependence*), rezim internasional, komunitas epistemik, tata pemerintahan global (*global governance*), dan sebagainya. Sedangkan Teori Marxis memiliki konsep-konsep dasar seperti ketergantungan, sistem dunia (*world system*), pusat-pinggiran (*center-periphery*), materialisme sejarah, dan sebagainya. Teori Konstruktivisme memiliki konsep-konsep dasar seperti identitas (*identity*), kepentingan (*interest*), niat (*intention*), bahasa (*language*), permusuhan (*belicosity*), rivalitas (*rivalry*), dan persahabatan (*friendship*). Konsep-konsep inilah yang menjadi pembeda bagi masing-masing teori.
2. Asumsi-asumsi dasar (*Basic Assumptions*): ide-ide yang mendasari proposisi teori tertentu. Misalnya, Teori Realisme didasarkan pada asumsi bahwa hakikat manusia pada dasarnya agresif sehingga jika diproyeksikan pada hubungan antar negara akan membentuk pola

17 Bruce Bueno de Mesquita (1997). 'Capabilities, Perception, and Escalation'. *American Political Science Review*, Vol. 91 No. 01, hlm. 54.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

hubungan perjuangan untuk kekuasaan (*struggle for power*). Sementara itu Teori Liberalisme berasumsi bahwa hakikat manusia adalah kooperatif satu sama lain sehingga jika diproyeksikan ke dalam hubungan antar negara dapat menjadi pendorong kerja sama internasional yang saling menguntungkan. Teori Konstruktivisme mengasumsikan bahwa hubungan antar aktor politik internasional adalah sebuah konstruksi yang dibentuk tidak saja oleh kepentingan (*interest*), melainkan juga oleh niat (*intention*), identitas (*identity*), dan bahasa (*language*). Semakin baik konstruksinya, maka akan terbentuklah persahabatan (*friendship*); sebaliknya konstruksi yang buruk akan menghasilkan rivalitas (*rivalry*). Konstruksi inilah yang dapat menjelaskan mengapa ada nuansa persahabatan dalam hubungan AS-Inggris, dan terdapat nuansa rivalitas dalam hubungan antara AS-China.

3. Proposisi (*Propositions*): pernyataan yang menunjukkan hubungan antar variabel objek penelitian. Sebagai contoh, proposisi terkenal Realisme adalah: hakikat manusia yang agresif dan dorongan untuk mencapai kepentingan nasional membuat setiap aktor internasional mengerahkan segenap kekuatan nasionalnya untuk memperoleh kekuasaan yang pada gilirannya membentuk hubungan yang diwarnai perjuangan untuk kekuasaan (*struggle for power*). Sementara itu proposisi Teori Liberalisme menyatakan bahwa: hakikat manusia yang kooperatif dan dikombinasikan dengan fakta bahwa tidak ada satu negaranpun yang bersifat autarkis (dapat memenuhi kebutuhannya sendiri) dapat mendorong aktor internasional untuk membentuk kerja sama saling menguntungkan terutama di bidang perdagangan, investasi, teknologi, dan energi. Teori Konstruktivisme mengandalkan pada proposisi bahwa: proksimitas (kedekatan) dalam hal identitas, kepentingan, niat, dan bahasa akan membentuk hubungan persahabatan, sedangkan perbedaan yang terlalu tajam dalam keempat hal tersebut cenderung membentuk hubungan rivalitas dan bahkan permusuhan.
4. Unit Analisis (*Unit of Analysis*): merujuk pada unit yang menjadi objek penelitian yang dapat dibagi menjadi tiga bagian, yakni (a) *micro*: individu, organisasi atau lembaga tertentu; (2) *mezzo*: entitas nasional (negara), entitas sub-nasional (kelompok minoritas, separatis, kelompok teroris, mafia, dan lain-lain); dan (3) *macro*: komunitas/kelompok negara-negara, masyarakat internasional, dan sistem internasional.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

Suatu topik riset dapat berada di dua atau lebih unit analisis. Misalnya, riset tentang peran presiden dalam pembuatan politik luar negeri negara tertentu dapat memakai dua unit analisis sekaligus: unit individu, ketika melihat peran presiden dalam pembuatan keputusan; dan unit entitas negara ketika berbicara mengenai implementasi politik luar negeri ke negara lain.

5. Peringkat Analisis (*Level of Analysis*): merujuk pada posisi topik penelitian dalam peringkat analisis yang terdiri dari tiga tingkatan: tingkat nasional/domestik, tingkat kawasan/regional, atau tingkat internasional/global. Suatu topik riset tertentu juga dapat berada pada dua atau lebih peringkat analisis. Sebagai contoh, topik mengenai keamanan di Laut China Selatan dapat menyangkut tiga peringkat analisis sekaligus: di tingkat nasional kita dapat membahas kebijakan pertahanan setiap negara yang mengklaim (Filipina, Tiongkok, Vietnam, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Taiwan), di tingkat regional kita bisa melihat pertarungan antara ASEAN berhadapan dengan Tiongkok dan Taiwan; sementara pada tingkat internasional/global kita bisa membahas kepentingan negara-negara besar (terutama AS dan Rusia) dalam memelihara stabilitas di Laut China Selatan.

Dalam penerapan teori pada suatu penelitian, seorang peneliti setidaknya merujuk pada tiga unsur utama dalam teori yang dia pakai, yakni: konsep-konsep yang terdefinisi dengan jelas; asumsi-asumsi yang mendasari teori tersebut; dan proposisi teori tersebut yang merupakan komponen dasar suatu teori, sementara dua unsur lainnya - unit analisis dan peringkat analisis - merupakan unsur yang boleh diabaikan, kecuali apabila penelitian tersebut menyangkut tinjauan kritis terhadap teori tertentu.

Kesimpulan

Bab ini telah menjelaskan definisi, asal mula, sejarah perkembangan HI, dan kegunaan serta unsur-unsur utama dari teori HI sebagai bagian penting dari disiplin ilmu atau bidang studi HI. Melihat pada konteks sejarah yang ada, maka tampak bahwa studi HI adalah merupakan temuan budaya Barat dan pada awalnya lebih menyangkut kepentingan negara-negara besar (*major powers*) yang terlibat dalam kancah peperangan dan perdamaian internasional.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

Maka dapat disimpulkan bahwa Ilmu HI yang berkembang di seluruh dunia saat ini mengandung beberapa perspektif krusial:

1. Perspektif Inggris: 1919-sekarang: Metode Historis/Tradisionalis; Liberalisme/Idealisme, *English School* (Realisme/Hobbes, Rasionalisme/Grotious, Idealisme/Kant), *Critical Theory* (Linklater).
2. Perspektif Amerika Serikat: 1940-an-sekarang: Metode Saintifik/ Positivis; Realisme/Neo-Realisme, Neo-liberal Institusionalisme; Kajian Politik Ekonomi Internasional.
3. Perspektif Skandinavia: 1970-an-sekarang: Metode historis interpretif; Studi Konflik dan Perdamaian, Teori Sekuritisasi dan Keamanan Non-Tradisional (*Copenhagen School*).
4. Eropa Daratan/Perancis dan Jerman: 1990-an-sekarang: Metode hermeneutika-interpretif, Posmodernisme, Teori Konstruktivisme (Friedrich Kratochwil, Nicolas Onuf, dan Alexander Wendt).

Empat macam perspektif inilah yang mewarnai kajian studi Hubungan Internasional di seluruh dunia saat ini, termasuk di Eropa Timur dan negara berkembang di kawasan Amerika Latin, Asia, dan Afrika.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

BAB 2

HUBUNGAN INTERNASIONAL DI INDONESIA: WARISAN SEJARAH, INTRUSI POLITIK, DAN KOMERSIALISASI[1]

Pengantar

Bab ini akan menguraikan sejarah dan perkembangan HI sebagai disiplin ilmu di Indonesia. Argumen yang dibangun adalah meskipun meningkatnya popularitas HI sebagai bidang studi di universitas-universitas di Indonesia tak terbantahkan, para sarjana dan akademisi HI di Indonesia melakukan usaha yang terlalu kecil dalam aktivitas akademik, secara domestik maupun internasional. Di Indonesia kondisi semacam ini sangat terasa di mana para sarjana HI sangat jarang memproduksi karya ilmiah, berpartisipasi pada konferensi internasional, dan menulis artikel jurnal ataupun buku yang dapat mengembangkan disiplin HI. Diskusi dalam artikel ini akan dibagi kepada empat bagian. Bagian pertama membahas warisan sejarah dalam 'pragmatisme' dan nasionalisme yang tertanam pada ilmu sosial di Indonesia, yang berarti para sarjana HI diharapkan untuk mengikuti orientasi politik luar negeri negara yang sangat pro-Amerika, khususnya pada zaman Perang Dingin. Bagian kedua membahas bagaimana konteks politik dari Asia Tenggara dan orientasi politik luar negeri telah membentuk persepsi HI dari para sarjana, akademisi, dan pelajar. Bagian ketiga membahas bagaimana hubungan dari HI sebagai bidang studi dengan pemerintah. Hubungan dalam lingkaran kekuasaan politik mengarahkan Indonesia kepada pragmatisasi, dikarenakan intervensi pemerintah dalam mendesain kurikulum HI di Indonesia, juga dengan intervensi negara dalam pengangkatan jabatan dosen, seakan telah mendorong para sarjana untuk membatasi aktivitas mengajar dan pengelolaan para pelajar.

1 Versi Bahasa Inggris dari makalah ini telah dipublikasi oleh penulis yang sama dalam jurnal ilmiah *International Relations of the Asia Pacific* (IRAP), Vol. 9 No. 1, Januari 2009, hlm. 55-81.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

Hal ini lebih sering terlihat dibandingkan dengan pencarian kebenaran atau riset untuk perkembangan disiplin ilmu oleh para sarjana. Bagian keempat memfokuskan pada tekanan yang dihadapi universitas-universitas di Indonesia untuk melakukan komersialisasi, dikarenakan kebijakan privatisasi universitas-universitas negeri yang telah diadopsi oleh pemerintah sejak awal 2000. Komersialisasi dari jenjang pendidikan lebih tinggi telah memaksa para dosen untuk membawa beban yang berat, dan meninggalkan waktu yang tidak cukup untuk para akademisi untuk berkonsentrasi pada riset dan publikasi. Selagi dana riset masih kurang, para dosen juga mempunyai insentif yang terlalu kecil untuk berpartisipasi dalam riset yang serius dalam bidang spesialisasi. Meskipun ada, riset yang terjadi lebih banyak berorientasi pada proyek untuk kegunaan praktis oleh institusi pendanaan.

Sejak dekade 1990-an di Indonesia telah terjadi peningkatan perhatian terhadap bidang studi HI. Para calon mahasiswa I-HI telah bertumbuh dalam jumlah yang banyak di seluruh Indonesia. Meskipun terdapat pertumbuhan stabil dalam biaya kuliah dan biaya masuk (termasuk pada universitas negeri), angka calon mahasiswa dalam jenjang S1 bidang studi HI telah tumbuh secara signifikan, terutama sejak pertengahan 1990[2]. Banyak universitas yang membuka jurusan HI untuk menampung pertumbuhan jumlah mahasiswa. Sebagai contoh, pada akhir 1980-an, hanya terdapat 12 jurusan HI, pada 2007, terdapat 47 jurusan HI diseluruh Indonesia. Kejadian-kejadian setelah Perang Dingin telah berkontribusi dalam minat terhadap HI sebagai bidang studi.

Para mahasiswa tertarik oleh dinamika perubahan dalam politik global setelah jatuhnya rezim komunis di Eropa Timur dan juga runtuhnya USSR. Ekspansi setelah Perang Dingin dari bidang studi HI termasuk resolusi konflik, keamanan non-tradisional, masyarakat global dan masyarakat sipil global, dan organisasi non-pemerintah. Hal ini dikarenakan aktor-aktor global yang telah menarik perhatian masyarakat yang berpikir bahwa HI hanya sebatas isu keamanan dan kebijakan luar negeri saja.[3] Pada waktu yang bersamaan, pada

2 Universitas-universitas di Indonesia mengaplikasikan biaya kuliah dan biaya masuk kuliah untuk mendaftarkan para mahasiswa. Di universitas swasta, para mahasiswa diwajibkan membayar ekstra untuk biaya satuan kredit semester, di mana mahasiswa membayar untuk setiap poin kredit yang diambil tiap semester. Jumlah dari biaya bervariasi, tergantung kebijakan universitas.

3 B.S. Hadiwinata (2007). 'Transformasi Isu dan Aktor di Dalam Studi Hubungan Internasional: Dari Realisme Hingga Konstrukrivisme'(*Transformation of issues and actor in the study of international realism:from realism to constructivism*), dalam Y.P. Hermawan (ed.), *Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional: Aktor, Isu dan Metodologi* (*Transformations in the Study of International Relations: Actors, Issues, and Methodology*). Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 8-9.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

beberapa universitas, HI sebagai subjek telah mendapatkan apresiasi lebih. Dikarenakan jarangnya buku referensi studi HI yang ditulis dalam bahasa Indonesia, universitas-universitas di Indonesia mempunyai standar yang tinggi dalam berbahasa Inggris bagi mahasiswanya. Hal ini menyebabkan mahasiswa HI dihormati oleh para teman sejawatnya.

Meskipun hal-hal tersebut menandakan perkembangan yang positif, namun para sarjana dan akademisi HI masih mempunyai kekurangan dalam kualitas riset dan publikasinya. Standar mereka biasanya tidak mencapai standar internasional. Hal ini tidak mengejutkan, jika dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya, HI Indonesia tidak banyak berkontribusi pada literatur akademis internasional. Beberapa pekerjaan serius dan publikasi internasional telah diproduksi oleh beberapa sarjana, namun hal ini merupakan hal yang terkecuali, dikarenakan mayoritas akademisi disibukkan dengan aktivitas ajar-mengajar. Hal ini menyebabkan mereka kurang memberi perhatian kepada riset dan publikasi yang serius. Keadaan ini merefleksikan kondisi umum dalam hampir semua bidang di ilmu kemasyarakatan di Indonesia. Dalam artikel ini, Hans Dieter Evers berargumen bahwa dalam bidang ilmu kemasyarakatan, sarjana Indonesia telah berkontribusi sedikit dibandingkan sarjana dari negara-negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan Singapura.[4] Pada tingkat domestik, setidaknya hingga tahun 2007 di antara sebagian kecil jurnal yang dipublikasikan oleh jurusan HI di beberapa universitas, tidak ada yang diakreditasi oleh Kementerian Pendidikan, karena kurangnya kualitas akan artikel dan kurangnya kontinuitas dari publikasi tersebut.

Selebihnya, dengan hubungan yang erat kepada pemegang kekuasaan, para sarjana di Indonesia - terutama pada pemerintahan di zaman Orde Baru[5] - tidak menunjukkan perhatian pada perkembangan riset ataupun aktivitas lainnya yang berkontribusi pada perkembangan disiplin ilmu HI. Dalam situasi di mana hubungan pada pemegang kekuasaan merupakan hal yang penting, kredibilitas dan reputasi untuk para akademisi sangat tergantung pada asosiasi personal dalam elite. Para sarjana pada era ini menjadi penasihat pada suatu

4 H. Evers (2000). 'Globalization, local knowledge, and the growth of ignorance'. *Southeast Asia Journal of Social Science*, Vol. 28 No. 1, hlm. 13-22.

5 Pemerintahan Orde Baru merupakan rezim yang didominasi oleh militer, dipimpin oleh Jend. Soeharto, seorang Jenderal tentara, yang menguasai Indonesia untuk lebih dari tiga dekade (1966-1998). Pemerintahan anti-komunis ini merebut kekuasaan setelah masalah politik di 1965, yang telah menyebabkan pembunuhan akan ratusan ribuan dari anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) di seluruh penjuru Indonesia. Tragedi tersebut merupakan kulminasi dari perlawanan antara PKI dan pihak militer pada zaman kepresidenan Soekarno (1945-66), presiden pertama Indonesia.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

kementerian, atau menjadi bagian dari birokrasi negara. Hal ini merupakan kontradiksi akan kategori yang dibuat oleh Ariel Heryanto terhadap kaum intelektual. Menurut Heryanto, dalam masyarakat, kaum intelektual harus menjaga jarak dari grup elit yang paling berkuasa dan kaya. Kredibilitas dan kekuasaan mereka dipengaruhi pada kegiatan yang terlihat menghasilkan materi maupun non-materi.[6] Posisi ini mengindikasikan bahwa para kaum intelektual harus tetap menjaga kemandirian, dan berkonsentrasi pada kegiatan kerja, seperti riset, menulis *paper* konferensi, mengikuti konferensi dan *workshop*, dan memproduksi artikel publikasi demi kemajuan disiplin ilmu HI.

Warisan Sejarah, Kaum Intelektual, dan Pengaruh Amerika Serikat

Dibandingkan dengan cabang ilmu lain dalam ilmu kemasyarakatan, yang dapat ditelusuri balik ke zaman kolonial, HI sebagai cabang ilmu merupakan sesuatu yang relatif baru. Cabang ilmu ini berawal pada era 1950-an, ketika beberapa universitas menawatkan mata kuliah HI, untuk memenuhi kebutuhan Kementerian Luar Negeri untuk *training* diplomat-diplomat baru untuk pekerjaan diplomatik di beberapa negara.[7] Untuk tujuan itulah di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada 10 Juli 1957 didirikan Departemen Ilmu Hubungan Internasional di bawah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik melalui Peraturan Pemerintah No.15/1957. Jurusan Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Gadjah Mada inilah yang dikenal luas sebagai jurusan Ilmu HI pertama di Indonesia. Hal yang menarik adalah besarnya pengaruh Realisme ala Amerika dalam ilmu HI di jurusan HI Universitas Gadjah Mada. Hal ini disebabkan oleh peran besar sejumlah pakar HI dari Universitas Johns Hopkins yang merupakan tim penyusun kurikulum HI yang dikomandoi oleh Prof. Donald Weatherbee, Amerika Serikat, dalam mendesain kurikulum HI di universitas tersebut.[8]

Masa Perang Dingin jelas telah berkontribusi banyak pada perkembangan HI, dalam periode di mana buku pelajaran ditulis oleh sarjana

6 A. Heryanto (2003). '*Public intellectuals, media and democratization: cultural politics of the middle classes in Indonesia*', dalam A. Heryanto dan S.K. Mandal (ed.).'*Challenging Authoritarianism in Southeast Asia: Comparing Indonesiaand Malaysia*'. London: Routledge-Curzon, hlm. 29.

7 Terdapat sedikitnya tiga universitas - Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Universitas Indonesia, Jakarta, dan Universitas Padjajaran, Bandung - yang menawarkan mata kuliah HI, untuk memenuhi kebutuhan Kementerian Luar Negeri untuk pelatihan diplomat.

8 Komunikasi surat elektronik dengan Prof. (Emeritus) Donald Weatherbee, salah seorang anggota Tim dari Universitas Johns Hopkins yang mendesain kurikulum HI di UGM pada 1950-an pada bulan Juli 2008.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

Amerika, seperti George F. Kennan, H.J. Morgenthau, Kenneth Waltz, Ernst B. Haas, dan sarjana-sarjana Amerika yang lain. Di antara sarjana-sarjana tersebut, para sarjana yang menulis dengan tradisi Realis merupakan pihak yang paling berpengaruh dalam membentuk konten HI di Indonesia. Konsep realis seperti kekuatan nasional, kepentingan nasional, keseimbangan kekuasaan, pencegahan, dan yang lainnya, merupakan topik utama dalam kegiatan mengajar dalam kelas HI seperti kebijakan luar negeri, politik internasional, teori hubungan internasional, dan organisasi internasional. Pengaruh Amerika tidak hanya terdapat dalam bidang HI, namun juga terdapat dalam cabang-cabang ilmu kemasyarakatan lainnya, seperti ekonomi, sosiologi, antropologi, ilmu kemasyarakatan, dan sejarah. Bahkan pada periode awal dalam Perang Dingin, Amerika Serikat menunjukkan ketertarikannya (secara geopolitik) terhadap Indonesia, sebagai salah satu kekuatan yang muncul di Asia Tenggara. Dean Rusk, seorang pejabat tinggi Departemen Luar Negeri AS pada zamannya, mencatat bahwa pada zaman Perang Vietnam, agresi komunis di Asia harus dikonfrontasi, tidak hanya dalam bentuk pelatihan regu militer AS, namun juga dalam pelatihan regu militer dari aliansi Asianya[9].

Sejak tahun 1950-an, beberapa kumpulan dari sarjana ilmu kemasyarakatan di Indonesia – sebagian besar merupakan dosen dari universitas terkemuka di Indonesia – dikirim ke universitas-universitas unggul di Amerika Serikat (dan didanai oleh beasiswa dari AS). Universitas-universitas ini termasuk *University of California at Berkeley, Cornell University, Ohio State University,* dan lain-lain. Banyak dari para ilmuwan ini kembali ke Indonesia dan tetap menjadi dosen pengajar di universitas, sedangkan sebagian lainnya menjadi menteri kabinet atau menjabat sebagai birokrat. Organisasi Amerika seperti *Ford Foundation* dan *Rockefeller Foundation* juga ikut serta dalam perkembangan para akademisi Indonesia dengan mengirimkan mereka ke AS dalam jenjang S-2. Perlu dicatat bahwa ketertarikan Amerika pada situasi akademik di Indonesia juga karena perkembangan Studi Wilayah (*Area Studies*) di negara tersebut. Publikasi yang berhubungan dengan sejarah dan politik Indonesia dilakukan oleh para sarjana Studi Wilayah Amerika, seperti George McT. Kahin, Benedict Anderson, Daniel Lev, Ruth McVey, Dwight Y. King, R. William Liddle, dan sarjana lainnya.

9 D. Ransom (1970). 'The Berkeley mafia and the Indonesian massacre'. *Ramparts*, Vol. 9 No. 4, hlm. 27-49.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

Kelompok penting ilmuwan sosial - termasuk spesialis HI - mulai muncul untuk melakukan studi lanjutan (jenjang S-2 dan S-3) di beberapa universitas Amerika pada tahun 1970-an. Studi Wilayah (*Area Studies*) telah mempengaruhi pelajaran HI di banyak universitas Indonesia. Sebagai contoh, para akademisi Indonesia dari departemen HI tertua di UGM, Yogyakarta, yang telah belajar di Amerika Serikat dapat dihubungkan dengan Studi Wilayah. Ketika mereka kembali ke Indonesia, mereka memperkenalkan Studi Daerah, seperti Politik dan Ekonomi dari Daerah Berkembang, Pemerintahan dan Politik di Asia Tenggara, Pemerintahan dan Politik di Timur Tengah, dan Pemerintahan dan Politik di Amerika Latin - di departemen masing-masing. Di antara grup sarjana ini terdapat beberapa akademisi terkenal seperti Ichlasul Amal (lulusan dari *University of Northern Illinois*), Amien Rais (lulusan *University of Chicago*), Yahya Muhaimin (lulusan *Massachusetts Institute of Technology*), dan Mohtar Mas'oed (lulusan dari *Ohio State University*).

Sarjana HI merupakan generasi kedua dari para akademisi Indonesia yang belajar di Amerika Serikat pada periode 1960-an dan 1970-an. Salah satu sarjana terkenal di bidang ini adalah almarhum Suwardi Wiriaatmadja (akademisi dari Universitas Padjajaran, Bandung, dan lulusan dari The Johns Hopkins University). Pada tahun 1981, beliau menulis buku referensi pertama dalam bahasa Indonesia berjudul *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional* yang menjadi teks standar pengajaran ilmu HI di Indonesia. Buku ini merefleksikan pengaruh yang kuat dari pendekatan Realis Amerika Serikat, di mana beberapa bab mengeksplor konsep-konsep realis seperti kekuatan nasional, kepentingan nasional, instrumen nasional, dan lain-lain[10]. Buku ini terpengaruh oleh karya-karya dari sarjana HI dari Amerika Serikat, terutama H.J. Morgenthau, dan George F. Kennan. Buku pelajaran ini menjadi referensi kunci dalam semua departemen HI di Indonesia hingga sekarang. Sejak saat itu, realisme dipandang secara serius oleh para sarjana HI Indonesia. Namun sayangnya, versi terbaru dari buku ini tidak pernah dipublikasikan sejak penulisnya meninggal pada tahun 1990.

10 S. Wiriaatmadja (1981). *'Pengantar Hubungan Internasional (Introduction to International Relations)'. Diktat Kuliah (Course Outline).* Bandung:University of Padjadjaran.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

Politik Luar Negeri, Intrusi Politik, dan Perhatian pada Asia Tenggara

Seperti yang diketahui pada kawasan Asia Tenggara, pemerintahan Indonesia di bawah Presiden Soeharto (1966-1998) sangat mendorong terbentuknya ASEAN bersama dengan Malaysia, Filipina, Thailand, dan Singapura melalui Deklarasi Bangkok di tahun 1967. Organisasi ini membangun dirinya dengan mengambil dari pelajaran 'Konfrontasi' terhadap Malaysia oleh Indonesia pada masa pemerintahan Soekarno. Inisiatif ini didasarkan ketakutan akan pemimpin militer Indonesia akan ancaman komunisme kepada stabilitas internal pada kawasan, yang selanjutnya dapat mengancam integritas nasional. Untuk mengubah ASEAN menjadi aliansi regional yang melawan penyebaran komunisme di kawasan tersebut, Indonesia mencoba untuk melaksanakan doktrin nasionalis pada ASEAN. Salah satu contoh adalah dimasukkannya konsep seperti ketahanan nasional, musyawarah-mufakat, dan anti-intervensi asing sebagai prinsip utama ASEAN.[11] Seperti yang dikatakan oleh Jusuf Wanandi, seorang sarjana HI terkemuka di *Centre for Strategic and International Studies* (CSIS): 'Jika setiap anggota dapat meraih perkembangan nasional secara keseluruhan dan menyelesaikan ancaman internal, maka ketahanan regional akan secara otomatis membuahkan hasil yang sama jika sebuah rantai mengambil kekuatan dari kesatuan seluruh bagiannya'.[12] Meskipun timbulnya kontroversi terhadap konsep-konsep ini, ide dari ketahanan nasional, pencarian konsensus, dan non-intervensi disambut baik oleh para pemimpin dan sarjana ASEAN, yang mengadopsi dan mempromosikan konsep-konsep ini sebagai nilai-nilai ASEAN.[13]

Reservasi dari sarjana dan mahasiswa Indonesia terhadap doktrin-doktrin nasionalis tersebut sebagian besar dipengaruhi oleh cara pemerintah Indonesia menghadapinya. Di kampus universitas, sebagai contohnya, mahasiswa diwajibkan mengambil pelajaran kewiraan, yang memfokuskan pada konsep-konsep ini, dibarengi dengan doktrin-doktrin militer yang lain seperti wawasan

11 Konsep dari ketahanan Indonesia diartikan sebagai konsep yang menjurus ke dalam, didasarkan oleh proposisi bahwa keamanan nasional tidak terdapat dari aliansi militer ataupun payung militer dari kekuatan besar, namun dari kemandirian dari faktor-faktor domestik seperti perkembangan ekonomi dan sosial, stabilitas politik, dan rasa nasionalisme (Irvine, 1982, hlm. 40)

12 J. Wanandi (1984). '*Security Issues in the Southeast Asia Region*', dalam K.D. Jackson dan H. Soesastro (ed.), '*ASEAN Security and Economic Development. Research Papers and Policy Studies*'. Berkeley, CA: Institute of East Asian Studies, University of California, hlm. 305.

13 A. Acharya (2001). '*Constructing a Security Community in Southeast Asia: ASEAN and the Problem of Regional Order*'. London: Routledge, hlm. 58-62.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

nusantara[14] dan sistem pertahanan rakyat semesta/SISHANKAMRATA).[15] Para dosen dalam pelajaran ini biasanya direkrut dari prajurit militer yang telah pensiun. Reservasi ini tidak hanya karena antipati terhadap adanya prajurit militer ini sebagai dosen, namun juga karena ketakutan indoktrinasi militer di kehidupan kampus di antara mahasiswa Indonesia. Subyek ini akhirnya ditinggalkan - bersama dengan penangguhan organisasi para-militer mahasiswa seperti resimen mahasiswa/Menwa - diikuti dengan jatuhnya pemerintahan Orde Baru di 1998, yang menandai akhir dari militerisasi kehidupan kampus.

Pada zaman Perang Dingin, pengaruh Amerika pada studi HI diiringi dengan kebijakan luar negeri Indonesia setelah kemerdekaan, yang fokus pada arah Amerika Serikat. Pada awal kemerdekaan, negara Indonesia menginginkan relasi yang kuat dengan dunia Barat - terutama dengan Amerika Serikat - untuk menahan kedaulatan melawan kembalinya Belanda. Sebagai perdana menteri dan juga Menteri Luar Negeri, Sutan Sjahrir menyatakan argumen pada November 1945:

> Indonesia berada pada lokasi yang secara geografis di dalam pengaruh kapitalisme Anglo-Sakson dan Imperialisme. Berdasarkan itu, takdir Indonesia selebihnya bergantung pada kapitalisme Anglo-Sakson dan Imperialisme. Sangat jelas sekarang bahwa kekuasaan Belanda telah menjadi pion dalam permainan catur politis yang telah dimainkan Inggris. Namun kita juga harus menyadari bahwa kekuasaan Belanda disini mempunyai kepentingan yang sama untuk Amerika Serikat maupun kebijakan luar negeri Inggris. Dalam fakta ini terdapat kemungkinan bagi kami untuk memenangkan posisi baru dalam ambisi politik dari Raksasa Pasifik, yaitu Amerika Serikat.[16]

Pernyataan ini menitikberatkan pada kemauan yang kuat dari pemerintahan Indonesia untuk membentuk hubungan yang kuat dengan Amerika Serikat. Meskipun dalam tahun-tahun berikutnya Indonesia mengambil posisi yang tidak terlalu 'netral' dengan mengantarkan Politik Luar Negeri Bebas Aktif, Indonesia tetap mencoba untuk menjalin hubungan yang dekat dengan Amerika Serikat untuk setidaknya hingga awal 1960-an. Periode ini merupakan

14 Konsep ini merupakan kejayaan dari zaman dulu ketika kerajaan Majapahit dapat menyatukan Nusantara (*Indonesian archipelago*) dalam satu kekuasaan, yang selanjutnya diambil oleh pemimpin militer sebagai negara kesatuan republik Indonesia (NKRI).

15 Istilah SISHANKAMRATA merupakan istilah yang diintroduksi oleh para pemimpin militer yang bertujuan untuk mengkombinasi personil militer dan rakyat dalam mempertahankan negara dari ancaman luar dan subversi internal yang dapat mengancam NKRI.

16 M. Leifer (1983). '*Indonesia's Foreign Policy*'. London: The Royal Institute of International Affairs and George Allen and Unwin, hlm. 8.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

periode ketika Presiden Soekarno mulai menjalin hubungan yang berbahaya terhadap negara-negara yang ia sebut sebagai NEKOLIM (neo-kolonialisme dan imperialisme), dengan membangun NEFOS (*new emerging forces*), yang menyebabkan buruknya hubungan dengan dunia Barat.

Ketika Jenderal Soeharto mengambil alih kekuasaan pada 1966, hubungan dengan dunia Barat kembali normal. Bergerak menjauh dari blok komunis, pemerintahan Orde Baru mengembangkan kebijakan baru yang lebih pragmatis dengan membangun kembali hubungan dengan dunia Barat, dan juga mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia. Menteri Luar Negeri, Adam Malik, mempersuasi negara-negara donor seperti Amerika Serikat, Jepang, Inggris, dan Belanda untuk menurunkan larangan dana untuk Indonesia. Hubungan dengan negara tetangga, terutama Malaysia, semakin berkembang. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, pemerintahan Soeharto mendorong terciptanya ASEAN.

Ketika periode inilah beberapa sarjana ilmu politik dan sarjana HI mengejar studi mereka di Amerika di bawah beasiswa dari Amerika. Sebagian kecil dari mereka belajar ke Inggris. Salah satu tokoh penting yaitu Juwono Sudarsono, yang meraih S-2-nya dari *University of California at Berkeley* dan gelar doktor dari *London School of Economics and Political Science*. Ketika datang kembali, ia melanjutkan mengajar HI dan strategi keamanan di Universitas Indonesia sebelum ia menjadi birokrat negara, dengan bekerja di beberapa posisi, seperti Lemhannas, Duta Besar ke Inggris, dan Menteri Pertahanan di bawah pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Realisme menjadi semakin kuat di tradisi HI Indonesia, dengan akademisi lebih muda tetap menerapkan tradisi tersebut. Penting untuk dicatat bahwa buku pelajaran mahasiswa HI yang paling sering digunakan adalah *Indonesia's Foreign Policy* oleh Michael Leifer. Buku ini dipublikasikan pada tahun 1983. Buku ini menjelaskan perubahan kebijakan luar negeri Indonesia dalam formasinya selama revolusi 1940 sampai dekade awal pemerintahan awal Soeharto. Salah satu aspek yang paling terlihat adalah bagaimana kebijakan luar negeri Soeharto dipresentasikan sebagai nasionalis dan lebih rasional dibandingkan dengan periode Soekarno. Buku ini ditanggapi baik oleh departemen HI seluruh Indonesia, dan menjadi bacaan wajib untuk pelajaran kebijakan luar negeri.

Pada tahun 1980 dan 1990-an, sarjana HI yang lebih muda mulai untuk mendiversifikasi pilihan studi mereka, seperti Australia, Inggris, Jerman, dan bahkan Jepang. Sarjana seperti Dewi Fortuna Anwar (periset senior di LIPI),

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

Rizal Sukma, (periset senior di CSIS, sebuah organisasi yang terkenal akan hubungan dekat dengan Soeharto), yang belajar pada masa setelah Perang Dingin, tetap melanjutkan untuk mengambil perspektif realis dalam analisa mereka dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Sarjana lainnya di generasi mereka memilih untuk mencoba aspek yang berbeda dalam HI. UGM, sebagai contoh, mengenalkan resolusi konflik dan studi perdamaian, yang menjadi populer di seluruh dunia. Output riset yang berkualitas diproduksi oleh Pusat Studi Konflik dan Perdamaian yang didirikan pada 1995 dan mempunyai staf dosen muda HI. Sedangkan Universitas lainnya mengambil jalur yang lain. Universitas Katolik Parahyangan sebagai contohnya, bergerak menjauhi realisme, dengan menambahkan isu-isu keamanan non-tradisional di mata kuliahnya. Publikasi telah diterbitkan oleh para sarjana dari universitas ini, di mana isu-isu keamanan non-tradisional seperti feminisme, terorisme, keamanan lingkungan, peran aktor non-negara, dan media.[17]

Jelas sekali bahwa dengan turut ikutnya sarjana HI dari berbagai universitas di seluruh dunia, pelajaran HI telah berjalan menjauh dari realisme. Pengaruh dari Studi Daerah Amerika juga telah direduksi. Namun dapat dikatakan bahwa sebagian besar dari universitas di Indonesia masih mempunyai karakteristik realisme Amerika dan Studi Daerah yang telah dipengaruhi oleh berbagai peristiwa setelah Perang Dingin. Akses terbatas dari sebagian besar dosen terhadap buku pelajaran baru mempunyai pendekatan yang tetap mengadopsi realisme.

Baru-baru ini, meskipun publikasi yang jarang mengenai HI oleh para sarjana-sarjana Indonesia, beberapa departemen HI di Indonesia – Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Padjajaran, Universitas Katolik Parahyangan, dan Universitas Airlangga – telah memakai tulisan-tulisan oleh sarjana Indonesia seperti Dewi Fortuna Anwar (LIPI), Rizal Sukma (CSIS-Jakarta), Makmur Keliat (Universitas Indonesia), dan Banyu Perwita (Universitas Katolik Parahyangan). Tulisan-tulisan ini mencakup beberapa isu, terutama hubungan luar negeri Indonesia, pembuatan kebijakan luar negeri, dan konflik antar-negara; yang telah merepresentasikan tradisi realis.

17 A.H. Parcira (ed.) (1999). '*Perubahan Global dan Perkembangan Studi Hubungan Internasional*'. Bandung: Cirra Aditya Bakti; B.S. Hadiwinata (2002). '*Politik Bisnis Internasional (The Politics of International Business)*'. Yogyakarta: Kanisius; Y.P. Hermawan (ed.) (2007). '*Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional: Aktor, Isu dan Metodologi (Transformations in the Study of International Relations: Actors, Issues, and Methodology)*'. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

Dapat dikatakan cukup mengejutkan bahwa fokus dari Asia Tenggara sebagai kawasan pada negara Asia Tenggara lainnya cukup rendah dalam pengajaran HI Indonesia. Sebagai contoh, kurangnya minat dari mahasiswa Indonesia dapat terlihat dari pengalaman di Universitas Gadjah Mada. Pada zaman 1980-an, ketika ada mata kuliah pilihan, seperti Politik Pemerintahan di Asia Tenggara, hanya sedikit mahasiswa yang mengambil. Mahasiswa lain lebih memilih Amerika Latin ataupun Timur Tengah. Salah satu mantan mahasiswa berargumen bahwa Amerika Latin dan Timur Tengah lebih menarik karena dua kawasan ini menawarkan peristiwa-peristiwa yang lebih dinamis, seperti debat antara modernisasi dan teori ketergantungan dari Amerika Latin, dan konflik di Israel-Arab dan Timur Tengah.[18] Namun baru-baru ini, terlihat mahasiswa mulai tertarik dengan mata kuliah pilihan terhadap Asia Tenggara, seperti Pemerintahan dan Politik di Asia Tenggara dan HI di Asia Tenggara.[19] Ariel Heryanto berargumen bahwa kurangnya minat terhadap mahasiswa Asia Tenggara dapat diasosiasikan dengan empat faktor: (i) orientasi yang nasionalis terhadap pendidikan di Asia Tenggara. (ii) kecenderungan dari mahasiswa Asia Tenggara yang menggeluti studi di luar negeri untuk berfokus pada energi intelektual mereka di negara mereka sendiri, (iii) keterbatasan bahasa; dan (iv) keterbatasan mekanisme dalam institusi studi Asia Tenggara.[20]

Faktor-faktor ini dapat berlaku dalam konteks Indonesia, di mana para akademisi dan sarjana bergantung pada dukungan pemerintah atau beasiswa asing, yang mana keduanya lebih memilih penerima beasiswa untuk fokus pada studi pascasarjana di negara masing-masing agar dapat berkontribusi untuk pembangunan nasional dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, kesejahteraan sosial, birokrasi, administrasi pembangunan, dan lain sebagainya. Hasilnya, banyak orang Indonesia yang merupakan lulusan perguruan tinggi asing yang mengajar atau melakukan penelitian di berbagai institusi cenderung menggunakan Indonesia sebagai subjek analisis. Bahasa pun menjadi masalah, karena mahasiswa lebih tertarik untuk mempelajari bahasa-bahasa Asia yang lain, seperti Bahasa Jepang, Mandarin dan Korea, daripada bahasa negara-

18 Wawancara dengan Mangadar Situmorang, mantan mahasiswa UGM, yang sekarang menjadi staf pengajar di Departemen Hubungan Internasional, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung 11 September 2008.

19 Wawancara dengan M. Dafri, Ketua Jurusan Hubungan Internasional di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 13 September 2008.

20 A. Heryanto (2007).*'Can there be Southeast Asians in Southeast Asian Studies?'* dalam L.J. Sears (ed.) *'Knowing Southeast Asian Subjects'*. Singapura: National University of Singapore Press, hlm. 81.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

negara Asia Tenggara. Contohnya, di Universitas Indonesia, Bahasa Jepang dan Mandarin merupakan bahasa Asia yang ditawarkan kepada mahasiswa hubungan internasional. Di Universitas Nasional yang berlokasi di Jakarta, mahasiswa hubungan internasional dapat memilih bahasa Korea sebagai mata kuliah pilihan. Sementara di Universitas Parahyangan, Bandung, mahasiswa hubungan internasional diharuskan memilih bahasa Jepang, Mandarin, atau Perancis sebagai mata kuliah bahasa wajib selain bahasa Inggris. Sejauh ini, tidak ada bahasa Asia Tenggara lain yang ditawarkan di universitas mana pun. Hal ini mengakibatkan ketidaktertarikan mahasiswa hubungan internasional terhadap wilayah Asia Tenggara. Mereka tidak memiliki minat terhadap negara-negara di wilayah Asia Tenggara selain terhadap negara mereka sendiri. Ketiadaan institusi yang berfokus pada wilayah Asia Tenggara di negara ini juga mengakibatkan kurangnya kebutuhan untuk ahli dalam kawasan Asia Tenggara.

Namun demikian, minat terhadap wilayah Asia Tenggara tumbuh di luar kampus universitas-universitas. Contohnya CSIS, yang berlokasi di Jakarta, mulai terlibat secara aktif dalam penelitian mengenai wilayah Asia Tenggara. Namun kegiatan mereka lebih banyak mengarah terhadap menyediakan masukan mengenai kebijakan-kebijakan kepada pemerintah Indonesia dalam berhadapan dengan ASEAN. CSIS -melalui ketua dewan Jusuf Wanandi - memiliki peran aktif dalam membentuk forum *track two* dari ASEAN pada tahun 1988. Dikenal sebagai ASEAN *Institutes of Strategic and International Studies* (ASEAN-ISIS), forum baru ini mencoba untuk berperan sebagai pemberi masukan mengenai kebijakan-kebijakan terhadap negara masing-masing demi kemajuan ASEAN.[21] Anggota awal berasal dari kelima negara asli ASEAN: CSIS di Jakarta, ISIS di Kuala Lumpur, *Institute for Strategic and Development Studies* di Manila, *Singapore Institute of International Affairs di Singapura*, dan *Institute for Security and International Studies* di Bangkok. Antara tahun 1995 dan 2000, tiga anggota lain bergabung: *Institute of International Relations* di Hanoi, *Institute of Foreign Affairs* di Vientiane, dan Brunei Darussalam *Institute of Policy and Strategic Studies* di Bandar Sri Begawan.

Meskipun sukses dalam berbagai ceramah terhadap keamanan di ASEAN, terutama pembentukan dari ASEAN *Regional Forum* sebagai pengatur keamanan ASEAN, forum *track two* ini telah berbuat nyaris nihil untuk membangun minat mahasiswa Indonesia terhadap wilayah Asia Tenggara,

21 M. Caballero-Anthony (2005). '*Regional Security in Southeast Asia: Beyond the ASEAN Way*'. Singapura: Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS), hlm. 161.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

atau bahkan terhadap ASEAN dan instrumeninstrumen institusionalnya.[22] Perwakilan Indonesia dalam forum hanya terdiri dari staf CSIS dan tidak pernah melibatkan perwakilan dari institusi-institusi akademis. ASEAN-ISIS juga dikritik karena sifat eksklusifnya yang hanya melibatkan komunitas elit seperti pejabat pemerintah, sejumlah kecil kalangan akademisi, kaum pengusaha, dan media, serta perwakilan dari kalangan "rakyat" seperti organisasi-organisasi kenegaraan, LSM dan ormas berpartisipasi dalam rapat-rapat ASEAN-ISIS.[23]ASEAN-ISIS telah berusaha untuk melibatkan LSM dan ormas dengan membentuk sebuah forum bernama *ASEAN People' Assembly* (APA) di tahun 2000. Namun terdapat kekhawatiran terhadap keberlangsungan forum karena keterbatasan-keterbatasan finansial, kemampuan untuk menarik partisipasi dari kalangan "rakyat", serta keraguan terhadap efektivitas forum dalam membuat kebijakan-kebijakan yang berpengaruh karena adanya hubungan institusional antara APA dan KTT ASEAN. Tingkat minat yang sudah rendah di antara kalangan akademisi dan pelajar Indonesia terhadap ASEAN diperparah oleh eksklusivitas forum *track two* yang membatasi informasi mengenai urusan ASEAN dan masing-masing anggotanya di dalam ruang lingkupnya sendiri.[24]

Hubungan Kekuasaan dan Intervensi Pemerintah

Sejarah ilmu pengetahuan sosial di Indonesia diasosiasikan dengan jaringan kekuasaan dari elite-elite penguasa. Para akademisi ilmu pengetahuan sosial diharapkan untuk mengadakan penelitian atau kegiatan lainnya (publikasi, seminar, lokakarya, dan lainnya) untuk memenuhi kebutuhan elite penguasa terhadap ilmu-ilmu atau keterampilan-keterampilan tertentu. Dalam kumpulan karya mengenai hubungan ilmu pengetahuan sosial dan kekuasaan di Indonesia, Hadiz dan Dhakidae berpendapat bahwa karakter ilmu sosial Indonesia sangat berkaitan dengan pergeseran kebutuhan kekuasaan seiring dengan dengan waktu.[25]

---

22 Wawancara dengan Aleksius Jemadu, guru besar Politik Internasional di Universitas Parahyangan, Bandung, 12 September 2008.

23 N.M Morada (2007). '*APA and track two-and-a-half diplomacy: the role of ASEAN people's assembly in building an ASEAN community*' tulisan ini dipresentasikan pada ASEAN 40th Anniversary Conference, Singapura, 31 Juli-1 Augustus, hlm. 3.

24 C.S. Tjhin (2005). 'Menjalin Demokrasi Lokal dengan Regional: Membangun Indonesia, Membangun ASEAN (Weaving democratization on local and regional level: building Indonesia, building ASEAN)'. *Political and Social Change Working Paper Series* No. 54. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies, hlm. 5-8.

25 V.R Hadiz dan D. Dhakidae (2005). '*Introduction*' dalam V.R. Hadiz dan D. Dhakidae (ed.). *Social Science and Power in Indonesia*. Singapura: Equinox Publishing, hlm. 2.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

Sejak awal 1970, upaya-upaya oleh pemerintah Order Baru untuk membangun birokrasi yang kuat telah membuka kesempatan bagai kalangan akademisi dan peneliti untuk memasuki birokrasi negara dan menjabat berbagai posisi tinggi, dari direktur perusahaan negara hingga menteri kabinet. Salah satu contohnya adalah dosen-dosen Universitas Indonesia seperti Emil Salim, Sumitro Djojohadikusumo, Ali Wardhana, Radius Prawiro, dan lainnya yang direkrut untuk menjabat sebagai menteri kabinet. Contoh lain adalah Mochtar Kusumaatmadja, seorang dosen senior hukum internasional di Universitas Padjadjaran yang menjabat sebagai Menteri Luar Negeri selama beberapa tahun. Alasan keterlibatan mereka adalah gengsi yang didapat sebagai tokoh publik, dan tentunya keuntungan materi sebagai pejabat negara, yang digabung dengan gaji rendah untuk mempertahankan posisi akademis yang mereka miliki.[26]

Jenderal Soeharto mendapatkan kekuasaan pada tahun 1966, setelah terjadi sengketa politik di mana beribu-ribu anggota Partai Komunis Indonesia dibunuh atau ditangkap sebagai tahanan politis. Pada masa pemerintahan Orde Baru, pengejaran Presiden Soeharto terhadap partai komunis serta larangan tanpa henti terhadap paham Marxisme menciptakan rasa takut di antara kalangan akademisi yang mungkin berhubungan dengan paham komunisme yang telah dilarang, hubungan yang dapat berakhir dengan kematian, penyiksaan, ditolaknya akses terhadap posisi publik atau terisolasi dari masyarakat. Pada pertengahan 1970-an, pemerintah memperkenalkan normalisasi kebijaksanaan kampus, di mana konten politis dalam beasiswa, tulisan dan kurikulum dihilangkan demi terwujudnya metode pengajaran dan penelitian yang mendorong terciptanya pembangunan dan stabilitas nasional, serta pertumbuhan ekonomi. Bagi kebanyakan pengamat politik Indonesia, seperti yang dinyatakan Celia Lowe, "dipenjarakan, penghilangan, pengasingan, teror, dan kematian merupakan kemungkinan yang terjadi pada kaum oposisi. Selain itu negara pun sengaja menghubungkan pergerakan politisnya dengan momok komunisme".[27]

26 A. Heryanto (2003). '*Public intellectuals, media and democratization: cultural politics of the middle classes in Indonesia*' dalam A. Heryanto dan S.K. Mandal (ed.). '*Challenging Authoritarianism in Southeast Asia: Comparing Indonesia and Malaysia*'. London: Routledge-Curzon, hlm. 29; H. Nugroho (2005). '*The Political Economy of Higher Education: The University as an Arena for the Struggle for Power*' dalam V.R. Hadiz and D. Dhakidae (ed.) *Op cit*, hlm. 154.

27 C. Lowe (2007). '*Recognizing Scholarly Subjects: Collaboration, Area Studies and the Politics Of Nature*' dalam L.J. Sears (ed.).'*Knowing Southeast Asian Subjects*'. Singapura: National University of Singapore Press, hlm. 117.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

Ancaman terus-menerus dari pemerintah terhadap pergerakan politis yang kritis memiliki dampak terhadap cara pengajaran dan kegiatan di tingkat perguruan tinggi. Para akademisi membentuk sebuah fobia terhadap penggunaan metode Karl Marx untuk analisis kelas. Universitas menuruti paham anti-komunis negara, di mana penggunaan teks-teks Marxisme untuk kegiatan belajar-mengajar dilarang keras. Beberapa akademisi mempertanyakan larangan pemerintah terhadap Marxisme dengan menggunakan analisis dalam upaya menjelaskan kemiskinan di Indonesia. Meminjam konsep yang digunakan teori ketergantungan yang dikembangkan di Amerika Latin pada akhir 1950-an serta awal 1960-an, para akademisi seperti Arief Budiman, Sritua Arief dan Adi Sasono menggunakan analisis kelas dalam menilai kemiskinan yang merajalela di Indonesia. Dalam berbagai tulisan dan pidato, mereka dengan sungguh-sungguh menyerang "golongan menengah kapitalis" Indonesia - yang dipelihara oleh pemerintah Orde Baru - yang mengakibatkan kemiskinan serta ketergantungan kepada pihak asing di Indonesia. Meskipun mendapat tanggapan baik oleh sebagian kecil mahasiswa yang tertarik dengan prinsip-prinsip radikal teori ketergantungan di universitas-universitas ternama, seperti Universitas Indonesia dan Universitas Gadjah Mada, Marxisme sebagai sebuah paham dan metode secara umum tidak diterima oleh sebagian besar akademisi dan mahasiswa, karena ketakutan terhadap teror dari penegak hukum serta juga akibat usaha-usaha tiada henti dari pemerintah Orde Baru untuk menanamkan "pengkhianatan komunis" sebagai narasi utama Indonesia pasca-kolonialisme.[28] Salah satu kejadian yang berakibat dipenjarakannya beberapa mahasiswa terjadi pada tahun 1988, ketika tiga mahasiswa Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dihukum antara 6 hingga 8 tahun di penjara setelah mereka dituduh menyebarkan Marxisme karena mendistribusikan novel dilarang yang ditulis oleh mantan anggota PKI, Pramudya Ananta Toer.[29] Ketiadaan ideologi sayap kiri di pengajaran HI berlanjut hingga era pasca-Orde Baru.[30] Pandangan-

28 V.R. Hadiz (2006).'The left and Indonesia's 1960s: the politics of remembering and forgetting'. *Inter-Asia Cultural Studies*,Vol. 7 No.4, hlm. 554.

29 Anders Uhlin (1997). 'Indonesia and the "Third Wave" of Democratisation'. *The Indonesian Pro-Democracy Movement in a Changing World*. England: Curzon Press, hlm. 107.

30 Pemerintahan pasca-Orde Baru diinisiasi tahun 1998 setelah krisis ekonomi yang mengakibatkan demonstrasi pemerintahan besar-besaran yang dipimpin oleh mahasiswa dan berakhir dengan diduduknya gedung parlemen di Jakarta. Sidang pleno parlemen membuat Presiden Soeharto mundur dari jabatannya dan ditunjuknya B.J. Habibie, Wakil Presiden, sebagai penggantinya. Sebagai jawaban atas tuntutan mahasiswa dan pemimpin-pemimpin oposisi yang menuntut reformasi politik, Habibie setuju untuk membawa demokrasi ke negeri ini dengan menciptakan undang-undang yang menjamin kebebasan berpolitik, memperbolehkan dibentuknya partai politik-partai politik baru, meniadakan

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

pandangan anti-komunis bertahan dominan karena banyak pejabat serta anggota organisasi-organisasi sosial dan politik yang terlibat dalam eliminasi keras dan demonisasi sayap kiri di bawah pemerintahan Orde Baru masih menegang posisi penting setelah 1998, sebagai anggota parlemen, pejabat serta pimpinan lembaga-lembaga pendidikan dan sosial.[31]

Untuk menekan oposisi, pemerintah Orde Baru pun mengontrol organisasi-organisasi sosial. Akibatnya, asosiasi-asosiasi profesional berdasarkan bidang akademik tertentu menjadi pemasok bagi pemerintah, bersangkutan dengan pengembangan kebijakan-kebijakan pembangunan, sekaligus sebagai pemasok pakar-pakar teknis untuk birokrasi negara. Salah satu asosiasi ternama adalah Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, yang memiliki peran besar dalam memajukan perekonomian sebagai penyedia berbagai referensi utama bagi pembangunan, terutama di masa pemerintahan Orde Baru. Asosiasi-asosiasi ilmu sosial yang lain terus-menerus ditekan untuk mengikuti konsep-konsep pembangunan yang sudah ada yang menekankan pada pertumbuhan ekonomi, stabilitas dan tidak adanya ganggunan dari orde sosial.[32] Selain itu, terdapat juga institusi-institusi yang disetujui pemerintah yang memiliki staf akademisi ternama yang mencakup berbagai cabang ilmu sosial. Seperti yang telah disebutkan, salah satu institusi ternama dalam bidang kebijakan-kebijakan pembangunan dan hubungan internasional adalah CSIS. Institusi ini didirikan pada tahun 1977 oleh pejabat militer seperti Sudjono Humardani, Ali Moertopo, dan Benny Moerdani dengan restu Soeharto. Dengan dana dari pengusaha yang memiliki hubungan erat dengan pemerintah Orde Baru, CSIS lanjut mengabdi sebagai penasihat presiden dalam bidang ekonomi serta hubungan asing Indonesia.[33]

Tidak diragukan bahwa pada masa pemerintahan Orde Baru, ilmu sosial digunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan. Sejalan dengan arugumennya, Ignas Kleden berpendapat bahwa ilmu sosial di Indonesia pada masa pemerintahan Orde Baru memiliki fungsi "teknis" dalam berbagai bidang, yaitu politik, pendidikan, budaya, hukum, dan moral. Dengan kapasitas tersebut, menurut Kleden, ilmu sosial cenderung menghasilkan karya

kontrol media, serta menyusun pemilu yang bebas dan adil di tahun berikutnya. Periode ini mengakhiri tiga dekade pemerintahan otoriter pada rezim Orde Baru.

31 V.R. Hadiz (2006). *Op cit.*, hlm. 564-565.

32 P.M. Laksono (2005). '*Social Science* Associations' dalam V.R. Hadiz dan D. Dhakidae (ed.).*Op cit.*, hlm. 225-226.

33 A. Irwan (2005). '*Institutions, discourses and conflicts in economic thought*' dalam V.R. Hadiz dan D. Dhakidae (ed.). *Op cit.*, hlm. 43-44.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

yang tidak reflektif, teoritis, dan berorientasi birokrasi, daripada fokus pada konsep, kejelasan logis, dan ketepatan. Agar dapat bertahan dalam rezim otoriter, para pakar ilmu sosial harus mengadopsi "pelembutan bahasa" yang menyenangkan pemerintah.[34] Sehingga dapat diperdebatkan bahwa pemerintah Orde Baru berhasil menanamkan budaya "pragmatis" dan "kompromi" kepada para pakar ilmu sosial Indonesia. Kegiatan "akademik" mereka ditujukan bagi mereka yang dapat menyenangkan pemerintah. Walaupun terdapat sebagian kecil akademisi yang berusaha untuk menghindari hubungan kekuasaan dengan mengembangkan pandangan-pandangan kritis terhadap pemerintah, mereka harus terus-menerus menghadapi intimidasi dan tekanan yang biasanya berujung pada pengunduran diri, contohnya yang terjadi pada akademisi-akademisi ternama dari Universitas Kristen Satya Wacana, seperti Arief Budiman, Ariel Heryanto, George Junus Aditjondro, dan masih banyak lainnya.[35]

Di masa pasca-Orde baru, meskipun dengan kejatuhan pemerintahan Soeharto dan demokratisasi tiada henti dalam negeri, hubungan pada kekuasaan masih sangat berarti di antara para akademisi ilmu sosial. Banyak akademisi yang menjadi tertarik untuk bergabung dalam partai-partai politik yang jumlahnya kian bertambah, terutama sebelum pemilihan umum tahun 1999. Beberapa akademisi bahkan membentuk partai politik. Contohnya, Amien Rais (akademisi dan sarjana hubungan internasional di Universitas Gadjah Mada) membentuk Partai Amanat Nasional, yang membuatnya menjabat sebagai ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tahun 1999-2004. Yang lainnya menjadi pejabat partai serta menjabat sebagai anggota parlemen. Sebagai bagian dari ilmu sosial, akademisi hubungan internasional Indonesia tidak bisa kabur dari hubungan kekuasaan ini. Saat ini, kebanggaan dalam menjadi "intelektual" serta kredibilitas bagi para akademisi hubungan internasional berdasarkan pada hubungan dengan berbagai badan pemerintahan, terutama Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan. Penempatan bagi posisi-posisi diplomatis, walaupun jarang, masih dianggap sebagai pekerjaan prestisius yang tidak boleh dilewatkan oleh para akademisi hubungan internasional.[36]

34 I. Kleden (1986). 'Alternative social science as an Indonesian problematique'. *New Asian Visions*, Vol. 3 No.2, hlm. 6-22.

35 A. Heryanto (2003). '*Public Intellectuals, Media and Democratization: Cultural Politics of the Middle Classes in Indonesia*' dalam A. Heryanto and S.K. Mandal (ed.). '*Challenging Authoritarianism in Southeast Asia: Comparing Indonesia and Malaysia*'. London: Routledge-Curzon, hlm. 33-41.

36 Pada era pasca-Orde Baru, penempatan untuk posisi-posisi diplomatis harus disetujui oleh parlemen. Dalam situasi ini, calon-calon untuk posisi tersebut (jika terdapat kalangan akademisi) harus membangun jaringan dengan partai-partai politik kuat yang dukungannya sangat dibutuhkan.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

Peran negara dalam membentuk kegiatan akademik dan belajar-mengajar di institusi pendidikan tersier mencerminkan perannya dalam memandu kurikulum universitas. Melaui kegiatan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi/ Dirjen Dikti di Kementerian Pendidikan, kurikuluın perguruan tinggi dikontrol dengan ketat oleh pemerintah. Dirjen Dikti membagi mata kuliah ke dalam empat kategori: (i) Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU); (ii) Mata Kuliah Dasar Keahlian (MKDK); (iii) Mata Kuliah Keahlian (MKK); serta (iv) Mata Kuliah Penunjang (MKP).[37] Aturan ini berlaku bagi perguruan tinggi negeri maupun swasta, dan Kementerian Pendidikan melakukan pemeriksaan teratur untuk memastikan bahwa perguruan tinggi-perguruan tinggi di Indonesia mematuhi peraturan tersebut.

Di sebuah Jurusan Hubungan Internasional yang standar, misalnya, MKDU mencakup beberapa mata kuliah seperti Agama, Pancasila, Budaya Dasar, Bahasa Indonesia, Ilmu Logika, dan semacamnya; MKDK mencakup Pengantar Politik, Pengantar Sosiologi, Pengantar Ekonomi, Metode Statistik, Politik di Indonesia, dan semacamnya; MKK mencakup mata kuliah-mata kuliah spesialisasi seperti Politik Internasional, Ekonomi Politik Internasional, Teori Hubungan Internasional, Organisasi Internasional, dan lain sebagainya; MKP mencakup mata kuliah-mata kuliah yang dapat menunjang keahlian, misalnya bahasa asing (Inggris, Tiongkok, Perancis, dan Jepang). Masing-masing mahasiswa diwajibkan menyelesaikan 140 SKS, di mana 30% merupakan MKDU dan MKDK (Universitas Parahyangan 2006). Setiap perguruan tinggi harus menaati peraturan ini, sehingga perubahan-perubahan yang dilakukan kepada suatu mata kuliah tidak boleh mengubah komposisi dari keempat kategori tersebut.

Meskipun dengan adanya peraturan ini, beberapa pergurun tinggi, terutama perguruan tinggi negeri yang berada dalam posisi kuat untuk bernegosiasi dengan pemerintah, dapat merancang sendiri kurikulumnya dengan memperkenalkan mata kuliah-mata kuliah pilihannya. Contohnya, pada tahun 2007, Jurusan Hubungan Internasional Universitas Indonesia menyusun kurikulum baru yang memperbolehkan mahasiswanya untuk memilih spesialisasi dalam empat kelompok, di mana tiga kelompok pertama, sebagaimana yang dijelaskan oleh seorang anggota Jurusan Hubungan Internasional, berhubungan dengan Realisme, Liberalisme dan Konstruktivisme: (i) Studi Strategi dan

37 Nugroho, Adi (2005). 'Analisis dan Perancangan Sistem Informasi dengan Metodologi Beriorientasi Objek'. Bandung: Informatika, hlm. 151.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

Pertahanan yang mencakup mata kuliah-mata kuliah seperti Perang dan Perdamaian, Berpikir Strategis, Strategi Pertahanan Indonesia, serta Resolusi Konflik; (ii) Politik Ekonomi Internasional yang terdiri dari mata kuliah-mata kuliah seperti Politik Ekonomi Internasional Pembangunan, Politik Ekonomi Asia Tenggara, Politik Ekonomi Keuangan Internasional, serta Integrasi Politik Ekonomi Global dan Regional; (iii) Masyarakat Transnasional yang mencakup mata kuliah-mata kuliah seperti Gender dan Hubungan Internasional, Politik Lingkungan Global, Migrasi Global, serta Hak Asasi Manusia, Demokrasi dan Hubungan Internasional; serta (iv) Studi Regional yang mencakup mata kuliah-mata kuliah seperti Politik Global AS, Politik Global Tiongkok, Dinamika Regional Afrika dan Timur Tengah, Dinamika Regional Amerika, Dinamika Regional Eropa, Dinamika Regional Asia Tengah dan Selatan, serta Dinamika Regional Pasifik Selatan.[38] Namun rancangan baru ini hanya dapat dilakukan dalam jangka 70% dari total 140 SKS untuk mahasiswa sarjana, yang jumlahnya sama dengan sekitar 30 mata kuliah (diasumsikan bahwa tiap mata kuliah terdiri dari 3 SKS). Di sisi lain, perguruan tinggi diwajibkan untuk memasukkan 30% MKDU dan MKDK, sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Pendidikan Nasional.

Negara pun memiliki peran penting dalam promosi akademisi, terutama dari tingkat Lektor Kepala hingga Guru Besar. Tiap akademisi harus mengumpulkan sejumlah poin dari kegiatan mengajar, supervisi thesis, publikasi, presentasi makalah di seminar atau konferensi, serta pengabdian pada masyarakat. Posisi sebagai Lektor Kepala dibagi ke dalam tiga kategori (A = 400 poin; B = 500; dan C = 700). Status Guru Besar diberikan kepada mereka yang dapat mengumpulkan setidaknya 850 poin. Dosen dinilai berdasarkan Tridharma, yaitu: (i) mengajar dan bimbingan; (ii) penelitian, keterlibatan dalam konferensi dan publikasi; serta (iii) pengabdian masyarakat. Mengajar dan bimbingan merupakan komponen terpenting, karena mencakup sebagian besar poin. Penilaian dimulai dari *peer group*, lalu ke perguruan tinggi (melalui senat atau badan perwakilan guru besar). Dari perguruan tinggi, penilaian lain harus diberikan oleh komite khusus dari Kementerian Pendidikan, yang akan memutuskan apakah akademisi tersebut berhak dipromosikan. Calon yang berhasil akan mendapatkan Surat Keputusan/SK yang ditandangani oleh Menteri Pendidikan. Dalam pemerintahan Orde Baru, promosi menjadi

38 Untuk keterangan lebih lanjut mengenai program-programnya, lihat Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Indonesia (2007, hlm. 88-101).

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

Guru Besar melibatkan presiden, yang tanda tangannya muncul di SK untuk menunjuk seorang guru besar.

Kontrol negara terhadap kurikulum perguruan tinggi, terutama dalam penentuan kategori mata kuliah - bukan konten - Hubungan Internasional serta dalam penentuan kenaikan jabatan Lektor Kepala dan Guru Besar meninggalkan sedikit ruang bagi perguruan tinggi untuk merancang secara kreatif kurikulumnya. Perubahan apapun harus dalam batas peraturan, yang memberikan penekanan pada komposisi mata kuliah yang terdiri dari MKDU, MKDK, MKK, dan MKP. Perubahan di luar jalur ini dapat berakibat akreditasi rendah, yang dilakukan setiap 5 tahun sekali oleh Badan Akreditasi Nasional dari Kementerian Pendidikan. Untuk memastikan kenaikan jabatan staf pengajar menjadi guru besar, perguruan tinggi di Indonesia tidak memiliki pilihan lain selain mentaati seluruh peraturan negara. Selain itu, para akademisi (yang tidak masuk ke birokrasi negara) cenderung menghabiskan lebih banyak waktu mengajar dan bimbingan mahasiswa ketimbang penelitian, presentasi di konferensi dan publikasi, karena mengajar dan bimbingan mencakup sebagian besar penilaian untuk kenaikan pangkat. Keadaan ini berkontribusi terhadap kurangnya motivasi bagi para akademisi hubungan internasional Indonesia untuk mengejar penelitian dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan perkembangan keilmuan tersebut.

Di tahun 2005, pemerintah melakukan langkah lain untuk mengendalikan kegiatan belajar-mengajar di sekolah dan perguruan tinggi dengan diberlakukannya Undang-undang Guru dan Dosen (No. 14/2005). Meskipun tujuannya mulia, yaitu untuk meningkatkan profesionalitas dan kesejahteraan guru dan dosen, undang-undang ini mengundang kontroversi karena tiap guru dan dosen diharuskan memiliki sertifikat mengajar dengan melalui kursus bersertifikat yang diadakan oleh sekolah guru yang ditunjuk pemerintah (bagi guru sekolah) dan perguruan tinggi negeri (bagi dosen dengan jabatan di bawah guru besar). Beberapa kritik mengatakan bahwa sertifikasi ini hanyalah suatu proyek nasional untuk menyadap kas negara tanpa tujuan jelas.[39] Hingga kini, undang-undang ini belum diimplementasikan sepenuhnya bagi dosen perguruan tinggi karena kekurangan anggaran pemerintah dan kurangnya kejelasan mengenai pihak yang harus membiayai kursus untuk mendapatan sertifikasi tersebut. Namun demikian, para dosen khawatir dengan

39 Pikiran Rakyat (2008). 'Sertifikasi Dosen Bakal Temui Kendala' (*Lecturers Certification Will Face Obstacles*). Bandung, 23 Juli.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

peraturan baru ini, terutama jika mereka harus menghabiskan lebih banyak waktu dan tenaga untuk mengikuti kursus wajib demi mendapatkan sertifikasi.

Komersialisasi Pendidikan Tinggi

Beberapa tahun belakangan, berbagai perguruan tinggi Indonesia semakin komersial. Krisis ekonomi 1997 yang diikuti dengan turunnya nilai mata uang lokal, rupiah, terhadap mata uang asing mengurangi sangat banyak jumlah mahasiswa Indonesia yang mengejar pendidikan ke luar negeri, terutama ke Australia, Amerika Serikat, dan negara-negara Eropa (Inggris, Belanda, dan Jerman). Akibatnya, mereka beralih ke perguruan tinggi-perguruan tinggi lokal. Hal ini menjelaskan kenaikan fenomenal pendaftar ke berbagai perguruan tinggi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai upaya pemerintah untuk menswastakan perguruan tinggi, perguruan tinggi negeri didorong untuk menciptakan sumber keuangan sendiri.

Dengan status Badan Hukum Milik Negara, perguruan tinggi negeri mulai membuka berbagai kelas non-reguler (yang sebagian besar diadakan di siang bahkan malam hari), semisal program sarjana ekstensi, diploma dan pascasarjana eksekutif yang diadakan di malam hari bagi mereka yang bekerja penuh waktu.[40]Beberapa perguruan tinggi, seperti Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, dan Universitas Muhammadiyah di Yogyakarta, serta beberapa perguruan tinggi lain membuka "kelas internasional", di mana kelas-kelas diajar dalam bahasa Inggris dan para mahasiswa diharuskan membayar lebih (terkadang dua kali lipat biaya pendidikan normal) untuk layanan ekstra seperti akses penuh kepada komputer dan kelas ber-AC. Ketika mengajar di kelas-kelas non-reguler tersebut, para dosen biasanya digaji berdasarkan *cash-and-carry*. Dengan kelas-kelas tambahan ini, dapat dibayangkan bahwa para dosen menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengajar berbagai kelas, terkadang hingga larut malam demi keuntungan materi. Semakin sedikit akademisi yang menghabiskan waktu untuk penelitian, menulis makalah, atau berpartisipasi dalam konferensi akademik atau lokakarya yang dibiayai dengan sangat minim oleh pemerintah.

Cerita ini sedikit berbeda bagi perguruan tinggi swasta. Sejak awal, perguruan tinggi swasta tidak dibiayai oleh pemerintah. Mereka diharuskan menghasilkan pemasukan sendiri, utamanya dari biaya masuk mahasiswa,

40 Adi Nugroho (2005). *Op cit.*, hlm. 144.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

SPP, biaya SKS, dan biaya pendaftaran. Banyak perguruan tinggi yang melihat melonjaknya jumlah pendaftar pasca krisis ekonomi 1997 sebagai kesempatan untuk menambah penghasilan dengan meningkatkan jumlah mahasiswa terdaftar. Contohnya, di Jurusan Hubungan Internasional Universitas Parahyangan, Bandung, dengan 14 staf pengajar, sebelum 1997 biasanya jumlah mahasiswa baru hanya mencapai 100 orang per tahun. Namun pada 2008, angka itu meningkat hingga 250, meskipun terdapat keluhan dari staf pengajar jurusan tersebut[41]. Akibatnya, mata kuliah-mata kuliah harus dibagi ke dalam tiga atau empat kelas paralel dengan 50-60 mahasiswa di masing-masing kelasnya. Hal ini mengakibatkan meningkatnya beban mengajar bagi dosen. Untuk memastikan komitmen dosen ke kewajiban mengajarnya, universitas memberlakukan peraturan yang mengharuskan masing-masing dosen mengajar minimal 12 SKS per minggu (tiap kelas dianggap sama dengan dua hingga tiga SKS, bergantung pada nilai SKS tiap mata kuliah).

Menghadapi segala kemustahilan, beberapa perguruan tinggi mampu untuk menghasilkan karya-karya penelitian. Namun karya-karya ini pada dasarnya berorientasi proyek dan dilakukan dengan tujuan praktis untuk memenuhi pesanan dari berbagai donor internasional (LSM internasional, lembaga pembangunan internasional, dan institusi pemerintah asing) serta lembaga-lembaga atau kementerian pemerintah Indonesia. Untuk mendapatkan proyek-proyek tersebut, lembaga penelitian harus memiliki hubungan personal dengan donor internasional dan lembaga-lembaga negara, sekaligus keterampilan teknis. Seperti yang dikatakan Hadiz dan Dhakidae, "sebuah pasukan para pakar ilmu sosial terlatih dalam teknik pengembangan program penelitian, evaluasi proyek, dan sejenisnya, yang intinya membantu melegitimasi undang-undang pembangunan negara".[42]

Keterlibatan akademisi dalam penelitian dengan dasar proyek bukan tanpa alasan. Salah satu alasan jelas adalah umumnya profesi akademis bukan pekerjaan berpenghasilan besar di mana para pelakunya dapat menikmati keuntungan materi. Sehingga keterlibatan dalam proyek akan memberikan para akademisi penghasilan tambahan. Selain itu, seperti yang telah dibahas sebelumnya, hubungan kekuasaan telah mengubah gambaran kaum intelek di Indonesia, karena kredibilitas dan reputasi dibangun dengan adanya hubungan

41 Wawancara dengan Y.P. Hermawan, Ketua Jurusan Hubungan Internasional di Universitas Parahyangan, 3 September 2008.

42 V.R Hadiz dan D. Dhakidae (2005). '*Introduction*' dalam V.R. Hadiz dan D. Dhakidae (ed.). *Op cit.*, hlm. 8.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

dekat dengan sumber kekuasaan dan uang. Dalam artikelnya, Heru Nugroho menulis:

> Terdapat sedikit penghasilan dari menjadi dosen yang menghasilkan karya "serius" dan menjauhkan diri dari hal-hal materialistis, yang disebut "astetisme" oleh Weber. Para akademisi lebih tertarik untuk mengajar dan melakukan penelitian yang menghasilkan keuntungan, atau memastikan posisi birokrasi di kampus, ketua lembaga, atau asisten ketua. Jika kaum akademisi memiliki jaringan "sosial-politik" yang kuat, dia bisa mendapatkan posisi dalam struktur pemerintahan, contohnya, sebagai penasihat menteri, dengan tujuan utama meningkatkan akses ke kekuasaan demi meningkatkan penghasilan.[43]

Gambaran ini secara umum mewakili kehidupan akademik di Indonesia. Banyak tokoh "bukan intelektual" yang diwariskan dari pemerintahan Orde Baru, di mana para akademisi ditekan untuk menghasilkan karya-karya yang memiliki fungsi praktis untuk menyokong undang-undang pembangunan negara. Kegagalan untuk menghasilkan karya seperti itu akan mengakibatkan terisolirnya sang akademisi dari kemewahan hubungan kepada pemangku kekuasaan. Meskipun hubungan kekuasaan sangat kuat pada masa pemerintahan Orde Baru, saat ini para akademisi belum sepenuhnya berhasil melepaskan dirinya dari kekuasaan. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, terbukanya kesempatan di bidang politik melalui partai politik telah mendorong beberapa akademisi hubungan internasional untuk memasuki arena politik dengan menjadi anggota parlemen mewakili berbagai partai politik.

Penelitian berbasis proyek cenderung untuk menodai tulisan-tulisan akademik dengan sentimen nasionalis. Pengalaman dari *Parahyangan Centre for International Studies* (PACIS) di Universitas Parahyangan, Bandung, dapat menggambarkan argumen ini. Pada bulan Maret 2002, PACIS melangsungkan proyek penelitian di bawah kontrak dengan Badan Penelitian dan Pengembangan/ Balitbang dari Kementerian Hubungan Luar Negeri. Topik yang diberikan oleh Balitbang adalah "intervensi kemanusiaan", dengan penekanan khusus mengenai posisi Indonesia dalam debat-debat intervensi kemanusiaan. Ketika laporan menganjurkan bahwa Indonesia sebaiknya mendukung intervensi kemanusiaan dengan dasar "tanggung jawab untuk melindungi", pendapat tersebut mendapat kritikan keras dari staf Balitbang dan kalangan akademik perguruan tinggi-perguruan tinggi yang mengikuti lokakarya karena bersifat

43 H. Nugroho (2005). '*The Political Economy of Higher Education: The University as an arena for the struggle for power*' dalam V.R. Hadiz dan D. Dhakidae (ed.) *Op cit.* hlm. 144.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

"anti-nasionalis". Perwakilan dari Kementerian Luar Negeri berpendapat bahwa intervensi oleh pihak asing (untuk alasan apapun) seharusnya tidak ditolerir karena dapat mengancam kedaulatan suatu negara, sementara PACIS menyatakan bahwa kemungkinan intervensi atas nama solidaritas kemanusiaan dan pencegahan pelanggaran keras hak asasi manusia.[44] Kementerian Hubungan Luar Negeri selanjutnya menyarankan revisi dan PACIS tidak memiliki pilihan lain selain mentaatinya.

Jelas bahwa komersialisasi pendidikan, terutama setelah krisis ekonomi 1997, telah mendorong kalangan akademik untuk kegiatan-kegiatan penghasil uang daripada penelitian non-profit, publikasi, lokakarya, serta konferensi. Ironisnya, beberapa akademisi (terutama mereka yang hanya memikirkan keuntungan materi dan tidak tertarik dengan penelitian) melihat bahwa meningkatnya beban mengajar merupakan solusi *win-win*, karena mereka mendapatkan penghasilan tambahan dari mengajar kelas-kelas diluar kewajiban minimum. Bagi mereka yang tertarik dengan penelitian, perguruan tinggi mendorong mereka untuk mencari lebih banyak uang melalui penelitian berbasis proyek dari berbagai lembaga eksternal untuk membangun pusat-pusat penelitian baru. Pada masa reformasi demokrasi dan menjamurnya konflik internal di Indonesia, penelitian mengenai topik-topik seperti demokratisasi dan konflik bertambah populer di antara donor (baik domestik maupun asing) yang menyediakan dukungan finansial bagi pekerjaan mengenai topik-topik tersebut. Akibatnya, akademisi terpaksa menghasilkan lebih banyak penelitian berbasis proyek dengan lebih banyak aplikasi praktis dan keuntungan langsung, dibandingkan dengan makalah-makalah teoritis atau publikasi.[45]

Kesimpulan

Makalah ini telah membahas warisan sejarah, hubungan politik serta komersialisasi pendidikan tinggi yang telah menciptakan paradoks dalam hubungan internasional sebagai sebuah bidang studi di Indonesia. Di saat hubungan internasional (sebagai bidang studi yang relatif baru) mendapat pengakuan lebih besar yang ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah peminat ke jurusan-jurusan Hubungan Internasional di penjuru negeri, kontribusi dari

44 Wawancara dengan Mangadar Situmorang, mantan Direktur PACIS serta koordinator proyek penelitian, 11 September 2008.

45 H. Nugroho (2005). *'The Political Economy of Higher Education: The University as an Arena for the Struggle for Power'* dalam V.R. Hadiz dan D. Dhakidae (ed.).*Op cit.*, hlm. 144.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

akademisi hubungan internasional Indonesia, baik dalam negeri maupun mancanegara, masih sangat terbatas. Warisan sejarah yang menghubungkan akademisi hubungan internasional Indonesia ke dalam tradisi Realis memberikan sedikit ruang bagi akademisi hubungan internasional di negeri ini untuk mengambil isu-isu global pasca-Perang Dingin yang membutuhkan pandangan yang lebih segar dan terbuka untuk mencakup perspektif lain, seperti peran pelaku non-pemerintahan yang berinvestasi dalam moralitas global, kontruksi teoritis baru mengenai hubungan internasional, serta meningkatnya perhatian bagi keamanan manusia yang menempatkan para pelaku pemerintahan serta non-pemerintahan dalam peran-peran komplementer. Sayangnya, lama setelah Perang Dingin telah usai, keadaan ini masih berlangsung, terutama di perguruan tinggi kecil yang akses terhadap literatur hubungan internasional terbaru sangat terbatas. Sebagian besar akademisi di perguruan tinggi-perguruan tinggi tersebut masih menggunakan literatur-literatur lama yang disisipi dengan tradisi Realis.

Tradisi akademik Indonesia yang mempertimbangkan hubungan dengan pemangku kekuasaan sebagai keadaan yang harus dihormati dan memiliki kredibilitas tampaknya mendorong sebagian besar akademisi di bidang ilmu sosial – termasuk Hubungan Internasional – untuk berkonsentrasi pada kegiatan-kegiatan yang tidak mencerminkan dan tidak teoritis yang tidak berkontribusi bagi kemajuan bidang keilmuan tersebut. Pandangan-pandangan berlawanan dan wacana Marxisme dilarang keras oleh pemerintahan militer karena ketakutan akan subversi komunis. Usaha apapun untuk melakukan analisa mandiri dapat berakibat penghilangan, penyiksaan, dan berbagai jenis teror oleh aparat keamanan. Hal ini menjelaskan ketiadaan teori-teori Marxisme dalam studi hubungan internasional di Indonesia. Menghabiskan banyak waktu membangun hubungan dengan pemangku kekuasaan dan melakukan kegiatan-kegiatan yang menambah penghasilan mengakibatkan kalangan akademisi hubungan internasional cenderung memiliki kertertarikan yang rendah dengan melakukan penelitian atau kegiatan lainnya yang berkontribusi terhadap perkembangan bidang keilmuannya. Bagi mereka yang tidak memiliki jaringan politis, mengajar dan membimbing mahasiswa (dua komponen utama dalam penilaian untuk kenaikan pangkat) jauh lebih menarik daripada penelitian dan melibatkan diri dalam seminar, lokakarya maupun publikasi karena menghasilkan lebih banyak keuntungan materi maupun non-materi. Bahkan jika ada penelitian mengenai topik-topik tertentu, hal ini pada dasarnya

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

merupakan penelitian berlandaskan proyek untuk kegunaan praktis institusi yang membiayai tanpa implikasi rekflektif dan teoritis.

Di saat yang sama, perkembangan kurikulum perguruan tinggi tampak sangat lamban. Kontrol negara terhadap kurikulum universitas membuat perubahan program kuliah sangat sulit. Badan Akreditasi Nasional milik pemerintah bertanggungjawab terhadap pengawasan kurikulum, dan pergerakan di luar peraturan akan merugikan status akreditasi perguran tinggi tersebut. Sementara itu, komersialisasi perguruan tinggi dalam beberapa tahun belakangan ini telah berkontribusi terhadap karakter "tidak intelek" dari para akademisi hubungan internasional Indonesia. Tekanan untuk menciptakan penghasilan telah mendorong perguruan tinggi untuk membuka kelas-kelas non-reguler seperti kelas sarjana ekstensi, kelas malam eksekutif pascasarjana, kelas internasional, dan lain-lain. Akibatnya, para akademik dihadapkan pada beban mengajar yang meningkat, walaupun terdapat tambahan keuntungan dari pembayaran kelas-kelas non-reguler. Akibat selanjutnya adalah, dengan ketiadaaan keterlibatan akademik di bidang-bidang penelitian terbaru dan penelitian independen yang mungkin mengkritik peraturan dan prioritas negara, perspektif-perspektif lama terus mendominasi ruang kelas.

Semua masalah yang telah dipaparkan di atas tidak eksklusif untuk bidang keilmuan hubungan internasional, yang termasuk bidang studi baru di Indonesia. Cabang-cabang yang lebih tua dari bidang-bidang ilmu sosial seperti ekonomi, politik, sosiologi, antropologi, sejarah, dan beberapa lainnya menghadapi permasalahan yang sama. Hal ini mungkin menjelaskan mengapa kontribusi para akademisi Indonesia di kancah regional dan internasional tetap rendah, sebagaimana yang disampaikan oleh Hans Dieter Evers.[46] Dalam Hubungan Internasional, meskipun terdapat beberapa akademisi yang menulis buku, bab buku, atau artikel dalam jurnal internasional, kecenderungan umum dari kegiatan akademik di antara kalangan akademisi Hubungan Internasional Indonesia adalah mengajar dan membimbing mahasiswa di satu universitas atau lebih. Meningkatnya jumlah mahasiswa yang lulus dari perguruan tinggi mancanegara dan kembali ke tanah air untuk mengajar Hubungan Internasional di berbagai perguruan tinggi tidak otomatis mengubah sikap terhadap penelitian dan publikasi. Sebaliknya, lulusan-lulusan muda dari mancanegara seringkali mengikuti langkah pendahulunya, yaitu dengan membangun jaringan dengan

46 Hans-Dieter Evers, Rudiger Korff (2000). 'Globalization, local knowledge, and the growth of ignorance', *Southeast Asia Journal of Social Science*, Vol. 28 No. 1, hlm. 13

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

para pemangku kekuasaan, menghabiskan banyak waktu mengajar, serta dalam melaksanakan penelitian berlandaskan proyek demi keuntungan materi. Tidak dapat dibayangkan perubahan drastis kecuali terdapat sebuah revolusi dalam manajemen perguruan tinggi secara umum.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.

Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

BAB 3

PERDEBATAN-PERDEBATAN BESAR DALAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

Pengantar

Sebagai disiplin ilmu yang sarat dengan diskursus dan datang dari berbagai cabang ilmu sosial lainnya seperti ilmu politik, filsafat, hukum internasional, dan sosiologi maka perkembangan studi HI diwarnai oleh perdebatan-perdebatan besar yang mempertemukan berbagai perspektif, paradigma, dan metode yang menentukan arah perkembangan studi HI. Besarnya pengaruh perdebatan besar bagi perkembangan studi HI digambarkan secara lugas oleh David A. Lake sebagai berikut:

> *The history of International Relations is typically told as a series of Great Debates, epic battles between titans that shaped the direction of inquiry and knowledge for decades afterwards. What was at stake in one of these debates has been - and continuous to be - reinterpreted in light of developments in the real world and current disciplinary struggles.*[1]
>
> (Sejarah Hubungan Internasional seringkali dipahami sebagai serangkaian perdebatan besar di antara para pakar yang menentukan arah perkembangan penelitian dan pengetahuan di bidang ini sampai berpuluh-puluh tahun ke depan. Apa yang dipersoalkan di dalam perdebatan tersebut telah dan akan terus dipahami kembali dalam konteks perkembangan dunia nyata dan perkembangan disiplin ilmu dewasa ini).

Pendapat Lake tersebut menyiratkan bahwa perkembangan studi HI sebagai bidang kajian tidak lepas dari berbagai perdebatan besar yang melibatkan para

1 David A. Lake (2013). 'Theory is dead, long live theory: The end of the Great Debates and the rise of eclecticism in International Relations'. *European Journal of International Relations*, Vol. 19 No. 3, hlm. 568.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

pakar penting yang ikut menentukan arah perkembangan teori dan kajian studi HI.

Perdebatan Besar Pertama terjadi pada dekade 1940-an ketika dunia menghadapi tantangan besar akibat gagalnya Liga Bangsa-Bangsa (LBB) dalam menegakkan perdamaian dunia pada pasca Perang Dunia Pertama (1914-1919) sehingga tidak mampu mencegah pecahnya Perang Dunia Kedua (1939-1945). Pada saat itu para pemikir Realis – terutama E.H. Carr dan H.J. Morgentahu – melakukan "serangan" terhadap para pemikir idealis seperti Alfred Zimmern, Norman Angell yang dianggap mengabaikan faktor kekuasaan (*power*) dalam menganalisis hubungan antar negara. Bagi mereka, kegagalan LBB dalam menegakkan perdamaian dunia pasca Perang Dunia Pertama adalah karena organisasi itu dibangun atas dasar semangat utopia untuk membangun perdamaian abadi yang ternyata gagal total karena kurang memperhitungkan realitas dalam hubungan antar bangsa, yakni faktor kekuasaan yang dapat membuat negara saling bersikap agresif satu sama lain. Perdebatan inilah yang mewarnai munculnya perspektif Idealisme/Liberalisme dan Realisme dalam studi HI.

Perdebatan Besar Kedua terjadi pada dekade 1960-an ketika sejumlah pemikir HI seperti Morton A. Kaplan, Karl W. Deutsch, Kenneth N. Waltz, dan beberapa pemikir lainnya menyadari pentingnya penerapan metode saintifik yang memfokuskan pada objektivitas penelitian dan penerapan metode ilmiah yang mengacu pada pencarian hubungan antar variabel penelitian, pengujian teori, dan validasi data dalam penelitian HI untuk menjadikan studi HI sebagai disiplin ilmu yang memenuhi karakter ilmiah. Upaya ini menghadapkan mereka dengan kaum historis atau tradisionalis – terutama Hedley Bull – yang membela *status quo* dengan menyatakan bahwa metode historis yang lebih menekankan pada sekuensi sejarah adalah metode yang paling tepat bagi studi HI. Tentang syarat ilmiah bahwa studi HI harus bersifat objektif dan bebas nilai (*value-free*), kaum tradisionalis menyatakan bahwa unsur subjektivitas dalam metode historis merupakan suatu yang tidak dapat dihindari. Mereka bahkan meyakini bahwa subjektivitas dan masuknya nilai serta moralitas dalam kajian HI bukanlah kontaminasi sebagaimana dikatakan kaum saintis melainkan suatu kekhasan studi HI yang harus terus dipelihara. Perdebatan yang dimanifestasikan dalam tulisan Morton Kaplan dan Hedley Bull di jurnal ilmiah *World Politics* edisi tahun 1966 ini menghadapkan metode historis/tradisionalis dengan metode saintifik/positivis dalam studi HI.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

Perdebatan Besar ketiga yang terjadi sejak 1970-an tampak lebih kompleks daripada perdebatan-perdebatan sebelumnya. Beberapa pakar menyebutnya sebagai perdebatan antara Realisme, Liberalisme, dan Radikalisme.[2] Beberapa pakar lainnya menyebut Perdebatan Besar Ketiga sebagai perdebatan antara "positivis-empiris" (NeoRealisme dan Neo-Liberalisme) berhadapan dengan "post-positivis" (Teori-Teori Reflektivis: Teori Kritis, Feminisme, Posmodernisme, dan Konstruktivisme).[3] Terlepas dari kompleksitas perdebatan tersebut, kita dapat menangkap nuansa pemberontakan dalam studi HI, di mana kelompok yang memisahkan diri dari tradisi berpikir positivis-empiris atau teori-teori arus utama (*mainstream theories*), menganggap teori HI perlu diperkaya dengan pemikiran-pemikiran di luar arus utama (*mainstream*) seperti Feminisme, Posmodernisme, dan Konstruktivisme. Beberapa pakar lainnya seperti Ray Maghroori dan Bennett Ramberg (1982) menyatakan bahwa Perdebatan Besar Ketiga mempertemukan Realisme klasik dengan Globalis/Transnasionalis menyangkut peran negara dalam politik dunia. Berbeda dengan Realisme klasik yang cenderung menganggap negara sebagai aktor utama jika bukan satu-satunya aktor dalam hubungan internasional, kaum Globalis atau Transnasionalis lebih membuka kesempatan bagi aktor-aktor non-negara seperti Perusahaan Transnasional (*Transnational Corporations/TNCs*), Organisasi Non-Pemerintah Transnasional (*International Non-Governmental Organizations/INGOs*), dan Organisasi Masyarakat Sipil Global (*Global Civil Society Organizations/GCSOs*) untuk ikut meramaikan politik internasional.

Dapat ditambahkan pula bahwa pada tahun 2005 muncul perdebatan yang mempertemukan Realisme berhadapan dengan Mazhab Inggris (*English School*). Debat ini bermula ketika John Mearsheimer memberikan kuliah untuk mengenang (*memorial lecture*) Prof. E.H. Carr yang isinya memuji-muji dedikasi Prof. Carr bagi perkembangan Realisme dalam studi HI dan pada saat bersamaan "menyerang" tradisi berpikir Inggris yang dianggapnya makin bergeser ke arah pemikiran Idealis. Kuliah yang dimuat di jurnal ilmiah *International Relations* tersebut mendapat tanggapan dari para mantan ketua BISA (*British International Studies Association*) yang kemudian mengarah

---

2 Ole Waever (1996). 'The Rise and Fall of the Inter-Paradigm Debate'. *International Theory: Positivism and Beyond*, hlm. 149-150; Brian Schmidt (2013). '*International Relations and the First Great Debate*'. London: Rourledge, hlm. 65.

3 Robert O. Keohane (1988). 'International Institutions: Two Approaches'. *International Studies Quarterly*. Vol. 32 No. 4, hlm. 379-381; Yosef Lapid (1989). 'The third debate: On the prospects of international theory in a post-positivist era'. *International Studies Quarterly*, Vol. 33 No. 3, hlm. 235-236.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

Perdebatan Besar ketiga yang terjadi sejak 1970-an tampak lebih kompleks daripada perdebatan-perdebatan sebelumnya. Beberapa pakar menyebutnya sebagai perdebatan antara Realisme, Liberalisme, dan Radikalisme.[2] Beberapa pakar lainnya menyebut Perdebatan Besar Ketiga sebagai perdebatan antara "positivis-empiris" (NeoRealisme dan Neo-Liberalisme) berhadapan dengan "post-positivis" (Teori-Teori Reflektivis: Teori Kritis, Feminisme, Posmodernisme, dan Konstruktivisme).[3] Terlepas dari kompleksitas perdebatan tersebut, kita dapat menangkap nuansa pemberontakan dalam studi HI, di mana kelompok yang memisahkan diri dari tradisi berpikir positivis-empiris atau teori-teori arus utama (*mainstream theories*), menganggap teori HI perlu diperkaya dengan pemikiran-pemikiran di luar arus utama (*mainstream*) seperti Feminisme, Posmodernisme, dan Konstruktivisme. Beberapa pakar lainnya seperti Ray Maghroori dan Bennett Ramberg (1982) menyatakan bahwa Perdebatan Besar Ketiga mempertemukan Realisme klasik dengan Globalis/Transnasionalis menyangkut peran negara dalam politik dunia. Berbeda dengan Realisme klasik yang cenderung menganggap negara sebagai aktor utama jika bukan satu-satunya aktor dalam hubungan internasional, kaum Globalis atau Transnasionalis lebih membuka kesempatan bagi aktor-aktor non-negara seperti Perusahaan Transnasional (*Transnational Corporations/TNCs*), Organisasi Non-Pemerintah Transnasional (*International Non-Governmental Organizations/INGOs*), dan Organisasi Masyarakat Sipil Global (*Global Civil Society Organizations/GCSOs*) untuk ikut meramaikan politik internasional.

Dapat ditambahkan pula bahwa pada tahun 2005 muncul perdebatan yang mempertemukan Realisme berhadapan dengan Mazhab Inggris (*English School*). Debat ini bermula ketika John Mearsheimer memberikan kuliah untuk mengenang (*memorial lecture*) Prof. E.H. Carr yang isinya memuji-muji dedikasi Prof. Carr bagi perkembangan Realisme dalam studi HI dan pada saat bersamaan "menyerang" tradisi berpikir Inggris yang dianggapnya makin bergeser ke arah pemikiran Idealis. Kuliah yang dimuat di jurnal ilmiah *International Relations* tersebut mendapat tanggapan dari para mantan ketua BISA (*British International Studies Association*) yang kemudian mengarah

---

2 Ole Waever (1996). 'The Rise and Fall of the Inter-Paradigm Debate'. *International Theory: Positivism and Beyond*, hlm. 149-150; Brian Schmidt (2013). *'International Relations and the First Great Debate'*. London: Rourledge, hlm. 65.

3 Robert O. Keohane (1988). 'International Institutions: Two Approaches'. *International Studies Quarterly*. Vol. 32 No. 4, hlm. 379-381; Yosef Lapid (1989). 'The third debate: On the prospects of international theory in a post-positivist era'. *International Studies Quarterly*, Vol. 33 No. 3, hlm. 235-236.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

pada perdebatan antara Realisme berhadapan dengan Mazhab Inggris. Banyak yang menyatakan bahwa perdebatan di era 2000-an ini tidak lebih dari sekadar upaya untuk menghidupkan kembali Perdebatan Besar Pertama (*First Great Debate*) antara Idealisme /Liberalisme vs. Realisme pada dekade 1940-an yang dilakukan dalam konteks pasca Perang Dingin.

Berbeda dengan situasi Perang Dunia Kedua di mana realitas internasional yang menonjolkan pada kekuasaan dan pentingnya penggunaan kekuatan militer negara telah menempatkan Realisme pada posisi di atas angin,[4] perdebatan Realisme vs. Mazhab Inggris pada pasca Perang Dingin di mana penggunaan kekuatan militer Negara dalam konflik mulai berkurang signifikansinya menempatkan Mazhab Inggris pada posisi di atas angin. Keadaan terbalik ini bukan semata-mata karena kekuatan argumentasi masing-masing perspektif, melainkan merupakan akibat dari perubahan konteks politik internasional yang pada dekade 1940-an sangat bersifat militeristik dan pada era 2000-an lebih bersifat non-militeristik. Mengingat besarnya nuansa perdebatan antara John Mearsheimer berhadapan dengan sejumlah pakar HI Inggris dan sekaligus mantan ketua BISA seperti Paul Rogers, Richard Little, Christopher Hill, Chris Brown, dan Ken Booth, maka tidak berlebihan jika dikatakan bahwa persilangan pendapat di jurnal *International Relations* edisi tahun 2005 tersebut merupakan bagian dari Perdebatan-perdebatan Besar dalam studi Hubungan Internasional, yakni Perdebatan Besar Keempat (*Fourth Great Debate*).

Bab ini akan membahas Perdebatan-perdebatan Besar (*Great Debates*) dalam studi HI. Pembahasan akan diawali dengan pro dan kontra mengenai Perdebatan Besar itu sendiri. Bagian selanjutnya akan me-*review* masing-masing Perdebatan Besar dalam studi HI, mulai dari Perdebatan Besar Pertama (Idealisme/Liberalisme vs. Realisme), Perdebatan Besar Kedua (Historisis/ Tradisionalis vs. Saintifis), Perdebatan Besar Ketiga (Positivis-Empiris vs. Post-Positivis/radikal/Reflektivis), hingga ke Perdebatan Besar Keempat (Realisme vs. Mazhab Inggris).

4 Darshan Vigneswaran, Joel Quirk (2004). 'Department of International Relations'. *International relations' first great debate: Context and tradition*'. Canberra: Australian National University, hlm. 3.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

Kontroversi Perdebatan Besar

Terlepas dari kenyataan bahwa teori-teori HI berkembang dari perbenturan (*clash*) antara berbagai teori dan bahwa disiplin HI dibangun dari hasil Perdebatan-perdebatan Besar (*Great Debates*) yang mempertemukan pakar-pakar ternama di dunia, tetapi bagaimanapun juga Perdebatan Besar sebagai fenomena penting bagi perkembangan studi HI tetap menuai kontroversi. Ada beberapa hal yang menyebabkan kontroversi mengenai Perdebatan Besar dalam studi HI. Pertama, banyak yang kurang yakin bahwa yang disebut Perdebatan Besar sungguh-sungguh merupakan perdebatan. Mereka melihat bahwa apa yang disebut Perdebatan Besar bukanlah proses pembentukan teori sebagaimana dirumuskan oleh Hegel sebagai proses: Tesis – Antitesis – Sintesis. Tidak juga menyerupai proses Revolusi Ilmiah (*Scientific Revolution*) ala Thomas Kuhn: Paradigma I – Anomali – Paradigma II – Anomali – *Normal Science*. Mereka menyatakan bahwa apa yang kita kenal sebagai Perdebatan Besar dalam studi tidak lebih merupakan perdebatan tentang nomenklatur dan kategori konsep-konsep dalam studi HI.[5] Kedua, keraguan sejumlah pakar bahwa Perdebatan Besar benar-benar berkontribusi terhadap perkembangan teori HI. Banyak yang merasa kecewa bahwa Perdebatan Besar tersebut cenderung terus-menerus terjadi dan tidak pernah tuntas, sehingga hampir tidak ada sesuatupun yang dapat dijadikan hasil akhir yang berguna bagi perkembangan studi HI.[6] Ketiga, adanya kecenderungan eklektisisme atau sintesis dalam teori HI sehingga membuat Perdebatan Besar menjadi kurang relevan bagi perkembangan teori-teori HI kontemporer. Robert Keohane (1984), misalnya, mencoba menggabungkan teori Realisme (Stabilitas Hegemony) dengan Liberalisme (Teori Rezim Internasional) untuk menjelaskan kerja sama antar negara pada masa pasca Perang Dunia. Bahkan sekelompok pakar studi keamanan (*security studies*) seperti Stephen Walt (1987), Jack Snyder (1991), Steven van Evera (1991), dan Barry Buzan (1993) mencoba menggabungkan faktor kekuasaan (*power*) yang diusung oleh Realisme dengan keinginan untuk menjalin kerja sama keamanan (*security cooperation*) dalam menciptakan komunitas keamanan (*security community*) di tingkat regional dan internasional.

5 M. Kurki, C. Wight (2007). 'International relations and social science'. *International relations theories: Discipline and diversity*. Hlm. 19-20.

6 Yosef Lapid (1989). 'The third debate: On the prospects of international theory in a post-positivist era'. *International Studies Quarterly*, Vol. 33, No. 3, hlm. 236.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

Kecenderungan sintesis tidak saja merupakan kecenderungan baru dalam perkembangan teori-teori HI tetapi juga mengakhiri Perdebatan-Perdebatan Besar dalam studi HI. Sebagaimana dikatakan oleh David A. Lake bahwa narasi perkembangan teori HI bergeser menjadi upaya pencarian teori jalan tengah (*eclectic*).[7] Dengan nada yang sama, Andrew Moravcsik menyatakan bahwa kecenderungan sintesis dalam dalam teori-teori HI terkait dengan perkembangan fenomena hubungan antar negara sejak pecahnya Perang Dunia Pertama dan Kedua, Perang Dingin, munculnya moralitas global mengenai perlindungan Hak Asasi Manusia, dan proses evolusi organisasi regional, terutama Uni Eropa yang mengisyaratkan kebutuhan akan teori-teori politik internasional yang eklektik.[8]

Namun demikian, tidak semua pakar HI bersepakat untuk mendukung kecenderungan sintesis atau eklektisisme dalam teori-teori HI. Bagi mereka yang tergabung ke dalam pemikiran "reflektivis" seperti pakar feminis, posmodernis, teori kritis dan konstruktivis teori HI seharusnya membuka luas bagi perdebatan-perdebatan baru dari sisi ontologis dan epistemologis untuk menghindari ortodoksi tunggal dan demi perkembangan disiplin ilmu itu sendiri.[9] Pada kenyataannya Perdebatan Besar dalam teori HI tetap berlangsung dan acap kali melibatkan paradigma yang berbeda, terutama antara kaum positivis dan post-positivis sebagaimana tercermin dalam berbagai kritik yang dilontarkan oleh para pemikir feminis, posmodernis, teori kritis dan konstruktivis terhadap teori-teori arus utama (*mainstream*) seperti Realisme klasik, Neo-Realisme, Idealisme dan Neoliberalisme. Kenyataan ini menunjukkan bahwa perkembangan teori-teori HI diwarnai oleh dua kecenderungan kontradiktif: sintesis dan perdebatan.

Mengenai Perdebatan Besar itu sendiri, para pakar HI memiliki pendapat yang berbeda-beda. Pandangan konvensional menyatakan bahwa terdapat tiga Perdebatan Besar dalam Hubungan Internasional, yakni: perdebatan pertama pada dekade 1940-an antara perspektif Idealis/Liberalis versus Realis, perdebatan kedua pada dekade 1960-an tentang metode antara kaum tradisionalis/historis versus saintifik, dan perdebatan ketiga pada dekade 1990-an tentang paradigma antara kaum positivis/empiris versus post-positivis/reflektivis. Sementara itu sejumlah pakar seperti Ken Booth, Michael Cox, dan

7 David A. Lake (2013), *Loc cit.*, hlm. 568.

8 Andrew Moravcsik (2003). 'Theory Synthesis in International Relations: Real not Metaphysical'. *International Studies Review*, Vol. 5, No. 1, hlm. 162.

9 Yosef Lapid (1989). 'The third debate: On the prospects of international theory in a post-positivist era'. *International Studies Quarterly*, Vol. 33, No. 3, hlm. 236; Andrew Moravcsik (2003). *Op cit.*, hlm. 133.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

Tim Dunne (2000) menyatakan bahwa telah terjadi lima Perdebatan Besar dalam studi HI: perdebatan besar pertama merupakan perdebatan ontologis antara perspektif Idealisme/Liberalisme versus Realisme, perdebatan kedua merupakan perdebatan epistemologis antara metode Tradisionalis /Historis / Klasik versus metode Saintifik/ Behavioralis/Positivis, perdebatan ketiga yang merupakan perdebatan paradigmatik antara paradigma empiris-positivis versus paradigma postpositivis, perdebatan keempat antara Realisme versus mazhab Inggris (*the English School*), dan perdebatan kelima antara Neo-Realisme versus Realisme kritis (*Critical Realism*). Dalam konteks ini, penulis mencoba mengikuti pandangan konvensional yang membatasi jumlah perdebatan pada empat Perdebatan Besar dalam studi HI karena perdebatan kelima sebagaimana dinyatakan Ken Booth, Michael Cox, dan Tim Dunne (2000) merupakan variasi dari Perdebatan Ketiga versi pandangan konvensional.

Perdebatan Besar Pertama: Realisme vs. Idealisme/Liberalisme

Perdebatan Besar Pertama sesungguhnya lebih mencerminkan superioritas perspektif Realisme atas perspektif Idealisme/Liberalime dalam studi Hubungan Internasional. Betapa tidak, apa yang kita kenal sebagai Perdebatan Besar Pertama dalam studi HI ternyata adalah serangan telak yang dilakukan dua pemikir Realis, E.H. Carr, yang kemudian diikuti oleh H.J. Morgenthau terhadap pemikiran kaum Idealis yang dianggap gagal mencegah pecahnya Perang Dunia Kedua pada dekade 1930-an.[10] Sekalipun E.H. Carr tidak secara spesifik menyerang karya perorangan pemikir Idealis pada masa itu, tetapi di dalam bukunya *The Twenty Years Crisis, 1919-1939* (1939), Carr seringkali merujuk pada karya Norman Angell *The Great Illusion* (1910) dan Alfred Zimmern *The League of Nations and the Rules of Law* (1936) sebagai sasaran kritiknya.

Pada awal munculnya studi HI sebagai disiplin ilmu mandiri pada tahun 1919, literatur studi HI didominasi oleh karya-karya kaum Idealis/Liberalis seperti Norman Angell, Leonard Woolf, dan Alfred Zimmern. Dalam karyanya *The Great Illusion* (1910), Angell menyatakan bahwa sejalan dengan bangkitnya peradaban ekonomi modern (*modern economic civilization*) dan merebaknya praktik kenegaraan modern (*modern statecraft*), maka negara-negara makin

10 Lucian M. Ashworth (2002). 'Did the realist-idealist great debate really happen? A revisionist history of international relations'. *International Relations*, Vol. 16, No.1, hlm. 34.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

dituntut untuk menjalin kerja sama dalam suasana saling ketergantungan yang pada gilirannya dapat menegakkan perdamaian internasional. Dengan nada yang sama, Leonard Woolf dalam karyanya *International Government* (1936), menyatakan bahwa dalam rangka upaya untuk mencegah peperangan, negara-negara di dunia harus membentuk semacam "pemerintaban internasional" (*international government*) yang memiliki otoritas untuk menegakkan hukum internasional dalam rangka memelihara ketertiban dunia. Otoritas internasional hendaknya mengonsentrasikan pada aktivitas komunikasi internasional, pelayanan kesehatan masyarakat terutama penanggulangan penyakit menular, pengelolaan perdagangan dan industri, serta menjaga moralitas dan mencegah kriminalitas. Sementara itu, Alfred Zimmern dalam karyanya *The League of Nations and the Rules of Law* (1936), menyatakan bahwa pada masa pasca perang Liga Bangsa-Bangsa dibentuk dengan maksud agar perilaku agresif dan jahat negara-negara dapat dicegah dengan cara-cara persuasif dan manusiawi. Belajar dari sistem-sistem yang dibangun pada masa sebelum perang, maka Liga Bangsa-Bangsa seharusnya diangun atas dasar kesukarelaan (*volunterism*) untuk menegakkan perdamaian dunia. Para pemikir idealis ini sangat dipengaruhi oleh pandangan Liberal. Mereka bersepakat bahwa manusia pada hakikatnya merupakan makhluk yang rasional dan kooperatif sehingga memiliki modal dasar yang cukup kuat untuk menegakkan perdamaian dunia melalui berbagai kerja sama saling menguntungkan.

Namun situasi pada dekade 1930-an hingga 1940-an tampak bertentangan dengan premis kaum Idealis, karena setelah diguncang oleh Perang Dunia Pertama pada 1914-1919, masyarakat dunia tidak berhasil menghentikan agresivitas Jerman dan Perang Dunia Keduapun tidak dapat dihindarkan. Ironisnya, Perang Dunia Kedua (1939-1945) terjadi dalam rentang waktu lebih lama dan memakan korban lebih banyak, terutama di pihak Jerman, Rusia, dan Polandia. Situasi ini dimanfaatkan oleh para pemikir Realis untuk melakukan serangan terhadap kaum Idealis yang dianggap gagal memberikan gambaran akurat tentang politik dunia pada waktu itu.

Terdapat beberapa butir pandangan yang merangkum kritik Realisme terhadap Idealisme. Pertama, asumsi kaum Idealis bahwa hakikat manusia yang rasional dan kooperatif dapat membentuk "harmoni kepentingan" (*harmony of interests*) yang pada gilirannya dapat menciptakan perdamaian abadi adalah ilusi belaka. Sebaliknya, perilaku negara – yang dibentuk oleh sikap dasar agresif – cenderung dituntun oleh upaya pencapaian kepentingan

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

nasional yang didefinisikan sebagai perjuangan untuk kekuasaan (*struggle for power*).[13] Kedua, cita-cita untuk membangun pemerintahan dunia sebagaimana digambarkan Norman Angell di dalam bukunya *The Great Illusion* tidak mungkin terwujud bahkan merupakan utopia belaka karena dalam hubungan internasional berlaku prinsip Darwinisme, '*survival of the fittests*', yakni negara yang akan terus bertahan (*survive*) adalah negara yang paling fit - memiliki kekuatan militer dan ekonomi terbesar.[12] Ketiga, internasionalisme sebagai dasar dari prinsip kerja sama internasional yang menjadi acuan kaum Liberalis tampak absurd karena perilaku negara lebih digerakkan oleh pencapaian kepentingan nasional daripada prinsip-prinsip moralitas internasional.[13] Keempat, walaupun pengaruh moralitas cukup signifikan dalam proses politik, namun dalam politik internasional pengaruh moral dapat diabaikan karena bertentangan dengan kaidah-kaidah praktik hubungan antar negara yang penuh dengan intrik dan keculasan demi kelangsungan hidup.[14] Kelima, kajian politik internasional harus bersifat objektif, yakni menjelaskan fakta-fakta internasional apa adanya dan bebas nilai untuk menjamin akurasi dan validitas. Hal ini penting mengingat bahwa politik internasional dibentuk oleh hukum obyektif yang berakar dari hakikat manusia.[15]

Dibandingkan dengan kaum Liberalis yang berkutat dengan ide-ide kerja sama saling menguntungkan dan perdamaian dunia, Realisme lebih menawarkan konsep-konsep yang mempunyai dimensi praktis sehingga bisa langsung dipakai dalam perumusan politik luar negeri suatu negara. Sebagai contoh konsep tentang pencapaian kepentingan nasional (*the pursuit of national interests*), integritas teritorial, keamanan nasional, kekuatan nasional, perimbangan kekuatan, dan sebagainya memberikan justifikasi teoretis dalam konteks perlombaan senjata dan pembangunan kekuatan militer oleh negara-negara besar (*Great Powers*) pada masa Perang Dingin. Maka, tidak mengherankan jika konsep-konsep dasar Realisme tersebut di atas menghiasi dokumen politik luar negeri banyak negara, terutama negara-negara besar.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Perdebatan Besar Pertama dalam studi HI tidak saja menunjukkan keunggulan perspektif Realisme

11 E.H. Carr (1939). 'The Twenty Years Crisis, 1919-1939'. *An Introduction to the Study of International Relations 2nd Edition*. New York: Harper Torchbook, hlm. 41-21; H.J. Morgenthau (1978 [1948]). '*The Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*'. New York: Alfred P. Knopf, hlm. 8.
12 E.H. Carr (1939). *Op cit*, hlm. 46-47.
13 *Ibid.*, hlm. 85-87.
14 H.J. Morgenthau (1978 [1948]). *Op cit*, hlm. 10-11.
15 *Ibid.*, hlm. 4-5.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

dalam menjelaskan situasi politik internasional pasca Perang Dunia Pertama dibandingkan dengan Idealisme yang dianggap kurang akurat dalam memprediksi perilaku argesif beberapa negara yang menodai perdamaian yang dicoba dibangun oleh LBB. Realisme juga lebih mampu menyediakan konsep-konsep dasar sebagai bahan dasar politik luar negeri. Liberalisme selain dianggap gagal mencegah ekspansi negara-negara Fasis di Eropa - Nazi Jerman dan Italia di bawah Musolini - yang menandai pecahnya Perang Dunia Kedua juga dianggap kurang mampu menyediakan konsep-konsep praktis bagi terbentuknya kerja sama saling menguntungkan yang menghindarkan negara dari peperangan.[16]

Perdebatan Besar Kedua: Metode Klasik/Historis/Tradisionalis vs. Saintifik/Positivis

Perdebatan Besar Kedua terjadi pada dekade 1960-an ketika para pakar HI mulai menyadari bahwa metode penelitian yang dipakai para peneliti HI tidak memenuhi syarat ilmiah. Morton Kaplan menyatakan bahwa patut disayangkan bahwa karya fenomenal E.H. Carr, *The Twenty Years Crisis 1919-1939*,ternyata diperoleh dari metode penelitian yang tidak memenuhi syarat ilmiah karena tidak melakukan uji hipotesis, validasi teori, pembuktian hubungan antar variabel, dan penentuan parameter, sehingga kualitas karyanya tidak lebih dari sekadar pemaparan sekuensi sejarah.[17] Sebaliknya, dalam mempertahankan validitas metode Klasik/Historisis/ Tradisionalis, Hedley Bull (1966) menyatakan bahwa karakter realitas sosial-politik dalam politik internasional yang mengandung ketidakpastian, penuh dengan kejutan, sulit diprediksi, dan tidak bebas nilai memerlukan metode penelitian yang mengandalkan pada penelusuran sejarah, landasan filosofis yang tepat, intuisi, dan interpretasi subyektif agar menghasilkan karya dengan sekuensi cerita yang runut (*good historical sequence*), deskripsi yang meyakinkan (*thick description*), dan interpretasi yang dituntun oleh landasan filosofis yang tepat.[18]

Walaupun esensi dari Perdebatan Besar Kedua adalah tindakan saling menyerang antara Hedley Bull yang membela metode Klasik/Historis/

16 Lucian M. Ashworth (2002). *Op cit*, hlm. 41.
17 Morton A. Kaplan (1966). 'The New Great Debate: Traditionalism vs. Science in International Relations'. *World Politics*, Vol.19, No.1, hlm. 2.
18 Hedley Bull (1966). 'International Relations Theory: The Case of Classical Approatch'. *World Politics*, Vol.18, No. 3, hlm. 363.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

Tradisionalis dan Morton Kaplan yang membela kesahihan metode Saintifik /Positivis dalam studi HI, namun dapat kita telusuri bahwa perdebatan ini mencoba mendiskusikan tentang landasan epistemologis penelitian dalam studi HI terutama menyangkut cara apa yang paling tepat untuk mendapatkan data dan informasi serta menentukan cara terbaik untuk menyajikan hasil-hasil temuan dalam penelitian hubungan internasional.

Perdebatan Besar Kedua dimulai dari tulisan Hedley Bull yang berusaha mempertahankan kesahihan metode Klasik/Historis/Tradisionalis tidak saja dengan mengemukakan keistimewaan metode tersebut, melainkan juga dengan menyerang metode saintifik/positivis yang dianggapnya telah mendistorsi penelitian HI dengan menonjolkan kaidah ilmiah dan mengabaikan substansi penelitian. Di dalam tulisannya yang berjudul *International Theory: the Case of a Classical Approach* di dalam jurnal ilmiah *World Politics* edisi bulan April tahun 1966, Hedley Bull mencoba memberikan pembelaan bagi pendekatan Klasik / Historisis / Tradisionalis yang dapat dirangkum sebagai berikut:[19]

1. Proposisi-proposisi teoretis kaum saintifik yang secara logis dan matematis bisa dibuktikan dan diverifikasi melalui prosedur yang ketat dan terukur tampak membesar-besarkan "instrumen" penelitian dan mengabaikan "substansi" penelitian. Karya-karya kaum saintifik tampak lebih menonjolkan "instrumen" ketimbang "substansi" penelitian.
2. Tampak sangat ironis bahwa di dalam menganalisis fenomena politik internasional, penelitian kaum saintifik lebih diingat oleh para pembacanya adalah unsur sejarah dan filosofinya – yang sering dipakai kaum Klasik/Historisis/Tradisionalis – bukannya metodenya yang rumit, angka-angka serta rumus-rumus matematikanya.
3. "Sistem" sama sekali berbeda dengan realitas di tengah masyarakat karena sistem tidak diikat oleh ideologi, nilai, dan norma. Karena itu penggunaan "sistem" sebagai model dalam penelitian sosial-politik sangat tidak menggambarkan kondisi realitas masyarakat.
4. Dalam studi HI adalah lebih relevan untuk menggagas "masyarakat internasional" (*international society*) yang lebih bernuansa historis daripada "sistem internasional" (*international system*) yang bernuansa

19 *Ibid.*, hlm. 361-377.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

ahistoris karena lebih sesuai dengan hakikat politik internasional yang penuh ketidakpastian dan kejutan.

5. Patut disayangkan bahwa metode saintifik justru dilemahkan oleh kecintaannya yang berlebihan kepada parameter dan pengukuran, sehingga melupakan substansi penelitian.

Menanggapi serangan tersebut, Morton Kaplan menulis artikel berjudul *The New Great Debate: Traditionalism vs Science in International Relations* di jurnal yang sama edisi bulan Oktober 1966 yang pada intinya menyerang pemikir HI yang menggunakan metode Klasik/ Historisis/Tradisionalis yang dapat diringkas sebagai berikut:[20]

1. Karya monumental E.H. Carr (*The Twenty Years Crisis*) tidak lebih dari sekadar "pelaporan fakta-fakta sejarah" (*a true report of historical facts*) karena tidak mengandung analisis ilmiah.
2. E.H. Carr gagal untuk membedakan antara fakta fisik (*physical facts*) yang objektif dengan fakta politik (*political facts*) yang subyektif sehingga menuntut penggunaan metode khusus dalam penelitian fakta politik.
3. Keyakinan E.H. Carr bahwa fenomena politik internasional hanya bisa diteliti dengan menggunakan metode penelusuran sejarah yang sama sekali berbeda dengan ilmu eksakta adalah sangat keliru.
4. Keyakinan para pakar Historisis/Tradisionalis bahwa fenomena politik internasional yang kompleks dan penuh kejutan tidak bisa diteliti dengan metode yang mengutamakan presisi, validasi, kuantifikasi, dan generalisasi adalah kekeliruan sehingga dapat diperdebatkan.
5. Kekhawatiran para pakar Historisis/Tradisionalis bahwa pendekatan saintifik yang mencoba menyederhakan subyek penelitian melalui pembuatan model-model tidak cocok dengan politik internasional yang sarat dengan unsur norma, nilai, identitas kultural, dan subyektivitas tampak terlalu berlebihan dan dibesar-besarkan.

Pernyataan provokatif Kaplan tersebut dikenal sebagai upaya terang-terangan untuk menghujat metode Klasik/Historisis /Tradisionalis yang dianggapnya

20 Morton A. Kaplan (1966). *Op.cit.*, hlm. 1-20.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

sama sekali tidak memiliki landasan ilmiah karena melewatkan proses uji hipotesis, validasi data, penetapan parameter, dan pembuatan model untuk memudahkan pengontrolan data dan informasi. Poin-poin dalam perdebatan besar kedua dalam studi HI tidak saja menunjukkan perbedaan yang sangat kontras antara dua metode penelitian dalam studi HI, melainkan juga menunjukkan bagaimana masuknya pengaruh Revolusi Behaviouralisme ke dalam studi HI ternyata mendapat tantangan dari pakar HI yang lebih menghargai faktor historis dan filosofis daripada instrumen yang lebih mengutamakan pada pengukuran, pembuktian, presisi, dan validasi dalam penelitian studi HI.

Menghadapi kritik terhadap metode tradisionalis/historis, E.H. Carr menyatakan bahwa (sebagaimana dikutip oleh John L. Gaddis): "*When I was young I was impressed to learn that the whale is not a fish... Nowadays I am assured that history is not a science*" (Sewaktu saya muda saya terkesan ketika mengetahui bahwa Paus (mamalia laut) bukanlah ikan... Saat ini pun saya menyadari bahwa sejarah bukanlah sesuatu yang ilmiah).[21] Pandangan Carr ini menyiratkan bahwa kita tidak perlu meributkan sejarah itu ilmiah atau tidak seperti halnya ahli biologi tidak meributkan apakah Paus itu mamalia atau ikan. Hal yang lebih penting bahwa baik Paus maupun ikan bisa hidup berdampingan di laut, seperti halnya metode sejarah dan metode ilmiah bisa hidup berdampingan dalam khazanah studi HI.

Perdebatan Besar Ketiga: Positivis vs. Post-positivis/Reflektivis

Perdebatan Besar Ketiga dalam studi HI adalah salah satu langkah untuk menentukan pendekatan manakah yang lebih relevan dalam menganalisis fenomena hubungan internasional dewasa ini: pendekatan positivis (yang menekankan pada objektivitas, validasi, presisi, pengukuran, dan uji hipotesis) atau pendekatan post-positivis (yang menekankan pada intuisi, subyektivitas, suara-suara kaum marjinal, kebenaran yang relatif, pemikiran kritis, dan dekonstruksi).[22] Peristiwa ini, menurut Lapid, bermula dari kesadaran para ilmuwan sosial bahwa saat ini pendekatan empiris-positivis mendapat tantangan ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang sangat berat terutama ketika kebenaran tunggal (determinisme), obyektivitas, dan realitas yang ditampilkan

21 John L. Gaddis (1997). "History, Theory and Common Ground". *International Security*, Vol. 22 No.1, hlm. 80.

22 Yoseph Lapid (1989). *Op cit.*, hlm. 235.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

oleh ilmu sosial produk pendekatan empiris-positivis mulai diragukan kebenarannya. Hal yang membuat pendekatan empiris-positivis mendapat ancaman adalah munculnya dorongan meta-teori yang dibawa oleh peristiwa "pembelokan linguistik" (*the linguistic turn*)[23] - sebuah pemberontakan paradigmatik dalam ilmu sosial yang mulai berpengaruh dalam studi HI pada dekade 1980-an - dan menciptakan keraguan terhadap kebenaran objektif, determinisme, dan kaidah-kaidah ilmiah ilmu sosial empiris-positivis.

Tidak sedikit kalangan yang meragukan apakah "Perdebatan Besar Ketiga" ini sungguh-sungguh merupakan sebuah latihan intelektual (*intellectual exercise*) untuk mengembangkan teori HI sebagaimana halnya dengan "Perdebatan Besar Pertama" (antara Liberalisme /Idealisme vs. Realisme) pada dekade 1950-an atau "Perdebatan Besar Kedua" (antara metode Tradisionalis / Historisis /Klasik vs. metode Saintifik/Positivis) pada dekade 1960-an. Terlepas dari keraguan tersebut, "Perdebatan Besar Ketiga" memuat pandangan post-positivis bahwa studi HI perlu memperkuat landasan filosofis teori-teorinya dengan sedapat mungkin menghindari determinisme, pemaksaan kebenaran tunggal, keharusan untuk mengacu pada teks-teks yang sudah ada, dan pemaksaan penggunaan metode ilmiah yang ketat dalam penelitian. Sebaliknya "Perdebatan Besar Ketiga" merupakan sarana untuk mendudukkan pendekatan post-positivisme pada posisi yang selayaknya dengan menawarkan tiga nuansa baru dalam penelitian sosial: paradigmatisme (keprihatinan terhadap tidak jelasnya perlakuan pada unsur-unsur meta-ilmiah), perspektivisme (keprihatinan terhadap ketergantungan pada premis dan asumsi), dan relativisme (penggunaan metodologi yang majemuk untuk menghindari determinisme).[24]

Dalam hal keprihatinan terhadap ketidakjelasan perlakuan pada unsur-unsur meta-ilmiah (paradigmatisme), post-positivis berpendapat bahwa jika pengetahuan yang diperoleh dari pendekatan empiris-positivis mempunyai tiga dimensi utama, yakni: "fenomena" (kandungan empiris dari suatu pengetahuan ilmiah), "analisis" (hipotesis, eksplanasi, dan model), dan "tema" (pendefinisian, asumsi-asumsi, dan premis-premis), maka dalam pendekatan post-positivis perlu penambahan dimensi lainnya yang meliputi nilai-nilai, norma-norma, diskursus, dan berbagai konstruksi meta-ilmiah lainnya. Maka, salah satu unsur yang membedakan antara pendekatan empiris-positivis dengan pendekatan

23 Peristiwa "pembelokan linguistik" (*the linguistic turn*) dan pengaruhnya terhadap teori-teori HI akan dibahas secara lebih komprehensif pada Bab 9 buku ini.

24 Yoseph Lapid (1989). *Op cit.*, hlm. 239-243.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

post-positivis adalah penekanannya pada norma, diskursus dan konstruksi meta-ilmiah di mana post-positivis lebih memberi bobot pada unsur-unsur meta-ilmiah termasuk yang paling absurd sekalipun.[25]

Menyangkut keprihatinan terhadap ketergantungan pada premis dan asumsi (perspektivisme), post-positivis memandang bahwa ilmu-ilmu empiris-positivis biasanya dalam melakukan proses ontologis, epistemologis, dan aksiologis selalu mencoba untuk mencari keselarasan antara fakta empiris dengan proposisi teoretisnya. Bila terjadi ketidakselarasan antara fakta empiris dan teorinya, akan terjadi semacam "kebuntuan teori" (*theoretical impasse*) yang menghentikan proses pencarian teori baru. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan sebuah teori tidak bisa lepas dari dan sering didasarkan pada sejumlah premis dan asumsi.[26] Sebagai contoh, teori tentang keharusan suatu negara untuk senantiasa membangun kekuatan militer yang besar guna mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam dunia yang anarkis - yang merupakan andalan perspektif Realisme - didasarkan pada asumsi bahwa "hakikat manusia yang agresif dan egosentris" dan premis bahwa "negara dengan kekuatan militer lebih besar cenderung untuk memerangi negara yang lebih lemah". Maka tidak mengherankan jika penelitian dalam studi HI sering menghadapi dua persoalan yang disebut oleh Robert O. Keohane (1986) dengan istilah "ketergantungan pada teori" (*inescapability of theory*) dan yang lebih pahit lagi "tersandera oleh asumsi-asumsi yang tidak dinyatakan secara jelas" (*the prisoner of unstated assumptions*).[27] Post-positivis mengingatkan agar kita tidak terikat pada premis dan asumsi tertentu dalam melakukan penelitian. Sebaliknya, kita harus lebih menghargai intuisi, kearifan lokal, dan komunikasi antar-subyek untuk menghindari jebakan perspektivisme.

Berkaitan dengan proposisi penerapan metodologi yang majemuk untuk menghindari determinisme (relativisme), dengan mengutip tulisan J.O. Wisdom (1987) dan Bernstein (1986), Yoseph Lapid menyatakan bahwa dewasa ini hasil karya pendekatan empiris-positivis menghadapi kritikan sangat pedas, terutama menyangkut objektivitas, kebenaran, metode saintifik, dan bahkan logika rasional yang dibangunnya. Untuk itulah Lapid memperkenalkan pemikiran "relativisme baru" (*new relativism*) yang sangat berbeda dengan pemikiran relativisme lama seperti pernah digagas oleh Fleck, Polanyi, Kuhn,

25 *Ibid.*, hlm. 241.
26 *Ibid.*, hlm. 242.
27 Robert O. Keohane (ed.) (1986). 'Theory of World Politics.' *Neorealism and Its Critics*. New York: Columbia University Press, hlm. 4.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

Feyerabend, dan yang lainnya - yang dituduh menghasilkan penelitian yang terlalu memiliki implikasi relatif sehingga tidak mengandung kebenaran hakiki. Pembeda paling utama dari "relativisme baru" ini adalah adanya upaya untuk membangun legitimasi pemikiran didasarkan pada standar, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip tertentu agar memungkinkan adanya penilaian dan pemberian status istimewa (*make judgements possible and give them privileged status*).[28] Berangkat dari pemikiran "relativisme baru" ini, pendekatan post-positivis menawarkan diterapkannya prinsip toleransi yang muncul dari gelombang baru disensus ilmiah (*a new-wave preoccupation with scientific dissensus*)[29] dalam rangka pembuatan suatu teori (*plea for tolerance in matters theoretical*) untuk menghindari determinisme dan pemaksaan kebenaran tunggal dalam penelitian.[30]

Apa yang dapat kita pelajari dari Perdebatan Besar Ketiga ini adalah masuknya pandangan post-modernisme dalam studi HI sebagai akibat dari peristiwa "pembelokan linguistik" dalam ilmu sosial yang memunculkan gelombang baru berupa disensus ilmiah dan dorongan untuk menerapkan toleransi dalam berpikir ilmiah untuk mendengarkan suara-suara kaum marjinal yang selama ini diabaikan. Dalam konteks perkembangan teori HI, Perdebatan Besar Ketiga menandai era baru yang memberikan tempat bagi teori-teori di luar arus utama (*mainsteam*) - yang sering disebut teori-teori reflektivis - seperti Teori Kritis (*critical theory*), Feminisme, Post-modernisme, dan Konstruktivisme untuk ikut memeriahkan khazanah perkembangan teori HI.

Debat Keempat: Realisme vs. Mazhab Inggris (*English School*)

Salah satu perdebatan besar yang sangat diragukan eksistensi dan kegunaannya bagi perkembangan teori-teori HI adalah Perdebatan Besar Keempat yang menghadapkan Realisme dengan Mazhab Inggris (*English School*). Sumber keraguan tersebut adalah kenyataan bahwa dalam Mazhab Inggris klasik yang secara ontologis meyakini bahwa di dunia ini terdapat tiga macam manusia yang menentukan karakter negara. Pertama, kelompok manusia yang egosentris

28 Yoseph Lapid (1989), *Op.it.*, hlm. 243.

29 Gelombang baru disensus ilmiah ini terkait dengan peristiwa "pembelokan linguistik" yang mentolerir adanya kemajemukan ontologis dan epistemologis dalam ilmu sebagaimana dinyatakan dalam L. Laudan (1984). '*Science and Values*'. Berkeley: University of California Press, hlm.13.

30 Terence Ball (ed.) (1987). 'Idioms of Inquiry'. *Critique and Renewal of in Political Science.* Albany: New York University Press, hlm. 34.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

dan agresif sebagaimana diyakini kaum Realis yang mengacu pada pemikiran filosofis Thomas Hobbes dan Nicollo Machiavelli. Kedua, kelompok manusia Rasionalis yang patuh pada norma dan hukum sehingga melahirkan negara yang bersikap menahan diri karena patuh pada hukum internasional yang mengacu pada pemikiran filosofis Hugo Grotious. Ketiga, kelompok manusia Revolusionaris yang menganut budaya kosmopolitan sehingga membentuk semangat saling bekerja sama sesuai dengan pemikiran filosofis Immanuel Kant. Karena Realisme masih berada di dalam lingkup Mazhab Inggris, maka sulit bagi kita untuk membayangkan adanya perdebatan antara Realisme dengan Mazhab Inggris. Sumber keraguan lainnya adalah banyaknya perbedaan penafsiran tentang Perdebatan Besar Keempat. Bagi Milja Kurki dan Colin Wright (2013), Perdebatan Besar Keempat dalam studi HI menghadapkan pendekatan positivis dengan postpositivis atau antara rasionalis versus reflektivis sebagaimana yang telah kita bahas dalam Perdebatan Besar Ketiga.[31]

Namun demikian, terlepas dari adanya keraguan terhadap Perdebatan Besar Keempat tersebut, pada konferensi internasional yang diselenggarakan oleh BISA (*British International Studies Association*) pada tahun 2004 di Universitas Aberystwyth, Wales, terjadi perdebatan antara John Mearsheimmer (mewakili perspektif Realisme) dengan para tokoh senior BISA seperti Paul Rogers, Christopher Hill, Richard Little, Chris Brown dan Ken Booth (mewakili Mazhab Inggris). Perdebatan bertajuk "*Roundtable: The Battle Rages On*" ini mendapat perhatian luas setelah dimuat dalam edisi khusus jurnal International Relations edisi tahun 2005. Karena memperdebatkan hal-hal esensial dalam studi HI, maka banyak kalangan berpendapat bahwa peristiwa tersebut layak disebut sebagai Perdebatan Besar Keempat dalam studi HI.

Perdebatan tersebut diawali dengan ceramah oleh John Mearsheimmer dari Universitas Chicago, Amerika Serikat, untuk mengenang tokoh Realisme Inggris E.H. Carr (*E.H. Carr Memorial Lecture*) di Universitas Aberystwyth, Wales. Pada forum itu, Mearsheimer memprovokasi para pakar HI Mazhab Inggris dengan menyatakan bahwa di Inggris terjadi perubahan besar dalam tradisi berpikir studi HI sejak terbitnya buku E. H. Carr *The Twenty Years Crisis, 1919-1939* (1939) di mana Mazhab Inggris semakin menjauhi Realisme dan mendekat ke kubu Idealisme/Liberalisme. Perubahan ini, menurut Mearsheimer, tidak saja akan membuat "*shock*" E.H. Carr jika dia masih hidup

31 Milja Kurki dan Colin Wright (2013). '*International Relations and Social Science*'. Dalam Tim Dunne, *et al.* (ed.). '*International Relations Theories: Discipline and Diversity*'. Oxford: Oxford University Press, hlm. 20.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

tetapi juga akan membuat kecewa para pakar Realis dan bahkan juga kaum Idealis yang sangat membenci Realis.[32]

Pernyataan provokatif Mearsheimer mendapat tanggapan dari para pakar HI Inggris. Tanggapan pertama muncul dari Paul Rogers, ketua BISA periode 2003-2004 yang menyatakan bahwa pemahaman Mearsheimer tentang Mazhab Inggris tampak dangkal. Menurut Paul Rogers adalah tidak benar jika Mazhab Inggris mengabaikan penggunaan kekuatan militer dalam rangka memperjuangkan kekuasaan sebagaimana tampak pada upaya Inggris dalam masa pemerintahan Perdana Menteri Margaret Thatcher untuk mempertahankan Pulau Falkland/Malvinas dalam peperangan dengan Argentina pada dekade 1980-an dan dukungan Inggris terhadap invasi AS ke Afghanistan dan Irak pada tahun 2003 dalam rangka perang melawan terorisme.[33] Dengan demikian Paul Rogers menyangkal bahwa dalam diskursus akademis maupun kebijakan Mazhab Inggris didominasi oleh pemikiran Idealisme/Liberalisme dan menjauhi Realisme.

Tanggapan kedua datang dari Richard Little, ketua BISA periode 2001-2002. Bagi Richard Little pernyataan provokatif Mearsheimer tersebut tidak membawa hal baru melainkan sekadar mengulang kembali pernyataan kaum Realis dalam mendiskreditkan kaum Idealis/ Liberalis dalam "Perdebatan Besar Pertama" (*First Great Debate*) yang terjadi sekitar 50 tahun yang lalu. Pengulangan tersebut membuat pernyataan Mearsheimer terasa tidak orisinil dan bahkan sudah basi.[34] Persoalan lain yang dihadapi Mearsheimer, menurut Richard Little, adalah ketidakmampuannya untuk melihat perkembangan terkini teori-teori HI di mana ada perbedaan mendasar di dalam Realisme itu sendiri sebagaimana ditunjukkan oleh Richard Ashley adanya perbedaan antara Realisme praktis (*practical Realism*) dan Realisme teknis (*technical Realism*)[35] dan juga munculnya konvergensi antar teori seperti yang terjadi antara Neo-Realisme dan Neo-Liberalisme ketika berbicara mengenai "kerja sama dalam kondisi anarki" (*cooperation under anarchy*).[36] Dalam kondisi demikian, sulit

32 John Mearsheimer (2005). 'E.H. Carr vs. Idealism: The Battle Rages On'. *International Relations*, Vol. 19 No. 2, hlm. 139.

33 Paul Rogers (2005). 'Roundtable: The Battle Rages On'. *International Relations*, Vol. 19, No. 3, hlm. 339-340.

34 Richard Little (2005). 'Roundtable: The Battle Rages On'. *International Relations*, Vol. 19, No. 3, hlm. 341-342.

35 Richard Ashley (1984). 'Poverty of Neorealism'. *International Organization*, Vol. 38, No.2, hlm. 235-286.

36 Kenneth A. Oye (1985). 'Explaining Cooperation Under Anarchy: Hypothesis and Strategies'. *World Politics*, Vol. 38 No.1, hlm. 1-24.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

untuk membayangkan Realisme sebagai suatu teori yang tunggal. Mearsheimer yang hanya mengeksploitasi perbedaan antara Realisme dengan Idealisme/ Liberalisme menunjukkan pemikirannya yang ketinggalan zaman (*outdated*) tentang perkembangan teori-teori HI.

Tanggapan berikutnya datang dari Christopher Hill, ketua BISA periode 1999-2000, yang beranggapan bahwa pernyataan provokatif Mearsheimer tidak jauh berbeda dengan pandangan kritis Robert Kagan terhadap Politik Luar Negeri Eropa (*European Foreign Policy*) yang menyatakan bahwa sebuah peradaban yang mulai kehilangan status tertingginya akan mencari cara untuk mempertahankan statusnya dengan, antara lain, mengangkat tema baru agar lebih diterima secara luas, misalnya dengan mengampanyekan "kekuatan masyarakat sipil" (*the power of civil society*) sebagaimana dilakukan kaum Idealis/Liberalis. Sama halnya dengan Kagan, Mearsheimer terjebak dalam sejumlah oversimplifikasi. Pertama, pelabelan yang rigid Realisme yang diasosiasikan dengan aliran pemikiran Trans-Atlantik (Amerika Serikat) yang sangat bertolak belakang dengan aliran pemikiran Idealisme/Liberalisme yang diasosiasikan dengan Mazhab Inggris. Pembedaan ini jelas kurang tepat karena baik ajaran Realisme dan Idealisme ada di kedua wilayah tersebut, terutama jika kita melihat di kampus-kampus di AS juga dibahas tentang perspektif Idealisme/ Liberalisme, juga sebaliknya di kampus-kampus di Inggris didiskusikan pandangan Realisme. Kedua, asumsi yang menyederhanakan Politik Luar Negeri suatu negara di mana Amerika Serikat disebut lebih mengutamakan "keamanan nasional" (*national security*) dan kurang menyukai "keamanan multilateral" (*multilateral security*); sementara Inggris disebut berpandangan sebaliknya. Asumsi ini jelas keliru mengingat bahwa sejak peristiwa 9/11 AS mulai terdorong untuk melakukan kerja sama multilateral dalam melaksanakan "Perang Global Melawan Terorisme" (*Global War on Terrorism/GWOT*). Melihat fakta tersebut, ada alasan untuk mengasihani Mearsheimer yang melakukan serangan di peperangan yang salah (*Great Attack, Wrong War*).[37]

Tanggapan lainnya datang dari Chris Brown, ketua BISA periode 1997-1998, yang menyamakan provokasi Mearsheimer dengan pendapat seorang pianis musik jazz Inggris, Stan Tracey. Dalam wawancaranya dengan BBC Radio Tracey menyatakan: "Tidak pernah ada musik jazz dalam program BBC Radio!". Tracey tetap teguh pada pendiriannya ketika pewawancara mencoba menantangnya

37 Christopher Hill (2005). 'Roundtable: The Battle Rages On'. *International Relations*, Vol. 19 No. 3, hlm. 345-347.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

dengan pertanyaan: bagaimana dengan program "*Jazz Record Requests*" dan "*Promenade Jazz Concerts*" yang diputar secara reguler di BBC Radio? Di akhir wawancara terungkap bahwa di BBC Radio tidak pernah diputar musik jazz sebagaimana yang dimainkan oleh Stan Tracey, karena itu dia menganggap tidak pernah ada musik jazz di BBC Radio. Cerita itu dipakai Chris Brown untuk memberikan perumpamaan terhadap provokasi Mearsheimer yang menyatakan bahwa Mazhab Inggris sangat didominasi oleh Idealisme dan tidak memberi tempat bagi Realisme. Pendapat ini tampak mengabaikan tokoh-tokoh Mazhab Inggris yang memiliki latar belakang Realisme seperti Hedley Bull, Martin Wight, Colin Gray, Lawrence Freedman, Christoper Cooker, dan Barry Buzan.[38] Hal ini menunjukkan ketidakmampuan Mearsheimer dalam melihat perkembangan Mazhab Inggris yang sekaligus menjelaskan mengapa dia tidak pernah menjadi tokoh penting dalam studi HI. Mearsheimer dianggap gagal dalam memahami mengapa Mazhab Inggris - yang menggabungkan Realisme, Rasionalisme dan Idealisme / Liberalisme - relevan dalam menjawab tantangan dewasa ini yang datang dari unsur keamanan tradisional (militer-strategis) dan keamanan non-tradisional (perdagangan manusia, terorisme, kriminalitas teroganisir, penyakit menular, kerusakan lingkungan, kemiskinan, dan sebagainya) dan munculnya "peperangan jenis baru" (*new wars*) yang dipicu oleh perbedaan etnis, ras dan agama. Bagi Brown, terlalu naif jika Mearsheimer berpendapat bahwa Realisme yang dipahami oleh Mazhab Inggris - yang tidak sama dengan pemahamannya - adalah bukan Realisme, sebagaimana halnya Tracey menyatakan bahwa musik jazz yang sering diputar BBC Radio - yang tidak seperti yang dimainkannya - adalah bukan musik jazz.

Tanggapan selanjutnya datang dari Ken Booth, ketua BISA periode 1995-1996. Booth memulai tanggapannya dengan mengatakan bahwa posisi Mearsheimer sebagai seorang "Realis ofensif" (*offensive Realist*) membuatnya menjadi pemikir yang terlalu mengagung-agungkan kekuatan militer sebagai solusi persoalan yang menciptakan perang berkepanjangan sehingga membawa nuansa pesimistik yang justru mendapat banyak penolakan dari pakar Realis sendiri. Sebagai seorang Realis, Mearsheimer dianggap sering berseberangan dengan pakar Realis lainnya, terutama H. J. Morgenthau dan bahkan E. H. Carr yang dibelanya mati-matian di dalam ceramahnya di Aberystwyth itu. Jika kita menuruti pembedaan Realis/Idealis ala Mearsheimer, kita akan menemukan

38 Chris Brown (2005). 'Roundtable: The Battle Rages On'. *International Relations*, Vol. 19, No. 3. hlm. 348-349.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

bahwa Carr adalah seorang Idealis ketika mempercayai adanya "moralitas dunia" yang dapat mencegah peperangan dan bahwa Morgenthau adalah juga seorang Idealis karena menyatakan bahwa konsep "negara-bangsa" (*nation-state*) sudah usang dan harus diganti dengan konsep "negara dunia" (*world state*) dan bahwa perlucutan senjata nuklir (*nuclear disarmament*) sangat disarankan untuk menurunkan ketegangan dunia.[39] Booth juga sangat berkeberatan dengan label "Idealisme pasca-Perang Dingin" (*post-Cold War Idealism*) yang diasosiasikan dengan Mazhab Inggris dan dianggapnya hanya sekedar *fashion* dan kurang substantif jika dibandingkan dengan "Idealisme pasca Perang Dunia Pertama" (*post-First World War Idealism*) yang menggebu-gebu untuk membentuk pemerintahan dunia (*world government*). Pelabelan tersebut jelas didasari oleh ketidakhirauan Mearsheimer terhadap agenda-agenda baru pasca-Perang Dingin seperti perlindungan Hak Asasi Manusia, demokrasi global, peran masyarakat sipil global, dan ketertarikan negara pada wacana keamanan internasional.[40] Ketika Mearsheimer menyerang pakar HI Inggris yang dianggapnya terlalu mengabaikan kekuatan militer, dia tidak menyadari bahwa ada nuansa yang berbeda di antara para pakar Inggris. Barangkali dia benar bahwa sekelompok pakar antipati terhadap penggunaan kekuatan militer, tetapi kebanyakan pakar HI Inggris dewasa ini berpendapat bahwa militer bukan faktor satu-satunya yang terpenting dalam politik internasional. Ada faktor lain yang tidak kalah penting dalam politik internasional seperti lembaga-lembaga internasional dan kerja sama internasional.[41]

Menaggapi berbagai kritik terhadap dirinya, Mearsheimer mengakui bahwa di dalam ceramahnya di Aberystwyth tersebut dia telah melakukan kekeliruan dalam menilai Mazhab Inggris karena tidak melihat perkembangan mutakhir di Inggris di mana banyak pakar HI yang mulai mendekat ke Realisme. Tetapi Mearsheimer tetap mempertahankan pendapatnya bahwa Mazhab Inggris tetap lebih identik dengan Idealisme/Liberalisme karena di antara sejumlah pakar HI Inggris yang berpretensi sebagai Realis, hanya Colin Gray yang menurutnya paling mendekati Realisme yang dia pahami. Selanjutnya Mearsheimer menyambut baik adanya perdebatan yang terjadi karena dia menganggap adanya kontribusi positif bagi perkembangan keilmuan HI itu sendiri. Pada bagian akhir komentarnya Mearsheimer sekali lagi menegaskan

39 Ken Booth (2005). 'Roundtable: The Battle Rages On', *International Relations*, Vol. 13, No. 3, hlm. 351-352.
40 *Ibid.*, hlm. 350.
41 *Ibid.*, hlm. 353.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

bahwa sudah waktunya bagi para pakar HI Inggris untuk memberikan tempat yang lebih setara bagi tumbuhnya Realisme dan Idealisme/Liberalisme demi kepentingan keilmuan.[42] Perdebatan yang dimuat di jurnal *International Relations* edisi tahun 2005 ini menandai adanya Perdebatan Besar Keempat dalam studi HI yang menunjukkan posisi berseberangan antara para pemikir HI Inggris dan Amerika Serikat.

Kesimpulan

Bab ini mungkin membuat kita bertanya-tanya: mengapa perdebatan begitu penting dalam studi HI? Apakah perdebatan-perdebatan besar tersebut memberikan kontribusi bagi perkembangan teori-teori HI? Bagi mereka yang pesimis dalam melihat perkembangan studi Hl tentu saja akan beranggapan bahwa "perdebatan besar" dalam studi HI adalah merupakan sesuatu yang terlalu dibesar-besarkan dan tidak terlalu penting sehingga tidak memiliki kontribusi apapun terhadap perkembangan teori-teori HI. Sebaliknya, kelompok yang menyadari bahwa studi I-II adalah salah satu cabang ilmu sosial yang banyak berbicara tentang diskursus akan beranggapan bahwa perdebatan-perdebatan tersebut mengandung makna penting dan memberikan kontribusi besar bagi perkembangan teori-teori HI, khususnya dalam merespon perkembangan-perkembangan baru studi HI. Di samping itu, perdebatan-perdebatan besar tersebut telah membuka lingkup teori-teori HI untuk semakin merambah ke hal-hal di luar arus utama sehingga membuat studi HI makin menarik dan berguna bagi kemaslahatan umat manusia.

Terlepas dari berbagai kontroversi yang menyertainya, Perdebatan Besar (*Great Debates*) dalam studi HI merupakan hal yang penting. Melalui perdebatan, seseorang dapat melakukan klarifikasi terhadap konsep atau teori yang dikemukakannya. Disamping itu, perdebatan juga dapat mendorong proses pendalaman (*deepening*) dan perluasan (*widening*) suatu konsep / teori sehingga kita dapat memperoleh gambaran lebih komprehensif tentang konsep/ teori tersebut. Dalam studi HI yang kerap mengandalkan pada diskursus, perspektif, teori, dan konsep, keberadaan Perdebatan Besar memiliki arti yang sangat penting bagi perkembangan suatu konsep/teori.

42 John Mearsheimer (2005). 'Roundrable: The Battle Rages On'. *International Relations*, Vol. 13 No. 3, hlm. 358-359.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

Dari bab ini kita dapat mengetahui bahwa tidak semua Perdebatan Besar sungguh-sungguh merupakan suatu perdebatan dalam arti harafiah. Seperti kita lihat pada Perdebatan Besar Pertama dan Ketiga, misalnya, para pakar yang terlibat di dalamnya tidak pernah merasa bahwa mereka sungguh-sungguh terlibat dalam suatu perdebatan. Mereka hanya menginisiasi suatu konsep/teori yang dikritik oleh tokoh lain melalui perspektif yang berbeda. Sebaliknya pada Perdebatan Besar Kedua dan Keempat, kita melihat adanya nuansa perdebatan, di mana mereka yang terlibat di dalamnya memang saling menyanggah sembari melakukan klarifikasi di dalam tulisan mereka.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.

Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

BAGIAN KEDUA:
TEORI-TEORI ARUS UTAMA

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

BAB 4

LIBERALISME DAN NEOLIBERAL-INSTITUSIONALISME

Sejarah kemunculan Liberalisme dalam studi HI

Liberalisme sebagai landasan filosofis pemikiran politik modern merupakan produk dari '*The European Enlightenment*' (abad pencerahan Eropa) yang diasosiasikan dengan para pemikir Eropa seperti J.J. Rousseau, Jean Bodin, Adam Smith, J.S. Mill, dan lain-lain yang menyerukan peran minimal pemerintah dalam kehidupan sosial-ekonomi masyarakat, jaminan kebebasan individu dalam berpolitik, demokrasi dan konstitusionalisme, dan kesetaraan hukum. Liberalisme juga meyakini bahwa sistem perekonomian kapitalisme pasar bebas (*free market capitalism*) dapat menjamin kemakmuran bersama dan pengalokasian sumber-sumber secara efisien di dalam masyarakat.[1]

Masuknya pemikiran Liberalisme klasik ke dalam studi HI melalui beberapa gelombang. Gelombang pertama terjadi pada saat Perang Dunia Pertama (1910-1919) ketika para pakar HI menggagas pentingnya membentuk semacam pemerintahan dunia yang didasarkan pada prinsip kebebasan individu dan kesetaraan hukum. Dalam konteks inilah Sir Alfred Zimmern, Woodrow Wilson, dan Norman Angell menggagas didirikannya Liga Bangsa-Bangsa (*League of Nations*/LoN) sebagai organisasi antar pemerintah yang bertujuan untuk mencegah terjadinya perang antar negara. Namun demikian, akibat lemahnya otoritas, tidak adanya instrumen legal untuk melakukan tindakan, dan lemahnya dukungan dari negara-negara besar (*Great Powers*) yang ditandai dengan penolakan AS dan Rusia untuk menjadi anggota, LoN tidak

1 Scott Burchill (2005). '*The national interest in international relations theory*'. Basingstoke: Palgrave Macmillan, hlm. 55.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

dapat berfungsi dengan baik sehingga eksistensinya tidak bisa dipertahankan. Kelemahan fundamental ini membuat LoN tidak mampu berperan efektif dalam menegakkan perdamaian dan gagal mencegah pecahnya Perang Dunia Kedua.[2] Pada masa ini, Liberalisme menghadapi kritik dan kecaman terutama dari pemikiran Realisme yang kemudian mendominasi teori HI hingga berakhirnya Perang Dingin 1990.

Gelombang kedua masuknya pengaruh Liberalisme ekonomi ke dalam kajian HI terjadi pada dekade 1970-an dan 1980-an ketika para pakar HI menaruh perhatian pada peran aktor-aktor non-negara, terutama perusahaan transnasional (*Transnational Corporations*/TNCs), dalam mempercepat proses globalisasi dan peningkatan produktivitas ekonomi dunia. Dari situasi inilah muncul gagasan antara lain untuk memformulasikan pola-pola kerja sama ekonomi internasional sebagaimana digagas oleh Robert P. Gilpin, pemikiran tentang rezim internasional yang mengatur lalu-lintas transaksi dan perdagangan internasional yang digagas oleh Stephen D. Krasner, dan konsep saling-ketergantungan yang kompleks (*complex interdependence*) yang menandai proses kerja sama antar-negara mulai dari hal yang paling sederhana menuju ke kerja sama yang kompleks.

Gelombang ketiga pengaruh Liberalisme di dalam studi HI terjadi pada dekade 1990-an ketika terjadi proses demokratisasi global. Pada tahun 1991, Samuel P. Huntington, salah satu pemikir politik terkemuka di Amerika Serikat, menulis buku berjudul *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century* yang berargumen bahwa saat ini (1990-an) dunia sedang memasuki transisi Gelombang Ketiga menuju demokrasi melengkapi transisi Gelombang Pertama (1820-an-1926) dan transisi Gelombang Kedua (1942-1962). Demokratisasi Gelombang Ketiga, menurut Huntington, ditandai oleh runtuhnya legitimasi rezim otoriter, semakin agresifnya negara-negara donor dalam mengkaitkan demokratisasi dengan bantuan pembangunan, dan efek bola salju dari proses demokratisasi di suatu kawasan.[3] Karya Huntington ini senada dengan karya Francis Fukuyama berjudul *The End of History and the Last Man* (1992) yang berargumen bahwa sejarah perjalanan ideologis umat manusia telah berakhir pada sistem demokrasi liberal yang terbukti mampu mengalahkan sistem-sistem lainnya seperti monarki herediter, fasisme,

2 Margaret P. Karns&Karen A. Mingst (2004). *International Organizations: The Politics and Processes of Global Governance*. Boulder: Lynne Reinner, hlm. 36.

3 Samuel P. Huntington (1993). *The third wave: Democratization in the Late Twentieth Century*. Oklahoma: University of Oklahoma Press, hlm. 3-4.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

otoritarianisme, dan komunisme, sehingga dapat disimpulkan bahwa demokrasi liberal merupakan "*the final form of human government*" (bentuk paling akhir sistem pemerintahan).[4] Dalam konteks inilah muncul berbagai kajian mengenai *why democracy is desirable* (mengapa demokrasi sangat diinginkan). John Rawls bersama-sama dengan Michael Doyle (1997), Bruce Russett (1993), dan J.M. Owen (1994) mengembangkan pemikiran tentang "*democratic peace*" (perdamaian demokratis) yang menyatakan bahwa "*liberal societies are less likely to engage in war with non-liberal outlaw states, except on the grounds of legitimate self-defence (or in the defence of their legitimate allies), or intervention in severe cases to protect human rights*" (masyarakat liberal jarang sekali teribat peperangan dengan masyarakat non-liberal, kecuali untuk alasan pertahanan diri (atau membela teman), atau dalam rangka intervensi pada masalah kemanusiaan yang gawat untuk perlindungan hak asasi manusia.[5]

Karya-karya Penting Perspektif Liberalisme dalam HI

Bagian ini mencoba membahas karya-karya penting yang mendasari pandangan Liberalisme/Idealisme dalam studi HI terutama pada awal abad ke-20 di mana HI sebagai disiplin ilmu tengah mempersiapkan diri untuk manjadi salah satu cabang ilmu sosial yang mandiri. Pada saat itu, studi HI mencoba melepaskan diri dari bayangbayang ilmu hukum, strategi peperangan, filsafat, dan terutama ilmu politik. Salah satu karya maha penting yang dianggap memberikan landasan filosofis-akademis bagi pentingnya prinsip Liberalisme/Idealisme dalam memahami fenomena HI.

Karya pertama yang layak disebut sebagai peletak landasan pemikiran Liberalis/Idealis dalam Hubungan Internasional adalah karya fenomenal Immanuel Kant (1724-1804) – seorang filsuf Jerman yang juga dikenal sebagai salah seorang pelopor pemikiran filsafat modern – berjudul *Perpetual Peace: a Philosophical Essay* (1795) yang dalam naskah aslinya berbahasa Jerman tertulis *"Zum Ewigen Frieden: Ein Philosopischer Entwurf"*. Setelah sekian lama berkutat dengan upaya untuk memisahkan antara ajaran teologi (yang mengutamakan pada iman kepercayaan dan keyakinan) dengan filsafat (yang menuntut logika berpikir dan pembuktian empiris), pada tahun 1795 Kant melahirkan karya yang menjadi salah satu buku acuan dalam khazanah ilmu

4 Francis Fukuyama (1992). *The End of History and the Last Man*. New York: Hamish Hamilton, hlm. xi.
5 John Rawls dan Samual Freeman (1999). *John Rawls: Collected Papers*. Belknap: Harvard University Press, hlm. 49.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

HI. Dalam buku *Perpetual Peace* itu Kant membagi argumentasinya menjadi 3 bagian:

1. Bagian Pertama berbicara mengenai mengapa perdamaian harus senantiasa diperjuangkan dan peperangan harus dihindari. Argumen ini dirinci ke dalam beberapa pokok pikiran: (i) sikap anti-perang, di mana setiap kesepakatan atau perjanjian antar-bangsa harus didasarkan pada keinginan kuat untuk menghindari peperangan; (ii) prinsip anti-dominasi asing, di mana setiap negara merdeka - besar atau kecil - tidak boleh dikuasai oleh negara lain dalam hal perdagangan, finansial, apalagi secara militer; (iii) prinsip de-militerisasi, di mana negara harus rela mengurangi bahkan menghapuskan kekuatan militernya apabila suasana saling mengancam sudah mereda dan perdamaian abadi sudah ditegakkan; (iv) pemisahan antara masalah ekonomi dengan hubungan militer, di mana negara-negara diharapkan untuk tidak mengkaitkan hutang luar negeri dengan friksi militer demi tercapainya perdamaian dunia; (v) prinsip non-intervensi, di mana tidak satu negara pun boleh mencampuri urusan dalam negeri negara lain, apalagi jika disertai dengan penggunaan kekerasan; dan (vi) prinsip non-kekerasan, di mana tidak satu negara pun boleh menebar sikap permusuhan yang dapat mengancam prospek perdamaian, misalnya dengan menebar teror melalui penculikan, pembantaian, penyebaran racun, dan tindakan sejenis.
2. Bagian Kedua berbicara mengenai bagaimana membangun dunia yang dapat menciptakan perdamaian abadi yang dirinci ke dalam beberapa pokok pikiran: (i) sistem negara yang kompatibel dengan perdamaian abadi adalah sistem republik, di mana sistem ini dapat mencegah terjadinya perang karena setiap keputusan penting (misalnya deklarasi perang) harus didiskusikan di depan publik. Pandangan ini sangat mirip dengan konsep modern tentang '*Democratic Peace*' yang menyatakan bahwa secara moral dan politis, negara demokrasi cenderung tidak suka berperang karena setiap keputusan tentang perang harus dimintakan pendapat ke parlemen yang seringkali mendapat penolakan karena perang dianggap akan membebani pembayar pajak; (ii) hukum internasional idealnya dirumuskan dalam konteks perserikatan negara-negara merdeka supaya keabsahannya dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikan, keberadaan sebuah perserikatan antar bangsa mutlak

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

diperlukan untuk menjamin penegakan hukum internasional yang dapat menjamin perdamaian dunia; dan (iii) dalam situasi di mana pergerakan penduduk antar negara semakin intensif, maka diperlukan adanya hukum tentang 'warga dunia' (*world citizens*) yang difokuskan pada upaya membangun keramahtamahan (*hospitality*) dalam tata pergaulan dunia. Poin inilah yang saat ini dipakai oleh pemikir teori kritis – terutama Andrew Linklater – dalam mengembangkan gagasan "*global citizenship*" yang diharapkan memiliki kesadaran kosmopolitan untuk melindungi tiga macam kebebasan individu dari agama, ras, atau etnis mana pun: *freedom from oppression*, *freedom from pursuing needs*, dan *freedom to maintain dignity*.

3. Bagian Ketiga berbicara mengenai bagaimana mewujudkan perdamaian abadi di dalam politik internasional. Bagi Kant, perdamaian abadi akan terjadi secara otomatis apabila negara-negara sebagai aktor utama politik internasional secara sukarela mengikatkan diri pada tiga komponen penting politik internasional, yaitu: demokrasi (*democracy*), saling ketergantungan ekonomi (*economic interdependence)*, dan organisasi internasional (*international organizations*) yang membentuk apa yang lazim dikenal sebagai "Segitiga Kantian" (*the Kantian Trangle*). Bagan 3.1 mengilustrasikan bagaimana ketiga unsur tersebut menciptakan perdamaian abiadi. Demokrasi yang menjunjung tinggi penegakan hukum, toleransi, dan *checks-and-balances* lembaga-lembaga negara telah mampu mencegah negara demokratis untuk terlibat peperangan. Saling ketergantungan ekonomi membuat negaranegara memberikan prioritas bagi kerja sama dengan negara lain dan pada gilirannya mengurangi dorongan untuk berperang. Organisasi internasional berperan dalam mengkonversi kepentingan nasional menjadi kepentingan bersama sehingga negara anggotanya mulai berpikir tentang pentingnya kerja sama.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

Bagan 3.1
Segitiga Kantian Pembentuk Perdamaian Abadi

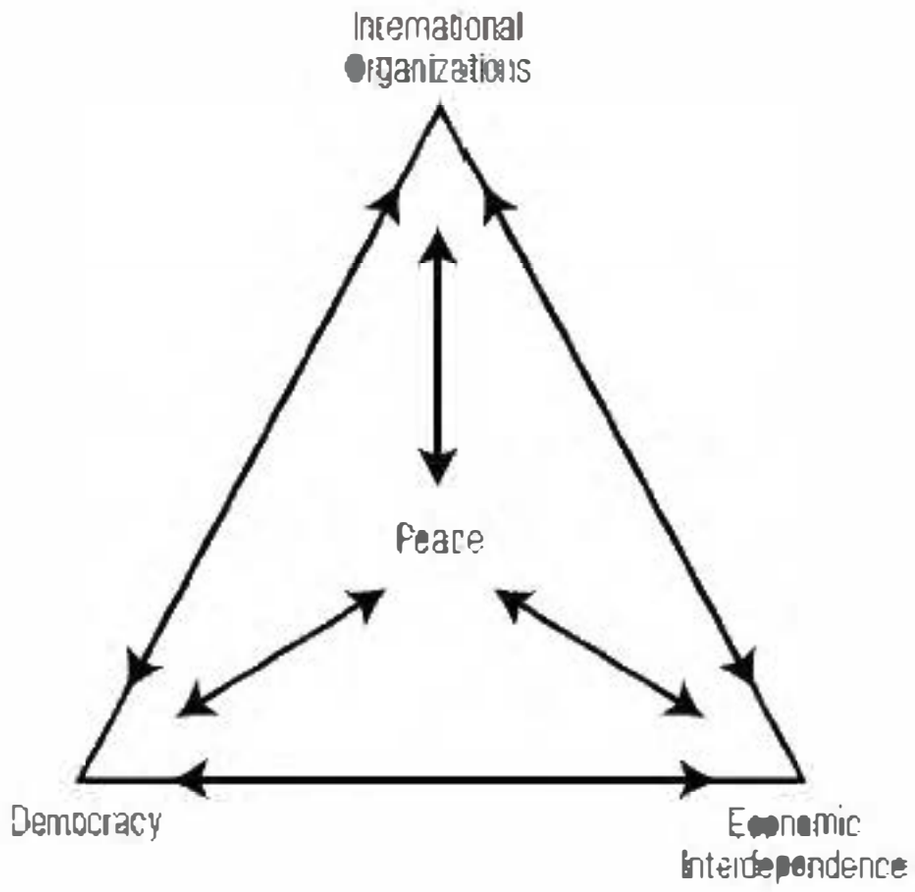

Sumber: https://www.studyblue.com/notes/note/n/international-relations-lecture-three-liberalism/deck/

Karya lainnya yang tidak boleh kita abaikan dalam konteks pemikiran Liberalisme dalam Hubungan Internasional adalah buku karya Norman Angell berjudul *The Great Ilussion* (1909). Di dalam buku tersebut Sir Ralph Norman Angell (1872–1967) - seorang jurnalis dan politisi Partai Buruh Inggris yang dianugerahi gelar bangsawan oleh kerajaan pada tahun 1931 dan mendapat hadiah Nobel pada tahun 1933 - mencoba menjawab pertanyaan yang menjadi bahan diskusi tentang sejarah umat manusia pada waktu itu: mengapa harus ada peperangan? Lebih spesifik lagi, Norman Angell mencoba mendiskusikan mengapa negara-negara di Eropa berkecenderungan saling menyerang satu sama lain sehingga menciptakan perang yang berkepanjangan. Menafikan pandangan bahwa perang dapat membawa kesejahteraan, Angell menyatakan bahwa perekonomian modern yang mendorong terjadinya perdagangan dan berbagai transaksi antar-negara dapat mendorong manusia untuk belajar bahwa kerja sama antar-bangsa akan lebih menguntungkan daripada keterlibatan dalam peperangan yang dapat berdampak kehancuran. Sir Norman Angell - yang merupakan eksponen *World Committee Against War and Fascism* dan anggota Komisi Eksekutif League of Nations / LoN - pada dasarnya berargumen bahwa perekonomian modern akan mendorong umat manusia untuk berpandangan bahwa 'perang adalah sesuatu yang destruktif dan tidak diinginkan oleh manusia'.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

Secara garis besar, argumen Norman Angell dapat diringkas menjadi beberapa poin penting, yakni: (1) Munculnya peradaban ekonomi modern menimbulkan dorongan bagi negara-negara untuk saling bekerja sama dan menghindari peperangan; (2) Peningkatan kerja sama ekonomi akan menciptakan saling ketergantungan (*interdependence*) yang dapat merembet ke sektor-sektor lainnya: politik, sosial-budaya, keamanan dan pertahanan; (3) meningkatnya pembagian kerja internasional (*international division of labour*) dapat meningkatkan kebutuhan untuk saling bekerja sama sehingga kerja sama internasional merupakan sebuah keniscayaan; dan (4) seperti tampak pada pengalaman Eropa pada awal abad ke-20 (sebelum Perang Dunia), saling ketergantungan ekonomi antarnegara dapat mengarah pada integrasi ekonomi yang dapat membuat peperangan dan invasi militer menjadi hal yang tidak berguna dan tidak relevan.

Karya ketiga yang dianggap mewakili pemikir kontemporer Liberalisme/ Idealisme dalam HI adalah sebuah tulisan Michael W. Doyle di jurnal *American Political Science Review*, Volume 80, Nomor 4, edisi Desember 1986 berjudul "*Liberalism and World Politics*". Tulisan di jurnal ini layak didiskusikan karena dalam 100 tahun sejarah jurnal tersebut, tulisan ini merupakan salah satu dari 16 tulisan yang paling banyak dikutip. Doyle – seorang pakar HI alumni Universitas Harvard yang menjadi dosen di berbagai perguruan tinggi ternama antara lain Universitas Warwick, Inggris, Universitas Princeton, Universitas Johns Hopkins, Universitas Yale, dan kini menduduki jabatan sebagai Harold Brown professor dalam bidang hukum dan politik internasional di Universitas Columbia, New York – dalam tulisan tersebut mencoba mempersandingkan tiga perspektif Liberalisme yang diwakili oleh Liberal Pacifis ala Joseph Schumpeter, Liberal Imperialis ala Nicolo Machiavelli, dan Liberal Internasionalis ala Immanuel Kant. Ketiga macam Liberalisme ini mencoba menjelaskan mengapa dalam politik internasional negara-negara liberal terlibat dalam kerja sama saling menguntungkan, peperangan, dan menjadi anggota organisasi internasional.

Liberal Pacifis dikaitkan dengan karya Joseph Schumpeter (1883–1950) *Capitalism, Socialism and Democracy* (1943). Di dalam karya tersebut Schumpeter menyatakan bahwa kombinasi antara kapitalisme dan demokrasi merupakan fondasi penting bagi kerja sama saling menguntungkan antar negara karena kapitalisme – yang menekankan pada akumulasi kekayaan dan cenderung menafikan peperangan – memiliki simbiosis mutualistik dengan demokrasi yang menekankan pada stabilitas dan toleransi. Bagi Schumpeter,

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

di dunia yang didominasi oleh kaum industrialis dan *enterpreneur* - yang mengutamakan profit dan akumulasi modal - peperangan adalah sesuatu yang destruktif dan harus dihindari.[6] Dalam konteks ini Liberalisme Pacifis memberikan identitas negara yang bersifat cinta damai dan berkecederungan besar untuk saling bekerja sama.

Liberal Imperialis terkait dengan gagasan Niccolo Machiavelli (1469–1527) tentang sebuah negara (republik) yang harus terus-menerus berekspansi demi menjaga kelangsungan hidupnya. Bagi Machiavelli, sebuah republik bukanlah pemerintahan demokratis karena demokrasi akan terus-menerus mendapat tekanan sehingga berubah menjadi sebuah tirani. Dalam situasi di mana para pejabat pemerintahan berfungsi sebagai 'raja', para anggota senat bertindak sebagai 'aristokrat' yang memberi perintah, dan pemerintahan tirani mendapat ancaman dari para tirani lain di sekelilingnya, maka ekspansi (penambahan penduduk, wilayah, dan kekayaan alam) merupakan suatu kebutuhan agar rakyat merasa aman dan pemerintah pun terhindar dari keruntuhan. Gagasan yang dituangkan di dalam karyanya berjudul *The Prince* (1535) ini menyarankan agar setiap negara liberal terus-menerus berekspansi demi mempertahankan kelangsungannya sebagai negara berdaulat. Tampak bahwa Liberal Imperialis memberikan warna ekspansif dan agresif sebuah negara liberal yang menjelaskan mengapa negara-negara liberal di Eropa terlibat peperangan.

Liberal Internasionalisme mengacu pada gagasan Immanuel Kant (1724–1804) yang dalam karyanya *Perpetual Peace: a Philosophical Essay* (1795) menyatakan bahwa perdamaian dunia dapat diwujudkan dengan bantuan tiga macam faktor: ketergantungan ekonomi, demokrasi dan organisasi internasional. Konsep perdamaian abadi berdasarkan tiga faktor ini lazim dikenal sebagai '*the Kantian Triangle*' (segitiga Immanuel Kant). Bagi Kant, negara liberal yang merasa nyaman berada dalam stabilitas dan ketiadaan ancaman keamanan cenderung terus-menerus berupaya untuk mempertahankan bahkan memperbaiki kondisi tersebut dengan cara meningkatkan komitmen internasionalnya untukmenjaga perdamaian melalui pengembangan prinsip demokrasi, partisipasi dalam organisasi internasional, penandatanganan pakta pertahanan, dan peningkatan hubungan ekonomi. Hal ini tampak jelas dalam partisipasi Amerika Serikat dalam NATO (*North Atlantic Treaty Organization*) dan berbagai pakta

6 Joseph Schumpeter (1983). *'Capitalism, Socialism and Democracy (1943')*, Vol. 99 No. 307. UK: George Allen and Unwin, hlm. 25.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

pertahanan dengan Jepang, Korea Selatan, Filipina dan Singapura serta berbagai kerja sama ekonomi seperti APEC (*Asia Pacific Economic Cooperation*) dan berbagai forum seperti G-20, WEC (*World Economic Council*), dan sebagainya. Tampak jelas bahwa Liberal Internasionalis menunjukkan wajah kooperatif dan komitmen internasional yang dimiliki sebuah negara liberal dan sekaligus juga menjelaskan mengapa manusia yang cinta damai perlu terus-menerus berikhtiar untuk menjaga perdamaian melalui berbagai komitmen internasional.

Dimensi Praktis Perspektif Liberalisme

Pemikiran Liberalisme dapat terus bertahan sebagai salah satu landasan filosofis praktik hubungan antar-bangsa walaupun mendapat kritik yang bertubi-tubi, terutama dari para pemikir Realis, karena memberikan beberapa tuntunan praktis dalam hubungan antar-aktor pada lingkup global. Ketika kajian perdamaian, ekonomi politik, organisasi regional dan internasional, demokrasi global, dan pentingnya aktor non-negara mulai merambah agenda studi HI pada dekade 1980-an dan 1990-an, pemikiran Liberalisme kembali mendapat tempat dalam studi HI. Dalam kaitan itu, Liberalisme menawarkan 4 dimensi praktis yang harus dipertimbangkan para pelaku dan pengamat politik internasional untuk mencapai hubungan internasional yang ideal. Keempat dimensi praktis tersebut adalah: (1) pemahaman tentang "*positive peace*" (perdamaian positif); (2) tumbuhnya "*the spirit of commerce*" (semangat komersial) dalam politik ekonomi internasional; (3) adanya saling ketergantungan (*interdependence*) dan institusionalisme (*institutionalism*) dalam kerja sama regional dan internasional; dan (4) pentingnya penegakan prinsip hak asasi manusia sebagaimana digariskan dalam kovenan hak sipil dan politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*/ICCPR).

Pemahaman tentang 'Perdamaian Positif' (Positive Peace)

Liberalisme meyakini bahwa perkembangan peradaban umat manusia ditentukan oleh hukum alam (*natural law*) di mana hakikat manusia yang penuh dengan harmoni dan kerja sama dapat membentuk perdamaian abadi sebagaimana dinyatakan oleh Immanuel Kant. Bagi para penganut ajaran Kant, peperangan adalah perilaku menyimpang, irasional, dan pengecualian yang berada di luar hakikat manusia. Belajar dari kondisi politik Perang Dunia, tampak bahwa perang adalah bagian dari upaya pemerintah untuk menaikkan

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

pungutan pajak, memperbesar kontrol birokrasi, dan meningkatkan kontrol pemerintah terhadap rakyatnya. Jika perang merupakan manifestasi dari perilaku manusia yang menyimpang, maka dapat disimpulkan bahwa manusia normal cenderung menghindari peperangan dan berupaya semaksimal mungkin untuk menciptakan harmoni dan kerja sama.

Bagi Immanuel Kant - yang dinyatakan dalam karyanya *Perpetual Peace* (1795), "Walaupun individu/negara pada dasarnya berkarakter *selfish*, tetapi mereka dapat belajar untuk mengembangkan *cosmopolitan behavior*, yaitu bagaimana saling berinteraksi secara damai di bawah naungan *world federation* atau *world government* yang pada gilirannya menciptakan perdamaian positif, di mana rasa permusuhan benar-benar tereliminasi dan peperangan merupakan sesuatu yang langka. Lebih jauh lagi, Imnanuel Kant menyatakan bahwa perdamaian dapat menjadi 'abadi' (*sef-perpetuating*) apabila ditopang oleh tiga faktor yang saling berkaitan, yaitu: demokrasi (*democracy*), organisasi internasional (*international organization*), dan saling ketergantungan ekonomi (*economic interdependence*) yang lazim dikenal dengan istilah '*the Kantian Triangle*' (Segitiga Kant). Pemikiran Kant ini dijadikan dasar bagi para pemikir Liberalis pada awal abad ke-20 seperti Alfred Zinmern, Robert Cecil, David Hunter Miller, dan Woodrow Wilson untuk membentuk Liga Bangsa-Bangsa (*League of Nations*/LoN). Mereka beranggapan bahwa LoN sebagai organisasi keamanan kolektif (*collective security*) dapat menduplikasi organisasi Persemakmuran Inggris (*The British Commonwealth*) yang terbukti mampu menciptakan perdamaian abadi di dunia. Organisasi Persemakmuran Inggris, menurut mereka, terbukti mampu menciptakan perdamaian dalam jangka waktu relatif lama tidak lepas dari peran Inggris yang menyebarluaskan nilai-nilai demokrasi ke seluruh anggotanya. Dalam konteks inilah maka LoN dibentuk dengan harapan agar negara-negara *Great Powers* mendiseminasikan nilai-nilai Liberal Demokrasi untuk menegakkan perdamaian. Namun demikian, fakta bahwa LoN tidak berhasil memeberikan insentif memadai bagi negara-negara anggotanya, terutama kelompok *Great Powers*, maka dua negara besar yakni AS dan Rusia menolak bergabung yang pada gilirannya memperlemah otoritas dan legitimasi LoN.

Optimisme tentang perilaku positif umat manusia yang berkembang sejak abad ke-19 hingga awal abad ke-20 berakhir dengan tragis ketika masyarakat dunia gagal mencegah terjadinya Perang Dunia Pertama (1910-1919) dan Perang Dunia Kedua (1939-1945). Kontroversi di sekitar pembentukan Liga Bangsa-

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

Bangsa - yang tidak menarik minat *Great Powers* (terutama AS dan Rusia) untuk bergabung - membuat lembaga ini mengalami krisis otoritas dan tidak memiliki cukup legitimasi untuk menegakkan perdamaian. Perilaku egoistis dan sikap terlalu mementingkan kepentingan nasional masing-masing negara telah menambah komplikasi keadaan sehingga Perang Dunia Kedua pun tidak bisa dihindarkan. Dalam situasi demikian tampak bahwa gagasan tentang '*Positive Peace*' yang digembar-gemborkan para pemikir Liberalis tidak lebih dari sekadar utopia yang sulit untuk diwujudkan.

Hal ini menciptakan peluang bagi pemikir Realis untuk menyerang argumen kaum Liberalis/Idealis yang dianggap menebarkan pemikiran utopis yang bertentangan dengan realitas. Edward H. Carr dalam karyanya *The Twenty Years Crisis, 1919-1939* (1943) mengidentifikasi sejumlah persoalan dalam perspektif Liberalis/Idealis. Pertama, menilai perilaku negara sebagai perwujudan dari perilaku individu mengandung risiko karena 'negara' dan 'individu' berada dalam peringkat analisis yang berbeda. Kedua, kekuasaan negara tampak berbanding terbalik dengan moralitas negara di mana semakin besar kekuasaan negara akan semakin kecil moralitasnya demi ambisi untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Ketiga, dalam situasi anarki sulit untuk mengharapkan negara-negara tunduk pada moralitas dunia karena mereka cenderung lebih mementingkan kepentingan masing-masing daripada kepentingan bersama. Keempat, kecilnya kemungkinan untuk mengembangkan internasionalisme yang menjadi dasar bagi keamanan kolektif - karena tidak ada satu negara pun yang bersedia mengorbankan kedaulatan nasionalnya untuk diatur oleh pemerintahan dunia - membuat prinsip-prinsip Liberalisme indah pada tataran teori, namun tidak dalam tataran praktis.[7]

Diseminasi Semangat Komersial (the Spirit of Commerce)

Kesadaran akan kondisi autarki (ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri) telah membuat negara-negara di dunia merasa perlu untuk menjalin hubungan satu sama lain. Bagi kaum Liberalis perdagangan bebas merupakan cara damai untuk mencapai kesejahteraan nasional karena menurut Teori Keuntungan Komparatif (*Comparative Advantage Theory*) - yang dikemukakan David Ricardo dalam karyanya *Principles of Political Economy and Taxation* (1919) - perdagangan bebas akan menciptakan pembagian kerja (*division*

7 Edward H. Carr (1947). '*International relations between the two world wars: 1919-1939*'. London: Macmillan, hlm. 63-88.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

of labor) bagi negara-negara yang terlibat di dalamnya di mana negara akan berspesialisasi pada komoditas yang dapat memberinya nilai efisiensi tertinggi dari sisi biaya (*costs*) dan keuntungan (*benefits*).[8] Dengan nada hampir sama, Immanuel Kant (1795) menyatakan bahwa perdagangan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kekuasaan negara-negara yang produktif dan cinta damai mengalahkan mereka yang haus akan peperangan. Perdagangan bebas akan membawa aneka ragam bangsa-bangsa di dunia pada hubungan konstan yang dapat membawa keuntungan material bagi perekonomian masing-masing. Dengan kata lain, perdagangan bebas dapat mempersatukan umat manusia untuk mencapai kemakmuran bersama.

Dalam perekonomian modern, di mana tidak ada negara yang benar-benar 'autarki' (sanggup memenuhi segala kebutuhannya akan sumberdaya alam – pangan, energi, dan bahan tambang), maka semangat komersial akan mendorong arus perdagangan bebas yang lebih memicu saling ketergantungan antar negara. Secara lebih ekstrim, semangat komersial seringkali dianggap sebagai salah satu faktor pendorong terciptanya saling pengertian dan tumbuhnya harmoni kepentingan antar bangsa. Bagi mereka, konflik acapkali disebabkan oleh diterapkannya *barrier* arus barang dan jasa sehingga mendistorsi dan mengesampingkan harmoni kepentingan. Maka tidak mengherankan jika John Stuart Mill mengklaim bahwa perdagangan bebas merupakan sarana untuk mengakhiri perang, sebagaimana dikatakannya: '*it is commerce which is rapidly rendering war obsolete, by strengthening and mutiplying the personal interests which act in natural opposition to it*'.[9] Dalam kondisi demikian, para pemimpin negara akan semakin didorong untuk berpikir bahwa kerja sama ekonomi jauh lebih menguntungkan daripada ekspansi (menambah jumlah penduduk, wilayah, dan sumber daya alam) yang dapat berujung pada peperangan.

Prinsip Saling Ketergantungan dan Institusionalisme (Interdependence and Institutionalism)

Ketika semangat komersialisme mendorong perkembangan perdagangan antar negara yang mempercepat arus perpindahan barang dan jasa antar negara, maka makin banyak negara yang meyakini bahwa kerja sama saling menguntungkan

8 David Ricardo (1891). '*Principles of political economy and taxation*.' London: George Bell and Sons, hlm. 24-25.

9 Scott Burchill (2005). *Op cit.* hlm. 63.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

di bidang ekonomi akan akan menggeser persaingan kekuatan militer dalam hubungan antar negara. Para pakar liberal dalam HI, antara lain, David Mitrany di dalam bukunya *The Functional Theory of Politics* (1976) menyatakan bahwa dalam suasana kerja sama antar negara yang makin meningkat, maka suatu kerja sama sukses di bidang tertentu, misalnya teknologi, akan menimbulkan *'spill over effect'* yakni penularan ke bidang-bidang fungsional lainnya seperti kerja sama sektor energi, perdagangan, sumber daya alam, dan sebagainya. Dalam konteks inilah terjadi proses saling ketergantungan (*interdependence*) di mana negara-negara makin terdorong untuk memperluas lingkup kerja sama mereka.

Perluasan lingkup kerja sama ini dapat terwujud apabila negara-negara tersebut melibatkan diri dalam berbagai organisasi internasional dalam bentuk partisipasi sebagai anggota. Keanggotaan dalam organisasi internasional akan memaksa negara-negara untuk mematuhi berbagai aturan dan perjanjian internasional dan bersikap menahan diri (*self restraint*) dalam menghadapi berbagai provokasi, suatu sikap yang sangat dibutuhkan dalam menggalang kerja sama. Sikap yang lazim dikenal dengan sebutan institusionalisme ini mendasarkan pada keyakinan bahwa hubungan internasional tidak harus berkarakter *zero-sum* (menang-kalah). Sebaliknya kerja sama yang berlandaskan pada itikad baik dan dukungan organisasi internasional dapat membuah keuntungan bersama. Hal inilah yang membuat banyak negara menyadari pentingnya kerja sama dalam situasi anarkis sekalipun. Dalam konteks inilah, Richard Rosecrance di dalam bukunya *The Rise of the Trading States: Commerce and Conquest in the Modern World* (1986) menyatakan bahwa meningkatnya saling ketergantungan antar negara di bidang ekonomi cenderung diikuti dengan menurunnya keinginan untuk menginvasi negara lain. Dengan kata lain, negara pedagang (*trading states*) lebih mementingkan kerja sama komersial daripada kompetisi militer dan invasi teritorial negara lain. Tampak jelas bahwa situasi politik internasional saat ini lebih didominasi oleh prinsip saling ketergantungan (*interdependence*) dan semangat institusionalisme (*institutionalism*) sebagaimana tampak dalam maraknya kerja sama ekonomi regional dan makin berkembangnya organisasi internasional di berbagai bidang.

Dengan nada yang sama, Robert O. Keohane dan Joseph S. Nye (1989) menyatakan bahwa masuknya aktor-aktor non-negara dalam ke politik internasional telah menciptakan dimensi baru dalam hubungan internasional,

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

hubungan yang bersifat "saling ketergantungan yang kompleks" (*complex interdependence*) yang mengandung tiga karakteristik:[10]

Pertama, karakter "jalur yang majemuk" (*multiple channels*) di mana hubungan internasional diwarnai oleh hubungan formal antar kepala negara, hubungan formal antar perusahaan transnasional (TNCs), hubungan formal antar organisasi non-pemerintah (NGOs), hubungan informal antar organisasi masyarakat sipil (CSOs), hubungan informal antar kaum profesional, dan hubungan informal antar individu. Dalam situasi ini negara tidak lagi aktor satu-satunya dalam hubungan internasional.

Kedua, karakter isu yang majemuk (*multiple issues*) yang mencampuradukkan berbagai isu "politik tingkat tinggi" (*high politics*) yang menyangkut isu politik, strategis, dan keamanan dengan isu "politik tingkat bawah" (*low politics*) yang meliputi isu kerja sama perdagangan, investasi, bantuan pembangunan, transfer teknologi, pertukaran buclaya, pendidikan, penelitian, dan sejenisnya. Tampak bahwa ide hubungan internasional tidak didominasi oleh agenda *high politics* yang menjadi ciri perspektif Realisme. Dalam situasi demikian dituntut adanya pengaturan dan koordinasi yang baik untuk mempelancar arus hubungan lintas batas negara (*cross border relations*) yang menjadi tren saat ini.

Ketiga, kekuatan militer tidak lagi menjadi instrumen utama yang digunakan oleh suatu negara terhadap negara lain. Dalam situasi "saling ketergantungan yang kompleks", negara saling berhubungan melalui mekanisme dialog dan kerja sama di berbagai bidang pada banyak forum bilateral dan multilateral baik pada tingkat regional maupun internasional. Dalam situasi semacam ini, para aktor hubungan internasional lebih dituntut untuk mengembangkan pengetahuan yang spesifik dan keterampilan bernegosiasi di forum-forum internasional. Walaupun kekuatan militer tetap diperlukan untuk pertahanan dan keamanan, namun hal itu harus dianggap sebagai pilihan terakhir jika instrumen lain gagal untuk menyelesaikan pertikaian dan perlindungan terbadap warga negara.

Ketiga karakter inilah yang dilihat oleh Robert Keohane dan Joseph Nye sebagai penanda munculnya dimensi baru hubungan internasional menjelang berakhirnya Perang Dingin dan terus berlangsung bingga era pasca Perang

10 Robert Keohane, Joseph Nye (1989). *Power and Complex Interdependena Edisi Kedua.* Boston: Scott Foresman and Company, hlm. 24-25.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

Dingin yang menujukkan kebangkitan perspektif Neo-liberalisme dalam studi HI.

Dukungan terhadap Prinsip Hak Asasi Manusia

Berbagai peristiwa internasional akhir-akhir ini seperti demokratisasi global dan pentingnya memperjuangkan keamanan manusia seolah-olah membantah tuduhan bahwa gagasan demokrasi liberal terlalu etnosentrik dan tidak relevan bagi masyarakat non-Barat. Beberapa peristiwa penting di dunia pasca Perang Dingin seperti keterlambatan masyarakat internasional dalam mencegah bencana kemanusiaan seperti pembersihan etnis (*ethnic cleansing*) dan genosida (*genocide*) di Bosnia, Kosovo, Rwanda, Burundi, Darfur, dan tempat-tempat lainnya membuat para pakar dan pemimpin dunia merasa perlu mengangkat kembali isu hak asasi manusia, khususnya berkaitan dengan hak-hak sipil dan politik mereka. Secara provokatif bahkan Sekretaris Jenderal PBB, Kofi Annan, mengusulkan penerapan prinsip *human security for all* (keamanan manusia untuk semua) yang mengaitkan antara kebebasan dari ancaman fisik (*freedom from fear*) dengan kebebasan dari ancaman pemenuhan kebutuhan (*freedom from pursuing needs*), dan kebebasan dari ancaman penjagaan martabat (*freedom from maintaining dignity*).[11]

Terlepas dari meningkatnya komitmen untuk memperjuangkan keamanan manusia, instrumen hukum untuk melakukan pencegahan terjadinya bencana kemanusiaan tampaknya masih dianggap kurang memadai. Instrumen yang tersedia hingga dekade 1990-an, Bab 7 Piagam PBB (*Chapter 7 of UN Charter*), seringkali dikritik 'terlalu kecil, dan terlambat" (*too little, too late*). Dalam peristiwa genosida di Rwanda dan Burundi pada tahun 1994, Dewan Keamanan PBB dituduh sangat terlambat dalam merespons ancaman genosida yang dihadapi oleh kaum minoritas Tutsi. Ketika pasukan perdamaian UNAMIR sedang panik menghadapi provokasi kaum mayoritas Hutu setelah terbunuhnya presiden terpilih dari suku Hutu, Habrayimana, dan meminta tambahan pasukan secepatnya, Dewan Keamanan sibuk mengadakan rapat di New York untuk memutuskan penambahan pasukan atau tidak. Ketika selama hampir 2 pekan mereka tidak berhasil mencapai kesepakatan, bencana kemanusiaan tidak bisa dihindarkan lagi, antara 800.000 hingga 1.000.000 manusia terbunuh (mayoritas kaum Tutsi) menjadi korban genosida.

11 Kofi Annan (2001). Nobel lecture. *Nobel Lecture, Oslo, 10 Desember*

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

Belajar dari kasus Rwanda-Burundi, pemerintah Kanada melalui ICISS (*International Commission of Intervention and State Sovereignty*) mengusulkan penerapan prinsip R-to-P (*Responsibility to Protect*) untuk menerobos keterbatasan mandat dan syarat prosedural yang membuat Bab 7 Piagam PBB tidak mampu merespon secara cepat dan tepat untuk mencegah bencana kemanusiaan skala besar. R-to-P pada dasarnya memberi otoritas bagi pasukan asing (gabungan maupun secara sepihak) untuk melakukan intervensi kemanusiaan dalam situasi di mana terdapat tanda-tanda ke arah (1) kejahatan perang (*war crimes*); (2) kejahatan kemanusiaan (*crimes against humanity*); (3) pembersihan etnis (*ethnic cleansing*); dan (4) genosida (*genocide*) tanpa harus ditugaskan oleh Dewan Keamanan PBB. Berbagai perdebatan mengenai prinsip R-to-P dan terbelahnya masyarakat internasional tentang penerapan R-to-P atau Bab 7 Piagam PBB menambah ketidakjelasan komitmen internasional untuk memperjuangkan keamanan manusia. Peristiwa kejahatan kemanusaiaan skala besar hampir terulang kembali di Kosovo, Libya, dan Syria akibat ketidakjelasan penerapan R-to-P atau Bab 7 Piagam PBB. Hal ini makin memperkuat dorongan untuk memperjuangkan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia yang dikembangkan dari naskah-naskah klasik seperti *The Magna Charta* (1215), *Bill of Rights* (1689), *Universal Declaration of Human Rights* (1948), *International Covenant on Civil and Political Rights* (1966), dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (1966).

Neoliberal-Institusionalisme dan "*Cooperation Under Anarchy*"

Sebagaimana dialami oleh cabang-cabang ilmu sosial lainnya, studi HI juga mendapat imbas dari revolusi saintifik - lazim dikenal dengan Revolusi Behavioral - yakni sebuah gerakan untuk membuat ilmu sosial menjadi lebih ilmiah dalam hal pemakaian metode yang menjamin presisi, pengukuran hubungan antar variabel, verifikasi data, validasi informasi, penerapan parameter penelitian, dan sebagainya. Jika Revolusi Behavioral menimpa ilmu sosiologi dan ilmu politik di Amerika Serikat pada dekade 1950-an, dampak Revolusi Behavioral baru terasa dalam studi HI pada dekade 1970-an dan 1980-an. Pada saat itu para pakar HI berupaya keras agar studi HI menjadi lebih ilmiah dengan cara membangun model-model tentang hubungan antar negara. Pada tataran praktis, hubungan internasional diwarnai dengan makin besarnya peran organisasi internasional dan berbagai bentuk kerja sama regional yang

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

mendorong terjadinya integrasi. Dunia menyaksikan munculnya organisasi internasional seperti *United Nations Environmental Program* (UNEP), *United Nations Development Fund for Women* (UNIFEM) yang pada tahun 2011 berubah menjadi *UN Women, United Natons Industrial Development Organization* (UNIDO), *International Fund for Agricultural Development* (IFAD), *World Intellectual Property Organization* (WIPO), dan sebagainya. Dunia juga menyaksikan munculnya berbagai organisasi regional sejak dari *European Common Market* (ECM) yang kemudian bermetamorfosa menjadi *European Economic Community* (EEC) dan *European Union* (EU) hingga *Association of South East Asian Nations* (ASEAN), *South Asian Association for Regional Cooperations* (SAARC), *Arab League, Organization of African Union* (OAU), *Union of South American Nations* (Mercosur), *Asia Pacific Economic Cooperation* (APEC), *Shanghai Cooperation Organization* (SCO), dan sebagainya. Berbagai peristiwa tersebut menujukkan bahwa semangat kerja sama internasional melalui berbagai organisasi internasional dan regional makin tumbuh dan berkembang. Fenomena ini memberikan justifikasi empiris bagi munculnya perspektif Neoliberal Insttusionalisme yang menerapkan kembali gagasan Liberalisme klasik dalam konteks organisasi internasional dan regional.

Dalam konteks inilah para pemikir Liberal-Institusionalis mengusulkan model-model kerja sama antar negara. Salah satu gagasan penting dalam kaitan ini adalah buku karya Kenneth Oye berjudul *Cooperation Under Anarchy* (1986). Buku ini seringkali dianggap sebagai karya yang menjembatani gap antara Realisme dan Liberalisme: di satu sisi sepaham dengan argumen Realisme bahwa politik internasional beroperasi dalam situasi anarki yang diwarnai ketiadaan otoritas dunia yang membuat negara cenderung berbuat sekehendaknya demi mencapai kepentingan nasional masing-masing; di sisi lain sepaham dengan argumen Liberalisme bahwa kerja sama antar negara merupakan hal yang tidak dapat dihindari karena negara harus saling bertransaksi dengan rekanan yang paling egoistik sekalipun.

Buku *Cooperation Under Anarchy* ini juga membahas apa dan bagaimana strategi negara dalam melibatkan diri dalam kerja sama dalam situasi anarki tersebut. Bagi Oye, kerja sama yang melibatkan banyak aktor akan membentuk model "*Payoff Structure*" yang mengandung beberapa karakter: kecenderungan manusia untuk jujur atau curang akan membentuk "harmoni" (*harmony*) atau "pengkhianatan" (*defection*), pemberian insentif atau sanksi yang tepat untuk meningkatkan kerja sama saling menguntungkan (*mutual*

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

cooperation) dan menghindari situasi saling mengkhianati (*mutual defection*), dan resiprositas (*reciprocity*) atau hubungan timbal balik antar aktor. Untuk memperoleh hasil optimal, model "*Payoff Structure*" mengharuskan negara menempuh tiga macam strategi: strategi unilateral, yakni melakukan tindakan kooperatif untuk mendapatkan insentif berupa kerja sama dan mengurangi kecenderungan kecurangan dari partner kerja sama; strategi bilateral, yakni menawarkan suatu insentif dan meminta insentif balasan dari partner kerja sama sehingga terbentuklah kerja sama saling menguntungkan; dan strategi multilateral, yakni menginisiasi dan sekaligus mempengaruhi pembentukan rezim internasional dengan insentif dan sanksi yang jelas untuk menciptakan harmoni dalam kerja sama antar negara. Model ini, walaupun mengandung logika rasional, namun hanya bisa diterapkan oleh negara-negara besar (*Great Powers*) yang memiliki cukup sumberdaya dan otoritas untuk memberikan insentif bagi pendukung kerja sama dan sanksi bagi pengkhianat.

Pembahasan tentang karya Oye *Cooperation Under Anarchy* (1986) sebagai salah satu karya pertama pemikir Neoliberal Institusionalisme menunjukkan kepada kita bagaimana model dalam studi HI mampu memberikan penjelasan rasional yang sangat meyakinkan tetapi gagal menampilkan substansi isu yang sedang dibahas. Karya tersebut lebih mengupas model '*Payoff Structure*' dalam kerja sama antar bangsa daripada mengelaborasi tidak adanya autarki (kemandirian) dalam hal kebutuhan ekonomi, energi, dan teknologi yang dialami semua negara di dunia sehingga kerja sama dengan negara lain mutlak diperlukan sehingga mendorong negara untuk rela melakukan kerja sama dalam situasi anarki yang dapat memunculkan negara-negara egoistik dan rentan terhadap kecurangan.

Sejak terbitnya karya Oye tersebut diskusi mengenai *Cooperation Under Anarchy* menjadi semakin marak dalam studi HI. Salah satu isu yang seringkali dibahas adalah bagaimana membangun kerja sama yang jujur dan saling menguntungkan dalam situasi anarki di mana aktor-aktor egoistik berpotensi untuk menciptakan kekacauan dengan melakukan berbagai kecurangan.[12] Dalam kaitan ini, Stephen Krasner menyatakan bahwa dalam situasi anarki kerja sama internasional yang melibatkan banyak aktor memerlukan sebuah 'rezim internasional' yang didefinisikan sebagai 'seperangkat prinsip, norma, aturan, dan prosedur yang dapat memaksa aktor-aktor untuk bersepakat melakukan

12 Stephen Haggard, Beth A. Simmons (1987). 'Theories of International Regimes'. *International Organization*, Vol.41No. 03, hlm. 492.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

kerja sama dalam bidang spesifik tertentu'.[13] Dalam rangka untuk memelihara ketertiban dalam kerja sama internasional, rezim diperlukan untuk mengatur beberapa hal penting seperti: mendistribusikan *public goods*, membatasi penggunaan *power*, dan memberikan sanksi bagi pelanggar kesepakatan serta memberikan insentif bagi pihak-pihak yang kooperatif.[14]

Karya-karya Utama Neoliberal-Institusionalisme

Ada beberapa karya penting lainnya yang mempunyai pengaruh besar dalam membentuk perspektif Neoliberal Institusionalisme. Karya pertama yang tidak boleh dilewatkan adalah buku yang ditulis oleh Ernst B. Haas berjudul *Beyond the Nation State: Functionalism and International Organization* (1964). Di dalam karya yang membuatnya dikenal luas sebagai pencetus Neofungsionalisme[15] dalam studi HI ini, Ernst Haas menyatakan bahwa kecenderungan negara untuk terlibat dalam perang antar-negara dapat diredam dengan cara melakukan berbagai aktivitas yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan yang tidak lagi dilakukan oleh para politisi melainkan dilakukan oleh kaum profesional di bidang teknik atau ekonomi. Dengan kata lain, kerja sama saling menguntungkan akan terwujud apabila lebih melibatkan kaum profesional daripada politisi.[16] Kaum profesional memiliki kemungkinan lebih besar untuk sukses dalam melakukan kerja sama karena mereka pada umumnya memiliki kemampuan belajar dari kesalahan, bersedia mengemban tanggung jawab, dan rasional. Dengan merujuk pada pengalaman *International Labor Organization* (ILO), Haas menyatakan bahwa organisasi internasional jika didesain dan dikelola dengan baik tidak saja mampu melahirkan konvensi-konvensi tentang pekerja, merekomendasi standar upah pekerja, dan memonitor kesejahteraan pekerja seluruh dunia, tetapi juga dapat menciptakan 'efek melimpah' (*spillover effect*) bagi kerja sama di sektor-sektor lain yang berujung pada integrasi internasional.[17] Dengan demikian, bagi Haas dan para neofungsionalis masa depan politik internasional akan mengacu pada sebuah

13 Stephen D. Kresner (1983). *International Regimes*. New York: Cornell University Press, hlm. 185.
14 *Ibid.*, hlm. 198-200.
15 Neofungsionalisme adalah suatu paham yang membahas tentang upaya untuk menggabungkan berbagai kerangka organisasi dalam proses fungsional untuk membentuk integrasi fungsional baik di tingkat regional maupun global, lihat Martin Griffith, Steven Roach, dan Scott Solomon (2009). *'Fifty Key Thinkers in International Relations*, edisi kedua'. New York: Routledge, hlm. 92.
16 Ernst B. Haas (1964). *Beyond the Nation State: Functionalism and International Organizations*. Stanford: Stanford University Press, hlm. 11.
17 *Ibid.*, hlm. 133-134.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

sistem 'multipolaritas yang heterosimetris dan relatif stabil' (*heterosymmetrical multipolarity with reasonable stability*). Sistem ini merupakan gabungan dari berbagai organisasi regional (regionalisme) yang tersebar di berbagai kawasan di Amerika Utara, Amerika Latin, Eropa, Asia, Afrika, dan Oceania. Keadaan relatif stabil akan menjadi ciri utama sistem politik dunia di masa depan karena berbagai regionalisme yang ada lebih bernuansa blok ekonomi (*economic blocs*) daripada aliansi militer.[18]

Karya penting lainnya yang juga dikenal sebagai pembawa Neoliberal Institusionalisme adalah karya kolaboratif dari Robert Keohane dan Joseph Nye berjudul *Power and Interdependence* (1977). Karya yang muncul pada saat masyarakat dunia sedang menikmati stabilitas relatif di bawah kepemimpinan atau hegemoni Amerika Serikat ini memperkenalkan istilah *interdependence* (saling ketergantungan) yang mendominasi hubungan antar negara, di mana negara-negara di dunia saling terikat dalam hubungan ekonomi, keuangan dan teknologi yang saling menguntungkan (*mutual benefit*) manakala ancaman perang terbuka atau agresi militer semakin berkurang. Terciptanya perdamaian negatif (*negative peace*) dalam suasana Perang Dingin, menurut Keohane dan Nye, memberikan kesempatan bagi banyak negara di dunia – terutama kelompok negara-negara berkembang – untuk menjalin hubungan saling ketergantungan di berbagai sektor, khususnya perdagangan, investasi, energi, teknologi, dan sebagainya. Dalam konteks inilah maka sistem internasional akan mengarah pada karakter 'saling ketergantungan yang kompleks' (*complex interdependence*) yang mengandung tiga unsur penting: (1) *multiple channels*: jaringan hubungan yang kompleks antar negara, organisasi internasional, korporasi transnasional, birokrasi, dan masyarakat yang ikut menentukan arah politik dunia; (2) *mutiple issues*: hubungan antar bangsa yang bernuansa majemuk dengan berbagai isu saling tumpang-tindih sehingga membentuk saling ketergantungan yang mematahkan asumsi dasar Realisme bahwa negara adalah aktor utama dalam hubungan internasional. Dalam situasi tersebut, aktor-aktor hubungan internasional perlu melakukan koordinasi kebijakan (*policy coordination*) untuk menjaga ketertiban dunia; dan (3) *decreasing role of military power*: dalam situasi *complex interdependence*, penggunaan militer sebagai instrumen penggetar (*deterrence*) bagi negara lain semakin berkurang digantikan oleh inovasi teknologi dan kekuatan ekonomi.[19] *Complex*

18 *Ibid*, hlm. 483-484.

19 Robert Owen Keohane, Joseph S. Nye (1977). *Loc cit*. hlm. 24-25.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

interdependence tampak mematahkan argumen Realisme yang meyakini bahwa hakikat politik internasional adalah perjuangan untuk memperoleh kekuasaan.

Karya lain yang perlu diperhitungkan dalam mendukung argumen Neoliberal Institusionalisme adalah dua karya David Mitrany masing-masing adalah *The Functional Approach to World Organization* (1948) yang merupakan artkel di Jurnal *International Affairs* dan gabungan rampai berjudul *The Functional Theory of Politics* (1975). Dengan menawarkan konsep fungsionalisme (*functionalism*), Mitrany (1975) menyatakan bahwa sebuah organisasi di tingkat global maupun regional dapat bertahan lama apabila dibangun atas dasar premis administrasi yang efisien dan penggunaan sumberdaya minimal. Organisasi yang dijalankan secara efisien, ditambah dengan penyediaan insentif dan sanksi yang tepat bagi para anggotanya dapat memperkuat soliditas yang penting bagi perdamaian dan ketertiban dunia.[20] Saat ini, konsep fungsionalisme David Mitrany dipakai sebagai konsep yang paling akurat dalam menjelaskan evolusi regionalisme, terutama berkaitan dengan terbentuknya Uni Eropa dari Pasar Bersama (*Common Market*) ke Integrasi Ekonomi (*Economic Integration*) menjadi Uni Eropa (*European Union*). Konsep fungsionalisme Mitrany ini merupakan adaptasi dari konsep yang ditulisnya pada dekade 1930-an tentang pemerintahan internasional (*international government*). Setelah menghadapi hujan kritik sebagai konsep yang utopis, tidak mungkin diterapkan, dan mengandung asumsi tentang manusia yang keliru, Mitrany lebih memfokuskan pada upaya menjawab pertanyaan: mengapa dan bagaimana organisasi global dan regional dapat bertahan lama? Tanpa maksud untuk mengecilkan peran negara-bangsa (*nation-states*), Mitrany menyatakan bahwa pembentukan asosiasi atau federasi di kawasan tertentu merupakan suatu keniscayaan karena negara-negara tertentu seperti India, Burma, dan Malaysia pada saat tertentu merasa perlu membangun sistem transportasi dan komunikasi. Dalam keadaan demikian bukan tidak mungkin mereka akan membentuk asosiasi yang bertugas menyusun rencana pembangunan sistem transportasi dan komunikasi untuk kepentingan bersama. Berbeda dengan pemerintahan internasional (*international government*), organisasi global di masa mendatang, menurut Mitrany, harus dibentuk sesuai dengan fungsinya sebagaimana organisasi buruh sedunia (*International Labor Organization*/ILO) berfungsi dalam menyetarakan kondisi kerja untuk para

20 A. Popoviciu (2010). 'David Mitrany and Functionalism: the Beginning of Functionalism'. *Revista Română de Geografie Politica*, Vol. 1 No. 12, hlm. 162.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

buruh sedunia.[21] Dapat disimpulkan bahwa David Mitrany sangat meyakini bangsa-bangsa didunia dapat dipersatukan dalam kerja sama fungsional ketika mereka dibebaskan dari segala bentuk ancaman serangan militer melalui jaminan keamanan yang diberikan oleh negara-negara adi kuasa (*super power*).

Tampak bahwa karya-karya Neoliberal Institusionalisme yang telah dibahas tersebut di atas menunjukkan adanya konvergensi antara Realisme/ Neorealisme dengan Neoliberal Institusionalisme. Konvergensi ini setidaknya mencakup tiga hal. Pertama, Neoliberal Institusionalisme mengakui bahwa stabilitas politik internasional - yang merupakan syarat bagi terbentuknya kerja sama saling menguntungkan antar negara - dapat diciptakan dalam situasi perimbangan kekuatan (*balance of power*) di bawah kepemimpinan dua negara adi kuasa (*super power*). Kedua, Neoliberal Institusionalisme bersepakat dengan Realisme/Neorealisme bahwa upaya pemenuhan kepentingan nasional oleh suatu negara adalah hal yang wajar, maka kerja sama global dan regional harus dibangun dengan premis untuk memberikan insentif dalam rangka pemenuhan kepentingan nasional bagi anggotanya. Ketiga, Neoliberal Institusionalisme sepakat dengan Realisme/Neorealisme bahwa politik internasional pada dasarnya bersifat anarki, tetapi perilaku rasional negara akan membuat negara yang paling egosentrik sekalipun merasa perlu bekerja sama di sektor-sektor fungsional seperti transportasi, komunikasi, perdagangan, teknologi, kesehatan, pengadaan energi, dan sebagainya mengingat bahwa banyak di antara mereka tidak dapat memenuhi hal tersebut secara autarkis.

Kesimpulan

Bab ini mendiskusikan bagaimana Liberalisme - yang muncul pada 1920-an - meletakkan dasar filosofis dan bagaimana neoliberal institusionalisme - yang berkembang pada dekade 1970-an - meletakkan dasar sistemik atau saintifik bagi teori HI. Keduanya memberikan dasar analisis bagi fenomena hubungan internasional yang lebih menonjolkan pada sifat-sifat kooperatif manusia yang berpotensi untuk menjalin kerja sama dalam situasi anarkis, membentuk regionalisme, dan menjaga perdamaian dunia.

Liberalisme berbeda dengan Neo-liberal Institusionalisme dalam tiga hal penting. Pertama, menyangkut peringkat analisis (*level of analysis*),

21 David Mitrany (1948). 'The Functional Approach to World Organization'. *International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944)*, Vol. 24 No. 3, hlm. 360-361.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

Liberalisme cenderung berada pada level negara atau nasional; sementara Neoliberal Institusionalisme berada pada peringkat global dengan melihat pada sistem global. Kedua, dari sisi metodologis, Liberalisme bertumpu pada metode historis yang mengedepankan sekuensi sejarah dan alur cerita; sedangkan Neoliberal Institusionalisme bertumpu pada metode saintifik yang mengutamakan presisi, validitas, regularitas, dan penentuan parameter dalam penelitian HI. Ketiga, dari sisi bagaimana mereka memandang aktor hubungan internasional, Liberalisme tampak sepaham dengan Realisme klasik bahwa negara-bangsa merupakan aktor utama hubungan internasional; sementara itu Neoliberal Institusionalisme meyakini adanya pluralisme aktor HI mencakup negara, birokrasi, organisasi pemerintah internasional, organisasi non-pemerintah internasional, kelompok-kelompok anti-kemapanan, korporasi transnasional, dan individu yang tindakannya berdampak transnasional yang membawa berbagai isu yang saling tumpang tindih (*overlapping mutiple issues*).

Dengan demikian pembaca dapat mengetahui bahwa masing-masing perspektif memiliki kontribusi dalam perkembangan teori-teori HI yang kita pelajari. Hal ini membuktikan bahwa munculnya perspektif baru tidak serta merta menafikan perspektif yang ada sebelumnya. Bahkan sebaliknya, kemunculan Neoliberal Institusionalisme justru makin menyempurnakan argumen-argumen Liberalisme.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

BAB 5

REALISME DAN NEOREALISME

Pengantar

Perspektif Realisme muncul sebagai reaksi keras terhadap kegagalan perspektif Liberalisme/Idealisme dalam mencegah agresivitas negara tertentu yang menandai pecahnya Perang Dunia Kedua. Bagi kaum Realis - terutama E.H. Carr dan H.J. Morgenthau - kepercayaan berlebihan Liberalisme/Idealisme terhadap adanya moralitas global dan harmoni kepentingan yang dapat menghindarkan negara-negara dari peperangan. Kegagalan Liga Bangsa-Bangsa - yang dibentuk oleh kaum Liberalis/Idealis seperti Norman Angell, Woodrow Wilson dan Alfred Zimmern - dalam mencegah pecahnya Perang Dunia Kedua dijadikan momentum oleh kaum Realis untuk menyerang perspektif Liberalisme/Idealisme.

Inti dari serangan kaum Realis adalah bahwa analisis kaum Liberalis/Idealis terhadap fenomena politik internasional yang mendasarkan pada asumsi bahwa negara seperti layaknya individu memiliki kecenderungan baik dan saling bergantung satu sama lain merupakan sebuah kekeliruan. Sebaliknya kaum Realis berpendapat bahwa hakikat manusia dan negara pada dasarnya agresif dan egosentrik sehingga politik internasional adalah arena perjuangan untuk memperoleh kekuasaan. Dalam situasi anarkis (ketiadaan pemimpin dunia), maka masing-masing negara harus memperjuangkan kelangsungan hidupnya melalui pembangunan kekuatan militer.

Tidak dapat dipungkiri bahwa Realisme yang digagas oleh para pakar HI di Amerika Serikat pada dekade 1940-an seperti H.J. Morgenthau, George F. Kennan, Raymon Aron, E.H. Carr (sejarawan Inggris yang berkiblat ke Amerika Serikat), John Herz, dan yang lainnya menjadi perspektif yang dominan

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

terutama pada masa Perang Dunia Kedua (1939-1945) dan Perang Dingin (1950-1990). Dominasi Realisme dalam teori dan praktik hubungan internasional adalah karena beberapa faktor. Pertama, Realisme menggambarkan secara tepat agresivitas Nazi Jerman dalam melakukan invasi ke Polandia pada 1 September 1939 dan ekspansi ke hampir seluruh Eropa yang menandai pecahnya Perang Dunia Kedua. Kedua, kecenderungan negara-negara besar untuk terlibat dalam perlombaan senjata menegaskan argumen Realisme bahwa negara secara naluriah akan membangun kekuatan militer demi memperjuangkan kekuasaan. Ketiga, Realisme menawarkan konsep-konsep seperti kepentingan nasional, integritas teritorial, kekuatan nasional, kedaulatan negara, politik luar negeri dan sebagainya yang sangat berguna bagi para politisi untuk memakai konsep-konsep tersebut dalam membangun jargon-jargon yang membangkitkan kebanggaan nasional yang penting untuk mempertahankan kekuasaan. Keempat, Realisme menawarkan proposisi-proposisi yang mendekatkan teori dengan praktik HI sehingga para politisi dapat memberikan justifikasi teoretis bagi kebijakan luar negeri maupun domestik yang mereka lakukan. Sebagai contoh logika *si vis pacem para bellum!* (jika ingin perdamaian, maka bersiap-siaplah untuk berperang!) dipakai para politisi untuk membangun kekuatan militer. Kelima, proposisi Realisme tentang sistem *Balance of Power* (perimbangan kekuatan) yang membentuk struktur bipolar dan menciptakan perdamaian negatif (*negative peace: the absence of war*) mendapat dukungan fakta empiris yang kuat. Pada masa Perang Dingin, bipolaritas antara AS dan Uni Soviet mampu mencegah peperangan, walaupun dalam suasana penuh ketegangan karena ancaman perang nuklir antara kedua negara adikuasa.

Bab ini akan membahas bagaimana Realisme klasik yang berkembang sejak dekade 1940-an dan Neorealisme yang berkembang sejak dekade 1970-an mendominasi teori dan praktik Hubungan Internasional hingga dekade 1990-an ketika akhir Perang Dingin memunculkan teori-teori baru di luar arus utama. Pembahasan akan diawali dengan karya-karya penting Realisme Klasik, dilanjukan dengan Dimensi Praktis Realisme Klasik, Revolusi Saintifik yang mengawali munculnya Neorealisme, dilanjutkan dengan pembahasan tentang kemunculan Neorealisme, karya-karya Penting Neorealisme, Kontribusi Praktis Neorealisme, dan diakhiri dengan Kesimpulan yang merangkum lintasan sejarah Realisme Klasik dan Neorealisme.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

Landasan Filosofis Realisme

Landasan filosofis perspektif Realisme dapat ditelusuri jauh ke sistem negara-kota (*city-states*) pada zaman Yunani kuno ketika seorang filsuf Thucydides (471 - 400 BC) dalam karyanya *The Peloponnesian War* mendokumentasikan perang dua puluh delapan tahun antara Athena melawan Sparta. Perang itu sendiri, menurut Thucydides, dipicu oleh kekhawatiran berlebihan Sparta terhadap pembangunan kekuatan militer Athena. Kekhawatiran ini terkait dengan ancaman yang dihadapi Sparta yang kemungkinan akan kehilangan pegaruhnya di dalam Liga Hellenic (*Hellenic League*) yang merupakan asosiasi berbagai negara-kota di Yunani. Seperti dinyatakan Thucydides: "Apa yang membuat peperangan sulit dicegah adalah peningkatan kekuatan militer Athena yang melahirkan ancaman bagi Sparta sehingga memunculkan sikap permusuhan yang berujung peperangan".[1] Dapat disimpulkan bahwa Thucydides menyatakan bahwa ketiadaan perimbangan kekuatan antara Athena dan Sparta telah memicu terjadinya perang Peloponnesia yang melibatkan banyak negara-kota di Yunani.

Pada abad pertengahan, Realisme mendapat suntikan filosofis dari filsuf Inggris Thomas Hobbes (1588 - 1679). Di dalam karyanya *Leviathan* (1651), Hobbes mencoba mengidentifikasi perilaku manusia dalam hubungannya satu sama lain berdasarkan tiga asumsi dasar: (1) Manusia pada dasarnya sederajat; (2) manusia saling berinteraksi dalam situasi anarkis sehingga bebas melakukan kehendaknya masing-masing; dan (3) Dalam situasi anarkis, manusia cenderung digerakkan oleh motif untuk berkompetisi, saling intrik, dan semangat untuk mengungguli pihak lain. Dalam politik internasional hakikat manusia yang demikian seringkali berujung pada perang massal (*a war of all against all*). Pengertian manusia pada dasarnya sederajat dapat diartikan bahwa 'manusia yang paling lemah pun berpeluang untuk mengalahkan manusia terkuat jika memakai senjata yang canggih atau beraliansi dengan manusia lainnya mengeroyok pihak yang kuat'.[2] Karena itu, bagi penguasa absolut sangat penting untuk mengumpulkan kekuasaan dan kontrol politik agar ditakuti rakyatnya. Dalam situasi di mana rakyat tidak puas dan melakuan pemberontakan, adalah lebih penting jika penguasa ditakuti walaupun tidak dihormati oleh rakyatnya.[3]

1 Paul R. Viotti, Mark V. Kauppi (1999). *'International Relations Theory: Realism, Pluralism, Globalism, and Beyond'*. Boston: Allyn and Bacon, hlm. 58.
2 Jack Donelly (2006). 'Sovereign Inequalities and Hierarchy in Anarchy: American Power and International Society'. *European Journal of International Relations*, Vol. 12 No. 2, hlm. 32.
3 Paul R. Viotti, Mark V. Kauppi (1999). *Op cit*, hlm. 60.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

Dalam politik internasional, keamanan dunia akan ditentukan oleh hubungan antar negara-negara besar (*Great Powers Politics)* bukannya oleh hubungan antar negara-negara kecil dan menengah. Dengan demikian, tampak bahwa Hobbes menekankan pada pentingnya kekuasaan dan pembangunan kekuatan militer untuk menjamin kelangsungan hidup dalam situasi anarkis dan kompetitif.

Karya filosofis lainnya pada abad pertengahan adalah Noccolo Machiavelli (1469 - 1527). Di dalam karyanya *The Prince*, Machiavelli menceritakan pengalamannya sebagai diplomat bagi negara Florence di Italia. Bagi dia, pergaulan antar negara terdiri dari dua bagian: sesuatu yang seharusnya terjadi (*should or ought to be*) adalah bagian yang berbicara mengenai moralitas dan kebaikan; dan sesuatu yang senyatanya terjadi (*real politics*) yaitu pergaulan yang penuh kompetisi, intrik, dan perjuangan demi kekuasaan. Bagi Machiavelli, walaupun para diplomat diinstruksikan untuk melakukan kebaikan-kebaikan dalam konteks apa yang seharusnya dilakukan (*what ought to be done*), tetapi realitas pergaulan antar negara yang penuh nuansa kompetisi dan perebutan kekuasaan akan menuntun para diplomat untuk menghadapi *real politics* di mana mereka saling melakukan intrik dan selalu mencari celah untuk menghantam lawan.[4] Ketiga pandangan filosofis tersebut (Thucydides, Thomas Hobbes, dan Niccolo Machiavelli) memberikan landasan berpikir bagi disiplin Hubungan Internasional - khususnya perspektif Realisme - untuk mengkaji politik internasional dari sudut pandang hakikat manusia yang agresif dan egoistik, kecenderungan untuk bersaing dalam memperjuangkan kekuasaan, dan penggunaan perang sebagai instrumen untuk menguasai atau mengontrol pihak lain.

Karya-karya Penting Realisme Klasik

Walaupun landasan filosofis Realisme klasik telah diletakkan jauh pada masa pra-sejarah dan abad pertengahan, namun sebagai Teori Hubungan Internasional secara utuh yang didokumentasikan secara sistematis dalam kajian dan pengajaran disiplin HI di berbagai jurnal ilmiah dan diskusi akademis di kampus-kampus Realisme klasik muncul pada masa pecahnya Perang Dunia Kedua. Pada saat itu seorang sejarawan Inggris, E.H. Carr menulis buku berjudul *The Twenty Years Crisis 1919-1939* (1939). Berpendidikan di Universitas Cambridge, Inggris, E.H. Carr lebih dikenal kiparahnya di Amerika Serikat.

4 Paul R. Viotti, Mark V. Kauppi (1999). *Op cit*, hlm. 59-60.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

Karya Carr yang sering dipakai sebagai teks rujukan bagi Realisme klasik di berbagai diskusi dan pengajaran disiplin HI ini pada dasarnya diawali dengan serangan terhadap pemikiran Liberal/Idealis - yang disebut oleh Carr sebagai utopis - dan kemudian dilanjutkan dengan argumen-argumen utama Realisme. Argumen E.H. Carr di dalam karyanya dapat diringkas ke dalam beberapa poin penting sebagai berikut:

1. Kritik terhadap gagasan keamanan kolektif (*collective security*): Konsep Keamanan Kolektif yang coba diterapkan oleh Liga Bangsa-Bangsa dengan mengacu pada pandangan Liberal/Idealis bahwa manusia pada dasarnya berkecenderungan baik untuk saling bekerja sama ternyata terbukti gagal. Kegagalan ini merupakan akibat asumsi Liberal/Idealis tentang perilaku negara yang keliru, di mana fakta menjukkan bahwa negara berkecenderungan egoistik dan agresif sehingga tidak mungkin membentuk suatu Keamanan Kolektif.[5]
2. Kritik terhadap konsep Harmoni Kepentingan (*Harmony of Interests*): Ide harmoni kepentingan yang digagas oleh kaum Liberal/Idealis dan diyakini mampu menggerakkan kerja sama internasional hanya ada dalam angan-angan karena pada kenyataannya dalam kondisi politik internasional yang anarkis setiap negara akan memperjuangkan kepentingan masing-masing secara egosentrik.[6]
3. Kekuasaan sebagai unsur utama politik internasional: Hakikat dari politik internasional adalah kekuasaan (*power*) yang ditopang oleh tiga unsur penting: (a) kekuatan militer (*military power*); (b) kekuatan ekonomi (*economic power*); dan (c) kekuatan untuk mempengaruhi (*power over opinion*) yang mempunyai peran penting dalam menjaga kelangsungan hidup suatu negara.[7]
4. Tidak ada moralitas dalam politik internasional: Moralitas dalam politik internasional merupakan hal yang *nonsense* karena pandangan tersebut didasarkan pada personifikasi negara sebagai perwujudan dari individu yang kooperatif dan berperilaku baik. Personifikasi ini sungguh tidak tepat karena berada pada *level of analysis* (peringkat analisis) yang berbeda dan juga didasarkan pada pandangan yang keliru tentang manusia. Karena itu dapat dinyatakan dengan tegas bahwa

5 Edward H. Carr (1947). '*International relations between the two world wars, 1919-1939*'. London: Macmillan, hlm. 27-30.
6 *Ibid.*, hlm. 80-84.
7 *Ibid.*, hlm. 102-114.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

politik internasional tidak mengenal adanya moralitas, yang ada adalah '*survival of the fittest*' (keberlangsungan mereka yang paling fit).[8]

Keempat poin inilah yang sering dikaitkan dengan upaya E.H. Carr untuk menghantam Liberalisme/Idealisme sekaligus memperkenalkan pemikiran Realisme klasik yang kemudian mendominasi wacana studi HI, terutama ketika konsep-konsep dasarnya dipakai dalam praktik hubungan luar negeri Amerika Serikat dan negara-negara lain di dunia.

Masih pada tataran teoretis, pakar HI lainnya yang juga membahas Realisme klasik secara sistematis adalah H.J. Morgenthau (1904-1980). Berpendidikan di Universitas Frankfurt dan Munich, Jerman, Morgenthau membangun karir akademiknya di Amerika Serikat ketika dia menghindari prosekusi yang dilakukan oleh Nazi Jerman terhadap kaum minoritas Yahudi. Dalam karyanya *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace* (1948) mencoba untuk menepis kesalahan persepsi tentang Realisme yang sering dilakukan pakar politik internasional pada saat itu dengan mengemukakan enam prinsip fundamental Realisme yang dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Politik internasional penuh dengan prasangka: Politik internasional, sebagaimana halnya politik pada umumnya, dituntun oleh hukum-hukum obyektif (*objective laws*) yang berakar pada hakikat manusia yang penuh prasangka (*prejudice*) sehingga melahirkan perilaku yang egoistis dan agresif. Dalam situasi anarkis, manusia berkencerungan untuk berperilaku egoistis dan agresif demi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Dalam politik internasional, perilaku negara merefleksikan perilaku manusia di mana para pemimpin negara dalam melaksanakan politik luar negeri masing-masing memiliki pilihan terbatas, yakni bertindak egoistis dan agresif demi mempertahankan kelangsungan hidup negaranya dalam pergaulan internasional.[9]
2. Hakikat politik internasional adalah perjuangan kepentingan: Realisme mendapat tempat penting dalam studi HI karena menawarkan konsep 'kepentingan' (*interest*) yang didefiniskan dalam konteks perebutan kekuasaan (*struggle for power*). Dengan konsep kepentingan ini, Realisme mencoba melihat secara faktual keterkaitan antara alasan

8 *Ibid*, hlm. 148-150.

9 H.J. Morgenthau (1978 [1948]). '*Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*'. New York: Alfred P. Knopf, hlm. 4-5.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

(*reason*) dengan fakta (*facts*) dalam politik internasional. Dalam pergaulan antar bangsa, para pemimpin negara selalu dituntun oleh pemenuhan 'kepentingan nasional' (*national interests*) yang didapat dengan cara apapun - dialog maupun peperangan.[10]

3. Kepentingan yang didefinisikan sebagai 'kekuasaan' merupakan penentu arah hubungan antar negara: Realisme berasumsi bahwa konsep kepentingan yang didefinisikan sebagai kekuasaan (*power*) merupakan hukum objektif yang berlaku universal, walaupun dapat berubah sesuai perjalanan waktu. Sebagai contoh jika pada masa Perang Dunia kepentingan nasional negara-negara yang terlibat peperangan terfokus pada perlindungan integritas teritorial, pada masa Perang Dingin, kepentingan nasional negara-negara lebih terkonsentrasi pada pemeliharaan stabilitas dan perdamaian dalam situasi perimbangan kekuatan (*Balance of Power*). Dalam situasi demikian Realisme meyakini bahwa 'kepentingan' merupakan standar ukuran di mana tindakan politik suatu negara harus diukur dan diarahkan.[11]
4. Kesinambungan bangsa (*national survival*) lebih penting daripada moralitas dan etika politik internasional: Sekalipun Realisme menyadari pentingnya moralitas dalam tindakan politik, tetapi Realisme juga menyadari adanya pertentangan antara seruan moral dengan persyaratan bagi kesuksesan suatu tindakan politik. Dengan kata lain, Realisme mengakui pentingnya moralitas, tetapi lebih mementingkan pentingnya pencapaian tujuan - yakni kesinambungan (*national survival*) suatu negara dalam pergaulan internasional - sehingga Realisme berkeyakinan bahwa kebajikan moral dan etika politik tidak bisa diterapkan jika tidak dapat memberikan jaminan bagi kelangsungan hidup suatu negara.[12]
5. Tindakan negara yang mengutamakan moralitas universal di atas kepentingan nasional adalah suatu kebodohan politik (*political folly*): Realisme menolak pandangan bahwa aspirasi-aspirasi moral setiap bangsa identik dengan hukum moral yang berlaku universal karena aspirasi moral suatu bangsa bersifat faktual, sedangkan hukum moral universal menyangkut apa yang seharusnya. Menyamakan kedua hal tersebut merupakan tindakan naif dan kebodohan politik (*political*

10 *Ibid.*, hlm. 5-7.
11 *Ibid.*, hlm. 8-10.
12 *Ibid.*, hlm. 10.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

folly) karena memperlakukan moralitas yang dibungkus dengan nasionalisme yang sempit sama dengan moralitas universal merupakan kebodohan yang tidak dapat dimaafkan. Moralitas nasional sarat dengan kepentingan jangka pendek, sedangkan moralitas universal sarat dengan idealisme. Maka, Realisme berusaha menekankan pada moralitas nasional yang lebih realistis dan faktual.[13]

6. Kekhasan perspektif Realisme adalah konsep '*struggle for power*': Realisme memiliki asumsi dan proposisi yang sangat berbeda dengan aliran pemikiran lainnya. Seorang Realis akan berpikir bahwa politik internasional perebutan kepentingan yang didefinisikan sebagai '*power*' (kekuasaan), seperti halnya seorang ekonom berpikir tentang aktivitas ekonomi sebagai upaya mewujudkan kepentingan yang didefinisikan sebagai '*wealth*' (kesejahteraan), dan juga seorang ahli hukum yang memperjuangkan kesesuaian antara tindakan dengan aturan hukum. Dalam konteks hubungan antar negara, seorang Idealis akan bertanya: "Apakah tindakan politik negara tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip moral universal?"; sedangkan kaum Realis cenderung bertanya: "Bagaimanakah dampak tindakan politik negara tersebut terhadap *power* bangsa tersebut?". Dengan demikian tampak bahwa Realisme lebih memfokuskan pada fakta adanya perjuangan demi kekuasaan daripada penerapan standar moralitas dalam pergaulan internasional.[14]

Pandangan Carr dan Morgenthau tentang politik internasional - yang lazim dikenal sebagai Realisme Klasik atau Realisme Politik - menampakkan karakternya sebagai perspektif yang lebih mengedepankan unit/negara sebagai fokus perhatian. Menurut istilah R.B.J. Walker (1993) model analisis Realisme Klasik bersifat '*Inside Out*' di mana unit/negara mempengaruhi sistem internasional; sedangkan model analisis Neorealisme (yang akan dibahas kemudian) lebih bersifat '*Outside In*' di mana sistem internasional/regional mempengaruhi perilaku unit/negara.

13 *Ibid*, hlm. 11.
14 *Ibid*, hlm. 12.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

Revolusi Saintifik dan Dampaknya bagi Realisme

Ketika perspektif Realisme mulai mendominasi studi Hubungan Internasional, terutama di Amerika Serikat, dengan berbagai penjelasannya tentang Perang Dingin Timur-Barat, perlombaan senjata, penggetaran nuklir (*nuclear deterrence*), dan sebagainya, pada dekade 1950-an di Amerika Serikat sedang terjadi fenomena Revolusi Behavioralisme yang menyerukan sebuah revolusi dalam ilmu sosial, yakni membatasi pokok bahasan (*subject matter*) ilmu sosial pada perilaku manusia yang dapat diobservasi (*observable*), dapat diukur (*measureable*), dapat dikuantifikasi (*quantifiable*), dan dapat diuji secara ilmiah (*testable*). Gerakan yang juga lazim dikenal sebagai Revolusi Saintifik ini dipelopori oleh seorang ahli biologi - Ludwig von Bertalanffy - yang berambisi untuk menyatukan metode semua ilmu sosial maupun eksakta. Melalui tulisannya '*General System Theory - A New Approach to Unity of Science*' di dalam jurnal ilmiah *Human Biology* edisi Desember 1951. Di dalam artikel tersebut von Bertalanffy menyatakan bahwa teori sistem yang terdiri dari komponen-komponen organik yang saling berhubungan satu sama lain dapat diterapkan pada semua ilmu seperti biologi, fisika, ekonomi, psikologi, sosiologi, politik, dan sebagainya.

Teori sistem - yang menekankan pada pendekatan holistik dan organik - diadopsi oleh sosiologi melalui Talcott Parsons, Bronislaw Malinowski, Emile Durkheim, Marcel Mauss, dan Radcliffe-Brown dalam bentuk pendekatan Struktural Fungsional dengan konsep-konsep utama seperti 'keluarga inti', 'solidaritas organik', 'solidaritas mekanis' 'ekuilibrium sosial', dan sebagainya. Dalam ilmu politik, teori sistem dibawa oleh tokoh-tokoh seperti David Easton, Gabriel Almond, Heinz Eulau, Karl W. Deutsch, dan Niklas Luhmann dalam bentuk Sistem Politik yang terdiri dari Input (tuntutan dan dukungan), Konversi (proses pengolahan input), dan Output (strategi dan kebijakan).

Dalam studi Hubungan Internasional, Revolusi Saintifik masuk melalui Morton A. Kaplan, Kenneth Waltz, George Modelski, Thomas Schelling, Oskar Morsgenstern, dan Bruce Bruno de Mesquita. Dampak terbesar dari Revolusi Behavioralisme bagi studi HI khususnya perspektif Realisme adalah bangkitnya kesadaran untuk membuat studi HI lebih saintifik sehingga lebih memenuhi syarat sebagai ilmu. Dalam konteks ini, Morton A. Kaplan membuat tulisan berjudul *Is International Relations a Discipline?* di dalam *Journal of Politics* edisi Agustus 1961 yang pada dasarnya meragukan bahwa

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

Hubungan Internasional merupakan suatu disiplin ilmu karena pokok bahasan (*subject matter*) dan metode (*methods*) nya masih diperdebatkan. Kegalauan ini dilanjutkan oleh Kaplan dengan sebuah tulisan provokatif berjudul *The New Great Debate: Traditionalism vs Science in International Relations* di dalam jurnal *World Politics* edisi Oktober 1966 untuk menanggapi provokasi Hedley Bull bahwa fakta sosial dalam HI yang serba tidak pasti, sulit diprediksi, dan mengandung bias kultural tidak bisa diteliti dengan metode saintifik/positivis. Sebagaimana telah dibahas pada Bab 3 buku ini, di dalam tulisan tersebut, Kaplan melancarkan serangan terhadap metode Klasik/Historis/Tradisionalis yang selama ini dipakai para pemikir Realis klasik dalam menghasilkan karya-karya mereka.

Kemunculan Neorealisme/Realisme Struktural/Realisme Saintifik

Di antara sejumlah tokoh tersebut, salah satu yang paling sering dibahas, dipuji dan dikritik sebagai pencetus Realisme Saintifik atau Neorealisme adalah Kenneth Waltz. Waltz adalah Guru Besar Hubungan Internasional di Universitas California di Berkeley (UC Berkeley) dan Universitas Columbia, New York. Pada tahun 1979 dia menulis karya fenomenal berjudul *Theory of International Politics* dengan membawa lima misi yang ditulisnya sekitar satu dekade kemudian di dalam artikel berjudul *Reflections on Theory of International Politics*:[15]

1. Mengembangkan teori politik internasional yang lebih ilmiah daripada yang pernah dikembangkan oleh Realisme klasik.
2. Membuat para peneliti HI mampu membedakan antara "unit" (peringkat nasional) dan 'struktur/sistem' (peringkat regional dan/atau internasional) dan membangun konektivitas di antara keduanya.
3. Menunjukkan bahwa pola pikir Realisme klasik yang berkecenderungan "*Inside-Out*" (dari dalam ke luar atau unit mempengaruhi struktur/sistem) tidak memadai, sehingga diperlukan pemikiran "*Outside-In*" (dari luar ke dalam atau struktur/sistem mempengaruhi unit) dalam karya-karya HI.
4. Menunjukkan pentingnya menganalisis bagaimana perilaku negara berbeda satu sama lain dalam merespons perubahan-perubahan dalam

15 Kenneth N. Waltz (1986). 'Reflections on Theory of International Politics'. Dalam Robert Keohane (ed.) *Neorealism and its Critics*. New York: Colombia University Press.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

struktur lingkungan regional dan/atau internasional melalui analisis "*Outside-In*" (struktur/sistem mempengaruhi unit/negara).

5. Mengusulkan bahwa teori harus selalu diuji kebenarannya.

Kenneth Waltz mengawali gagasannya dengan pernyataan kekagumannya terhadap keberhasilan ekonom mentransformasi teori menjadi hukum alam (*natural laws*). Dalam ilmu ekonomi, menurut Waltz, seorang pelaku ekonomi wajib mematuhi hukum yang berlaku: aktivitas ekonomi harus berorientasi pada profit demi mempertahankan kelangsungan bidang usaha yang dilakukannya. Kegagalan untuk mematuhi hukum tersebut akan berakibat pada hukuman dari struktur/sistem, yakni: kebangkrutan. Waltz berkeinginan bahwa studi HI seharusnya dapat mentransformasi teori-teorinya menjadi hukum alam yang harus dipatuhi para praktisi HI (kepala negara, menteri luar negeri, dan diplomat). Dia menyatakan bahwa hukum dalam politik internasional adalah bahwa dalam kondisi anarki setiap negara harus memperjuangkan sendiri kelangsungan hidupnya dengan membangun kekuatan militer yang cukup. Kegagalan mematuhi hukum tersebut dalam pergaulan internasional akan berakibat fatal: kekalahan dalam perang dan dikuasai negara lain.

Ambisi besar Waltz ini acapkali mendapat kritik dengan berbagai alasan, antara lain: kenyataan bahwa fakta politik internasional terlalu kompleks dan cepat berubah sehingga sulit ditentukan polanya, aktor politik internasional tidak sepenuhnya rasional dalam bertindak sehingga hukum alam pun menjadi kurang berarti, dan terlalu banyak ketidakpastian di dalam fenomena politik internasional sehingga sulit untuk mengkonversi teori menjadi hukum alam. Terlepas dari kritik tersebut Kenneth Waltz dikenal luas sebagai tokoh penting sekaligus pencetus perspektif Neorealisme. Karya Waltz *Theory of International Politics* (1979) banyak dikutip oleh penulis HI dalam membahas perilaku negara pada konteks penegakan keamanan di kawasan tertentu.

Dalam membahas tentang keamanan kawasan (*regional security*) eksplanasi logis ala Kenneth Waltz tampak kurang memadai tanpa membahas karya-karya pemikir Neorealis lainnya, terutama John Mearsheimer *The Tragedy of Great Power Politics* (2001) yang mengusung konsep 'Realisme Ofensif' (*Offensive Realism*) dan karya John Herz *Security Dilemma in International Relations* (2003). Dengan mengutip konsep 'Dilema Keamanan' (*security dilemma*) yang diperkenalkan oleh John Herz pada dekade 1950-

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

an, Mearsheimer mencoba membangun model keamanan regional. Menurut dia, dalam merespons persepsi ancaman eksternal, setiap negara menghadapi suatu 'Dilema Keamanan'. Ketika persepsi ancaman relatif rendah, maka suatu negara merasa perlu membangun kekuatan militer yang tidak terlalu besar karena sekadar untuk memelihara (*preserve*) kekuasaan dengan membangun *Balance of Power*; sebaliknya jika suatu negara merasakan ancaman eksternal yang besar, maka dia cenderung membangun kekuatan militer yang besar pula untuk menambah (*increase*) kekuasaan demi mencapai status hegemoni regional (*regional hegemony*). Keadaan ini akan mengarah pada dua model keamanan regional, yakni: (1) Negara dengan persepsi ancaman rendah akan memilih strategi 'Realisme Defensif' ala Kenneth Waltz sehingga membentuk keamanan regional berdasarkan *Balance of Power*; dan (2) Negara dengan persepsi ancaman tinggi akan memilih strategi 'Realisme Ofensif' ala John Mearsheimer sehingga membentuk keamanan regional berdasarkan *Regional Hegemony*.

Dalam politik internasional, situasi semacam ini dihadapi negara-negara Eropa menjelang Perang Dunia Kedua, di mana Inggris dan Perancis memilih model keamanan regional berdasarkan *Balance of Power*, sedangkan Jerman dan Italia memilih model keamanan regional berdasarkan hegemoni regional. Saat ini negara-negara di Asia menghadapi dilema yang sama, di mana strategi ofensif Tiongkok di Laut Cina Selatan menunjukkan bahwa negara itu lebih memilih model keamanan regional berdasarkan regional hegemoni, sedangkan Jepang, India, Indonesia dan yang lainnya lebih memilih strategi defensif untuk menghasilkan model keamanan regional berdasarkan *Balance of Power*.

Teori-teori Formal Turunan dari Neo-realisme

Beberapa model kuantitatif untuk memprediksi dan mengukur perilaku aktor internasional dikembangkan dari Neo-realisme dengan menyuntikkan unsur ilmiah (saintifik) dari perilaku aktor internasional. Di antara banyak model yang ditawarkan, terdapat beberapa model yang acapkali dipakai dalam studi HI untuk menjelaskan perilaku negara dalam merespon situasi internal maupun eksternal yang dihadapinya. Model-model kuantitatif yang sering kita temui dalam studi HI, antara lain, adalah *Game Theory, Rational Choice Theory*, dan *Security Dilemma*.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

Game Theory

Game Theory adalah suatu model matematis mengenai konflik dan kerja sama antar dua atau lebih aktor internasional yang rasional. Pertama kali diperkenalkan oleh John von Neumann dan Oskar Morgenstern (1944) dalam karya mereka berjudul *Theory of Games and Economic Behavior*, teori ini banyak dipakai dalam ilmu ekonomi, politik, dan psikologi untuk membuat model matematik dari perilaku suatu aktor sebagai reaksi terhadap tindakan aktor lain terhadapnya. Berdasarkan pilihan-pilihan yang dimiliki para aktor yang terlibat dalam suatu "permainan" (*game*) yang ada, *Game Theory* dapat dibagi menjadi dua macam: *zero sum* dan *non-zero sum*. *Zero sum game* merujuk pada situasi di mana keuntungan yang diperoleh salah satu aktor akan mengakibatkan kerugian bagi aktor lainnya. Permainan ini dapat diumpamakan sebagai situasi yang lazim dikenal sebagai *chicken game*: permainan uji nyali para remaja dekade 1970-an di Amerika Serikat yang memacu mobil dari arah berlawanan untuk uji keberanian: si pemenang akan terus melaju lurus dan disebut pemberani, si pecundang akan berbelok menghindari tabrakan dan diberi predikat "*chicken*" (+2, -2). Jika keduanya berbelok menghindari tabrakan, keduanya dianggap penakut (-1, -1); sebaliknya jika keduanya melaju lurus dan terjadi tabrakan, mereka harus menanggung akibatnya berupa risiko kematian (-3, -3). Pilihan tersebut diilustrasikan pada bagan 5.1.

Bagan 5.1
Zero Sum Game

	A	B
A	-1, -1	-2, -2
B	-2, -2	-3, -3

Sementara itu, *non-zero sum game* merujuk pada suatu situasi di mana setiap aktor dapat memperoleh keuntungan dalam permainan tersebut. Situasi semacam ini diilustrasikan dalam permainan *prisoners' dilemma*: dua orang tahanan diinterogasi secara terpisah. Mereka menghadapi tiga macam pilihan. Jika keduanya mengaku telah melakukan kejahatan, maka masing-masing akan dijatuhi hukuman 2 tahun; jika salah satu mengaku dan yang lainnya menyangkal, maka yang mengaku mendapat hukuman 3 tahun dan

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

yang lainnya bebas (3, 0; 0, 3). Sedangkan jika jika keduanya menyangkal akan mendapat hukuman masing-masing 1 tahun (1, 1). Situasi tersebut diilustrasikan dalam bagan 5.2.

Bagan 5.2
Non-Zero Sum Game

A	B
2, 2	0, 3
3, 0	1, 1

Kedua macam model *Game Theory* ini acapkali dipakai untuk menjelaskan situasi yang dihadapi aktor internasional dalam berhubungan dengan aktor lain di bidang politik, ekonomi dan keamanan. Pilihan-pilihan yang ada sebagaimana diilustrasikan dalam *Game Theory* tersebut di atas akan mendorong suatu negara untuk melakukan pilihan-pilihan tertentu.

Rational Choice Theory

Rational Choice Theory - yang juga dikenal sebagai *Rational Action Theory* - adalah sebuah upaya untuk membuat model matematik tentang perilaku sosial dan ekonomi aktor internasional. Teori yang digagas oleh ahli sejarah ekonomi Amerika Serikat Gary Becker yang memenangkan hadiah Nobel pada tahun 1992. Teori ini didasarkan pada premis bahwa para pembuat keputusan cenderung melakukan pilihan rasional setelah menimbang-nimbang secara cermat keuntungan maksimal yang akan diperoleh dari sejumlah kemungkinan yang ada. Teori ini mengasumsikan bahwa setiap individu yang normal sudah pasti berpikir rasional dalam menentukan pilihan keputusan tertentu. Pertimbangan untung-rugi secara teliti yang dilakukan individu dapat berbuah pada keputusan yang baik dan berdaya guna. Berbeda dari bahasa sehari-hari atau ilmu filsafat yang cenderung mengaitkan rasionalitas dengan sensibilitas, prediktabilitas dan pengukuran yang cermat, pemahaman rasionalitas yang digagas dalam teori ini mengacu pada pemahaman lebih spesifik yakni sikap-sikap yang berorientasi pada tujuan (*goal oriented*), reflektivitas (selalu dievaluasi) dan konsisten. *Rational choice theory* tidak berniat membahas proses pemilihan

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

sebuah sikap, melain membuat prediksi tentang outcome dan penentuan pola-pola pemilihan keputusan tertentu. Pilihan keputusan didasarkan pada prinsip kegunaan maksimum (*maximum utilization*), yakni analisis untung-rugi yang membuat seseorang yakin bahwa pilihan tersebut lebih berguna dibandingkan dengan alternatif yang lain yang dapat digambarkan sebagai berikut: **μ (ax) > μ (ay) > μ (az)**. Dalam hal ini pilihan ax setelah dilakukan analisis untung-rugi dianggap lebih berguna daripada ay dan az. Dalam studi HI, analogi ini sering dipakai untuk menjelaskan mengapa aktor internasional tertentu memilih melakukan tindakan tertentu di antara berbagai pilihan lainnya.

Security Dilemma

Security dilemma atau lazim dikenal dengan *spiral model* adalah istilah yang diperkenalkan oleh pakar keamanan John H. Herz dalam bukunya berjudul *Political Realism and Political Idealism* (1951) mengacu pada situasi dilematis yang dihadapi suatu negara di mana penembahan kekuatan militer untuk meningkatkan postur pertahanannya mendorong negara lain yang merasa terancam untuk ikut meningkatkan kekuatan militernya yang dapat bermuara ke perlombaan sanjata (*arms race*). Menurut John Herz, "*security dilemma*" adalah: "*A structural notion in which the self-help attempts of states to look after their security needs tend, regardless of intention, to lead to rising insecurity for others as each interprets its own measures as defensive and measures of others as potentially threatening*".[16] Setiap negara merespon *security dilemma* sesuai dengan kekuatan ekonomi dan persepsi ancaman yang dirasakan. Bagi mereka yang memiliki keterbatasan anggaran militer dan merasakan persepsi ancaman yang tidak terlalu mendesak, mereka akan menibangun kekuatan militer seperlunya dengan membuat postur pertahanan yang esensial (*essential defense*); sementara mereka yang secara ekonomi mampu memobilisasi sumber dana untuk membangun kekuatan militer yang baik cenderung membangun postur militer yang *offensive* untuk menjadi kekuatan hegemoni di kawasan.

Security dilemma ini melengkapi perspektif Neo-realisme yang digagas Kenneth Waltz, bahwa dalam situasi internasional yang anarkis, maka setiap negara harus mampu *self-help* untuk menjaga keamanannya sendiri. Dalam suatu kawasan yang mengandung rivalitas yang tinggi, maka security dilemma akan menciptakan perlombaan senjata di kawasan tersebut. Perlombaan senjata

16 John Herz (1950). 'Idealist Internationalism and Security Dilemma'. *World Politics*, Vol. 2 No. 2, hlm.157.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

itu akan terus berlangsung sampai persepsi ancaman keamanan yang dihadapi setiap negara dapat diturunkan melalui kerja sama keamanan atau pembentukan pakta pertahanan.

Realisme Neoklasik dalam Praktik Hubungan Antar Bangsa

Salah satu alasan yang membuat Realisme dan Neorealisme menjadi perspektif yang dominan dalam studi HI adalah konsep-konsep dasar perspektif ini seperti "integritas teritorial", "kekuatan nasional", "kepentingan nasional", "keamanan nasional", "keamanan regional", "diplomasi", dan sebagainya sering dirujuk oleh para pemimpin negara dalam merumuskan dan melaksanakan politik luar negeri. Konsep-konsep tersebut memberikan tuntunan sangat berarti bagi para pembuat keputusan tentang bagaimana para pemimpin negara menetapkan prioritas-prioritas tertentu dalam menetapkan politik luar negeri dengan menggunakan sumber-sumber yang ada untuk mencapai hasil seperti yang diinginkan.

Bagi negara-negara adikuasa yang memiliki kepentingan dan bertanggung jawab terhadap stabilitas keamanan internasional, logika yang dibangun Realisme/Neorealisme antara lain: 'Dalam kondisi anarki di mana setiap negara bertanggung jawab atas keamanannya sendiri, kehadiran dua kekuatan besar sebagai penyeimbang dalam sistem Bipolar dapat mencegah terjadinya perang berkepanjangan'. Logika ini secara tidak langsung menyatakan bahwa stabilitas keamanan di bawah sistem Bipolar merupakan situasi optimal yang dapat dicapai oleh Realisme/Neorealisme. Bagi Realisme/Neorealisme, tugas utama negara adikuasa dalam sistem Bipolar adalah menjaga *Balance of Power* dengan cara membangun kekuatan militer yang memadai untuk mencegah peperangan, apalagi Perang Nuklir yang memicu kehancuran bersama (*mutual destruction*).

Selain berbicara mengenai stabilitas keamanan internasional/regional, Realisme/Neorealisme juga berbicara mengenai pilihan politik luar negeri yang tepat (*the right foreign policy*). Sebuah upaya untuk menghidupkan kembali teori Pembuatan Politik Luar Negeri (*Foreign Policy Decision Making*) dilakukan oleh pakar HI untuk mengisi kevakuman teoretis pada pasca Perang Dingin di akhir dekade 1990-an. Pada saat itu Gideon Rose menulis artikel yang me-*review* beberapa buku tentang Politik Luar Negeri di jurnal *World Politics* edisi Oktober 1998. Di dalam artikel berjudul *Neoclassical Realism*

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

and Theories of Foreign Policy, Gideon Rose berupaya menghidupkan kembali teori Pembuatan Politik Luar Negeri (*Foreign Policy Decision-making*) yang memberikan porsi penting bagi politik domestik - yang lazim disebut sebagai "politik dalam negeri" (*innenpolitik*) - sebagai penentu arah Politik Luar Negeri negara-negara adi kuasa (*Great Powers*).

Perspektif baru yang disebut Gideon Rose sebagai Realisme Neoklasik (karena merujuk pada teks-teks Realisme klasik seperti Thucydides, Carr, Morgenthau, Wolfers, dan yang lainnya) pada dasarnya menerima kenyataan bahwa Politik Luar Negeri ditentukan oleh dua faktor: lingkungan eksternal dan lingkungan domestik, namun faktor eksternal merupakan faktor yang 'tidak langsung' (*indirect factor*) sedangkan faktor domestik (*innenpolitik*) berupa preferensi elite, persepsi ancaman, keyakinan ideologis, opini publik, dan kekuatan material relatif (*relative material power*) dibanding negara-negara lain merupakan faktor paling menentukan (*determining factor*) dalam perumusan Politik Luar Negeri suatu negara.[17] Tampak bahwa Realisme Neoklasik merupakan sebuah upaya untuk mengembalikan proses pembuatan Politik Luar Negeri dari peringkat analisis sistemik (yang dikembangkan Neorealisme) - atau analisis "*Outside In*" - ke peringkat analisis negara/unit (yang dikembangkan Realisme klasik) atau analisis "*Inside Out*". Dalam istilah Gideon Rose, tindakan ini merupakan upaya "*Bringing the State Back In*" (Mengembalikan Peran Negara).[18]

Dengan demikian, seorang pemimpin negara harus sungguh-sungguh mempertimbangkan "hambatan-hambatan domestik" (*domestic constraints*) yang terdiri dari dua hal: (1) faktor ideasional (*ideational factors*) yang terkait dengan revolusi di dalam negeri, kejayaan di masa lalu (*glories of the past*) dan/atau trauma di masa lalu (*trauma of the past*); dan (2) kelangsungan politik (*political survival*) yang bersangkutan dengan kekuatan material relatif, persepsi ancaman, preferensi kaum elit, ideologi, dan opini publik.[19] Kegagalan pemimpin dalam memperhitungkan *domestic constraints* tersebut akan mendatangkan hukuman dari sistem yang berlaku (*systemic punishment*) berupa penggulingan secara paksa, pengucilan, dan kekalahan dalam peperangan.

17 Gideon Rose (1998). 'Neoclassical Realism and Theories of Foreign Policy'. *World Politics*, Vol. 51 No. 1, hlm. 146-147.

18 *Ibid*, hlm. 161.

19 Balkan Devlen,Özgür Özdamar (2009). 'Neoclassical Realism and Foreign Policy Crises'. *Rethinking Realism in International Relations Between Tradition and Innovation*, hlm. 142-143.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

Sebagai contoh, di akhir masa pemerintahannya presiden Sukarno mengambil langkah Politik Luar Negeri yang bertentangan dengan *innenpolitik* atau *domestic constraints* dengan berpaling dari Amerika Serikat ke Uni Soviet dan kemudian berubah lagi dengan membentuk kekuatan *counter-balancing* bersama Tiongkok dalam wujud NEFOS (*New Emerging Forces*) pada saat elite politik dan publik belum sepenuhnya lepas dari trauma masa lalu berupa ancaman bahaya laten Komunisme, persepsi ancaman dari Tiongkok, opini publik yang pro-Amerika Serikat. Maka tidak mengherankan jika di akhir pemerintahannya presiden Sukarno mengalami pemberhentian secara paksa dan pengucilan sebagai akibat dari *systemic punishment* karena tidak memperhitungkan *innenpolitik* atau *domestic constraints* dalam mengambil langkah Politik Luar Negeri.

Kesimpulan

Bab ini membahas Realisme dan berbagai turunannya yakni Neorealisme (yang memasukkan pengaruh Teori Sistem ke dalam Teori I-II) dan Realisme Neoklasik (yang mengembalikan pentingnya politik domestik dalam Pembuatan Politik Luar Negeri). Tampak bahwa upaya para pakar HI untuk membuat studi HI lebih memenuhi kaidah ilmiah dengan memasukkan Teori Sistem ke dalamnya telah melahirkan perspektif baru yang dikenal luas sebagai Neorealisme. Walaupun Realisme dan Neorealisme dibangun dari landasan filosofis yang sama, yakni hakikat hubungan antar bangsa adalah 'perjuangan demi kekuasaan' (*struggle for power*), tetapi keduanya menawarkan model analisis yang berbeda. Jika Realisme klasik lebih fokus pada 'keamanan nasional' suatu negara, maka Neorealisme lebih berkonsentrasi pada 'keamanan regional dan/atau internasional'. Manakala Realisme klasik meyakini bahwa Unit/Negara lebih menentukan sistem dan menawarkan analisis "dari dalam ke luar" (*Inside Out*), Neorealisme lebih meyakini bahwa sistem internasional/regional menentukan perilaku Unit/Negara dan menawarkan analisis "dari luar ke dalam" (*Outside In*).

Perbedaan lainnya tampak pada penggunaan metode penelitian. Jika Realisme klasik lebih memilih metode Historis/Tradisionalis dengan menggunakan teknik penelusuran sejarah untuk menyusun sekuensi cerita yang runut; Neorealisme lebih menekankan pada metode saintifik dengan

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

memfokuskan pada pengujian teori-teori yang ada, pembuktian, pengukuran, dan presisi dalam rangka mencari kebenaran obyektif.

Bab ini juga menunjukkan bahwa di dalam studi HI ketika sebuah perspektif teoretis mengalami kritik luar biasa tidak berarti bahwa dia langsung mati. Sekalipun mendapatkan cercaan dan hujatan luar biasa, perspektif Realisme terus mengalami perbaikan sehingga bisa tetap berlaku dalam konteks yang spesifik. Hal ini menunjukkan karakter studi HI yang bersifat dinamis.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

BAGIAN KETIGA:
TEORI-TEORI ALTERNATIF

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

BAB 6

MAZHAB INGGRIS (*THE ENGLISH SCHOOL*): MARTIN WIGHT, HEDLEY BULL, DAN BARRY BUZAN

Asal Mula, Tradisi, dan Arti Mazhab Inggris

Bermula dari kombinasi antara kekaguman dan keberatan terhadap kepiawaian Realisme Klasik dalam memberikan eksplanasi logis bagi perilaku aktor utama hubungan internasional, sekelompok pakar hubungan internasional Inggris seperti Adam Watson, Herbert Butterfield, Charles Manning, dan Martin Wight - yang dikenal sebagai Generasi Klasik Mazhab Inggris - menganggap perlu memberikan kontribusi pada perkembangan teori hubungan internasional dengan mengupas sisi lain yang tidak mendapat perhatian teori Realisme Klasik. Kemunculan Mazhab Inggris ini tidak dapat dipisahkan dari aktivitas dua pakar Hubungan Internasional di *London School of Economics and Political Science* (LSE), Inggris, Charles Manning dan Martin Wight, yang pada dekade 1950-an mengembangkan kurikulum Studi Hubungan Internasional di universitas tersebut yang mencoba menggabungkan tiga tradisi berpikir dalam studi hubungan internasional: realisme ala Thomas Hobbes, rasionalisme ala Hugo Grotious, dan idealisme/ revolusionisme[1] ala Immanuel Kant. Ketiga tradisi ini akan dibahas secara lebih mendetail pada bagian selanjutnya tulisan ini.

Mereka yang tergabung ke dalam Mazhab Inggris Generasi Klasik ini beranggapan bahwa argumen Realisme Klasik tentang negara sebagai aktor utama dalam hubungan internasional adalah benar adanya, tetapi mereka tidak sepakat bahwa perdamaian tercipta semata-mata hanya karena ketakutan suatu

1 Istilah revolusionisme yang dipakai pakar Mazhab Inggris untuk menyebut perspektif Idealisme ala Immanuel Kant didasarkan pada pemahaman bahwa Kant menawarkan gagasan revolusioner dengan mengenalkan konsep kosmopolitanisme atau internasionalisme untuk keluar dari tradisi berpikir "negara-bangsa" yang dominan sejak perjanjian Westphalia 1648.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

negara untuk memulai peperangan, sehingga perdamaian tercipta karena negara-negara anggota komunitas internasional takut memulai peperangan seperti dikemukakan Realisme Klasik[2] atau mereka takut memulai suatu peperangan karena adanya perimbangan kekuasaan (*Balance of Power*) sebagaimana dinyatakan oleh Neo-Realisme atau Realisme Saintifik.[3] Sebaliknya, pencetus Mazhab Inggris menyatakan bahwa alasan mengapa negara tidak melakukan serangan terhadap negara lain adalah juga karena kepatuhan (*compliance*) mereka terhadap hukum dan aturan internasional dan juga sikap menahan diri (*self-restraint*) untuk tidak melanggar nilai dan norma pergaulan internasional. Sikap seperti ini – kepatuhan hukum dan kesadaran untuk menahan diri – merupakan konsekuensi logis dari kesadaran negara-negara sebagai bagian dari masyarakat internasional untuk mematuhi "aturan koeksistensi" (*rules of coexistence*).

Dalam perkembangannya, ketiga macam tradisi yang mendasari Mazhab Inggris ini menimbulkan interpretasi berbeda-beda mengenai perspektif ini. Mereka yang terpesona oleh pandangan Hugo Grotius tentang pelembagaan kepentingan bersama untuk menegakkan ketertiban cenderung mengklasifikasikan perspektif ini sebagai "Rasionalime". Sementara itu mereka yang lebih terpesona oleh postulasi politik internasional sebagai hubungan kekuasaan cenderung menyebut perspektif ini sebagai "Realisme ala Inggris" (*British Realists*). Mereka yang merasa optimis pada kecenderungan setiap negara anggota masyarakat internasional untuk melembagakan budaya kosmopolitan (*cosmopolitan culture*) untuk membuat negara patuh pada norma, aturan dan perjanjian internasional cenderung menyebut perspektif ini sebagai "Institusionalis Inggris" (*British Institutionalists*). Untuk menghindari kesimpangsiuran penyebutan perspektif ini, Roy Jones (1981) mengusulkan istilah "Mazhab Inggris" (*the English School*) yang dipandang lebih netral untuk merangkum ketiga macam tradisi yang mendasari kemunculan perspektif ini dan sekaligus mengakhiri perdebatan nomenklatur yang terjadi.[4]

Latar belakang ini kemudian mengundang pertanyaan: apa sesungguhnya "Mazhab Inggris" itu? Dengan mengutip Robert Jackson, Barry Buzan mendefinisikan Mazhab Inggris (*the English School*) sebagai:

2 H.J. Morgenthau (1978 [1948]). *'Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace'*. New York: Alfred P. Knopf. hlm. 4-5.
3 Kenneth N. Waltz (1979). *'Theory of International Politics'*. New York: Random House, hlm. 163-170.
4 Roy E. Jones (1981) 'The English School of International Relations: a Case for Closure'. *Review of International Studies* Vol.7 No.1, hlm. 1-13.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

> *A variety of theoretical inquiries which conceive of international relations as a world not merely of power and prudence or wealth or capability or domination but also one of recognition, association, membership, equality, equity, legitimate interests, rights, reciprocity, customs and conventions, agreements and disagreements, disputes, offenses, injuries, damages, reparations, and the rest: the normative vocabulary of human conduct.*[5]
>
> (Suatu bentuk investigasi teoretis yang menelusuri hubungan internasional tidak semata-mata sebagai kajian tentang kekuasaan dan kebajikan atau kesejahteraan atau kapabilitas atau dominasi, tetapi berkaitan dengan pengakuan, perhimpunan, keanggotaan, kesetaraan, kesamaan, kepentingan yang absah, hak, timbal-balik, kebiasaan dan konvensi, kesepakatan dan ketidaksepakatan, pertikaian, penyerangan, pencideraan, kerusakan, perbaikan, dan segala perbendaharaan kata normatif mengenai perilaku manusia).

Definisi ini mencerminkan karakter eklektik dari Mazhab Inggris yang mencoba menyatukan antara Liberalisme, Realisme, dan Teori Kritis. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Mazhab Inggris muncul untuk melengkapi jawaban Realisme dan Neo-Realisme terhadap pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti: mengapa negara-negara yang pada hakikatnya egosentrik (*selfish*) tidak saling menyerang yang dapat menciptakan peperangan massal (*war-of-all-against-all*)? Apakah dimungkinkan adanya kerja sama dalam suatu kondisi anarkis (*cooperation under anarchy*)? Dan bagaimana membuat anggota komunitas internasional untuk tidak saling menyerang dalam situasi anarkis? Berbeda dengan Realisme dan Neo-Realisme yang cenderung memberikan jawaban pesimistis terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut; dan juga untuk menghindari jebakan optimisme berlebihan yang ditawarkan oleh Liberalisme dan Neo-Liberalisme, Mazhab Inggris mencoba menawarkan jalan tengah yang dapat diterima akal sehat dalam memahami fenomena hubungan internasional.

Proposisi Mazhab Inggris Generasi Klasik

Kemunculan mazhab di luar arus utama (*mainstream*) – Liberalisme dan Realisme – di dalam studi Hubungan Internasional ini tidak saja memberi warna baru dalam kajian politik internasional, tetapi juga mendorong para pakar hubungan internasional untuk menelaah lebih jauh konsep-konsep

5 Robert Jackson (1992). 'Pluralism in international political theory'. *Review of International Studies*, Vol. 18 No. 3, hlm. 271; Barry Buzan (2004) *'From International to World Society? English School Theory and the Social Structure of Globalisation'*. Cambridge: Cambridge University Press, hlm. 6.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

dasar seperti negara-bangsa, kepentingan nasional, kedaulatan, kewajiban sebagai anggota komunitas internasional, dan kepatuhan hukum sebagai syarat terbentuknya masyarakat internasional (*international society*) yang aman dan damai. Penerapan konsep-konsep tersebut hendaknya disesuaikan dengan perkembangan jaman dan kebutuhan manusia. Sebagai contoh, konsep tentang keutuhan negara bangsa (*nation-state unity*) bisa dipertanyakan ketika sekelompok masyarakat di negara tertentu menghadapi ancaman pelanggaran HAM berat (genosida, pembersihan etnis, dan diskriminasi). Demikian halnya konsep kedaulatan negara (*state sovereignty*) menjadi tidak mutlak ketika suatu negara menghadapi krisis kemanusiaan akibat peperangan maupun bencana alam yang membutuhkan intervensi kemanusiaan. Demikian juga konsep kepentingan nasional (*national interests*) seharusnya didefinisi ulang menjadi kepentingan nasional yang absah (*legitimate national interests*) dengan mendorong negara sebagai anggota masyarakat internasional untuk bersikap menahan diri (*self-restraint*) demi memperkecil peluang terjadinya perbenturan kepentingan yang dapat memicu peperangan.

Mencoba menempatkan diri di luar arus utama, Mazhab Inggris berusaha memenuhi fungsi utamanya sebagai salah satu teori hubungan internasional, terutama dalam hal: (1) memberikan eksplanasi logis terhadap berbagai masalah internasional; dan (2) memberikan makna bagi sejumlah peristiwa internasional agar dapat dipahami secara luas oleh berbagai kalangan dengan mengandalkan pada sejumlah asumsi dan proposisi. Dalam kaitan inilah Mazhab Inggris dibangun atas dasar sejumlah asumsi, antara lain adalah:[6]

(1) Kajian hubungan internasional hendaknya dilandasi oleh kaidah berpikir ilmu sosial ala Max Weber tentang "pemahaman" (*verstehen*), yakni mengutamakan pemahaman terhadap berbagai fenomena sosial bukannya untuk memenuhi kebutuhan praktis umat manusia (*praxis*) seperti diyakini kaum Marxis.

(2) Kajian hubungan internasional harus senantiasa memperhitungkan ilmu sejarah (*history*) dan filsafat (*philosophy*) untuk menibuat manusia mau belajar dari pengalaman historis dan senantiasa mengedepankan moralitas yang baik demi pembentukan ko-eksistensi damai (*peaceful coexistence*) untuk pemeliharaan perdamaian dunia.

6 Tim Dunne (2010). *'The English School'*. Dalam Tim Dunne, Mirja Kurki, dan Steve Smith (ed.). *International Relations Theories: Discipline and Diversity*. Oxford: Oxford University Press, hlm. 139-140.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

(3) Kajian hubungan internasional hendaknya mengacu pada suatu sistem yang beranggotakan negara-negara merdeka dan berdaulat (*a system of independent and sovereign states*). Sistem ini layak dipelihara kelangsungannya karena bersifat absah (*legitimate*) dan diperlukan (*desirable*) bagi kelangsungan peradaban dunia. Ketika aktor negara cenderung menciptakan stabilitas internasional, maka aktor semi-negara (*quasi-states*) atau sub-negara (*sub-states* cenderung menjadi "kekuatan penentang" (*counter forces*) yang berpotensi mengancam ketertiban dunia sehingga tidak diperlukan (*undesirable*).[7]

(4) Kajian hubungan internasional memiliki karakter yang dinamis, antara pesimisme dan optimisme. Sekalipun hubungan internasional secara esensial diwarnai oleh hubungan kekuasaan (*power relationship*) penuh dengan intrik yang mengindikasikan pesimisme tentang perdamaian dunia sebagaimana diyakini kaum Realis, tetapi hubungan internasional juga membuka peluang bagi adanya ketertiban dunia manakala anggota masyarakat internasional melembagakan kepentingan bersama (*shared interests*), mematuhi aturan dan moralitas internasional, dan bersikap menahan diri (*self restraint*) yang menjanjikan optimisme perdamaian dunia.

Seperti telah disinggung pada bagian awal tulisan ini, selain keempat asumsi dasar tersebut, Mazhab Inggris generasi klasik ini juga dikenal luas melalui proposisinya mengenai tiga tradisi (*the three traditions*) yang mendasari studi hubungan internasional. Ketiga tradisi tersebut meliputi:[8]

(1) Realisme ala Thomas Hobbes dan Nicolo Machiavelli - disebut sistem internasional (*international system*) - yang melihat Hubungan Internasional sebagai sebuah sistem politik kekuasaan (*power politics*) di mana pola interaksi antar negara didasari oleh dorongan naluriah untuk saling mempengaruhi. Dalam situasi di mana negara bertindak atas dorongan naluri untuk memperjuangkan kekuasaan, perdamaian dapat terjadi jika ada keseimbangan distribusi kekuasaan (*balance of*

---

7 Pandangan bahwa "*quasi-states*" atau "*sub-states*" - digunakan untuk menyebut aktor-aktor non-negara dalam hubungan internasional - sebagai "*counter forces*" yang berpotensi merusak ketertiban (*order*) sebagaimana dikemukakan oleh Martin Wight menjadi salah satu kontroversi Mazhab Inggris generasi klasik yang dianggap kurang bersimpati atau bahkan antipati terhadap peran aktor non-negara (NGOs, *global civil society*, MNCs, dan lain-lain) dalam menciptakan ketertiban dunia. Dalam konteks politik internasional yang pluralistis dewasa ini, pandangan semacam ini tampak ketinggalan zaman (*out of date*).

8 Barry Buzan (2004). *Op cit.*, hlm. 7-8.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

power) manakala suatu negara takut untuk memulai suatu peperangan karena kekuatan yang relatif seimbang.

(2) Rasionalisme ala Hugo Grotius - disebut masyarakat internasional (*international society*) - yang meyakini bahwa setiap negara dituntun oleh rasionalitas untuk melembagakan kepentingan bersama (*shared interest*) dan identitas masing-masing negara demi menciptakan ketertiban (*order*) dan stabilitas hubungan antar bangsa.

(3) Revolusionisme[9] ala Immanuel Kant - disebut masyarakat dunia (*world society*) - yang memandang bahwa masyarakat dunia terdiri dari negara sebagai aktor utama dan aktor periferal Hubungan Internasional yang dipersatukan oleh "budaya yang sama" (*Common Culture*) atau semacam "kosmopolitanisme universal" (*universalist cosmopolitanism*) dalam rangka mencapai perdamaian abadi.[10]

Ketiga tradisi berpikir dalam studi hubungan internasional yang digagas oleh pencetus Mazhab Inggris generasi klasik yang cukup mendapat perhatian luas dari para pakar hubungan internasional itu dapat digambarkan pada Bagan 1 di bawah ini.

9 Penyebutan istilah "Revolusionisme" oleh Martin Wight terhadap gagasan kosmopolitanisme Immanuel Kant terasa janggal, namun Wight bersikukuh bahwa pemakaian istilah itu untuk menegaskan keberpihakannya pada teori normatif dan pentingnya menonjolkan nuansa historis dalam penelitian hubungan internasional. Lebih dari itu, Revolusionisme berkembang secara lintas batas teori dari Liberalisme hingga Teori Kritis (*Critical Theory*) yang membuatnya dapat disebut cukup revolusioner dalam tradisi keilmuan.

10 Barry Buzan (2004), *Op cit.*, hlm. 8-9.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

Bagan 6.1
Tiga Tradisi Mazhab Inggris ala Generasi Klasik

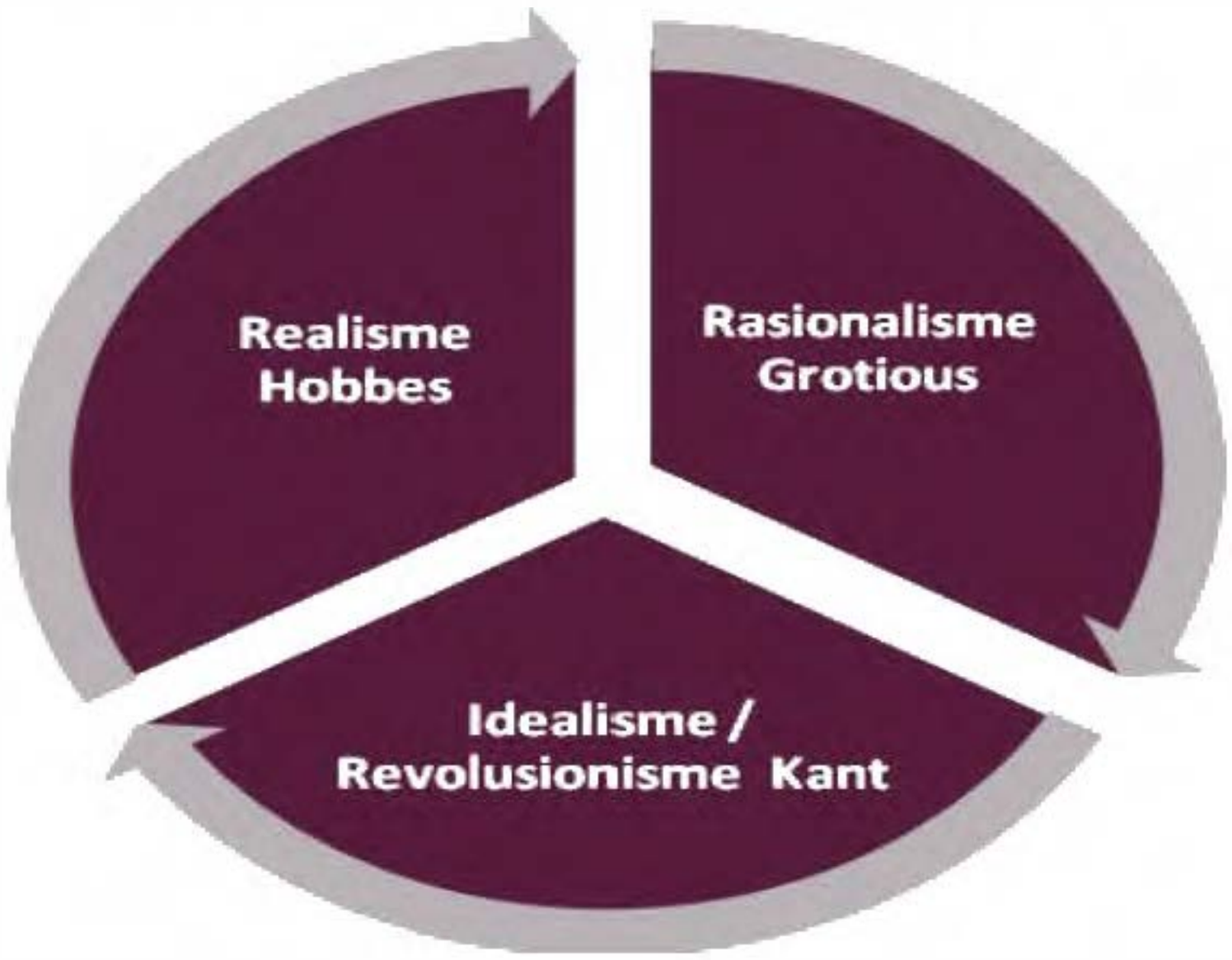

Sejak dicetuskan pada dekade 1950-an hingga 1970-an ketiga tradisi ini merupakan tulang punggung studi hubungan internasional di Inggris yang merambah ke seluruh Eropa yang membedakannya dengan studi hubungan internasional di kawasan lain, terutama Amerika Serikat dan negara-negara lain yang lebih mengacu pada teori-teori arus utama (*mainstream*) seperti Realisme Klasik, Neo-Realisme, Liberalisme, dan Neo-Liberalisme. Namun demikian, Mazhab Inggris juga mengalami suatu dinamika perkembangan pemikiran, terutama dengan munculnya dua tokoh penting, Hedley Bull pada dekade 1970-an dan Barry Buzan pada dekade 1990-an yang mencoba memperbaiki proposisi Mazhab Inggris generasi klasik agar lebih relevan dalam memberikan jawaban terhadap berbagai pertanyaan akademis menyangkut fenomena hubungan internasional kontemporer yang makin dinamis. Pada dekade 1970-an, kemunculan Hedley Bull - salah satu murid Martin Wight - secara serius melakukan perbaikan terhadap proposisi Mazhab Inggris agar dapat memberikan jawaban secara lebih meyakinkan terhadap pertanyaan: mengapa ketertiban internasional dapat terjadi dalam kondisi internasional yang anarkis? Pada dekade 1990-an, Barry Buzan merapat ke kubu Mazhab Inggris dalam upayanya untuk menjaga relevansi proposisi Mazhab Inggris dalam mengantisipasi perkembangan baru fenomena internasional di mana isu-

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

isu global tidak lagi didominasi "politik tingkat tinggi" (*high politics*), aktor internasional makin majemuk (negara, non-negara, dan bahkan individu), dan berbagai krisis kemanusiaan mengundang interpretasi kembali konsep-konsep dasar seperti kedaulatan negara (*state sovereignty*), negara-bangsa (*nation-states*), dan integritas teritorial (*territorial integrity*).

Hedley Bull dan Konsep Masyarakat Internasional (*International Society*)

Hedley Bull dilahirkan di Sydney, Australia, pada 10 Juni 1932. Dia menempuh studi Ilmu sejarah dan filsafat (*History and Philosophy*) di Universitas Sydney, Australia, dan dilanjutkan dengan studi doktoral di bidang ihnu politik (*Politics*) di Universitas Oxford, Inggris. Karir akademik Hedley Bull sebagai pakar politik internasional tersebar di berbagai perguruan tinggi ternama seperti *London School of Economics* and *Political Science* (LSE), London, *Australian National University*, Canberra, dan terakhir sebagai *Montague Burton Professor* di bidang politik internasional di Universitas Oxford, Inggris, sejak 1977 hingga meninggalnya akibat penyakit kanker pada 18 Mei 1985.

Salah satu sumbangan terbesar Hedley Bull bagi perkembangan Mazhab Inggris adalah karya fenomenalnya berjudul *The Anarchical Society* (1977) di mana dia berargumen bahwa dalam situasi anarkis di mana setiap negara bebas bertindak untuk memenuhi kepentingan nasional masing-masing, hal yang dapat mencegah terjadinya peperangan adalah kesadaran untuk mematuhi (*compliance*) terhadap norma dan aturan internasional yang disepakati bersama dalam rangka untuk menegakkan ketertiban (*order*) dalam hubungan antar bangsa.[11] Di samping itu, dalam konteks "perdebatan besar" dalam ilmu hubungan internasional, Hedley Bull telah berperan dalam membela pentingnya penggunaan metode sejarah agar studi hubungan internasional lebih mampu mengulas secara detail berbagai fakta sejarah dan memiliki tingkat relevansi yang tinggi dengan fakta historis seperti yang dia ungkapkan dalam perdebatannya dengan tokoh saintifik hubungan internasional Morton Kaplan, yang dikenal sebagai "*Bull-Kaplan Debate*" atau "*Second Great Debate*" di dalam jurnal ilmiah *World Politics* pada dekade 1960-an.[12]

11 Hedley Bull (1977). 'The Anarchical Society: a Study of World Order'. *World Politics*. London: MacMillan, hlm. 8-10.

12 Hedley Bull (1966). 'International Theory: the Case for a Classical Approach'. *World Politics*, Vol. 18 No. 3, hlm. 361-377; dan Morton A. Kaplan (1966). 'The New Great Debate: Traditionalism vs. Science in

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

Bagi Hedley Bull, pengertian konsep masyarakat internasional (*international society*) dapat digambarkan sebagai berikut:

> *A society of states (or international society) exists when a group of states, conscious of certain common interests and common values, form a society in the sense that they conceive themselves to be bound by a set of common rules in their relations with one another, and share in the working of common institutions.*[13]
>
> (Suatu masyarakat negara [masyarakat internasional] terbentuk manakala sekelompok negara, yang memiliki suatu kepentingan dan nilai yang sama, membentuk suatu masyarakat dalam arti menyediakan diri untuk mematuhi seperangkat peraturan dalam hubungannya satu sama lain, dan bersedia berbagi dan menyepakati berfungsinya lembaga-lembaga yang dibuat secara kolektif).

Dalam mengembangkan konsep masyarakat internasional ini Hedley Bull merujuk pada sejumlah asumsi dasar sebagai titik awal untuk memahami hakikat hubungan internasional, yang terdiri dari empat hal.[14] Pertama, hubungan internasional tidak seharusnya dipahami hanya dalam konteks "anarki" (ketiadaan pemimpin internasional) yang menentukan perilaku (*code of conducts*) hidup bernegara atau dalam konteks kecenderungan saling berperang seperti sinyalemen Thomas Hobbes. Sebaliknya hubungan internasional harus dipahami secara lebih optimis di mana negara bersikap bijak (*prudent*) dan menahan diri demi kepentingan bersama.

Kedua, masyarakat internasional bukanlah duplikasi langsung lembaga pemerintahan dan pranata politik domestik, terpeliharanya ketertiban (*order*) dalam hubungan antar negara adalah produk yang dibuat secara unik untuk kebutuhan pemeliharaan kesinambungan hubungan internasional. Dengan menolak "analogi domestik" (*domestic analogy*), Hedley Bull tampak ingin memberi apresiasi lebih pada kemampuan negara-negara untuk membentuk sebuah tata kelola (*governance*) yang lebih dari sekadar sentralitas kekuasaan dan pemaksaan (*enforcement*) pada lingkup domestik. Pandangan ini yang mendekatkan Hedley Bull pada perspektif Liberal-Institusionalisme yang

---

International Relations'. *World Politics*, Vol.19 No.1, hlm. 1-20.

13 Hedley Bull sebagaimana dikutip dalam Kai Alderson dan Andrew Hurrell (ed.) (2000).'International Society and the Academic Study of International Relations'. *Hedley Bull on International Society*. London: MacMillan, hlm. 3.

14 Keempat *starting points* pemikiran Hedley Bull ini dapat dilihat dalam Kai Alderson dan Andrew Hurell (ed.) (2000). *Op cit*, hlm. 4-5.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

digagas pada awal dekade 1980-an oleh Robert Keohane, Joseph Nye, dan Sterphen Krasner.

Ketiga, istilah masyarakat (*society*) dalam masyarakat negara-negara (*society of states*) tidak serta-merta merujuk pada hubungan yang harmonis, damai, dan non-konfliktual. Sebaliknya hubungan kekuasaan sebagaimana digambarkan Thomas Hobbes tetap mewarnai hubungan internasional. Namun demikian keberadaan nilai-nilai, moralitas tertentu dan aturan internasional berkontribusi dalam meredam negara-negara - terutama kelompok negara besar (*great powers*) - untuk menahan diri dan tidak terlibat dalam peperangan. Dalam konteks ini, negara-negara besar diharapkan menjaga moralitas dunia untuk senantiasa mendukung perdamaian. Keyakinan semacam ini membuat Hedley Bull tidak beranjak terlalu jauh dari Realisme maupun Neo-Realisme.

Keempat, fakta sejarah menunjukkan bahwa masyarakat internasional yang kohesif terjadi pada masa terbentuknya sistem "negara-bangsa klasik di Eropa" pasca perjanjian Westphalia 1648, di mana kekuasaan negara tidak saja dipisahkan dari otoritas agama tetapi negara diberi kedaulatan untuk menguasai wilayah, penduduk dan sumberdaya alam tertentu yang harus dihormati oleh negara lain. Pandangan semacam ini seringkali menjadi sasaran para pengeritik Hedley Bull atau Mazhab Inggris pada umumnya yang menganggapnya terlampau "Eropa-sentris" (*Europocentric*) karena terlalu mengagung-agungkan sistem negara Eropa Barat sebagai sistem yang paling kohesif dan stabil.

Hedley Bull juga dikenal sebagai pemikir Mazhab Inggris yang melakukan koreksi terhadap tiga tradisi yang dicetuskan oleh Charles Manning dan Martin Wight dengan mengemukakan tiga pilar dalam politik internasional, yang tidak saja memberi penjelasan tentang terjadinya hubungan antar negara dalam situasi anarkis, tetapi juga merevisi ketiga tradisi intelektual yang dikemukakan pendahulunya. Bagi Bull, masyarakat internasional terdiri dari tiga pilar utama: (1) sistem internasional yang terbentuk atas adanya perimbangan kekuasaan (*balance of power*); (2) masyarakat internasional yang didasarkan pada kepatuhan kepada norma dan aturan yang disepakati; dan (3) masyarakat dunia yang merepresentasi interaksi aktor-aktor sub-negara, non-negara, dan individu yang lazim disebut TNAs (*Trans-national Actors*). Revisi Hedley Bull terhadap tiga tradisi Mazhab Inggris generasi klasik tersebut dapat dilihat pada Bagan 2 di bawah ini.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

Bagan 6.2
Tiga Pilar Politik Internasional ala Hedley Bull

Menempatkan dirinya di dalam barisan utama (*hard core*) Mazhab Inggris, Hedley Bull mencoba memberikan pemahaman baru terhadap tiga tradisi para pendahulunya dengan mengemukakan ketertiban dalam masyarakat internasional, yang dapat diringkas ke dalam beberapa butir pemikiran sebagai berikut:[15]

(1) Hubungan Internasional merupakan masyarakat negara yang merdeka dan berdaulat (*a society of independent and sovereign states*) di mana kemerdekaan dan kedaulatan merupakan hal krusial yang menentukan eksistensi negara sebagai bagian dari masyarakat internasional. Karena tanpa negara yang merdeka dan berdaulat, masyarakat internasional akan mengalami gangguan stabilitas berkepanjangan.

(2) Kelangsungan masyarakat negara yang merdeka dan berdaulat (*society of independent and sovereign states*) tersebut dapat terjadi jika semua anggotanya mempertahankan ketertiban (*order*) dengan mengembangkan sikap menahan diri, mematuhi hukum dan perjanjian internasional, serta bertindak yang tidak mengancam eksistensi negara lain.

15 Hedley Bull (1977). *Op cit.*, hlm. 3-76.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

(3) Ketertiban internasional (*international order*) bisa terjamin apabila setiap negara anggota masyarakat internasional – terutama negara-negara besar (*great powers*) – melakukan "aturan koeksistensi" (*rules of coexistence*) yang meliputi tiga hal: (i) bersedia untuk bersikap menahan diri dengan menghindari tindakan yang dapat membahayakan pihak lain (*restraint against violence resulting in death or bodily harm*); (ii) memberikan jaminan melalui berbagai kesepakatan internasional yang dihargai oleh seluruh anggota masyarakat internasional; dan (iii) memberikan jaminan bahwa kepemilikan negara (wilayah teritorial, penduduk, kekayaan alam, dan lain-lain) tidak dapat diganggu-gugat untuk alasan apapun.

(4) Kesinambungan masyarakat internasional akan terjamin apabila setiap negara anggota memiliki tingkat solidaritas memadai (*sufficient degree of solidarity*) – yang disebut dengan istilah "*Groatian solidarist formula*" (rumusan solidaritas ala Hugo Grotious) – yang menjunjung tinggi tujuan bersama dan memiliki semangat untuk menghindari peperangan. Sejarah menunjukkan bahwa rumusan solidaritas ala Grotious ini dapat dilakukan secara kolektif untuk menegakkan ketertiban seperti misalnya tindakan Liga Bangsa-Bangsa (LBB) dalam menentang invasi Italia ke Abyssinia pada tahun 1935 dan dalam menentang invasi Uni Soviet ke Finlandia pada tahun 1939, sebelum akhirnya digantikan oleh mekanisme "*collective security*" (keamanan kolektif) di bawah otorisasi Majelis Umum PBB ketika memberi kewenangan kepada Amerika Serikat untuk membentuk aliansi demi perimbangan kekuatan (BoP) dalam perang Korea pada dekade 1950-an.[16] Perbedaan mendasar antara tindakan PBB pada dekade 1930-an dengan tindakan Majelis Umum PBB pada 1950-an terletak pada cara mereka menegakkan ketertiban dan keamanan. Jika LBB lebih memilih tindakan persuasif dan dialog, maka PBB lebih memilih cara represif dengan memberikan kewenangan kepada negara besar (*great powers*) untuk menindak pelanggar "aturan koeksistensi".

(5) Sejarah menunjukkan bahwa keanekaragaman (*heterogenity*) cenderung mengurangi solidaritas antar negara sehingga dapat mengganggu

16 Argumen "solidaris" Hedley Bull ini terasa ambigu karena berada di antara "jalan persuasif" (ala Immanuel Kant) dan "jalan represif" (ala Thomas Hobbes). Lihat pembahasan mengenai "Solidaritas Negara-negara" di dalam Hedley Bull (1977). *Op cit.*, hlm. 238-240.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

ketertiban (*order*) internasional, maka setiap negara anggota masyarakat internasional harus berkomitmen untuk mendorong terciptanya suatu "budaya bersama" (*common culture*) untuk mendukung hidup berdampingan secara damai melalui praktik diplomasi, penandatanganan perjanjian internasional, partisipasi dalam organisasi internasional, dan kesediaan mengikuti arus budaya kosmopolitan modern. Ketika dihadapkan pada pertanyaan budaya manakah yang dapat dijadikan panutan untuk menjadi sebuah *common culture*, Bull menjawab bahwa budaya Barat (*West*), khususnya Eropa pada abad ke-19 di mana praktik bernegara modern mulai ditegakkan untuk menciptakan ketertiban internasional.[17]

Kelima butir pemikiran inilah yang membuat Hedley Bull dikenang sebagai salah satu pemikir utama (*hard core*) Mazhab Inggris yang seringkali dijadikan rujukan oleh para peneliti hubungan internasional yang ingin menelusuri lebih jauh mengapa negara-negara dengan kepentingan saling berbeda, berkarakter egosentris (*selfish*), dan dipenuhi ambisi untuk memperjuangkan kekuasaan mau saling berinteraksi dan bahkan saling bekerja sama untuk menciptakan ketertiban internasional.

Kritik terhadap Proposisi Mazhab Inggris Generasi Klasik

Sekalipun Hedley Bull mendapat tempat istimewa dalam Mazhab Inggris, khususnya proposisinya tentang konsep "masyarakat internasional" (*international society*) sebagai salah satu cara dalam memandang fenomena hubungan internasional di luar arus utama (*mainstream*) ilmu hubungan internasional, seperti Realisme yang lebih mengedepankan hakikat agresif suatu negara yang cenderung menciptakan konflik dan peperangan atau Liberal-Institusionalisme yang lebih memfokuskan pada dorongan dan kebutuhan kooperatif setiap negara yang cenderung menciptakan kerja sama dalam kondisi anarkis (*cooperation under anarchy*), namun tidak sedikit yang memberikan kritik terhadap proposisi Hedley Bull.

Salah satu pengeritik Hedley Bull adalah Stanley Hoffman yang secara tegas menyatakan bahwa posisi intelektual Hedley Bull agak membingungkan di mana di dalam salah satu artikelnya berjudul *International Theory: the*

17 *Ibid.*, hlm. 33-34.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

case for a Classical Approach (1969) dia seolah-olah berangkat dari tradisi saintifik dengan mendukung ide pemahaman (*verstehen/understanding*) yang dikemukakan oleh Max Weber dan menafikan penggunaan persepsi dan intuisi, tetapi pada saat yang sama Bull juga menekankan pada keberpihakan moral dengan menyatakan bahwa keadilan (*justice*) adalah prasyarat bagi tegaknya ketertiban (*order*) dalam masyarakat internasional. Dengan kata lain, Stanley Hoffman meyakini bahwa Hedley Bull berada di antara dua tradisi intelektual yang saling berlawanan, yakni di antara tradisi saintifik (*Weberian*) dan tradisi humanis (*Marxian*).[18]

Pengritik lainnya adalah Nicholas J. Wheeler dan Timothy Dunne yang dalam tulisan bersama mereka berjudul *Hedley Bull's Pluralism of the Intellect and Solidarism of the Will* (1996) merujuk pada tiga macam kelemahan fundamental dalam gagasan Bull tentang ketertiban (*order*) di dalam masyarakat internasional (*international society*). Pertama, keyakinan Bull terhadap kemampuan negara-negara besar (*great powers*) untuk menciptakan ketertiban didasarkan pada dua alasan: (i) negara-negara besar harus saling berhubungan satu sama lain atas dasar ketertiban sehingga akan menjadi pola hubungan yang universal; dan (ii) negara-negara besar harus memanfaatkan posisi mereka yang dominan untuk memperkuat kelangsungan sebuah masyarakat negara-negara (*society of states*). Keyakinan semacam ini tidak sepenuhnya benar. Bull mungkin benar ketika negara-negara adi kuasa (*super power*) berada dalam suasana peredaan ketegangan (*detente*) pada pertengahan 1970-an, tetapi dia tampak keliru ketika kedua negara adi kuasa - AS dan Uni Soviet -terlibat dalam Perang Dingin (*Cold War*) dan perlombaan senjata (*arms race*) yang dapat mengancam perdamaian dunia. Di sini tampak bahwa Bull terlalu membesar-besarkan kemauan dan kemampuan negara adi kuasa (*super powers*) dalam menciptakan ketertiban dunia, padahal tidak ada kewajiban khusus bagi negara-negara adi kuasa untuk menjaga moralitas dunia dan menegakkan perdamaian.[19]

Kedua, proposisi Bull yang diungkapkan pada kuliah umumnya di *Australian National University*, Canberra pada tahun 1983 tentang keadilan

18 Stanley Hoffman (2006 [1986]) 'Hedley Bull and His Contribution to International Relations'. *International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944)*, Vol.62 No. 2, hlm. 179-195. Dalam Stephen Chan dan Cerwyn Moore (ed.). *Theories of International Relations Vol. I*'. London: SAGE Publication Ltd., hlm. 140-142.

19 Nicholas J. Wheeler dan Timothy Dunne (2006 [1996]). 'Hedley Bull's Pluralism of the Intellect and Solidarism of the Will'. *International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944)*. Dalam Stephen Chan dan Cerwyn Moore (ed.) *Op cit.*, hlm. 180-181.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

sebagai prasyarat terciptanya ketertiban masyarakat internasional tampak sebagai proyek ambisius yang sulit untuk diwujudkan, terutama ketika Bull menyatakan bahwa negara Barat, negara Selatan, dan berbagai kelompok semi-negara (*quasi-states*) mengembangkan dialog dalam rangka ko-eksistensi damai (*peaceful coexistence*) untuk menyelaraskan pemahaman tentang hak asasi manusia (*human rights*) dan konsep keadilan (*justice*). Sulit untuk membayangkan adanya dialog semacam ini untuk mencapai kesamaan pemahaman terhadap hal-hal sensitif seperti hak asasi manusia dan konsep keadilan yang melibatkan kelompok negara Barat yang Liberal berhadapan dengan kelompok negara Selatan yang menghadapi persoalan pelanggaran hak asasi manusia dan kelompok-kelompok semi-negara yang menghadapi berbagai masalah hukum.[20]

Ketiga, sentimen solidaris Hedley Bull yang dikemukakan dalam serangkaian kuliah tamunya di berbagai universitas terkemuka sedikit terbantah oleh skeptisisme yang dia tunjukkan ketika membahas sejauh mana situasi hubungan internasional memungkinkan terjadinya tindakan unilateral maupun kolektif dalam konteks budaya kosmopolitan (*cosmopolitan culture*) untuk menegakkan prinsip hak asasi manusia dan keadilan dunia. Manakala Bull menyatakan bahwa semua negara anggota masyarakat dunia – besar atau kecil, kaya atau miskin, maju atau terbelakang – berkewajiban untuk membentuk semangat solidaritas internasional dengan menjunjung tinggi prinsip ketertiban (*order*) dan keadilan (*justice*), fakta menunjukkan bahwa respons negara-negara anggota masyarakat internasional terhadap berbagai krisis kemanusiaan (*humanitarian crises*) terutama pada pasca Perang Dingin tampak kurang optimal karena terbentur berbagai persoalan seperti prinsip kedaulatan (*sovereignty*) dan perbedaan pemahaman tentang perlindungan hak asasi manusia antara kelompok negara Barat dan Selatan. Hal ini tampak jelas dari rendahnya dukungan bagi intervensi kemanusiaan Perancis melalui "*Operation Torquoise*" di Rwanda pada tahun 1994. Ketika kontingen pasukan perdamaian Perancis di Rwanda – yang menyadari adanya ancaman genosida dan pembersihan etnis bagi kaum minoritas Tutsi – meminta penambahan pasukan tambahan untuk mencegah terjadinya bencana kemanusiaan lebih besar, Dewan Keamanan PBB (*UN Security Council*) tidak berhasil menyepakati "intervensi militer" (*forcible intervention*) dengan alasan kemanusiaan.[21] Akibatnya, tragedi

20 *Ibid.*, hlm. 182-183.
21 *Ibid.*, hlm. 184-186.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

kemanusiaan di Rwanda dan Burundi tidak bisa terhindarkan di mana sekitar 1 juta jiwa mati sia-sia akibat pertikaian etnis yang paling berdarah dalam lima dekade terakhir. Pelajaran dari tragedi Bosnia, Rwanda, Kosovo, dan Timor Leste yang menujukkan lemahnya penegakan prinsip hak asasi manusia menunjukkan ironi gagasan "solidaris" yang dikampanyekan oleh Hedley Bull.

Kritik yang paling pedas datang dari Barry Buzan, salah satu pakar hubungan internasional Inggris yang pada awalnya menganut Realisme dan kemudian berpindah haluan mendekat ke kubu Mazhab Inggris. Lebih dari itu, Barry Buzan merasa terpanggil untuk tidak hanya mengekspos kekurangan Hedley Bull dan Mazhab Inggris secara keseluruhan, tetapi juga meniendam keinginan untuk memperbaiki teori Mazhab Inggris agar lebih relevan untuk menjelaskan fenomena politik global (*global politics*) kontemporer yang tidak lagi didominasi oleh negara sebagai aktor utama dan isu global yang merupakan gabungan antara "politik tingkat tinggi" (*high politics*) dan "politik tingkat bawah" (*low politics*).[22] Karena upaya untuk memperbaiki teori Mazhab Inggris inilah, maka tidak terlalu berlebihan untuk mengatakan bahwa Barry Buzan adalah pemikir Mazhab Inggris generasi kedua (*Second Generation English School Thinker*) yang muncul belakangan setelah generasi pertama seperti Adam Watson, Herbert Butterfield, Martin Wight, dan Hedley Bull.

Buzan memulai dengan otokritik terhadap proposisi Mazhab Inggris generasi pertama dengan mengklasifikasikan kritiknya ke dalam beberapa kategori, yakni: peringkat analisis, sektor kajian, batas-batas lingkup kajian, konflik normatif, dan metodologi.[23] Detail dari kritik Buzan terhadap proposisi Mazhab Inggris generasi pertama dapat dirangkum ke dalam beberapa poin. Pertama, kategori yang disebut Buzan sebagai "peringkat analisis" (*levels of analysis*) di mana Mazhab Inggris cenderung menekankan atau berbias kepada sistem internasional atau global di mana aktor utamanya adalah negara; sementara peringkat analisis sub-global atau regional kurang mendapat perhatian. Ada beberapa alasan yang membuat Mazhab Inggris berbias kepada peringkat analisis global, yakni: keyakinanan bahwa sistem antar negara memiliki

22 "*High politics*" mengacu pada isu-isu militer-strategis yang merupakan domain petinggi militer, petinggi negara, politisi, dan pembuat kebijakan (*policy makers*); sedangkan "*low politics*" mengacu pada isu-isu non-militer seperti migrasi penduduk, kriminalitas transnasional, perdagangan manusia, penyakit menular, kerusakan lingkungan, pelanggaran hak asasi manusia, dan lain-lain. Yang dapat diusung oleh aktor negara dan aktor nonnegara.

23 Kritik Barry Buzan dirangkum dalam Barry Buzan (2004). 'From International to World Society? English School Theory and the Social Structure of Globalisation'. *Cambridge Studies in International Relations*. Cambridge: Cambridge University Press, hlm. 16-24.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

kecenderungan lebih untuk membentuk stabilitas dibandingkan dengan sistem yang melibatkan aktor non-negara, organisasi regional dan individu; perbedaan persepsi tentang hak asasi manusia dan prinsip keadilan antara aktor negara dan aktor non-negara; dan keyakinan bahwa ketertiban dunia bergantung pada kesediaan negara untuk mematuhi perjanjian dan ketentuan yang disepakati bersama. Bias peringkat analisis global ini menunjukkan bagaimana Mazhab Inggris generasi pertama menafikan kontribusi kekuatan-kekuatan sub-global atau regionalisme dalam membangun ketertiban dan perdamaian dunia. Maka tidak mengherankan jika Mazhab Inggris kurang mengapresiasi kekuatan organisasi regional seperti ASEAN (*Association of South East Asian Nations*), OAU (*Organization of African Union*), bahkan EU (*European Union*) walaupun mazhab ini sangat mengapresiasi perjanjian dan aturan internasional.

Kedua, pada kategori "sektor kajian" (*sectors*), Buzan melihat pada unsur yang hilang (*a missing element*) dalam kajian Martin Wight tentang masyarakat internasional yang dia anggap terlalu menekankan pada sektor "*high politics*" (politik tingkat tinggi) – hubungan militer-strategis dan diplomasi – sebagai pondasi sistem ketertiban internasional, dan kurang memperhitungkan sektor "*low politics*" (politik tingkat rendah) – hubungan ekonomi (perdagangan dan investasi) – yang juga merupakan elemen utama hubungan antar negara dan aktor-aktor non-negara (terutama perusahaan multinasional/MNCs) yang mengandung elemen kerja sama sehingga berkontribusi terhadap ketertiban dan stabilitas internasional. Sekalipun dalam membahas tentang keadilan Hedley Bull menyebut pentingnya menciptakan suatu politik ekonomi internasional yang lebih setara (*equitable*) untuk menciptakan ketertiban internasional, tetapi Bull tidak berbuat banyak untuk mengisi "*the missing element*" di dalam kajian Martin Wight tentang masyarakat internasional karena tetap mengabaikan kenyataan bahwa ekonomi merupakan komponen utama ketertiban internasional.[24] Kurangnya perhatian Wight dan Bull terhadap sektor ekonomi menegaskan bias Mazhab Inggris terhadap sistem negara (*system of states*) yang mengecilkan peran regionalisme dan elemen "*low politics*" sebagai komponen pembentuk ketertiban internasional.

Ketiga, pada kategori "batas-batas lingkup kajian" (*boundaries*), Buzan menyoroti tiga tradisi (*the three traditions*) yang mendasari kemunculan Mazhab Inggris: Realisme, Rasionalisme, dan Revolusionisme. Jika batas antara Realisme

24 R.J. Vincent (1988). 'Hedley Bull and Order in International Politics'. *Millenium Journal of International Studies*, Vol. 17 No. 2, hlm. 196.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

dan Rasionalisme tampak cukup jelas; tetapi batas antara keduanya dengan Revolusionisme tidak terlalu jelas. Ketidakjelasan batas antara Rasionalisme dengan Revolusionisme, misalnya, berakibat pada lemahnya pengembangan gagasan masyarakat internasional untuk menjelaskan berbagai fenomena kontemporer. Mazhab Inggris akan dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan seperti: siapakah yang berhak mengkampanyekan nilai universal hak asasi manusia, keamanan manusia (*human security*), dan konservasi lingkungan hidup? Siapakah yang berwenang memberikan justifikasi akan adanya krisis kemanusiaan (*humanitarian crisis*) dalam situasi tertentu? Dan siapakah yang berwenang mengotorisasi aksi unilateral ataupun multilateral dalam konteks intervensi kemanusiaan (*humanitarian intervention*) yang melanggar kedaulatan negara untuk melindungi keselamatan manusia? Sangat ironis bahwa Mazhab Inggris cenderung memberikan hak istimewa kepada negara-negara besar (*great powers*) untuk melakukan semua hal tersebut. Ketidakjelasan batas ini pada gilirannya melemahkan posisi Mazhab Inggris dalam menjelaskan tentang siapakah aktor penyebar ide-ide kosmopolitan, nilai-nilai transnasional, dan nilai-nilai kemanusiaan universal? Di sini tampak adanya kesenjangan antara retorika dan fakta karena retorika hak istimewa negara terbantahkan oleh fakta bahwa penyebaran nilai-nilai transnasional dan ide-ide kosmopolitan banyak melibatkan negara-negara kecil (*small powers*) dan aktor non-negara seperti perusahaan multinasional (MNCs), organisasi non-pemerintah internasional (INGOs), organisasi masyarakat sipil global (*global civil society*), dan bahkan individu yang memiliki pengaruh internasional.

Keempat, pada kategori yang disebutnya "konflik normatif" (*normative conflicts*) ini, Barry Buzan merujuk pada konflik yang melekat (*embedded*) di dalam Mazhab Inggris antara "pluralisme" - yang menyatakan bahwa pemahaman tentang konsep-konsep dasar seperti hak individu, harmoni kepentingan, dan kepentingan yang absah (*legitimate interests*) dari aktor negara dapat bertentangan dengan pemahaman aktor-aktor sub-negara dan non-negara - berhadapan dengan "solidarisme" yang meyakini adanya kesamaan pemahaman antara aktor negara dan non-negara terhadap konsep-konsep dasar tersebut di atas. Berbeda dengan "pluralisme" yang cenderung menyatakan bahwa berbagai aksi (unilateral maupun multilateral) dalam mengimplementasikan ide-ide kosmopolitan (perlindungan keamanan manusia, perlindungan hak asasi manusia, pelestarian lingkungan hidup, dan lain-lain) bersifat relatif dan memerlukan dukungan (*back up*) perangkat hukum untuk pelaksanaannya,

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

"solidarisme" cenderung menyatakan bahwa setiap aktor internasional (negara maupun non-negara) memiliki kewajiban untuk mengutamakan jaminan terhadap tiga macam kebebasan individu - "*freedom from fear*" (kebebasan dari rasa takut), "*freedom from want*" (kebebasan untuk melaksanakan kehendak), dan "*freedom to maintain dignity*" (kebebasan untuk menjaga martabat) - tanpa harus mempersoalkan azas legalitas dan kedaulatan. Konflik normatif ini pada gilirannya memperlemah posisi Mazhab Inggris ketika tidak mampu memberikan solusi bagi keraguan masyarakat internasional dewasa ini dalam memberikan respons memadai terhadap berbagai krisis kemanusiaan di Bosnia, Kosovo, Rwanda, Burundi, Mesir, dan Suriah di mana operasi penyelamatan manusia tidak dapat dilakukan karena berbagai pertimbangan hukum dan asas kedaulatan negara.

Kelima, pada kategori "metodologi", Buzan melihat adanya kekaburan metodologis dalam Mazhab Inggris. Di satu sisi, konsepsi Martin Wight tentang "sistem internasional" mendekatkan Mazhab Inggris pada metode positivistik-saintifik yang mengandalkan pada eksplanasi realitas dengan menggunakan model-model. Di sisi lain, konsepsi Hedley Bull tentang "masyarakat internasional" mendekatkan mazhab ini pada metode hermeneutik dan interpretif (*hermeunetics-interpretive*). Sementara itu konsep "masyarakat dunia" yang dikembangkan oleh Mazhab Inggris generasi kedua lebih mendekatkan mazhab ini pada metode Teori Kritis (*Critical Theory*) yang digagas oleh Andrew Linklater. Dalam membahas kategori "metodologi" ini terdapat semacam keraguan pada diri Barry Buzan: di satu sisi pemakaian ketiga macam metode ini dapat disebut sebagai ketidakjelasan Mazhab Inggris dalam menetapkan pilihan metodologi; tapi di sisi lain pemakaian ketiga macam metode justru merupakan "kekayaan" dari Mazhab Inggris yang mempersatukan Neo-Realisme yang mensyaratkan penggunaan metode saintifik-positivistik (mengutamakan validitas dan pengujian teori), Rasionalisme dengan menekankan kepatuhan pada norma dan aturan yang mensyaratkan penggunaan metode hermeneutik-interpretif (menginterpretasi makna fisik dan metafisik segala sesuatu), dan Revolusionisme dengan bertumpu pada kosmopolitanisme Immanuel Kant yang mensyaratkan penggunaan metode Teori Kritis (proposisi perubahan revolusioner cara berpikir tentang segala sesuatu).

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

Barry Buzan dan Revisi terhadap Proposisi Generasi Klasik

Berbeda dengan para pengritik lainnya, Barry Buzan tidak hanya melontarkan kritiknya pada pandangan klasik yang dipelopori oleh Charles Manning, Adam Watson, Martin Wight, dan Hedley Bull, dia menempatkan diri sebagai pembela Mazhab Inggris sebagaimana dideklarasikan dalam konferensi BISA (*British International Studies Association*) pada tahun 1999. Tindakan revisionis Buzan ini tidak hanya meliputi upaya memperbaiki berbagai kelemahan yang ada pada teori klasik, tetapi juga membuat Mazhab Inggris menjadi lebih kontemporer, terutama dalam merespon situasi global kontemporer. Perbaikan yang diusulkan Buzan meliputi beberapa poin penting: (1) Revisi terhadap ketiga tradisi (*the three traditions*) dengan mengajukan konsep "kosmopolitanisme"; (2) Rekonstruksi perdebatan pluralis-solidaris (*reconstructing the pluralist-solidarist debate*); dan (3) Pentingnya memelihara institusi utama masyarakat internasional (*the primary institutions of international society*) dan faktor geografi (*bringing geography back in*). Ketiga poin tersebut akan dijelaskan secara lebih rinci di bawah ini.

Revisi terhadap ketiga tradisi (the three traditions) generasi klasik

Sebagaimana telah disinggung di awal tulisan ini para pemikir klasik Mazhab Inggris berangkat dari tiga tradisi berpikir: (1) realisme ala Thomas Hobbes; (2) rasionalisme ala Hugo Grotious; dan (3) revolusionisme ala Immanuel Kant. Konsepsi yang digagas oleh Martin Wight ini ternyata tampak terlalu menekankan pada diskursus dan kurang mengakomodasi realitas terkini di dalam hubungan internasional di mana aktor-aktor non-negara dan sub-negara menjadi subyek penting politik internasional. Sejak dekade 1970-an dan 1980-an ketika perhatian para pakar mulai tertuju pada aktor non-negara terutama perusahaan mutinasional dan kelompok-kelompok sub-negara seperti PLO (*Palestinian Liberation Organization*) di Timur Tengah, separatis Tamil di Sri Lanka, separatis Basque di Spanyol, dan semacamnya, pengabaian sektor non-negara ini dianggap kesalahan besar sehingga perlu diatasi dengan segera.

Untuk mengoreksi kesalahan ini, Hedley Bull dalam karyanya *The Anarchical Society* (1977) mengusulkan konsep "masyarakat internasional" yang memberi status bagi keterlibatan aktor-aktor sub-negara dan non-negara dalam politik dunia, sebagaimana dapat dilihat pada Bagan 6.2 di atas. Namun demikian, sekalipun Bull telah mencoba memasukkan aktor non-negara yang

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

lazim disebut dengan istilah TNAs (*Trans-national Actors*), pemahaman tentang hal ini masih relatif terbatas sehingga tidak dianggap sebagai aktor yang memberikan kontribusi positif bagi ketertiban internasional. Malah sebaliknya ada kesan bahwa mazhab Inggris pada waktu itu lebih melihat TNAs sebagai kekuatan yang berpotensi mengganggu ketertiban dunia seperti telah disinggung dalam pembahasan mengenai proposisi Mazhab Inggris di atas.

Dengan demikian, untuk lebih menegaskan pengakuan bagi peran TNAs dalam memelihara ketertiban dunia, Barry Buzan mengusulkan perubahan pilar untuk menjadikan teori Mazhab Inggris menjadi lebih relevan dengan perkembangan terkini di mana globalisasi makin membuka kesempatan bagi TNAs dalam melakukan bagai hal penting seperti kampanye perlindungan hak asasi manusia, konservasi lingkungan hidup, penegakan perdamaian, pemberantasan kemiskinan, dan lain-lain yang dapat berujung pada pemeliharaan ketertiban dunia.

Bagan 6.3
Tiga Pilar Masyarakat Kosmopolitan ala Barry Buzan

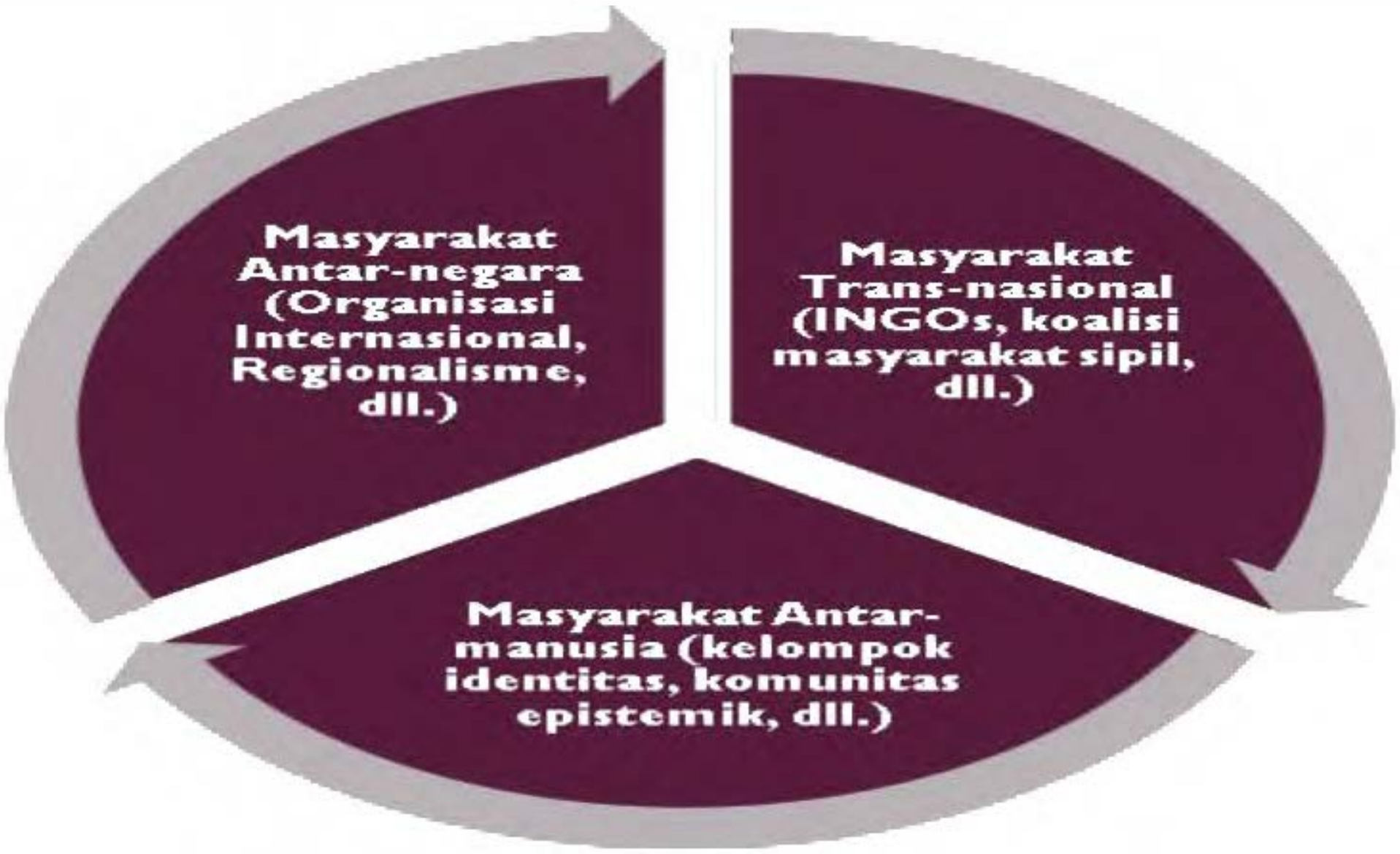

Atas dasar tujuan itulah Barry Buzan mengusulkan pemakaian istilah Kosmopolitanisme yang terdiri dari tiga bagian penting, yakni: (1) *inter-state*

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

societies (masyarakat antar-negara) masyarakat yang beranggotakan negara; (2) *trans-national societies* (masyarakat transnasional)suatu masyarakat yang beranggotakan berbagai aktor sub-negara, NGOs, koalisi masyarakat sipil, dan perusahaan multinasional; dan (3) *inter-human societies* (masyarakat antar manusia) suatu masyarakat yang beranggotakan individu-individu lintas negara yang saling berhubungan yang disatukan oleh spirit kosmopolitan yang sama seperti komunitas epistemik (*epistemic communities*), asosiasi profesi lintas negara, dan lain-lain.[25] Ketiga pilar ini merupakan sumbangan terpenting Buzan yang membuat teori Mazhab Inggris lebih kontemporer. Revisi Buzan terhadap ketiga tradisi berpikir Mazhab Inggris dapat dilihat pada Bagan 3.

Sekalipun ketiga pilar masyarakat kosmopolitan ala Buzan ini berotensi membuka kontroversi baru, namun sekurang-kurangnya memberikan kekuatan baru bagi Mazhab Inggris untuk tetap relevan dalam memberikan eksplanasi logis bagi fenomena politik terkini dalam era globalisasi di mana terjadi tumpang-tindih antara hubungan antar-negara, antar kelompok sub-negara, dan antar individu melewati batas-batas negara.

Rekonsruksi Perdebatan Pluralis-Solidaris

Untuk mengatasi kelemahan pada kategori konflik normatif, Buzan mengusulkan adanya rekonstruksi perdebatan pluralis-solidaris (*reconstructing the pluralist-solidarist debate*). Rekonstruksi ini diinaksudkan untuk memperteqas posisi Mazhab Inggris, khususnya Hedley Bull dalam perdebatan antara kaum pluralis dan solidaris. Bagi Buzan, perdebatan pluralissolidaris tidak seharusnya dipahami sebagai posisi ekslusif dari masing-masing sudut pandang, tetapi sebagai spektrum di mana pluralis merepresentasikan karakter "minimalis" - atau menurut Buzan memiliki keyakinan yang tipis (*thin*) - terhadap norma, nilai, dan institusi bersama (*shared*); dan solidaris merepresentasikan karakter "maximalis" - keyakinan yang tebal (*thick*) - yang melihat norma, nilai dan institusi bersama sebagai kewajiban untuk dilaksanakan setiap anggota masyarakat internasional untuk membentuk hidup yang tertib dan aman.

Lebih jauh lagi, pluralis mengajukan syarat minimal bagi kelangsungan suatu masyarakat internasional adalah kepatuhan para anggotanya untuk mematuhi "aturan koeksistensi" (*rules of coexistence*) yang meliputi prinsip kedaulatan, integritas teritorial, dan hak untuk mengelola sumber daya alam

25 Barry Buzan (2004). *Op cit.*, hlm. 27-63.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

(*sovereignty, territorial integrity*, dan *control over natural resources*); sedangkan solidaris mensyaratkan kewajiban setiap anggota masyarakat internasional untuk bertindak lebih jauh lagi dengan mengedepankan "aturan kerja sama" (*rules of cooperation*) yang meliputi partisipasi dalam perjanjian internasional, mendukung bekerjanya lembaga internasional, partisipasi dalam tindakan kolektif untuk kemaslahatan bersama, dan bahkan koordinasi kebijakan.[26]

Dewasa ini, maraknya bencana kemanusiaan, kemiskinan, pengangguran, dan pelanggaran hak asasi manusia akibat konflik etnis, perang saudara, kebijakan pembangunan yang diskriminatif, dan bencana alam membuat dorongan ke arah perspektif solidaris tampak semakin kuat, terutama ketika masyarakat internasional mendapat pelajaran berharga dari situasi di Rwanda, Burundi, Bosnia, dan Kosovo pada dekade 1990-an di mana tindakan pemeliharaan perdamaian (*peace keeping*) oleh PBB yang setengah hati – *too little, too late* – membuat ratusan ribu penduduk (termasuk perempuan dan anak-anak) mati sia-sia dan jutaan lainnya mengalami pemindahan secara paksa (*forced displacement*). Dalam situasi semacam ini, tidaklah cukup bagi anggota masyarakat internasional untuk menciptakan stabilitas hanya dengan cara mematuhi "aturan koeksistensi".

Lebih dari itu, anggota masyarakat internasional semakin didorong untuk meningkatkan komitmennya untuk menegakkan prinsip hak asasi manusia, pembebasan dari tekanan kemiskinan, dan meminimalisasi degradasi lingkungan hidup. Untuk penegakan hak asasi manusia, bilamana perlu negara anggota masyarakat internasional dapat melegalkan "intervensi militer" (*forcible intervention*) untuk melindungi penduduk sipil yang menjadi korban kekerasan para kombatan atau aparat keamanan negara. Pemberantasan kemiskinan dapat ditingkatkan dengan pemberian bantuan kemanusiaan yang lebih sistematis. Degradasi lingkungan hidup dapat diminimalisir melalui koordinasi kebijakan melalui berbagai skema kerja sama.[27] Kebangkitan solidaritas antar-negara tampak cukup menggembirakan ketika dunia menyaksikan kerja sama lintas-batas negara antara aktor negara, organisasi internasional, dan aktor non-negara dalam membantu korban bencana tsunami di Aceh, Thailand dan Sri Lanka pada dan korban gempa di Haiti; tetapi kurang menggembirakan dalam mencegah krisis kemanusiaan akibat perang saudara di Suriah. Berbagai persoalan dalam pelaksanaan perspektif maksimalis "aturan kerja sama" ini

26 Barry Buzan (2004). *Op cit.*, hlm. 143-145.
27 *Ibid.*, hlm. 154-155.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

terkait dengan perdebatan pluralis-solidaris yang masih melingkupi perilaku negara dewasa ini, di mana kepentingan nasional dan prinsip kedaulatan mutlak (*absolute sovereignty*) seringkali mengurangi komitmen negara-negara untuk melakukan kewajiban mereka sebagai anggota masyarakat internasional.

Pentingnya Membawa Kembali Institusi Utama dan Faktor Geografis

Untuk mengatasi kelemahan pada kategori peringkat analisis, Barry Buzan membahas pentingnya membawa kembali institusi utama masyarakat internasional dan faktor geografis ke dalam analisis hubungan internasional. Salah satu kelemahan fundamental Mazhab Inggris generasi klasik adalah ketidakjelasan mengenai apa yang mereka maksud dengan "institusi masyarakat internasional" (*the institutions of international society*). Bagi Mazhab Inggris, institusi masyarakat internasional adalah sekumpulan praktik dan aturan yang stabil dan menetapkan perilaku yang pantas untuk ditaati kelompok-kelompok tertentu yang saling berinteraksi dalam hubungan internasional.[28] Definisi ini sedikit-banyak memiliki kemiripan dengan konsepsi kaum neo-liberal-institusionalis seperti Stephen D. Krasner, Robert Keohane dan John G. Ruggie tentang "rezim internasional" yang mengacu pada sekumpulan prinsip, norma, aturan dan prosedur pembuatan keputusan di mana aktor-aktor hubungan internasional mengonvergensikan keinginan dan kepentingan masing-masing di bidang-bidang yang spesifik.[29]

Namun demikian, terdapat beberapa perbedaan fundamental antara pemahaman Mazhab Inggris dan teori rezim tentang institusi internasional: (1) teori rezim lebih mengacu pada isu-isu kontemporer, sedangkan Mazhab Inggris mengacu pada perspektif sejarah; (2) jika teori rezim lebih memfokuskan pada isu spesifik (kerja sama ekonomi, teknologi, dan energi), maka Mazhab Inggris melihat pada lingkup lebih luas menyangkut "permainan bernegara" (*game of states*) di sektor militer-strategis; (3) teori rezim lebih menekankan pada aktor-aktor yang egoistik tetapi dituntun oleh perilaku rasional untuk saling bekerja sama, Mazhab Inggris lebih menekankan pada aktor-aktor yang memiliki kepentingan bersama (*common interests*) dan nilai-nilai bersama (*shared values*); dan (4) jika teori rezim cenderung berbicara tentang fenomena sub-

28 *Ibid.*, hlm.165.

29 Stephen D. Krasner (1982), 'Structural Causes and Regime Consequences: Regimes as Intervening Variables'. *International Organization*, Vol. 36 No. 2, dalam Stephen Krasner (ed.) '*International Regimes*'. Ithaca: Cornell University Press, hlm. 2.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

global atau regionalisme, maka Mazhab Inggris berbicara tentang masyarakat pada level global.[30] Dengan demikian, walaupun baik Mazhab Inggris maupun teori rezim menghargai institusi internasional tetapi keduanya memiliki nuansa pemahaman yang sangat berbeda.

Kelemahan lain Mazhab Inggris generasi klasik adalah kurangnya perhatian mereka kepada eksistensi masyarakat internasional pada level regional.[31] Hal ini seolah-olah menafikan peran organisasi regional seperti Uni Eropa, ASEAN, Liga Arab, NAFTA, APEC, dan lain-lain dalam membangun ketertiban dan keamanan sebagaimana digagas oleh Hedley Bull. Menafikan kekuatan organisasi-organisasi regional pada gilirannya membawa Mazhab Inggris pada suatu "*exclusive globalism*" (globalisme eksklusif). Hal ini sungguh ironis manakala fakta menunjukkan bahwa kerja sama ekonomi, teknologi dan energi tampak lebih efektif jika dilakukan pada level regional sebagaimana dapat kita lihat pada perkembangan Uni Eropa di Eropa, ASEAN di Asia Tenggara dan NAFTA di Amerika Utara. Di samping itu pengabaian regionalisme yang didasari oleh ketidakyakinan pada nilai-nilai non-Barat dapat menjebak Mazhab Inggris pada sikap Eropasentrisme, terutama ketika mereka memandang bahwa proses dekolonisasi – yang memunculkan negara-negara berdaulat baru yang multikultural – dianggap mengancam peradaban yang sudah mapan dibangun oleh Barat. Pandangan semacam ini menjadikan proposisi Mazhab Inggris mengalami apa yang oleh Buzan disebut: "*not only ethnocentrically narrow and misleadingly gloomy, but also fundamentally mistaken about what interstate society is and how it develops*" (tidak saja berciri etnosentrisme sempit dan suram, tetapi juga mengandung kekeliruan fundamental mengenai apa itu masyarakat antar-negara dan bagaimana dia berkembang).[32]

Demi penyempurnaan proposisi teoretis Mazhab Inggris, Buzan mengusulkan perbaikan mendasar dengan menambah domain aktor-aktor subglobal dan non-negara dalam kategori masyarakat kosmopolitan yang bercirikan interaksi antara domain antar-manusia (*inter-human*), trans-nasional (*trans-national*) dan antar-negara (*interstate*) yang memiliki porsi peran penting dalam tatanan dunia. Dengan demikian, revisi Buzan terhadap proposisi generasi klasik Mazhab Inggris mencoba memasukkan perspektif baru dalam studi hubungan internasional, yakni globalisme atau kosmopolitanisme yang

30 Barry Buzan (2004). *Op cit*., hlm. 161-162.
31 *Ibid*., hlm. 205.
32 *Ibid*., hlm. 215.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

membuatnya makin mendekatkan diri ke pemikiran Teori Kritis Andrew Linklater yang mengusulkan perubahan radikal dalam konsepsi bernegara dengan mengusung pemikiran pasca-Westphalia (*post-Wesphalia*), yakni gagasan tentang "warganegara internasional" (*international citizen*), yaitu warganegara yang tidak semata-mata loyal kepada negara-bangsa namun memiliki kewajiban dasar untuk melindungi hak-hak dasar manusia meliputi kebebasan dari ancaman (*freedom of oppression*), kebebasan mendapatkan kebutuhan dasar (*freedom to pursue basic needs*), dan kebebasan untuk hidup secara bermartabat (*freedom to maintain dignity*).[33]

Kegunaan Mazhab Inggris dalam Studi Hubungan Internasional

Dewasa ini, ketika dalam diskusi, perkuliahan, penulisan karya ilmiah, dan berbagai aktivitas akademik lainnya, kita sering mendengar istilah teori Mazhab Inggris (*English School Theory*), maka kita pun layak untuk bertanya: apakah proposisi Mazhab Inggris dapat dikategorikan sebagai sebuah teori yang dapat disejajarkan dengan teori-teori arus utama (*mainstream*) di dalam studi hubungan internasional seperti realisme, liberal-internasionalisme, neo-realisme, dan neo-liberalisme? Untuk menjawab pertanyaan ini kita dapat melihatnya dari sisi pemahaman teori yang berbeda-beda, terutama antara tradisi berpikir Eropa dan Amerika.

Dari sisi tradisi berpikir Eropa yang mengedepankan metode penelusuran sejarah (*historical tracing*) dan dasar filosofis (*philosophical ground*) suatu kajian, teori didefinisikan sebagai: "*anything that organises a field systematically, structures questions and establishes a coherent and rigorous set of interrelated concepts and categories*" (segala upaya untuk mengatur pemikiran secara sistematis, menyusun pertanyaan-pertanyaan, dan membangun analisis yang mengaitkan berbagai konsep dan kategori.[34] Sementara itu, tradisi berpikir Amerika Serikat yang sangat positivistik, mendefinisikan teori sebagai:[35]

> *"a set of propositions and concepts that seeks to explain phenomenon by specifying the relationships among concepts; theory's ultimate purpose is to predict phenomena. Good theory generates groups of testable hyphotheses ...*

33 Andrew Linklater (2007). '*Critical Theory and World Politics: Citizenship, Sovereignty and Humanity*'. London: Routledge, hlm. 104-108.
34 Barry Buzan (2004), *Op cit.*, hlm. 24.
35 Karen A. Mingst (2004). *Essentials of International Relations Edisi Ketiga*. New York: W.W. Norton, hlm. 57.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

> *By testing groups of interrelated hypotheses, theory is verified and refined and new relationships are found that demand subsequent testing"*
>
> (sekumpulan proposisi dan konsep yang mencoba menjelaskan suatu fenomena dengan mengidentifikasi hubungan antar konsep; tujuan utama teori adalah memprediksi fenomena. Teori yang baik berupaya menguji sejumlah hipotesis ... Melalui uji hipotesis, teori dapat diverifikasi dan disempurnakan, dan hubungan-hubungan baru ditemukan untuk selanjutnya diuji kembali).

Jika kita memakai ukuran definisi teori ala tradisi berpikir Eropa, maka proposisi Mazhab Inggris jelas masuk dalam kategori teori, namun jika kita memakai definisi teori ala tradisi berpikir positivis Amerika, maka proposisi Mazhab Inggris tidak dapat dikategorikan sebagai teori karena tidak berpretensi untuk memprediksi dan melakukan uji hipotesis, sebagaimana dikatakan Barry Buzan: "*English school theory clearly qualifies on the first (European) account, but not on the second (American). In its Wightian, normative theory form, English school theory cannot (and does not want to) meet criteria for positivist theory*" (Teori Mazhab Inggris jelas memenuhi kriteria teori ukuran Eropa, tetapi tidak memenuhi standar ukuran Amerika. Teori normatif ala Wight tidak dapat - dan tidak ingin - memenuhi kriteria teori positivistik).[36] Kesengajaan untuk tidak memenuhi kriteria teori positivistik seperti sinyalemen Buzan ini sesungguhnya mencerminkan perbedaan metodologis antara kaum tradisionalis/historisis berhadapan dengan kaum positivis/saintifik di dalam ilmu sosial yang terus berlangsung hingga saat ini.

Namun demikian, terlepas dari perdebatan tradisionalis versus positivis, proposisi Mazhab Inggris tetap memiliki muatan teori untuk setidaknya dua alasan. Pertama, Mazhab Inggris mencoba memberikan eksplanasi logis terhadap berbagai fenomena internasional dari tiga perspektif sekaligus: realisme ala Thomas Hobbes, rasionalisme ala Hugo Grotious, dan idealisme ala Immanuel Kant. Hal ini dapat dianggap sebagai kekuatan Mazhab Inggris. Dengan tidak mendasarkan pada salah satu perspektif saja, analisis Mazhab Inggris terhadap berbagai fenomena internasional menjadi lebih kaya, terlepas dari berbagai kelemahan yang terus-menerus diperbaiki dan dibuat lebih *up-to-date*, terutama oleh Hedley Bull dan Barry Buzan. Kedua, Mazhab Inggris menjanjikan domain baru dalam studi hubungan internasional yang mencoba mempertemukan antara sosiologi, ilmu politik, filsafat, dan ilmu hukum.

36 Barry Buzan (2004). *Loc cit.*

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

Proposisi Mazhab Inggris sejak generasi klasik hingga generasi kontemporer menunjukkan interaksi yang sangat unik antara: (1) hubungan antar negara yang egoistik, mengutamakan kepentingan nasional, tetapi terhindar dari peperangan karena adanya perimbangan kekuasaan (*Balance of Power*) - disebut *system of states*; (2) hubungan antar negara yang penuh sikap menahan diri (*self restraint*) karena mematuhi "aturan koeksistensi" (*rules of coexistence*) - disebut *society of states*; dan (3) hubungan antar aktor negara dan non-negara yang didasari oleh kewajiban moral untuk saling membantu dalam konteks kepatuhan terhadap "aturan bekerja sama" (*rules of cooperations*) - disebut *trans-national and inter-human societies*.

Dengan demikian, tidak terlalu berlebihan untuk berbicara mengenai kegunaan Mazhab Inggris bagi studi hubungan internasional. Ada beberapa hal yang dapat dianggap sebagai kontribusi Mazhab Inggris dalam perkembangan studi hubungan internasional saat ini. Pertama, Mazhab Inggris mengingatkan para pemerhati masalah internasional bahwa isu-isu internasional tidak saja dapat dijelaskan secara baik oleh teori-teori arus utama (*mainstream*) seperti realisme, liberalisme, neorealisme, dan neo-liberalisme/institusionalisme, tetapi teori-teori di luar arus utama pun menjanjikan eksplanasi dan analisis yang memadai, khususnya bagi mereka yang mendalami isu spesifik misalnya: mengapa intervensi kemanusiaan atas dasar prinsip solidaritas - yang jelas-jelas melanggar kedaulatan negara - dapat dibenarkan dalam kondisi tertentu? Mengapa institusi internasional yang dapat memelihara ketertiban internasional patut dipertahankan dan bahkan diperluas pengaruhnya? Mengapa kiprah aktor-aktor internasional (negara maupun non-negara) memiliki peran penting sebagai "investor norma-norma" (*norm entrepreneurs*) dalam memperjuangkan kemaslahatan umat manusia? Dan mengapa aktor-aktor internasional (negara, organisasi internasional, NGO internasional, koalisi masyarakat sipil global, perusahaan multi-nasional, dan bahkan individu transnasional) dalam interaksi satu sama lain diikat oleh kewajiban moral untuk memelihara hak-hak dasar manusia dari jenis kelamin, kebangsaan, etnisitas, dan kelompok agama apa pun?

Kedua, Mazhab Inggris mencoba membangun kesadaran baru para pemerhati studi hubungan internasional dan negarawan akan relativitas prinsip bernegara dan perlunya menetapkan dasar kebijakan yang bermuatan moral dan nilai kebaikan. Sebagai contoh, pelaksanaan prinsip kedaulatan (*sovereignty*) menjadi relatif dan tidak mutlak manakala suatu negara dihadapkan pada

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

persoalan pelanggaran hak asasi manusia serius (genosida, pembersihan etnis, kejahatan kemanusiaan, dan kejahatan perang) yang mengundang intervensi asing. Dalam konteks dasar kebijakan dengan muatan moral, Mazhab Inggris mengingatkan bahwa anggota masyarakat internasional seharusnya tidak sekadar melaksanakan kebijakan luar negeri (*foreign policy*) tetapi melakukan "kebijakan luar negeri yang baik" (*good foreign policy*), bertindak lebih dari sekadar dasar kepentingan (*interests*) tetapi atas dasar "kepentingan yang absah" (*legitimate interests*). Disamping itu, setiap negarawan dihimbau untuk senantiasa mematuhi standar "aturan koeksistensi" dengan bersikap menahan diri untuk tidak membahayakan anggota masyarakat internasional lainnya. Kesadaran baru semacam ini sangat diperlukan dan menjadi syarat minimal bagi terpeliharanya ketertiban internasional sebagaimana diamaatkan Mazhab Inggris.

Ketiga, Mazhab Inggris mencoba menghapuskan sekat-sekat keilmuan di dalam menganalisis fenomena internasional, terutama sekat-sekat yang tajam antara metodologi sejarah dalam realisme dan liberalinternasionalisme klasik, metode saintifik-positivistik dalam neo-realisme dan neo-liberalisme, metode hermeneutik-interpretif dalam rasionalisme, dan metode teori kritis (*critical theory*) dalam kosmopolitanisme. Bagi Mazhab Inggris, seluruh metode tersebut dapat dipakai untuk memperkaya perspektif analitis yang ditawarkan dalam menjelaskan berbagai fenomena internasional. Walaupun mendapat banyak tantangan, upaya Mazhab Inggris untuk menghapuskan sekat-sekat metodologi keilmuan ini telah memperkaya khazanah studi hubungan internasional sehingga perdebatan mengenai metodologi mana yang paling tepat untuk studi hubungan internasional menjadi tidak relevan. Maka, bagi pemerhati masalah internasional hal yang paling penting adalah bagaimana menjelaskan suatu fenomena secara meyakinkan tanpa harus disibukkan oleh pemilihan metode penelitian yang tepat menyangkut penelusuran sejarah, interpretasi esensi, prediksi, uji hipothesis, maupun verifikasi teori.

Keempat, Mazhab Inggris juga mencoba membangun eksplanasi lintas disiplin ilmu dalam menganalisis berbagai fenomena internasional, terutama antara ilmu politik, sosiologi, ilmu hukum, dan filsafat. Pendekatan lintas batas keilmuan ini memberikan dimensi yang cukup bagi Mazhab Inggris. Disiplin ilmu politik memberikan tempat bagi studi tentang hubungan kekuasaan (*power relations*) dalam masyarakat internasional. Sosiologi memberikan sarana upaya menangkap hal-hal fisik dan metafisik dari hubungan antar aktor

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

internasional dalam membentuk masyarakat internasional yang tertib. Ilmu hukum memberikan fasilitasi dalam upaya untuk memahami mengapa aktor internasional memiliki kewajiban untuk mematuhi aturan, ketetapan, dan perjanjian yang disepakati bersama demi terpeliharanya ketertiban internasional. Sedangkan filsafat memberikan dasar filosofis bagi pandangan Mazhab Inggris dalam mendefinisikan pilihan aktor-aktor masyarakat internasional dalam menentukan perannya sebagai "investor norma-norma" (*norms entrepreneurs*) demi untuk memperjuangkan kemaslahatan umat manusia.

Kesimpulan

Sebagai perspektif pemikiran yang berada di luar arus utama (*mainstream*) teori hubungan internasional, Mazhab Inggris menawarkan domain baru yang menggabungkan objektifitas dan keberpihakan moral dalam menganalisis fenomena sosial-politik, khususnya isu-isu internasional. Dalam perkembangannya, Mazhab Inggris mengalami proses metamorfosis untuk menjaga agar tetap relevan dalam mengeksplanasi berbagai perkembangan baru dalam studi hubungan internasional, khususnya ketika terjadi ekspansi lingkup kajian dari keamanan tradisional yang memfokuskan pada hubungan-hubungan militer-strategis, ke kajian ekonomi politik, dan ke kajian keamanan non-tradisional (perdagangan manusia, pemindahan secara paksa, penyakit menular, kriminal internasional terorganisir, terorisme, perdagangan senjata ilegal, perdagangan narkoba, dan sebagainya). Proses metamorfosis Mazhab Inggris dari generasi klasik ke generasi kontemporer tidak bisa dipisahkan dari peran tokoh-tokoh utama (*hard core*) seperti Charles Manning dan Martin Wight yang membangun "tiga tradisi" (realisme, rasionalisme, dan idealisme/revolusionisme) yang mewakili generasi klasik; Hedley Bull yang pada dekade 1970-an mencoba mendongkrak gaung Mazhab Inggris dengan mengajukan konsep tiga pilar masyarakat internasional yang membuatnya berada di tengah-tengah antara generasi klasik dan kontemporer; dan Barry Buzan yang mencoba tiga pilar Bull dengan memasukkan kiprah aktor non-negara dan membuatnya masuk ke dalam kategori generasi kontemporer yang makin mendekat ke kubu kosmopolitanisme. Dengan demikian, kita dapat memahami Mazhab Inggris dalam tiga versi: versi generasi klasik yang direpresentasikan dengan tulisan Charles Manning dan Martin Wight; versi Hedley Bull yang berbicara tentang

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

tiga pilar masyarakat internasional; dan versi kontemporer yang diwakili oleh Barty Buzan dan Andrew Linklater.

Kehadiran Mazhab Inggris seolah-olah memberikan "kekuatan baru" bagi studi hubungan internasional, terutama saat keabsahan perspektif pemikiran arus utama (terutama Realisme dan Neo-Realisme) dipertanyakan menyangkut: mengapa Perang Dingin (yang mencerminkan hubungan kekuasaan permanen) dapat berakhir? Mengapa tatanan internasional saat ini - yang didasarkan pada prinsip kedaulatan negara dan non-intervensi - dipertanyakan eksistensinya di tengah maraknya krisis kemanusiaan akibat peperangan dan bencana alam? Mengapa intensi, dan kepentingan menjadi penting dalam menetukan pola hubungan antar aktor internasional sebagai "kawan" atau "lawan" potensial? Mazhab Inggris menawarkan alternatif baru dalam memandang fenomena internasional di luar kaidah-kaidah yang kita pelajari dari teori-teori arus utama. Keanekaragaman teori dalam studi hubungan internasional ini sekaligus menegaskan kekhasan disiplin hubungan internasional yang terbuka, multi-disipliner, dan dinamis.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

BAB 7

TEORI KRITIS (*CRITICAL THEORY*): MENGGUGAT PEMIKIRAN-PEMIKIRAN MENYIMPANG DAN MENDEKATKAN HI PADA KEMASLAHATAN MANUSIA

Pengantar

Bab ini mencoba mendiskusikan tentang kiprah Teori Kritis (*Critical Theory*) dalam memberikan warna tersendiri bagi perkembangan teori hubungan internasional. Dari istilah yang dipakai, kita dapat mengetahui bahwa Teori Kritis berasal dari pemikiran sosiologi kritis Mazhab Frankfurt (*Frankfurt School*) yang mencoba menentang dominasi pemikiran positivis dalam ilmu sosial yang dianggap lebih mementingkan penggunaan metodologi mutakhir dalam penelitian sosial untuk mengejar syarat keilmuan - presisi, validitas, korelasi antar variabel, daya prediksi, dan sebagainya - tanpa memperdulikan hakikat manusia sebagai makhluk yang kental dengan unsur-unsur subjektif seperti norma, budaya, linguistik, dan otonomi untuk menentukan pilihannya sendiri. Demi kemudahan pembahasan, tulisan ini akan dibagi menjadi beberapa bagian.

Bagian pertama akan mendiskusikan kritik Mazhab Frankfurt terhadap positivisme dengan merangkum pendapat tokoh-tokoh Mazhab Frankfurt seperti Max Horkheimer dan Jurgen Habermas. Bagian kedua akan membahas tentang bagaimana Marxisme ikut meramaikan teori hubungan internasional. Tujuan pembahasan hal ini tidak saja untuk menunjukkan kedekatan Teori Kritis dengan Marxisme, tetapi juga untuk memperlihatkan bahwa konsep-konsep Marx tentang "materialisme sejarah", "perjuangan kelas" dan "internasionalisme" mulai dilirik para pakar hubungan internasional untuk memberikan eksplanasi bagi fenomena global terkait dengan perkembangan kapitalisme dunia. Bagian ketiga akan membahas tentang bagaimana studi hubungan internasional

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

yang positivistik terbelenggu oleh "pemikiran-pemikiran menyimpang" (*distorted thoughts*) dan kecenderungan untuk menciptakan eksplanasi "satu dimensi" (*one dimensional*) yang memunculkan sejumlah pertanyaan yang tidak terjawab. Pembahasan hal ini untuk memberikan dasar bagi adanya kebutuhan untuk mempelajari perspektif alternatif - seperti Teori Kritis - demi memperkaya studi hubungan internasional sebagai suatu disiplin ilmu. Bagian keempat akan mendiskusikan tentang tesis Andrew Linklater - *Problems of Community, Problems of Citizenship*, dan *Problems of Harm* - yang menjadi "proposisi penanda" (*signified proposition*) Teori Kritis dalam studi hubungan internasional. Bagian kelima akan menyimpulkan keseluruhan tulisan ini.

Kritik terhadap Ilmu Positivistik

Teori Kritis muncul dari sekelompok ilmuwan Mazhab Frankfurt (*Frankfurt School*) yang sering dikaitkan dengan sejumlah nama seperti Max Horkheimer, Jurgen Habermas, dan Theodor Adorno yang merupakan para pemikir Sosiologi di *Institute for Social Research, Goethe University*, Frankfurt. Pemikiran kritis Mazhab Frankfurt ini muncul ke permukaan sebagai reaksi terhadap dominasi pemikiran positivisme dalam ilmu sosial - khususnya Sosiologi - yang membangun teori berdasarkan kaidah-kaidah sosial (*social laws*) dan keajegan-keajegan (*regularities*) sehingga menciptakan berbagai "pembatasan-pembatasan sosial yang sengaja diciptakan" (*socially-created constraints*) dan pada gilirannya membelenggu kebebasan umat manusia. Dalam bentuk yang ekstrim, situasi seperti ini dapat dilihat di Jerman pada masa kekuasaan Nazi Hitler ketika rekayasa sosial yang paling ekstrim dilakukan oleh Hitler menciptakan bencana kemanusiaan dalam peristiwa *Holocaust* yang menelan korban berjuta-juta orang Yahudi di hampir seluruh Eropa.

Dengan merujuk pada pemikiran Karl Marx bahwa "manusia membuat sejarahnya sendiri, tetapi dalam situasi di mana mereka tidak menentukan pilihan secara mandiri" (*human beings make their own history, but not in conditions of their own choosing*), Max Horkheimer menyatakan bahwa Teori Kritis bertujuan untuk mereduksi bahkan mengeliminasi berbagai "pembatasan-pembatasan sosial yang sengaja diciptakan" ini agar kebebasan umat manusia sebagai "subjek" (bukannya objek) ilmu pengetahuan dapat terjaga. Dengan demikian Teori Kritis mencoba membebaskan umat manusia dari belenggu

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

"*socially-created constraints*" yang diciptakan oleh mereka yang memiliki otoritas politik dan otoritas kelimuan.[1]

Senada dengan Horkheimer, Jurgen Habermas menyatakan bahwa positivisme dalam ilmu sosial mencoba mengadopsi metode yang diterapkan dalam ilmu eksakta (*natural sciences*). Dengan keyakinan bahwa ilmu eksakta yang menerapkan metode mutakhir dapat menghasilkan teori-teori canggih yang memiliki daya eksplanasi tinggi, para pemikir positivis mencoba meniru mentah-mentah metode pengukuran dan menyederhanakan fakta melalui pembuatan model-model dalam penelitian ilmu sosial dengan sengaja mengabaikan fakta bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki unsur budaya, linguistik, norma, dan otonomi kehendak dalam menentukan nasibnya sendiri. Dalam situasi ini, positivisme cenderung menciptakan pengetahuan yang mengandung unsur "kepentingan demi ilmu pengetahuan" (*knowledge-constitutive interest*) yang membuat agenda penelitian dipenuhi "kepentingan-kepentingan teknis" (*technical interests*) untuk mengontrol perilaku manusia. Teori kritis dapat dilihat sebagai hasil dari proses "sekuensi dialektis" (*dialectic sequence*) dari ilmu sosial positivis dengan "kepentingan kognitif emansipatoris" (*emancipatory cognitive interest*) dalam memahami kemungkinan pembebasan aktor-aktor sosial dari "pembatasan-pembatasan yang tidak perlu" (*unnecessary constraints*) dan berbagai bentuk "pemikiran-pemikiran dan komunikasi yang menyimpang" (*distorted thoughts and communications*) yang dapat memisahkan ilmu pengetahuan dari kepentingan umat manusia.[2]

Sekalipun kita boleh berterimakasih kepada para pemikir Mazhab Frankfurt yang telah menyadarkan kita untuk tidak terjebak pada "*socially-created constraints*" maupun "*knowledge-constitutive interests*" yang dibawa oleh positivisme dengan penekanan pada presisi, pengukuran dan pencarian hubungan kausal antar variabel dalam penelitian, tetapi barangkali tidak berlebihan untuk mempertanyakan: jika penekanan berlebihan pada metode yang menekankan pada keajegan, presisi, pengukuran, dan hubungan kausal antar variabel seperti diyakini kaum positivis dianggap berpotensi memisahkan ilmu pengetahuan dari kepentingan umat manusia sehingga harus ditolak, lalu metode apakah yang disarankan untuk dipakai agar dapat mempertahankan

1 Max Horkheimer (1972). '*Critical Theory: Selected Essays Vol. I*'. New York: Hammondsworth, sebagaimana dikutip dalam Andrew Linklater (1990). '*Beyond Realism and Marxism: Critical Theory and International Relations*'. London: MacMillan, hlm. 1-2.

2 Jurgen Habermas (1972). '*Knowledge and Human Interests*'. London: Heinemann, sebagaimana dikutip oleh Andrew Linkalater (1990). *Op cit.*, hlm. 9-10.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

manusia di dalam lingkungan budaya, norma, linguistik, dan otonomi kehendak bebasnya?

Menghadapi pertanyaan semacam itu, Andrew Linklater (1990) membagi penelitian ilmu sosial menjadi tiga macam model pertanyaan sosiologis (*sociological inquiry*), yakni: (1) positivisme dengan komitmennya terhadap pemahaman saintifik dari keajegan-keajegan sosial (*social regularities*); (2) pendekatan hermeneutik yang memfokuskan pada dimensi kultural dan linguistik dari perilaku manusia; dan (3) sosiologi kritis (*critical sociology*) yang memiliki minat intrinsik untuk membebaskan manusia sebagai subjek dari "hambatan-hambatan sosial yang tidak perlu" (*unnecessary social constraints*) dan "pola-pola menyimpang dari produk budaya dan komunikasi" (*distorted patterns of culture and communication*). Sejak 1980-an, model kedua (hermeneutika) dan model ketiga (teori kritis) menjadi makin relevan bagi perkembangan teori hubungan internasional, terutama manakala identitas kultural dan simbol-simbol linguistik ikut membentuk diplomasi internasional.[3] Metode hermeneutika menjadi penting ketika teori hubungan internasional perlu menangkap hal-hal eksplisit (diekspresikan secara terbuka) dan implisit (disembunyikan dalam bentuk gestur dan simbol-simbol) – atau yang juga dikenal dengan istilah unsur fisik dan metafisik – yang membentuk perilaku suatu aktor internasional untuk berperang atau berdialog dengan pihak lain. Kehadiran Teori Kritis juga tidak kalah pentingnya manakala teori hubungan internasional perlu membebaskan umat manusia sebagai subjek dari "*socially-created constraints*" dan "*distorted thoughts*" yang dibawa ilmu positivis demi pencapaian kebenaran ilmiah semata.

Pengaruh Marxisme dalam Pembangunan Teori Hubungan Internasional

Sebagaimana telah disinggung di awal tulisan ini, Teori Kritis memiliki kaitan erat dengan Marxisme. Keterkaitan antara Teori Kritis dengan Marxisme menyangkut banyak hal; namun dapat diringkas menjadi beberapa hal. Pertama, keyakinanan bahwa hakikat ilmu sosial tidak hanya upaya untuk memahami (*verstehen*) berbagai fenomena sosial sebagaimana diyakini oleh Max Weber; sebaliknya, ilmu sosial hendaknya diabdikan untuk memenuhi kepentingan umat manusia sebagaimana dituliskan dalam "tesis kesebelas"

3 Andrew Linklater (1990). *Op cit.*, hlm. 3-4.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

(*thesis eleventh*) Karl Marx.[4] Tesis kesebelas Marx ini dijadikan dasar oleh Jurgen Habermas di dalam bukunya *Knowledge and Human Interests* (1972). Kedua, Teori Kritis bersepakat dengan Marxisme untuk memakai internasionalisme - mirip dengan istilah Karl Marx *suprastates* – sebagai peringkat analisis untuk mendukung argumennya tentang tatanan dunia. Dalam memasukkan pola berpikir Mazhab Frankfurt ke dalam studi hubungan internasional, Andrew Linklater mengusulkan sebuah tatanan kosmopolitan "pasca-Westphalia" (*post-Westphalia*) yang dibentuk oleh "warganegara dunia" (*world citizens*). Ketiga, Teori Kritis tampak sejalan dengan Marxisme ketika menyatakan bahwa kebebasan manusia (*human freedom*) terbelenggu oleh hambatan-hambatan struktural (*structural constraints*) sehingga perlu mengembangkan ilmu pengetahuan yang emansipatoris, yakni ilmu pengetahuan yang memiliki tujuan untuk membebaskan umat manusia dari belenggu-belenggu struktural.

Sekalipun kita dapat melihat bahwa Marxisme memberikan dasar penting bagi Teori Kritis, dalam konteks perkembangan teori hubungan internasional Marxisme kurang mendapat tempat. Barry K. Gills melihat alasan kurangnya - atau bahkan ketiadaan - perhatian terhadap konsep-konsep Karl Marx dalam teori hubungan internasional adalah karena teori hubungan internasional merupakan "elemen utama yang hilang" (*the single greatest missing element*) dalam karya besar Karl Marx.[5] Dengan nada yang sama, John MacLean menyatakan bahwa hubungan antara Marxisme dan studi hubungan internasional merupakan suatu "kasus aneh pengabaian secara mutual" (*a strange case of mutual neglect*),[6] di mana rendahnya apresiasi Marxisme klasik terhadap eksistensi negara membuatnya makin teralienasi dari pendekatan Realisme yang menekankan pada pentingnya peran negara yang merupakan perspektif dominan sejak pasca-Perang Dunia. Dapat kita lihat adanya paradoks antara realisme dan Marxisme. Di satu sisi, Realisme bertumpu pada kiprah

4 "Tesis kesebelas" (*thesis eleventh*) Karl Marx adalah salah satu argumen Marx dalam dialognya dengan filsuf Jerman Ludwig von Fuerbach pada 1845 yang pada tahun 1924 dipublikasikan berupa pamflet berjudul "Theses on Fuerbach". Pada butir kesebelas (terakhir) pamflet itu, Marx menyatakan bahwa ilmu pengetahuan tidak hanya berhenti pada upaya memahami (*verstehen*) dan menginterpretasi (*interpretiert*) fenomena saja, tetapi lebih penting lagi adalah mengubahnya (*verandern*) untuk memenuhi kepentingan manusia.

5 Barry K. Gills (1987). 'Historical Materialism and International Relations Theory', *Millenium: Journal of International Studies*, Vol.16 No. 2, sebagaimana dipublikasi kembali dalam Stephen Chan dan Cerwyn Moore (ed.) (2006). '*Theories of International Relations Vol III*'. London: Sage, hlm. 39.

6 John MacLean (1988). 'Marxism and Internarional Relations: a Strong Case of Mutual Neglect', *Millenium: Journal of International Studies*, Vol. 17 No.2, sebagaimana dipublikasi kembali dalam Stephen Chan dan Cerwyn Moore (ed.) (2006). *Op cit.*, hlm. 48.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

negara dalam mengelola sumber daya alam, melakukan diplomasi, dan bahkan memobilisasi pasukan untuk berperang yang pada gilirannya membentuk hubungan antar-negara. Pada sisi lain, Marxisme lebih memfokuskan pada kekuatan-kekuatan supra-negara (*suprastates*) dan bahkan kekuatan-kekuatan non-negara seperti gerakan sosial (buruh, petani, kaum tertindas, dan lain-lain) yang membentuk perlawanan terhadap sistem kapitalisme dunia. Bahkan salah satu tokoh Mazhab Inggris, Martin Wight (1966) mempertegas demarkasi antara studi hubungan internasional dengan Marxisme dengan menyatakan bahwa Marxisme atau Komunisme merupakan "teori masyarakat domestik" (*a theory of domestic society*) yang hanya berbicara mengenai hubungan-hubungan ekonomi-politik antara kelompok atau kelas berbeda dalam masyarakat sehingga kurang memiliki relevansi untuk diterapkan dalam konteks hubungan antar negara.[7]

Namun demikian, dalam perkembangan selanjutnya hubungan yang kurang harmonis antara studi hubungan internasional dengan Marxisme berubah ke arah konvergensi mutual ketika pada dekade 1980-an – sebelum runtuhnya Komunisme di Uni Soviet - ada semacam dialog antara studi hubungan internasional dan Marxisme. Dalam karya mereka *Marxism and International Relations* (1989), Vendulka Kubalkova dan Albert Cruickshank menunjukkan bahwa Marxisme yang secara ontologis, metodologis, dan politis telah mengalami perkembangan pesat – terutama dengan munculnya kelompok "*The Professors*"[8] yang memodifikasi konsep-konsep dasar Marx seperti analisa kelas, determinisme sosial dan materialisme sejarah sehingga lebih fleksibel untuk dipakai dalam menganalisis berbagai masalah internasional – telah menunjukkan "konvergensi luarbiasa" (*incredible convergensies*) dengan studi hubungan internasional. Konvergensi ini ditunjukkan sekurang-kurangnya oleh dua hal penting. Pertama, metode materialisme sejarah dan strukturalisme yang telah dimodifikasi oleh "*The Professors*" ternyata bermanfaat bagi para pakar untuk menganalisis pelbagai dimensi hubungan antar negara seperti hegemoni

7 Martin Wight (1960). 'WhyThere Is No International Theory?'. *International Relations*, Vol. 2 No.1, hlm. 35-48, dalam H. Butterfield dan M. Wight (ed.). '*Diplomatic Investigations*'. London: George Allen and Unwin, hlm. 25.

8 Istilah "*the professors*" dipakai oleh Vendulka Kubalkova dan Albert Cruickshank untuk menyebut para akademisi dan peneliti yang dalam kuliah dan tulisannya telah berperan dalam "kebangkitan" (*the awakening*) konsep dan metode Marxisme. Mereka ini, antara lain adalah Paul Baran, Paul Sweezy, Harry Magdoff, Hamza Alavi, Shamir Amin, Giovanni Arrighi, Andre Gunder Frank, Louis Althusser, Regis Debray, dan lain-lain. Lihat V. Kubalkova dan A. Cruickshank (1989). '*Marxism and International Relations*'. Oxford: Oxford University Press, hlm. 205-222.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

negara besar dalam hubungan produksi skala global sebagaimana dinyatakan oleh Robert W. Cox,[9] struktur ketergantungan (*dependency*) ekonomi negara berkembang terhadap negara maju sebagaimana diyakini Andre Gunder Frank,[10] dan hirarki hubungan antara kelompok negara pusat, semi-pinggiran dan pinggiran sebagaimana dinyatakan oleh Immanuel Wallerstein.[11] Dalam konteks inilah metode materialisme sejarah Karl Marx telah membantu para pakar dalam menggambarkan proses perubahan formasi sosial, dari feodalisme Eropa, perbudakan di benua Amerika dan kapitalisme dunia.[12] Kedua, Marxisme memberikan kontribusi dalam melihat keterkaitan antara "tiga tradisi" (*the three traditions*: Realisme ala Hobbes, Rasionalisme ala Grotious, dan Revolusionisme ala Kant) yang diusung oleh Mazhab Inggris generasi klasik.[13] Realisme ala Hobbes yang membahas tentang hubungan konfliktual antar negara dalam rangka pencapaian kepentingan nasional tampak sesuai dengan diktum Marxis (Leninis) tentang "tujuan menghalalkan cara" (*the end justifies the means*). Ketika negara merasa perlu untuk saling bekerja sama dengan cara mematuhi norma dan aturan hukum sebagaimana dinyatakan oleh Rasionalisme ala Grotious, maka Marxisme memberikan kontribusi dalam hal kebutuhan adanya perombakan total terhadap tatanan sistem negara menuju tatanan supra-negara yang mirip dengan gagasan masyarakat kosmopolitan ala Immanuel Kant.

Bagi pencetus Teori Kritis dalam studi hubungan internasional, hubungan baik antara Marxisme dan studi hubungan internasional sejak dekade 1980-an adalah perkembangan yang sangat menggembirakan. Hazel Smith, misalnya, menyatakan bahwa metode materialisme sejarah Karl Marx yang sudah direvisi (dilepaskan dari agenda perjuangan kelas) lebih memiliki bobot integritas teoretis yang memudahkan teori hubungan internasional untuk mengadopsi konsep-konsep Marx, seperti misalnya yang dilakukan oleh Robert W. Cox yang memakai konsep hegemoni pemikir Marxis Antonio Gramsci untuk menjelaskan bagaimana hubungan produksi dan kekuasaan

9 Robert W. Cox (1987). '*Production, Power and world Order: Social Forces in the Making of History Vol. 1*'. New York: Columbia University Press.
10 Andre Gunder Frank (1978). 'The Post-War Boom: Boon for the West and Bust for the South'. *Millenium: Journal of International Studies*. Vol. 7 No.2, hlm. 151-161.
11 Immanuel Wallerstein (1979). '*The Capitalist World Economy*'. Cambridge: Cambridge University Press.
12 Barry K. Gills (2006 [1987]). 'Historical Materialism and International Relations Theory'. *Millennium-Journal of International Studies*. Vol. 16 No. 2, dalam Stephen Chan dan Cerwyn Moore (ed.). *Op cit*, hlm.41.
13 V. Kubalkova dan A. Cruickshank (1989). *Op cit*., hlm. 13-15.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

telah membentuk pola hegemoni kelompok yang kuat terhadap kelompok yang lemah. Karya Cox ini kemudian acapkali menjadi bahan rujukan dalam karya-karya pemikir Teori Kritis dalam studi hubungan internasional.[14]

Dengan nada yang kurang-lebih sama, Andrew Linklater menyatakan bahwa dialog antara Marxisme dan studi hubungan internasional sebagaimana diungkapkan oleh Kubalkova dan Cruickshank telah "membuka lebar" (*opening up*) pengembangan teori hubungan internasional untuk membahas tema-tema di luar tradisi arus utama - terutama Realisme - yang melulu berbicara tentang isu politik tingkat tinggi (*high politics*) - peperangan dan perdamaian. Dengan memakai konsep-konsep Marx, studi hubungan internasional bahkan dapat berekspansi untuk mulai membahas tema-tema yang menyangkut kebebasan manusia (*human freedom*) dan emansipasi manusia (*human emancipation*) yang terkait dengan kenyataan sehari-hari.[15] Bahkan dalam karyanya yang mengkritisi Realisme, Alejadro Colas (2002) menyatakan bahwa pemikiran Antonio Gramsci dapat dipakai untuk menjelaskan proses persaingan antara aktor-aktor tradisional yang disebut pemegang hegemoni (*hegemonic forces*) berhadapan dengan masyarakat sipil internasional (*international civil society*) sebagai komponen utama gerakan kontra-hegemoni (*counter-hegemonic movements*) dalam membicaraan masalah perlindungan hak asasi manusia, demokrasi global, keamanan manusia, dan perlindungan lingkungan hidup.[16] Dalam konteks inilah, tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa teori Kritis dan Marxisme ikut mendorong perluasan (*the extension*) lingkup isu dalam studi hubungan internasional - terutama pada masa pasca Perang Dingin - dengan mulai merambah ke isu-isu non-tradisional seperti hak asasi manusia, kemiskinan global, kesetaraan gender, perlindungan lingkungan hidup, perdagangan manusia, pengungsi, penyakit menular, dan sebagainya yang melibatkan aktor-aktor non-negara (NGOs, aliansi masyarakat sipil, gerakan sosial, dan individu transnasional).

14 Hazel Smith (1996). 'The Silence of the Academics: International Social Theory, Historical Materialism and Political Values'. *Review of International Studies*, Vol. 22 No.2, sebagaimana dipublikasi kembali dalam Stephen Chan dan Cerwyn Moore (ed.) (2006). *Op. cit.*, hlm. 76.

15 Andrew Linkalater (1986). 'Realism, Marxism and Critical International Theory'. *Review of International Studies*, Vol. 12 No.1, seperti dipublikasi ulang dalam Stephen Chan dan Cerwyn Moore (ed.) (2006). *Op. cit.*, hlm. 113-117.

16 Alejandro Colas (2002). '*International Civil Society*'. Cambridge: Polity Press, hlm. 14-16.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

Pemikiran-pemikiran Menyimpang (*Distorted Thoughts*) dalam Studi Hubungan Internasional

Sebagaimana telah disinggung pada bahasan sebelum ini, Teori Kritis memiliki tujuan emansipatoris, yakni membebaskan ilmu pengetahuan dari pemikiran-pemikiran menyimpang (*distorted thoughts*) yang dibawa oleh ilmu positivis yang membuat postulasi sedemikian rupa demi mengejar presisi dan validitas teori yang dibangun. Dalam kaitan ini, adalah masuk akal untuk menanyakan hal-hal apa sajakah yang dapat dikelompokkan sebagai "*distorted thoughts*"? Seperti halnya cabang-cabang ilmu sosial lain, studi hubungan internasional positivistik – terutama yang dibawa oleh Neo-Realisme – mengandung beberapa "*distorted thoughts*". Maka tidak mengherankan jika Andrew Linklater dalam karyanya *Beyond Marxism and Realism: Critical Theory and International Relations* (1990) menunjukkan beberapa poin dalam karya pencetus Neo-Realisme, Kenneth Waltz,[17] yang dapat di kategorikan sebagai "*distorted thoughts*" dalam studi hubungan internasional. Pertama, dalam proposisinya Waltz menyatakan bahwa politik domestik dan politik internasional dapat dibedakan dengan jelas karena politik domestik berkarakter "hirarkis" di mana negara memiliki hak-hak yang dilindungi hukum untuk menggunakan instrumen kekerasan dalam upaya untuk melindungi setiap warganegara dari segala bentuk ancaman dan kekacauan, sedangkan politik internasional berkarakter "anarkis" yang diwarnai dengan ketiadaan perlindungan secara sistematis sehingga setiap negara harus menjaga kelangsungan hidupnya secara mandiri (*self help*).[18] Dengan demikian politik internasional yang anarkis yang mendorong setiap negara untuk berperilaku mandiri cenderung membentuk perilaku rasional yang mereproduksi situasi kecurigaan (*distrust*) dan rasa tidak aman (*insecurity*) karena sewaktu-waktu dapat diserang negara lain yang lebih kuat. Karena itu, logika bahwa hubungan internasional yang penuh kecurigaan dan rasa tidak aman ini seolah-olah dipaksakan kepada kita untuk diyakini (*taken for granted*) sebagai kebenaran.

Kedua, pendapat Waltz bahwa sistem internasional merupakan reproduksi dari teori sistem dalam politik domestik di mana eksistensi setiap bagian dari sistem politik ditentukan oleh peran dan fungsinya. Dalam kondisi anarkis, setiap negara dituntut untuk berfungsi dalam mempertahankan

17 Kaya Neo-Realisme yang menjadi fokus perhatian dari Andrew Linkalater adalah buku Kenneth Waltz (1986). *'Reflections of Theory of International Politics'*. New York: Random House, hlm. 327.

18 Andrew Linkalater (1990). *Op cit.*, hlm. 12.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

kelangsungan hidupnya dan juga kelangsungan sistem internasional dengan memaksimalkan kekuatan militernya. Dalam situasi seperti ini, Waltz cenderung terjebak pada oversimplifikasi, di mana karakter negara ditentukan oleh besar-kecilnya kekuatan militer yang ada padanya. Dengan kata lain, reproduksi teori sistem dalam konteks politik internasional cenderung mengabaikan karakter-karakter penting negara selain kekuatan militer.[19] Dalam konteks ini, Neo-Realisme berkecenderungan untuk melakukan "reduksi secara absurd" (*reductio ad absordum*) dengan mengabaikan karakter lain suatu negara seperti misalnya kemampuan menjalin persahabatan dengan pihak lain, kemampuan menggunakan pengaruh ekonomi, kapasitas dalam menginisiasi ketentuan internasional, kapasitas untuk mendorong terciptanya perjanjian internasional, dan sebagainya. Sifat "*reductio ad absordum*" akibat penerapan teori sistem inilah juga merupakan salah satu "*distorted thoughts*" dalam studi hubungan internasional.

Ketiga, atas dasar alasan pertama (politik internasional yang anarkis) dan alasan kedua (sistem internasional yang mereduksi eksistensi negara pada kekuatan militer) kemudian menghasilkan pola hubungan internasional spesifik yang diwarnai dengan hakikat hubungan antar negara dalam suasana "perjuangan kekuasaan dan keamanan tanpa akhir" (*endless struggle for power and security*). Hubungan internasional akan terus-menerus diwarnai dengan perjuangan kekuasaan selama politik internasional dalam kondisi anarkis.[20] Dengan kata lain, Neo-Realisme meyakini bahwa "*struggle for power*" merupakan konsekuensi logis dari anarki dalam sistem internasional yang tidak akan pernah berubah. Dalam kondisi semacam itu tampak adanya nuansa pesimistis akan masa depan politik internasional di dalam perspektif Neo-Realisme. Namun tidak berarti bahwa suasana damai tidak akan pernah terjadi. Dalam suasana "*struggle for power*" pun, perdamaian (dalam arti tidak adanya peperangan) dapat saja terjadi dalam suasana perimbangan kekuasaan (*Balance of Power*), di mana kekuatan militer terdistribusi secara relatif merata. Ironisnya, perdamaian semacam ini dibangun atas dasar "saling curiga dan takut" (*mutual distrust and mutual fear*) karena ketiadaan peperangan terjadi semata-mata akibat tidak adanya pihak yang berani memulai peperangan dengan kekuatan militer yang relatif setara. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa logika "*endless struggle for power and security*" dalam situasi anarkis

19 Andrew Linklater (1990). *Loc cit.*
20 *Ibid.*, hlm. 14.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

yang diyakini oleh Neo-Realisme merupakan salah satu bentuk dari "*distorted thoughts*" dalam studi hubungan internasional.

Andrew Linklater dan Gagasan "Warga Dunia" dalam Tatanan Politik Pasca Westphalia

Bagian ini akan mengulas tentang "proposisi penanda" (*signified proposition*) dari Teori Kritis dalam studi hubungan internasional yang dilakukan oleh pencetusnya, Andrew Linklater.[21] Harus diakui bahwa dalam karya terdahulunya *Beyond Realism and Marxism* (1990), Andrew Linklater telah meletakkan pondasi yang cukup penting bagi Teori Kritis dalam studi hubungan internasional. Di dalam buku itu, Linklater membahas sekurang-kurangnya empat hal penting, yakni: (1) Kritik Teori Kritis Mazhab Franfurt terhadap ilmu sosial positivistik yang terkontaminasi oleh kepentingan keilmuan sehingga mengabaikan dimensi budaya dan linguistik manusia sebagai subyek; (2) adanya dialog antara Marxisme dan Realisme sehingga Marxisme dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan teori hubungan internasional; (3) seperti halnya cabang ilmu sosial lainnya, studi hubungan internasional juga terkontaminasi oleh positivisme sehingga memiliki sejumlah "pemikiran-pemikiran menyimpang" (*distorted thoughts*) dan eksplanasi berdimensi tunggal (*one-dimensional explanation*) sehingga menghasilkan produk penelitian yang bias; dan (4) untuk menghindari "pemikiran-pemikiran menyimpang" akibat dominasi pendekatan positivis, studi hubungan internasional perlu mengembangkan pendekatan emansipatoris yang meletakkan studi hubungan internasional pada tradisi berpikir revolusioner ala Immanuel Kant, yakni menggugat pemahaman berdimensi tunggal studi hubungan internasional yang merujuk pada pentingnya "negara-bangsa" (*nation-state*) yang digagas pada perjanjian Westphalia tahun 1648.[22]

21 Penulis berkesempatan berinteraksi dengan Prof. Andrew Linklater sebagai salah satu murid beliau ketika menempuh studi master di bidang hubungan internasional di *Monash University*, Australia, pada tahun 1991-1993. Interaksi berlanjut ketika penulis beberapa kali mengundang Prof. Linklater untuk memberikan kuliah tamu tentang Teori Kritis di Jurusan Hubungan Internasional Universitas Katolik Parahyangan dan diskusi-diskusi di Universitas Cambridge, Inggris, tempat penulis menempuh studi doktoralnya kerika pada waktu yang sama Prof. Linklater menjadi guru besar hubungan internasional di *Keele University*, Inggris sebelum kemudian menduduki jabatan prestigius sebagai *Woodrow Wilson Professor* di Universitas Aberyswyth di Wales, Inggris.

22 Andrew Linklater (1990). *Op cit.*, hlm. 68-69.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

Sekalipun karya awal Linklater itu telah meletakkan dasar penting bagi usaha kita untuk memahami sumbangan Teori Kritis dalam teori hubungan internasional, tetapi buku itu belum memberikan "proposisi penanda" (*signified proposition*) dari Teori Kritis yang dapat dianggap sebagai proposisi utama Teori Kritis dalam melihat hubungan antar aktor dalam studi hubungan internasional. Baru pada karya berikutnya, *Critical Theory and World Politics: Citizenship, Sovereignty and Humanity* (2007), Andrew Linklater mengungkapkan secara lebih eksplisit argumen Teori Kritis dalam pembentukan teori hubungan internasional yang emansipatoris. Buku yang merupakan kompilasi dari artikel-artikel pilihan karya Linklater di berbagai jurnal ilmiah dan buku teks yang dipublikasi antara tahun 1982-2007 ini merangkum perkembangan bertahap Teori Kritis dalam studi hubungan internasional. Selain mengkritisi dominasi konsep "negara-bangsa" (*nation-state*) dalam studi hubungan internasional pasca-Perang Dunia, dalam buku tersebut Linklater juga mengamati prospek konfigurasi konsep "komunitas" (*community*) dan "solidaritas" (*solidarity*) dalam rangka proses peningkatan "saling keterkaitan umat manusia" (*human interconnectedness*) demi mencapai kemaslahatan bersama.

Kedua macam argumen itu dirangkum oleh Linkalater ke dalam tiga bagian, yakni: (1) Bagian pertama: Problematika komunitas (*The Problem of Community*) di mana pemakaian istilah standar "komunitas internasional" dalam analisis hubungan internasional telah mengabaikan pentingnya pelaksanaan "kewajiban moral" (*moral obligation*) para anggota komunitas tersebut; (2) Bagian kedua: Problematika Kewarganegaraan (*Problem of Citizenship*) di mana pembahasan mengenai kewarganegaraan (*citizenship*) yang selalu dikaitan dengan "kedaulatan negara" (*state sovereignty*) justru membatasi upaya bersama umat manusia untuk menyelesaikan berbagai masalah global, sehingga perlu rekonstruksi konsep "kewarganegaraan nasional" (*national citizenship*) menjadi "kewarganegaraan dunia" (*world citizenship*); dan (3) Bagian ketiga: Problematika Pencideraan (*Problem of Harm*) di mana diskursus tentang kejahatan perlu direkonstruksi dengan tidak lagi hanya berbicara mengenai peperangan antar negara, tetapi juga menyangkut kejahatan dalam bentuk-bentuk yang lain seperti misalnya kejahatan oleh aktor-aktor non-negara (terorisme, pemberontakan, kriminalitas, dan lain-lain) dan kejahatan negara terhadap rakyatnya (kekerasan, diskriminasi, pengabaian, dan lain-lain). Penyelesaian menyeluruh terhadap problematika pencideraan mensyaratkan adanya kesadaran kosmopolitan untuk memandang bahwa kejahatan

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

merupakan persoalan universal. Ketiga bagian itu akan dibahas secara lebih rinci di bawah ini.

Problematika Komunitas (Problem of Community)

Seperti telah disinggung pada bagian sebelum ini, diskusi mengenai sistem negara-modern didominasi oleh konsep-konsep dasar yang dikembangkan dari Perjanjian Westphalia 1648 di mana komunitas antar-negara memprioritaskan pada kedaulatan negara-bangsa (*nation-states*) yang memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya alam, mengatur hubungan sosial-ekonomi-politik penduduk dalam wilayah tertentu, dan juga menetapkan batas teritorial sebagai simbol identitas negara. Konsep negara-bangsa yang muncul sejak Perjanjian Westphalia dan diterapkan di seluruh Eropa dan kemudian merebak ke seluruh penjuru dunia sebagai dasar bagi berdirinya negara-modern ini ternyata memberi gambaran adanya kewajiban setiap negara sebagai anggota komunitas internasional untuk menciptakan kesejahteraan serta menegakkan kedamaian dan ketertiban di segala aspek kehidupan (sosial-ekonomi-politik) di dalam wilayah teritorial masingmasing, tanpa sedikitpun kewajiban untuk menegakkan kesejahteraan, kedamaian, dan ketertiban di luar batas-batas teritorialnya.[23]

Dalam kaitan ini, Linklater melihat problematika komunitas dari tiga dimensi. Pertama, pada dimensi normatif ada semacam konflik antara partikularisme (*particularism*) berhadapan dengan universalisme (*universalism*), di mana keyakinan akan adanya nilai-nilai universal selalu ditentang oleh mereka yang meyakini adanya konteks lokal yang membatasi universalitas suatu nilai. Konteks lokal ini dapat berwujud budaya setempat, subjektivitas aktor, favoritisme, dan sebagainya. Para pakar ilmu sosial, seperti Durkheim dan Bosanquet, misalnya meyakini bahwa hal-hal yang menyangkut kemanusiaan (*humanity*) dapat lebih mudah dipahami jika dibatasi pada konteks negara-negara tertentu dengan melihat pada praktik-praktik yang berlaku pada suatu komunitas sosial, sehingga membentuk apa yang disebut oleh Henry Shue (1988) sebagai "citra lingkaran konsentrik mengenai tugas" (*concentriccircle image of duty*).[24] Tampak bahwa para penentang universalisme bersandar pada pentingnya mempertahankan toleransi dan perbedaan. Di lain pihak,

23 Andrew Linklater (2007). *Op cit.*, hlm. 31-32.

24 Henry Shue (1988) 'Mediating Ethics'. *Ethics*, Vol. 98 No. 4, sebagaimana dikutip oleh Andrew Linklater (2007). *Ibid.*, hlm. 35.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

Teori Kritis berkeyakinan bahwa universalitas nilai perlu ditegakkan dengan memperhatikan keseimbangan yang pas antara hal yang partikular dan hal yang universal, tanpa harus menafikan diversitas budaya untuk kemudian menggantikannya dengan nilai-nilai universal.[25] Dalam konteks inilah, Teori Kritis berargumentasi bahwa negara sebagai anggota komunitas internasional tidak seharusnya mengabaikan kewajiban politik dan moralnya yang universal – yakni menjaga kebebasan manusia dari penindasan (*freedom from fear*), memelihara hak untuk memperoleh kebutuhan dasar (*freedom of pursuing needs*), dan hak untuk memperjuangkan martabat kemanusiaan (*freedom of maintaining dignity*) – tanpa harus dibatasi oleh fragmentasi politik, diversitas budaya, dan perbedaan ras/etnis. Kewajiban universal ini hendaknya dipikul oleh seluruh anggota komunitas internasional tanpa kecuali.

Kedua, pada dimensi sosiologis para pemikir seperti Karl Marx, Max Weber, Ferdinand Tonies, dan Emile Durkheim mendiskusikan mengenai "transformasi besar" (*great transformation*) di mana industrialisasi dan modernisasi telah mentransformasi perikatan individu dari *gemeinschaft* (komunitas) yang disatukan oleh status, bahasa, budaya, dan agama menjadi *gesselschaft* (masyarakat) yang disatukan oleh hubungan impersonal, transaksi sosial, dan keanggotaan dalam organisasi.[26] Dalam konteks ini, tumbuhnya kesadaran baru dan munculnya perikatan sosial baru telah mentransformasi sikap-sikap individu untuk meninggalkan tradisionalitas yang sempit dan mendukung nilai-nilai moral yang universal. Sejalan dengan itu, studi hubungan internasional sebagaimana digambarkan oleh Hedley Bull (1984) mulai menggagas bentuk baru komunitas politik lintas negara yang menjunjung tinggi norma-norma global yang pada gilirannya mengarah pada terciptanya sebuah komunitas dunia (*world community*).[27] Dengan demikian tampak jelas bahwa secara sosiologis terjadi pula pergeseran pemahaman komunitas dari *gemeinschaft* menjadi *gesselschaft* yang juga diikuti dengan tumbuhnya kesadaran universal untuk menegakkan nilai dan norma global.

Ketiga, pada dimensi praktis pembentukan negara modern yang diwarnai dengan monopoli penggunaan instrumen kekerasan (militer) dan pengelolaan keuangan telah menciptakan apa yang disebut oleh Norbert Elias (2000) dengan

25 Andrew Linkalater (2007). *Loc cit.*,
26 *Ibid.*, hlm. 39.
27 Hedley Bull (1984). *'Justice and International Relations: The Hagey Lectures'*. Ontario: University of Waterloo sebagaimana dikutip dalam Andrew Linklater (2007). *Op cit.*, hlm. 39.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

"pola baru pembentukan identitas" (*new pattern of identity formation*).[28] Secara lebih spesifik, Martin Wight menyatakan bahwa kebangkitan negara-modern disertai dengan "revolusi loyalitas" (*a revolution in loyalties*) di mana "loyalitas lingkaran dalam berkembang" (*inner circle of loyalty expanded*) sedangkan "loyalitas lingkaran luar menyempit" (*outer circle of loyalty shrank*).[29] Dalam konteks revolusi loyalitas inilah semangat kosmopolitanisme muncul dalam wujud aneka ekspresi solidaritas transnasional. Sebagai contoh, ketika terjadi penindasan oleh aparat keamanan Serbia terhadap warga sipil di Bosnia dan Kosovo, komunitas internasional bersatu atas nama solidaritas kemanusiaan untuk menentang segala macam tindakan kekerasan terhadap warga sipil dan mendorong adanya intervensi kemanusiaan untuk menghindari bencana kemanusiaan yang lebih besar.

Problematika komunitas memiliki dampak teoretis bagi perkembangan teori-teori hubungan internasional, yakni: (1) perlunya reinterpretasi teori hubungan internasional untuk lebih menyeimbangkan antara kewajiban individu dan kewajiban kemanusiaan yang tidak lagi harus dibatasi oleh loyalitas terhadap negara-bangsa; (2) adanya kebutuhan untuk melakukan penelaahan sosiologis yang menganalisis hubungan antara kekuasaan negara, identitas budaya, dan moralitas global yang lintas masyarakat; dan (3) perlunya pengembangan teori-teori yang menggambarkan perluasan lingkaran komunitas dari lingkaran yang dibatasi oleh loyalitas kepada negara-bangsa menjadi loyalitas kemanusiaan global tanpa sekat-sekat negara-bangsa.

Problematika Kewarganegaraan (Problem of Citizenship)

Secara harafiah istilah kewarganegaraan (*citizenship*) seringkali diasosiasikan dengan seperangkat hak-hak dan kewajiban hukum yang melekat pada individu sebagai warga dari suatu negara.[30] Di sisi lain, kewarganegaraan juga dapat diasosiasikan dengan hak-hak individu untuk ikut berpartisipasi dalam komunitas global. Konsep kewarganegaraan yang bertumpu pada loyalitas kepada negara tertentu inilah yang sangat dijunjung tinggi dan diperkuat oleh gagasan-gagasan pendukung seperti kedaulatan, batas teritorial, persatuan nasional, dan semacamnya untuk mempertegas fungsi simbolis negara sebagai

28 Norbert Elias (2000). *'The Civilizing Process: Sociogenetic and Psychogenetic Investigations'*. Oxford: Basil Blackwell, sebagaimana dikutip dalam Andrew Linklater (2007). *Op cit.*, hlm. 42.
29 Martin Wight (1978). *'Power Politics'*. Leicester: Leicester University Press, sebagaimana dikutip oleh Andrew Linklater (2007). *Op cit.*, hlm. 42.
30 Andrew Linklater (2007). *Op cit.*, hlm. 65.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

pemegang otoritas dan hak untuk menuntut loyalitas dari warganya. Dengan demikian, Realisme – yang menekankan pada sentralitas negara sebagai aktor internasional - semakin mendapat dukungan untuk kemudian menjadi perspektif utama di dalam teori hubungan internasional pasca Perang Dunia. Tampak jelas bahwa pada pasca Perjanjian Westphalia 1648, sistem internasional dibentuk oleh negara-bangsa sebagai aktor utama yang kelangsungan hidupnya dijamin oleh warganegara (*citizens*) yang loyal kepada negara-bangsa tempat tinggalnya.

Di tengah-tengah dominasi Realisme, para pemikir Teori Kritis mengajukan pertanyaan penting: masih adakah peluang bagi terjadinya apa yang disebut oleh Martin Wight dengan "revolusi loyalitas" di mana loyalitas negara-bangsa dalam konteks "*national citizenship*" bertransformasi menjadi loyalitas global dalam konteks "*global citizenship*"? Dalam kaitan ini, Andrew Linklater menyatakan adanya semacam dialektika dalam konsep kewarganegaraan.[31] Ketika pada awal kebangkitan negara-bangsa pembahasan mengenai hak asasi manusia terbatas pada hak sipil (*civil rights*) dan hak politik (*political rights*) – di mana penerapan prinsip hak asasi manusia dikaitkan dengan kewarganegaran seseorang: hak individu untuk menyatakan pendapat, hak untuk berorganisasi, hak untuk mencapai status kewarganegaraan, hak untuk memilih dan dipilih sebgai wakil rakyat, dan sebagainya – memang kewarganegaraan dengan loyalitas negara tampak sangat kental. Tetapi, pada awal abad ke-20 ketika diskursus tentang hak asasi manusia ditambah dengan komponen hak ekonomi, sosial dan budaya (*economic, social and cultural rights*) - yang berbicara mengenai hak individu untuk mendapat penghidupan yang layak, hak untuk melakukan ritual sosial-keagamaan, hak untuk menggunakan identitas budaya tertentu, dan sebagainya – maka loyalitas lingkaran dalam (*inner circle loyalties*) menjadi kurang relevan tergantikan oleh loyalitas lingkaran luar (*outer circle loyalties*) yang menjadi dasar perilaku kosmopolitan. Menurut Bryan Turner saat ini dialektikanya tidak berhenti sampai di sini saja, tetapi mulai mempertanyakan hak-hak spesies non-manusia lainnya, seperti perlidungan lingkungan hidup, hewan, dan tumbuhan.[32]

Dalam konteks studi hubungan internasional, dialektika konsep kewarganegaraan ini memiliki dampak cukup signifikan. Para pakar seperti Edward H. Carr (1945) dan Raymond Murphy (1988) menyatakan bahwa

31 *Ibid.*, hlm. 6566.

32 Bryan S. Turner (ed.) (1986). '*Citizenship and Social Theory*'. London: Sage, hlm. 127-131.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

penambahan komponen hak-hak untuk memperoleh kesejahteraan kedalam diskusi mengenai "*national citizenship*" secara tidak langsung mengganggu eksistensi sistem negara-bangsa di mana kedaulatan negara dipersoalkan dan batas teritorial dikesampingkan.[33] Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dialektika konsep kewarganegaraan mensyaratkan munculnya teori-teori baru hubungan internasional yang menggambarkan loyalitas lingkaran luar (*outer circle loyalties*) yang tidak lagi bertumpu pada negara sebagai unit analisis yang paling penting. Dalam konteks inilah, kajian mengenai teori kritis dalam studi hubungan internasional diharapkan memberi kontribusi.

Problematika Pencideraan (Problem of Harm)

Dalam studi hubungan internasional yang didominasi oleh Realisme, keinginan untuk melakukan tindak pencideraan (*harm*) kepada pihak lain adalah salah satu hal penting yang mau tidak mau harus dilakukan oleh negara untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam hubungan kekuasaan (*power relations*). Bagi kaum Realis, esensi hubungan antar negara sejak zaman negara-kota (*city states*) pada masa Yunani kuno hingga era negara-modern pasca Perjanjian Westphalia 1648 adalah hubungan yang diwarnai oleh keinginan untuk mencederai negara lain yang berpotensi mengancam keamanan nasional suatu negara. Bahkan tatanan internasional pasca Perang Dunia didasarkan pada semacam kesepakatan bahwa negara-negara besar (*major powers*) memiliki kekuasaan untuk menggunakan instrumen kekerasan yang dapat mencederai (*harm*) negara lain demi menegakkan ketertiban dan keamanan dunia. Hal ini dimanifestasikan dalam hak istimewa yang dimiliki Dewan Keamanan PBB (*UN Security Souncil*) – di mana *major powers* seperti USA, Inggris, Perancis, Rusia, dan Tiongkok menjadi anggota tetap – untuk memobilisasi intervensi militer ke wilayah negara lain demi untuk menegakkan keamanan dan ketertiban.

Namun demikian, Realisme cenderung memiliki pemahaman sangat sempit tentang fenomena ini, di mana prinsip pencideraan (*harm*) dipahami sebagai pencideraan oleh suatu negara kepada negara lain atau perang antar negara (*inter-state wars*). Oversimplifikasi semacam ini dapat menciptakan distorsi dalam menganalisis bagaimana negara (bahkan seluruh umat manusia) harus bersikap mengenai perbuatan mencederai (*harm*) yang melekat dalam hubungan antar negara. Karena itu, ada semacam kebutuhan untuk memperluas

33 Edward Hallett Carr (1945). '*Nationalism and After*'. London: MacMillan, dan Raymond Murphy (1988). '*Social Closure: The Theory of Monopolisation and Closure*'. Oxford: Oxford University Press.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

analisis tentang prinsip penciderаan. Teori Kritis beranggapan bahwa ekstensi prinsip kejahatan (*harm*) secara universal dan pembahasan secara lebih rinci mengenai apa saja yang termasuk ke dalam kategori kejahatan dapat mewajibkan kita untuk menghindari perbuatan mencederai pihak lain secara tidak perlu.[34] Merujuk pada pemikiran kosmopolitan Mazhab Inggris, Andrew Linklatermengemukakan lima kategori penciderаan (*harm*), yakni:[35]

(1) Penciderаan secara sengaja dalam hubungan antara komunitas politik independen (*deliberate harm in relations between independent political communities*) yang sering disebut dengan perang antar negara yang dapat dihindari dengan adanya perimbangan kekuasaan (*Balance of Power*), diplomasi, dan hukum internasional.

(2) Penciderаan secara sengaja oleh pemerintah terhadap warga negaranya sendiri (*deliberate harm caused by governments to their own citizens*) di mana karena sesuatu hal pemerintah suatu negara melakukan penciderаan (*harm*) terhadap warganegaranya sendiri seperti terjadi di Yugoslavia, Libya, dan Suriah. Hal ini seringkali mengundang intervensi kemanusiaan dengan berbagai pre-teks seperti Bab VII (*Chapter 7*) Piagam PBB atau yang lebih kontemporer prinsip R-to-P (*Responsibility to Protect*/Tanggung Jawab untuk Melindungi), di mana atas dasar prinsip *Just War* (Perang demi Keadilan) yang mentolerir penggunaan kekuatan militer untuk menghindari bencana kemanusiaan dalam memberantas separatisme.

(3) Penciderаan oleh aktor non-negara (*deliberate harm by non-state actors*) yang marak terjadi terutama setelah usainya Perang Dingin di mana gangguan terhadap keamanan warga dapat muncul dari aktor-aktor non-negara seperti dalam kasus pembajakan di laut oleh para perompak dan tentara bayaran, perdagangan manusia oleh para pelaku kriminal transnasional, terorisme global oleh kelompokkelompok ekstrim, peredaran obat terlarang oleh para mafia pengedar transnasional, dan sebagainya. Dalam kondisi seperti ini, dimensi isu keamanan menjadi melampaui batas teritorial suatu negara sehingga memerlukan penanganan secara mutinasional. Maka pemahaman universal mengenai berbagai isu keamanan non-tradisional seperti itu sebagaimana digagas oleh Teori Kritis menjadi sangat krusial.

34 Andrew Linklater (2007). *Op cit*, hlm. 150.
35 *Ibid.*, hlm. 151-154.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

(4) Pencideraan secara halus (*unintended harm*) yang dapat terjadi tanpa disengaja. Sebagai contoh, tumbuhnya kapitalisme global dan perkembangan teknologi modern telah membuat negara saling berlomba untuk mengeksploitasi sumberdaya alam yang dapat merusak lingkungan hidup dan menciptakan fenomena perubahan iklim. Kerusakan lingkungan dan perubahan iklim - yang berpotensi menimbulkan bencana kemanusiaan lebih besar – merupakan akibat dari pencideraan secara halus yang dilakukan para pelaku bisnis yang kurang peduli terhadap kelestarian lingkungan hidup. Sejalan dengan Mazhab Inggris, Teori Kritis mendorong pengembangan kesadaran moral universal agar umat manusia bertindak secara lebih bertanggung jawab demi kelestarian lingkungan dan keamanan manusia.

(5) Pengabaian (*negligence*) yang menyangkut kegagalan suatu otoritas (negara maupun organisasi internasional) untuk melakukan tindakan pencegahan seperlunya bagi semua kalangan - termasuk kaum marjinal dan minoritas – yang dapat berisiko pengabaian hak-hak dasar manusia (hak untuk mendapat penghidupan yang layak, hak untuk mendapat pendidikan yang layak, hak untuk mendapat pelayanan kesehatan, hak untuk berpartisipasi politik, dan sebagainya). Dalam konteks inilah, Teori Kritis menuntut adanya konvensi pencideraan yang berlaku universal mengenai bagaimana suatu komunitas politik internasional memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi hak-hak dasar umat manusia.

Ketika kita memahami berbagai permasalahan pencideraan secara lebih komprehensif, maka ketika kita dihadapkan pada keharusan untuk melakukan pilihan tindakan untuk mengatasi masalah rumit seperti misalnya persoalan tindakan pencideraan oleh pemerintah kepada warga yang menentang legitimasi penguasa, permasalahan negara-gagal (*failed states*) yang mengabaikan hak-hak dasar warganya, tindakan serakah kaum kapitalis dalam mengeksploitasi lingkungan secara membabi-buta, dan sebagainya maka dengan adanya kesadaran akan adanya kewajiban moral universal untuk melindungi lingkungan dan makhluk hidup yang ada di dalamnya kita tidak perlu lagi memperdebatkan persoalan jurisdiksi teritorial, kepentingan nasional, dan kedaulatan nasional. Dengan kata lain, pemahaman problematika pencideraan

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

yang lebih komprehensif dapat menghindarkan komunitas internasional dari perdebatan panjang yang tidak perlu ketika harus melakukan intervensi kemanusiaan, aksi kolektif memitigasi akibat buruk kerusakan lingkungan, dan mencegah praktek perdagangan ilegal yang bisa membuat berbagai tindakan tersebut terkesan "terlalu kecil dan terlambat" (*too little, too late*).

Dengan mengemukakan ketiga macam problematika dalam studi hubungan internasional yang menghasilkan analisis pesimistis tentang hubungan antar negara sebagaimana diyakini oleh teori-teori arus utama - terutama Realisme klasik dan Neo-Realisme - Andrew Linklater mencoba menawarkan alternatif pemikiran baru di mana batas-batas antara peringkat analisis yang satu dengan yang lainnya (nasional dan internasional) sudah semakin kabur, peran negara sebagai aktor internasional mendapat saingan dari gerakan sosial global, kelompok masyarakat sipil global, lembaga swadaya masyarakat internasional, dan bahkan berbagai kelompok sub-nasional. Maka, sebagai proponen Teori Kritis, Andrew Linklater mengusulkan sebuah revolusi pemikiran tentang hubungan antar-negara untuk keluar dari tradisi Westphalia. Bagi Linklater, tatanan dunia pasca-Westphalia adalah sebuah tatanan pada lingkup kosmopolitan yang dihuni tidak lagi oleh warganegara yang memiliki kesetiaan pada negara-bangsa, melainkan sebuah tatanan yang dihuni oleh warga dunia (*world citizens*) yang memiliki kesetiaan universal yaitu kelestarian lingkungan hidup dan semua makhluk yang ada di dalamnya, terutama umat manusia.

Kesimpulan

Bab ini telah membahas Teori Kritis yang dibawa oleh Andrew Linklater ke dalam studi hubungan internasional sejak akhir dekade 1980-an dan awal 1990-an ternyata memiliki keterkaitan dengan Teori Kritis Mazhab Frankfurt yang dikembangkan dalam bidang sosiologi kritis (*critical sociology*) pada dekade 1960-an ketika banyak pakar sosiologi Jerman, terutama yang tergabung di *Institute for Social Research* (*Institut fur Sozialforschung*) di Universitas Frankfurt am Main, merasa jengah dengan dominasi positivisme dalam ilmu sosial. Tidak puas dengan gagalnya gerakan buruh untuk memberikan warna politik di Jerman dan bahkan hampir di seluruh Eropa, Mazhab Frankfurt mencoba merekonstruksi pendekatan Marxis dalam ilmu sosial dengan

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

memberi warna lebih humanis. Maka tidak mengherankan jika Teori Kritis seringkali juga dikenal sebagai pendukung pendekatan Neo-Marxis.

Dalam studi hubungan internasional, Teori Kritis membawa tiga misi penting. Pertama, menelaah adanya berbagai "pemikiran-pemikiran menyimpang" (*distorted thoughts*) dalam studi hubungan internasional yang didominasi oleh Neo-Realisme atau Realisme saintifik yang menyerdehanakan perilaku negara sebagai sesuatu yang dapat diprediksi dan seolah-olah bebas dari unsur moralitas, etika, identitas budaya, dan intensi-intensi tertentu. Penyerdehanaan entitas negara ini dikhawatirkan dapat mendistorsi kebenaran dalam studi hubungan internasional sehingga harus dikoreksi. Kedua, medorong rekonstruksi konsep-konsep dasar Marxisme - materialisme sejarah, determinisme sosial, dan analisa kelas - dan menerapkannya dalam menganalisis fenomena hubungan internasional, terutama dalam melihat dinamika hubungan antara negara-negara maju dengan negara-negara miskin. Fakta bahwa Realisme dan Marxisme dapat disandingkan, menunjukkan bahwa teori hubungan internasional dapat melengkapi diri dengan konsep-konsep Marxis. Ketiga, dalam rubrik "*problems of community, problems of citizenship, and problems of harm*", Linklater menawarkan pola berpikir alternatif di luar tradisi Realisme dan Neo-Realisme, yakni kesadaran yang sebagai bagian dari "warga dunia" (*world citizen*) yang memikul kewajiban universal, yakni "menjaga keamanan umat manusia" dengan menjunjung tinggi "kebebasan dari ancaman" (*freedom of oppression*), "kebebasan untuk memenuhi kebutuhan" (*freedom of pursuing needs*), dan "kebebasan untuk menegakkan martabat" (*freedom to maintain dignity*). Bagi Teori Kritis, ekstensi loyalitas "warga negara" menjadi "warga dunia" dapat memperkuat kewajiban global untuk memelihara keamanan umat manusia. Ketika kesadaran sebagai "warga dunia" ini terjadi, maka menhadapi krisis kemanusiaan seperti yang terjadi di Rwanda, Burundi, Yugoslavia, Libya, Mesir, dan Suriah masyarakat dunia tidak perlu membuangbuang waktu dengan berdebat mengenai otoritas, kedaulatan negara, pelanggaran hukum internasional, dan lain-lain untuk melakukan intervensi kemanusiaan.

Dari bahasan di atas, tampak bahwa Teori Kritis memberikan dasar konseptual bagi para peneliti yang memahami lingkup studi hubungan internasional secara lebih luas dengan melihat bagaimana aktor-aktor internasional (negara maupun non-negara) saling berinteraksi secara setara, tanpa harus dibatasi oleh hirarki berdasarkan kekuatan militer, kekuatan

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

ekonomi, tingkat pengaruh, dan pelbagai atribut kekuatan lainnya. Dengan demikian, dalam politik dunia yang makin didominasi oleh kekuatan-kekuatan non-negara (masyarakat sipil global, NGOs internasional, kekuatan quasi-negara, individu transnasional, dan yang sejenisnya), posisi Teori Kritis menjadi sangat sentral.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.

Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

BAB 8

MAZHAB KOPENHAGEN (*THE COPENHAGEN SCHOOL*) DAN TEORI SEKURITISASI

Pengantar

Perang Dingin antara kelompok negara Demokrasi Liberal Blok Barat dan kelompok negara Sosialis Komunis Blok Timur yang berlangsung antara dekade 1940-an hingga 1990-an telah mendorong banyak negara untuk menerapkan konsep "keamanan nasional" yang dipahami secara sangat sempit dalam konteks militer dan pertahanan. Logika semacam ini dapat membentuk semacam norma "militerisme" di mana setiap negara seolah-olah diharuskan melakukan dua hal: (1) negara harus memfokuskan pada upaya mengatasi ancaman militer (*military threats*) karena ancaman militer dinilai paling berbahaya daripada jenis ancaman lainnya, terutama yang berdimensi non-militer; dan (2) negara wajib melakukan langkah militerisasi (*militarization*) melalui peningkatan kekuatan militer menyangkut teknologi, taktik, dan sumberdaya manusia agar mampu menjaga kedaulatan nasional dan integritas teritorial secara optimal.[1]

Konsekuensi logis dari situasi di mana banyak negara terobsesi oleh peningkatan kekuatan militer adalah pertaruhan (*tradeoff*) antara penjagaan kedaulatan nasional dan integritas teritorial dengan prinsip-prinsip demokrasi seperti kebebasan individu, perlindungan Hak Asasi Manusia, non-diskriminasi terhadap kaum minoritas, dan penegakan hukum karena banyak operasi militer dalam rangka mempertahankan kedaulatan dan teritori seringkali menabrak prinsip-prinsip demokrasi tersebut. Untuk menghindari kemungkinan terjadinya *tradeoff* semacam itu, Richard Ullman menawarkan upaya redefinisi persepsi terhadap ancaman ketika kita membicarakan isu keamanan. Suatu cara

1 Richard Ullman (2011). 'Redefining Security'. Dalam Christoper W. Hughes dan Lai Yew Ming (ed.) '*Security Studies: A Reader*'. London: Routledge, hlm. 11.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

untuk menakar kadar suatu ancaman adalah menetapkan semacam batasan bahwa sesuatu dikatakan bersifat mengancam "keamanan nasional" suatu negara apabila: (1) datang secara tiba-tiba dan dapat menurunkan atau merusak kualitas hidup warga yang menghuni negara tersebut; dan (2) faktor yang dapat mempersempit pilihan kebijakan suatu negara untuk memelihara kehidupan normal warganya.[2]

Definisi persepsi ancaman yang dilakukan Ullman ini ternyata menimbulkan dampak yang lebih luas terhadap konsep keamanan. Dalam pemahaman baru ini, persepsi ancaman ternyata tidak lagi dikaitkan dengan integritas teritorial dan kedaulatan negara saja, melainkan juga terkait dengan keselamatan individu dari ancaman kekerasan fisik, keterbatasan akses kebutuhan pokok, penyakit menular, degradasi kualitas lingkungan hidup, dan degradasi kualitas hidup. Dengan demikian, pemikiran baru yang ditawarkan Richard Ullman mengenai konsep keamanan adalah perluasan cakupan yang meliputi berbagai ancaman militer dan non-militer. Pada dekade 1980-an ketika suasana Perang Dingin belum menunjukkan tanda-tanda mereda, perluasan cakupan isu keamanan sebagaimana digagas Richard Ullman ini tidak mendapat tanggapan serius. Sebagian besar pembuat kebijakan dan pakar keamanan masih terobsesi oleh pentingnya keterkaitan antara konsep keamanan, kelangsungan hidup negara-bangsa, dan jaminan yang dapat diberikan oleh kekuatan militer. Menurut mereka, upaya memasukkan unsur-unsur non-militer ke dalam kajian keamanan tidak lebih dari sekadar angan-angan (*wishful thinking*) belaka. Upaya yang dilakukan Richard Ullman tersebut seolah mengulangi kegagalan seorang ahli psikologi Universitas Toronto, Kanada, William Ernest Blazt, yang melalui karyanya *Human Security: Some Reflections* (1966) mengusulkan bahwa kajian keamanan harus juga memberi perhatian pada aspek "keamanan manusia" (*human security*) karena tanpa perhatian terhadap keselamatan individu, kajian keamanan tidak akan memberi dampak bagi manusia yang merupakan warga resmi suatu negara dengan berbagai hak dan kewajibannya.[3] Upaya perluasan konsep keamanan yang dilakukan oleh Ullman (1983) dan Blazt (1966) pada waktu itu kurang mendapat sambutan karena pada saat suasana Perang Dingin – ketika banyak negara melihat kekuatan militer sebagai satu-satunya penjamin kelangsungan hidup dalam suasana politik internasional yang anarkis – upaya

2 *Ibid.*, hlm. 13.

3 William E. Blazt (1966). '*Human Security: Some Reflections*'.Toronto: University of Toronto Press, hlm. 112-116.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

memasukkan unsur non-militer ke dalam konsep keamanan tampak sebagai tindakan mengada-ada dan tidak ada gunanya.

Situasi berubah total pada saat berakhirnya Perang Dingin pada tahun 1989 yang ditandai dengan runtuhnya tembok Berlin, berjatuhannya rezim Sosialis/Komunis di Eropa Timur, dan kolapsnya negara Uni Soviet. Pada saat itu ketegangan dan peperangan antar negara menjadi sangat berkurang. Kalaupun peperangan masih terjadi hal itu lebih merupakan peperangan antar kelompok/faksi dari dalam satu negara yang dipicu oleh perbedaan identitas etnis, agama, dan ras. Pergeseran ini mendorong para pakar keamanan untuk beranggapan bahwa keamanan tidak lagi hanya terkait dengan ancaman eksternal berupa serangan militer oleh suatu negara terhadap negara lain yang berdaulat, melainkan lebih disebabkan oleh isu mayoritas-minoritas, penguasaan sumberdaya alam oleh kelompok tertentu, pemerintah yang mengalami krisis legitimasi, masalah diskriminasi, dan kemiskinan. Ketika kekuatan militer dianggap tidak lagi terlalu penting, Realisme dan Neo-Realisme menghadapi tantangan besar.

Dalam kaitan ini, Michael Renner, Direktur *Global Security Project* di Worldwatch Institute, Washington, DC, menyatakan bahwa pada pasca Perang Dingin muncul empat kecenderungan baru dalam kajian keamanan yang harus diperhitungkan dalam analisis tentang isu keamanan kontemporer. Pertama, fakta bahwa persenjataan tidak lagi dianggap sebagai satu-satunya sarana untuk menjamin keamanan. Kedua, keamanan yang sesungguhnya tidak lagi dapat diselesaikan pada tingkat nasional, melainkan memerlukan tindakan kolektif pada tingkat regional dan/atau global. Ketiga, fokus perhatian pada keamanan negara (*security of state*) tidak lagi memadai, melainkan perlu juga memperhatikan keamanan setiap individu yang tinggal di dalam negara tersebut. Keempat, dimensi-dimensi non-militer memiliki pengaruh penting terhadap stabilitas dan keamanan.[4]

Ancaman terhadap kelangsungan kajian keamanan juga dirasakan oleh pakar keamanan Barry Buzan yang pada tahun 1991 menulis artikel berjudul *New Patterns of Global Security in the Twentieth Century*. Senada dengan Renner, dalam tulisan itu Buzan menyatakan bahwa dalam situasi di mana ketegangan ideologis Timur-Barat sudah berkurang, terdapat dimensi baru isu keamanan yang akan lebih dirasakan oleh negara-negara periferal (negara

4 Michael Renner (2005). 'Security Redefined'. Dalam Worldwatch Institute. '*State of the World 2005: Redefining Global Security*'. New York: W.W. Norton, hlm. 3-19.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

sedang berkembang). Dimensi baru isu keamanan ini meliputi lima aspek: (1) Keamanan politik (*political security*): jaminan untuk mempertahankan hak-hak politik, bebas dari tekanan politik akibat rivalitas, dan kebebasan untuk mempertahankan rezim politik; (2) Keamanan militer (*military security*): kebebasan dari ancaman militer asing dan intervensi militer pihak eksternal; (3) Keamanan ekonomi (*economic security*): jaminan akses terhadap sumberdaya alam, sumber keuangan, dan pasar global yang dapat mendukung aktivitas untuk mencapai kesejahteraan sosial; (4) Keamanan masyarakat (*societal security*): bebas dari ancaman konflik horizontal antar kelompok baik karena alasan primordial (etnis, agama, dan ras) maupun alasan penguasaan sumberdaya alam, keuangan, dan pasar; dan (5) Keamanan lingkungan (*environmental security*): kebebasan dari ancaman kerusakan lingkungan hidup yang dapat mengakibatkan berbagai bencana kemanusiaan.[5]

Ketika konsep keamanan pasca Perang Dingin mengarah pada perluasan kajian yang mencakup isu-isu non-militer, maka muncul-lah pertanyaan: Apa saja isu yang bisa dianggap sebagai isu keamanan? Bagaimana kita menjadikan isu non-militer yang tidak mengandung unsur strategis sebagai isu keamanan? Apa saja yang membatasi sebuah isu sebagai isu keamanan? Pertanyaan-pertanyaan tersebut dicoba dijawab oleh pakar keamanan Mazhab Kopenhagen (*Copenhagen School*) yang menggunakan teori Konstruktivis (akan dibahas lebih rinci pada Bab 12 buku ini) yang memandang bahwa konsep keamanan – sebagaimana halnya konsep-konsep politik internasional lainnya – adalah hasil dari proses konstruksi sosial. Proses ini – lazim dikenal sebagai sekuritisasi (*securitization*) – berawal dari pernyataan (*speech act*) oleh agen-agen tertentu (pejabat pemerintah, tokoh masyarakat, dan aktivis NGO) bahwa suatu hal yang menjadi rujukan (*referent object*) berwujud hal-hal yang dianggap berpotensi mendatangkan bencana adalah merupakan ancaman bagi keamanan individu maupun keamanan nasional clan disampaikan kepada publik sebagai target (*target audience*) agar menjadi tanggap (*alert*) dan kemudian mendukung upaya penyelesaian secara darurat (*emergency response*) di luar kebijakan normal (*outside normal policies*). Dalam konteks inilah sumbangan para pakar Mazhab Kopenhagen tampak begitu penting dalam memberikan justifikasi teoretis bagi pemahaman baru konsep keamanan yang memasukkan unsur-unsur non-militer.

5 Barry Buzan (1991) 'New Patterns of Global Security in the Twentieth Century'. *International Affairs*, Vol. 67 No. 3, hlm. 439-451.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

Munculnya Mazhab Kopenhagen

Mazhab Kopenhagen bermula dari proyek penelitian tentang tinjauan kritis terhadap konsep keamanan di *Copenhagen Peace Research Institute* yang dibiayai oleh *Fritz Thyssen Stiftung* (Yayasan Fritz Thyssen) dan melibatkan pakar keamanan antara lain Barry Buzan, Ole Waever, dan Jaap de Wilde. Proyek penelitian ini bermula dari kegundahan Ole Waever dan beberapa koleganya yang merasa jengah dengan perdebatan panjang dalam kajian keamanan antara kelompok pakar yang memandang bahwa ancaman keamanan bersifat "objektif" (tetap, pasti, dan dapat diprediksi) berhadapan dengan mereka yang meyakini bahwa ancaman keamanan bersifat "subjektif" (tidak pasti, berubah-ubah, dan tidak dapat diprediksi). Untuk menengahi perdebatan tersebut, Mazhab Kopenhagen mengusulkan pandangan bahwa keamanan merupakan pernyataan (*speech act*) yang diterima oleh publik yang menjadi target (*target audience*).

Dengan menyatakan keamanan sebagai suatu pernyataan (*speech act*) Waever tidak saja menjadikan keamanan sebagai sebuah proses konstruksi sosial melainkan juga membuka peluang bagi agen sebagai pelaku keamanan (*securitizing actor*) untuk menyatakan bahwa berbagai isu berpotensi mendatangkan ancaman eksistensial (*existential threats*) bagi manusia/negara. Jika publik yang menjadi target sepakat dengan pernyataan yang dilakukan pelaku keamanan, maka kita dapat menyimpulkan bahwa proses "sekuritisasi" isu tertentu dapat dikatakan sukses. Dengan demikian, pernyataan dalam proses sekuritisasi mengandung logika retorika tertentu yang meliputi tiga hal. Pertama, adanya klaim bahwa suatu obyek tertentu sedang menghadapi ancaman eksistensial. Obyek tersebut dapat berupa publik, kelompok, dan negara secara keseluruhan. Kedua, adanya permintaan untuk melakukan tindakan di luar kebiasaan untuk mengatasi ancaman tersebut yang sekaligus memberikan justifikasi bagi tindakan-tindakan darurat. Ketiga, adanya upaya untuk meyakinkan publik bahwa tindakan di luar prosedur normal dapat dibenarkan demi mengatasi ancaman eksistensial yang ada. Maka dapat dikatakan bahwa proses sekuritisasi adalah upaya pelaku keamanan (*securitizing actors*) – individu, kelompok, lembaga yang melakukan *speech act* – melakukan dramatisasi suatu isu yang tadinya bersifat biasa-biasa saja menjadi prioritas utama yang harus cepat diatasi sekalipun harus menggunakan prosedur di luar kebiasaan. Sebagai contoh, pada tahun 2003 ketika menteri kesehatan Singapura

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

membuat *speech act* bahwa virus SARS (*Severe Acute Respiratory Syndrome*) sangat berbahaya dan mengancam keamanan Singapura, maka publik negara itu pun membiarkan tindakan darurat untuk mencegah penyebaran SARS, termasuk mobilisasi tentara bersenjata lengkap di tempat umum (mall, stasiun MRT, dan bandar udara) untuk memaksa orang yang dicurigai terindikasi SARS diperiksa intensif oleh petugas kesehatan.

Konsep sekuritisasi yang diusung oleh Mazhab Kopenhagen merupakan upaya beberapa pemikir kajian keamanan di Eropa yang menawarkan sebuah pemahaman yang lebih komprehensif mengenai keamanan yang menggabungkan unsur militer dengan unsur lain seperti ekonomi, sosial, politik, lingkungan hidup, dan sebagainya. Konsep baru ini – lazim dikenal dengan istilah keamanan non-tradisional – ditawarkan oleh Mazhab Kopenhagen atas dasar pemikiran bahwa pada era pasca Perang Dingin yang diwarnai dengan penurunan signifikansi kekuatan militer sebagai alat penjamin keamanan, model keamanan non-tradisional yang mengkombinasikan unsur militer dan non-militer adalah cara yang paling tepat dalam merespon berbagai ancaman baru yang muncul dalam politik internasional kontemporer yang lebih terdesentralisasi dan berkarakter regional.[6] Dalam hal ini dimensi baru keamanan pasca Perang Dingin meliputi tiga hal. Pertama, perluasan kajian yang menggabungkan aspek militer dan non-militer yang sama-sama memiliki potensi mendatangkan ancaman eksistensial sehingga pencegahan ancaman keamanan tidak lagi hanya melalui strategi peningkatan kekuatan militer. Kedua, perubahan spasial dari keamanan nasional menjadi keamanan regional dan internasional yang meyakini bahwa upaya untuk mengatasi berbagai ancaman non-tradisional tidak lagi harus datang dari inisiatif suatu negara secara nasional melainkan harus datang dari upaya bersama (*collaborative efforts*) kelompok negara yang saling bekerja sama untk mengatasi ancaman yang ada. Ketiga, perluasan aktor di mana upaya untuk mengatasi ancaman keamanan non-tradisional tidak lagi didominasi oleh peran para pemimpin negara dan aparat keamanan saja melainkan harus melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang lebih luas: pembuat kebijakan, tokoh masyarakat, NGO, dan aktivis kemanusiaan.

Hasil karya para pemikir yang tergabung ke dalam Mazhab Kopenhagen memberikan pengaruh besar terhadap kajian keamanan pasca Perang Dingin. Karya yang tersebar di berbagai tulisan berupa buku dan jurnal ini disadari

6 Barry Buzan, Ole Waever, dan Jaap de Wilde (1998). *'Security: A New Framework for Analysis'*. Boulder: Lynne Riener Publisher, Inc., hlm. 1.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

sebagai salah satu upaya konkret untuk menganalisis isu keamanan menakai teori Konstruktivis. Beberapa karya yang dapat dianggap mewakili pandangan Mazhab Kopenhagen, antara lain adalah: Barry Buzan (1991) *People, States and Fear: an Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era* (Boulder: Lynne Rienner Publisher, Inc.); Bill McSweeney (1996) "Identity and security: Buzan and the Copenhagen school", *Review of International Studies*, Vol. 22, No. 1; Barry Buzan dan Ole Waever (2003) *Regions and Powers: The Structure of International Security* (Cambridge: Cambridge University Press); Michael C. Williams (2003) "Words, Images, Enemies, Securitization and International Politics", *International Studies Quarterly*. Vol. 47, No. 2; Matt McDonald (2008). "Securitization and the Construction of Security". *European Journal of International Relations*. Vol. 14, No. 4; dan beberapa karya lainnya.

Perluasan (*Widening*) dan Pendalaman (*Deepening*) Konsep Keamanan

Tidak dapat dipungkiri bahwa situasi politik internasional pasca Perang Dingin telah membentuk kebutuhan baru tentang konsep keamanan. Fakta bahwa dimensi keamanan tradisional yang didominasi oleh unsur kekuatan militer mulai dipertanyakan. Sebagaimana dikatakan Richard Ullman (2011 [1983]) bahwa pemahaman baru "keamanan" seharusnya tidak hanya dibatasi pada masalah "ancaman" (*threasts*) baik yang bersifat eksistensial maupun potensial, tetapi juga mengacu pada situasi kerentanan (*vulnerability*) yang dapat membatasi kemampuan negara untuk menciptakan rasa tenteram bagi rakyatnya. Aspek kerentanan ini terutama berkaitan dengan dimensi non-militer.[7] Penambahan dimensi non-militer ini dapat dilihat sebagai upaya untuk memperluas kajian keamanan. Dengan melihat pada aspek kerentanan, kita dapat melihat bagaimana kelangkaan pangan, sumberdaya alam, energi, dan lain-lain dapat menciptakan situasi tidak aman. Demikian halnya berbagai bencana alam (banjir, kekeringan, tanah longsor, dan sebagainya) akibat perubahan iklim dan kerusakan lingkungan telah menempatkan manusia dalam situasi rentan.

Pemahaman konsep keamanan secara sempit yang membatasi kajian pada dimensi militer saja secara tidak langsung membatasi masalah keamanan

7 Richard Ullman (2011 [1983]). 'Redefining Security'. Dalam Christoper W. Hughes dan Lay Yew Ming (ed.). '*Security Studies: A Reader*'. London: Routledge, hlm. 13-15.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

internasional secara eksklusif pada politik negara-negara besar (*Great Powers Politics*) yang memiliki kebutuhan dan kemampuan untuk senantiasa mengembangkan kekuatan militernya. Sebaliknya negara-negara miskin hanya bisa menjadi penonton atau aktor periferal dengan menjalin hubungan dengan salah satu *Great Powers* untuk mendapat perlindungan militer pada saat mendapat ancaman. Di dalam salah satu karyanya "*The Periphery as the Core: the Third World and Security Studies*", Amitav Acharya (2011 [1997]) menyatakan bahwa studi keamanan sejak masa Perang Dunia hingga Perang Dingin adalah kajian eksklusif negara-negara besar, terutama Amerika Serikat, Uni Soviet, dan Eropa; pada masa Perang Dingin negara berkembang hanya menjadi pendukung salah satu kubu yang berseteru. Namun pada masa pasca Perang Dingin, masalah keamanan yang dihadapi negara berkembang seperti konflik India-Pakistan, konflik internal di Afghanistan, separatisme di Asia Tenggara (Filipina, Indonesia, dan Thailand), dan perang di Teluk Persia. Dari beberapa kawasan negara dunia ketiga tersebut kita dapat melihat kaitan antara dimensi ekonomi, identitas, dan ekologis dapat mempengaruhi isu keamanan nasional dan regional.[8] Dalam perkembangan selanjutnya, berbagai masalah kerentanan yang dialami banyak negara dunia ketiga seperti penyakit pandemik (*Severe Acute Respiratory Syndrome*/SARS, Flu Burung, Flu Babi, dan Virus Zika), konflik identitas, bencana alam, kriminalitas transnasional, dan kerusakan lingkungan telah mendorong para pakar untuk melakukan pemahaman baru tentang konsep keamanan yang relevan bagi kelompok negara maju maupun negara berkembang.

Sebagaimana dikatakan Barry Buzan (1991), isu keamanan pada abad ke-21 ini sebaiknya mengalami perluasan cakupan (*widening/broadening*) agar memiliki relevansi bagi semua negara, baik yang sudah maju maupun yang sedang berkembang. Kesalahan fatal para pakar keamanan adalah bahwa selama ini -terutama pada masa Perang Dingin- kajian keamanan mengabaikan pengalaman negara berkembang dalam mengatasi permasalahan keamanannya sehingga kajian keamanan cenderung bersifat etnosentris dengan mengacu pada kepentingan negara besar (*Great Powers*). Namun saat ini dunia sudah makin berubah, di mana pengalaman negara berkembang dalam bergulat dengan masalah keamanan dapat memberi pelajaran penting. Maka, berkaca dari pengalaman negara berkembang tersebut, Buzan melihat bahwa sumber-

8 Amitav Acharya (2011 [1997]). 'Third World and Security Studies'. Dalam Christoper W. Hughes dan Lay Yew Ming (ed.). '*Security Studies: A Reader*.' London: Routledge, hlm. 53-56.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

sumber ancaman ternyata memiliki dimensi militer dan non-militer. Karena itu dia mengusulkan agar perluasan cakupan isu keamanan pada abad ke-21 ini sekurang-kurangnya menyangkut lima bidang: (1) keamanan militer, yakni bagaimana menghadapi serangan militer pihak lawan; (2) keamanan politik, menyangkut kemapanan lembaga dan sistem politik untuk menciptakan stabilitas politik; (3) keamanan ekonomi, bagaimana menjaga akses terhadap sumber-sumber ekonomi, modal, dan pasar untuk menciptakan kesejahteraan; (4) keamanan masyarakat, situasi sosial yang bebas dari konflik horizontal; dan (5) keamanan lingkungan hidup, situasi ekologis yang dapat menopang kehidupan yang sehat.[9] Dengan merujuk pada kelima macam isu keamanan tersebut, maka kita dapat melihat bahwa isu keamanan tidak lagi merupakan permasalahan eksklusif *Great Powers* yang memiliki hak istimewa untuk menjaga perdamaian dunia.

Perluasan cakupan konsep keamanan yang muncul pada masa pasca Perang Dingin dapat dikatakan sebagai proses yang muncul dari dua sumber. Pertama, dari kalangan praktisi atau pembuat keputusan. Perluasan cakupan konsep keamanan dari kalangan praktisi atau pembuat keputusan seringkali dikaitkan dengan hasil karya seorang ekonom Pakistan, yang menjadi konsultan tetap badan PBB yang mengurusi program pembangunan internasional, UNDP (*United Nations Development Program*), Dr. Mahbub ul Haq. Dalam karyanya *New Imperatives of Human Security* (1994), ul Haq menyatakan bahwa pada era modern ini konsep "keamanan" memasuki era baru, suatu era yang tidak lagi membatasi perhatian pada keamanan negara atau keamanan bangsa, tetapi harus mencakup keamanan manusia atau individu. Keamanan manusia harus memberikan jaminan pada manusia menyangkut hak dasarnya untuk memperoleh perlindungan dari segala bentuk ancaman yang dapat membahayakan kehidupannya.

Gagasan ul Haq ini kemudian menginspirasi UNDP yang dalam laporan tahunannya, *Human Development Report* edisi 1994 menyatakan bahwa di era pasca Perang Dingin ini keamanan tidak lagi semata-mata menyangkut senjata melainkan juga menyangkut kehidupan dan martabat manusia yang mencakup tujuh kategori: (1) keamanan ekonomi (*economic security*) yakni bagaimana menghadapi ancaman bidang ekonomi yang menyangkut pengangguran, kelangkaan kerja, kemiskinan, dan kelangkaan pemukiman; (2) keamanan

9 Barry Buzan (1991). *Op cit.*, hlm. 433.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

pangan (*food security*) yang berkaitan dengan berbagai ancaman pangan seperti kelangkaan pangan, ketiadaan akses terhadap makanan, harga pangan yang tidak terjangkau, dan bencana kelaparan; (3) keamanan kesehatan (*health security*) yang meliputi berbagai ancaman di bidang kesehatan seperti penyakit pandemik, virus yang berbahaya, dan kelangkaan akses terhadap pelayanan kesehatan; (4) keamanan lingkungan hidup (*environmental security*) yang menyangkut berbagai ancaman lingkungan hidup seperti polusi, kelangkaan sumberdaya alam, pemanasan bumi, dan deforestasi; (5) keamanan personal (*personal security*) yang mencakup berbagai ancaman bagi keselamatan individu seperti kriminalitas, pencideraan, intimidasi, dan diskriminasi; (6) keamanan komunitas (*community security*) yang meliputi berbagai ancaman terhadap komunitas seperti tawuran massal, konflik etnis, dan konflik komunal; dan (7) keamanan politik (*political security*) yang menyangkut berbagai ancaman terhadap hak-hak politik seseorang seperti hak menyatakan pendapat, hak berorganisasi, dan hak untuk melakukan partisipasi politik.[10]

Tampak bahwa dari perspektif pembuat keputusan konsep keamanan dewasa ini harus dipahami dalam konteks "keamanan manusia" (*human security*) yang oleh Ramesh Thakur dan Edward Newman (2004) didefinisikan sebagai "*the protection of people from critical life-threatening dangers, regardless of whether the threats are rooted in anthropogenic activities or natural events, whether they lie within or outside states, and whether they are direct of structural.*"[11] Pemahaman semacam ini diadopsi oleh PBB sebagaimana dirangkum dalam pernyataan Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan di dalam bukunya *In Larger Freedom: Towards Development, Security and Human Rights for All* (2000) yang menyatakan bahwa tantangan global yang dihadapi manusia dewasa ini harus menggabungkan pembangunan, keamanan dan perlindungan Hak Asasi Manusia secara bersamaan dalam bentuk perlindungan terhadap tiga macam kebebasan, yakni: *freedom from fear, freedom from want*, and *freedom to maintain dignity.*

Konsep keamanan manusia ini segera mendapat sambutan secara luas. Pemerintah Kanada, melalui Menteri Luar Negerinya Lloyd Axeworthy menyatakan dukungan penuh dengan menempatkan konsep keamanan manusia sebagai dasar kebijakan luar negerinya. Sebagai respon terhadap

10 United Nations Development Program (1994). '*Human Developement Reports*'. New York: Oxford University Press.

11 Ramesh Thakur dan Edwards Newman (ed.) (2004). '*Broadening Asia's Security Discourse and Agenda: Political, Social and Environmental Perspectives*'. Tokyo: United Nations University Press.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

konflik etnis di Balkan dan Rwanda-Burundi yang berujung pada genosida, pemerintah Kanada selalu berada di garda depan dalam kampanye pendirian *International Criminal Court* (ICC), pelarangan penggunaan senjata pemusnah massal, dan pemberlakuan prinsip *Responsibility to Protect* (R-to-P) yang mengizinkan intervensi kekuatan asing dalam mitigasi konflik. Dengan nada yang hampir sama, dalam merespons krisis finansial di Asia pada akhir 1990-an, pemerintahan Jepang di bawah Perdana Menteri Keizo Obuchi mendorong PBB untuk membentuk *Human Security Trust Fund* untuk membantu negara-negara yang dilanda krisis finansial mengatasi kemiskinan setelah mengalami *shock* akibat kebijakan penyesuaian struktural (*Structural Adjustment Programs*/SAPs) yang memicu laju inflasi, pengangguran, dan kenaikan pajak. Menghadapi persoalan yang sama, Uni Eropa pun tidak mau ketinggalan dalam mendukung kampanye keamanan manusia dengan upaya untuk membentuk *Human Security Task Force* untuk membantu negara-negara yang dilanda krisis kemanusiaan akibat peperangan dan bencana alam sebagaimana dirinci dalam *Barcelona Report* 2005.

Kedua, dari kalangan akademisi upaya untuk memperluas konsep keamanan juga dilakukan. Agak berbeda dari kalangan praktisi yang lebih menyukai istilah "keamanan manusia", para akademisi lebih menyukai pemakaian istilah "keamanan non-tradisional" yang menggabungkan aspek militer dan non-militer. Pilihan tersebut terdorong oleh upaya sejumlah ahli keamanan tradisional untuk menyelamatkan kajian keamanan yang pada masa pasca Perang Dingin terancam oleh berkurangnya urgensi penggunaan milier dalam menghadapi ancaman-ancaman baru di sektor keamanan. Sejumlah pakar keamanan seperti Barry Buzan, Amitav Acharya, Muthiah Alagappa, dan Muhammad Ayoob menyadari bahwa sampai berakhirnya Perang Dingin, dengan pemahaman secara sempit yang memfokuskan pada aspek militer kajian keamanan adalah hak eksklusif (*privilege*) negara-negara besar yang memiliki kemampuan ekonomi untuk terus-menerus meningkatkan kemampuan militernya. Sementara itu, negara berkembang atau negara miskin hanya bisa menyaksikan kontestasi militer tanpa mampu ikut bermain. Karena itu pengenalan konsep keamanan non-tradisional yang manggabungkan unsur militer dan non-militer oleh Mazhab Kopenhagen merupakan karunia tersamar (*blessing in disguise*) bagi negara berkembang, terutama ketika berbicara ancaman keamanan dari unsur non-militer seperti krisis pangan, kemiskinan, perdagangan, manusia, pengungsi, dan sebagainya.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

Sekuritisasi sebagai *Speech Act* untuk Mendramatisasi Ancaman

Salah satu terobosan yang dilakukan oleh Mazhab Kopenhagen - di samping pendalaman dan perluasan konsep keamanan - adalah interpretasi baru bahwa keamanan adalah pernyataan oleh suatu agen (*security as speech act*), di mana keputusan untuk menetapkan sesuatu sebagai isu keamanan ditentukan oleh pernyataan (*speech act*) oleh seseorang yang memiliki pengaruh luas atau agensi seperti misalnya seorang pejabat pemerintah, politisi atau aktivis NGO, dan tokoh masyarakat. Pernyataan itu, dalam proses sekuritisasi, pelaku sekuritisasi (*securitzing actor*) harus mampu meyakinkan publik bahwa sesuatu (kesehatan manusia, peradaban, moralitas, hak asasi manusia, persediaan pangan, ketersediaan energi, kondisi lingkungan hidup, dan sebagainya) dalam kondisi terancam dan memperbolehkan pemerintah atau agen yang ditunjuk pemerintah untuk melakukan tindakan di luar kelaziman (darurat) untuk mengatasi ancaman yang ada, termasuk tindakan memobilisasi para sukarelawan dan aparat keamanan serta meminta anggaran khusus untuk mendukung tindakan pengamanan. Berkaitan dengan itu, sekuritisasi dapat didefinisikan sebagai pernyataan (*speech act*) yang dilakukan pelaku sekuritisasi (*securitizing actor*) tertentu (biasanya pejabat pemerintah) untuk meyakinkan publik bahwa suatu objek rujukan (*referent object*) sedang menghadapi ancaman serius dan harus ditangani dengan aksi di luar kelaziman. Secara sederhana sekuritisasi dapat dipahami sebagai sebuah proses untuk mendramatisasi sesuatu yang tadinya dianggap "normal" menjadi masalah "keamanan". Bagan 8.1 menggambarkan bagaimana proses sekuritisasi itu terjadi.

Bagan tersebut menunjukkan bahwa proses sekuritisasi adalah sebuah upaya untuk menaikkan tingkat urgensi suatu isu dari yang tadinya sebuah isu politik manjadi isu keamanan melalui pernyataan (*speech act*) kepada publik melalui media, siaran pers, makalah, seminar, konferensi, dan pertemuan-pertemuan lainnya. Pernyataan itu terus-menerus dilakukan sampai melampai ambang batas (*threshold*). Ketika dirasakan ancaman keamanan tersebut sudah mereda, maka pelaku keamanan biasanya melakukan desekuritisasi untuk mengembalikan isu pada taraf normal. Hal tersebut perlu dilakukan untuk menghindarkan publik dari kepanikan berlebihan.

Dari sisi cakupan konsep keamanan, sekuritisasi dapat diartikan sebagai upaya yang secara sengaja mencoba memindahakan domain penetapan isu keamanan dari unsur negara/ pemerintah (aparat keamanan)

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

Sekuritisasi sebagai *Speech Act* untuk Mendramatisasi Ancaman

Salah satu terobosan yang dilakukan oleh Mazhab Kopenhagen - di samping pendalaman dan perluasan konsep keamanan - adalah interpretasi baru bahwa keamanan adalah pernyataan oleh suatu agen (*security as speech act*), di mana keputusan untuk menetapkan sesuatu sebagai isu keamanan ditentukan oleh pernyataan (*speech act*) oleh seseorang yang memiliki pengaruh luas atau agensi seperti misalnya seorang pejabat pemerintah, politisi atau aktivis NGO, dan tokoh masyarakat. Pernyataan itu, dalam proses sekuritisasi, pelaku sekuritisasi (*securitzing actor*) harus mampu meyakinkan publik bahwa sesuatu (kesehatan manusia, peradaban, moralitas, hak asasi manusia, persediaan pangan, ketersediaan energi, kondisi lingkungan hidup, dan sebagainya) dalam kondisi terancam dan memperbolehkan pemerintah atau agen yang ditunjuk pemerintah untuk melakukan tindakan di luar kelaziman (darurat) untuk mengatasi ancaman yang ada, termasuk tindakan memobilisasi para sukarelawan dan aparat keamanan serta meminta anggaran khusus untuk mendukung tindakan pengamanan. Berkaitan dengan itu, sekuritisasi dapat didefinisikan sebagai pernyataan (*speech act*) yang dilakukan pelaku sekuritisasi (*securitizing actor*) tertentu (biasanya pejabat pemerintah) untuk meyakinkan publik bahwa suatu objek rujukan (*referent object*) sedang menghadapi ancaman serius dan harus ditangani dengan aksi di luar kelaziman. Secara sederhana sekuritisasi dapat dipahami sebagai sebuah proses untuk mendramatisasi sesuatu yang tadinya dianggap "normal" menjadi masalah "keamanan". Bagan 8.1 menggambarkan bagaimana proses sekuritisasi itu terjadi.

Bagan tersebut menunjukkan bahwa proses sekuritisasi adalah sebuah upaya untuk menaikkan tingkat urgensi suatu isu dari yang tadinya sebuah isu politik manjadi isu keamanan melalui pernyataan (*speech act*) kepada publik melalui media, siaran pers, makalah, seminar, konferensi, dan pertemuan-pertemuan lainnya. Pernyataan itu terus-menerus dilakukan sampai melampai ambang batas (*threshold*). Ketika dirasakan ancaman keamanan tersebut sudah mereda, maka pelaku keamanan biasanya melakukan desekuritisasi untuk mengembalikan isu pada taraf normal. Hal tersebut perlu dilakukan untuk menghindarkan publik dari kepanikan berlebihan.

Dari sisi cakupan konsep keamanan, sekuritisasi dapat diartikan sebagai upaya yang secara sengaja mencoba memindahakan domain penetapan isu keamanan dari unsur negara/ pemerintah (aparat keamanan)

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

ke unsur masyarakat (*society*) bahkan ke unsur individu (*individual*). Dengan memasukkan aspek-aspek non-militer sebagai sumber ancaman baru, Mazhab Kopenhagen mencoba mencampuradukkan unsur keamanan tradisional dan non-tradisional sebagai kajian keamanan pasca Perang Dingin. Maka bagi Mazhab Kopenhagen, ancaman kemanusiaan yang ditimbulkan oleh terorisme dapat disetarakan dengan ancaman bagi keselamatan para korban perdagangan manusia (*human trafficking*) yang ditimbulkan oleh para pelaku kriminal transnasional.

Bagan 8.1
Proses Sekuritisasi Mazhab Kopenhagen

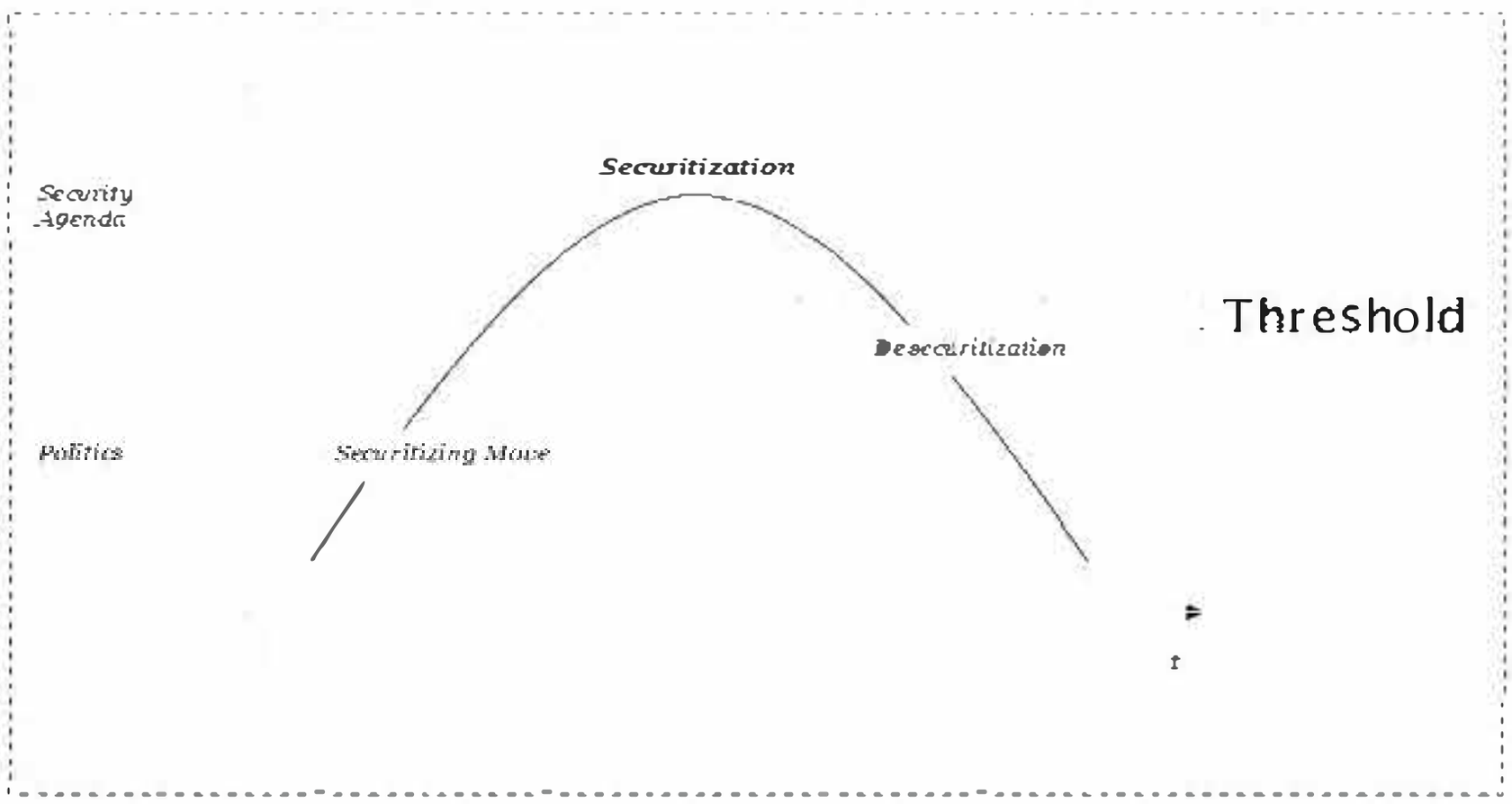

Securitization Chart

Source: Helse, Matthias, Die Renaissance der Regionen. Neue Ansätze in den Theorien der Internationalen Beziehungen: Regionaler Sicherheitskomplex und Regionale Ordnungen, Frankfurt a.M. et al.: Peter Lang 2008, p. 55

Pemindahan domain urusan keamanan ini merupakan terobosan baru yang dilakukan Mazhab Kopenhagen yang membuat isu keamanan bukan lagi hal eksklusif yang melekat pada fungsi negara. Dengan kata lain proses sekuritisasi merupakan suatu langkah untuk membuat isu keamanan dapat berada pada ranah publik dan privat sekaligus. Upaya untuk mengatasi berbagai ancaman keamanan dapat dilakukan secara militer dan non-militer. Kesuksesan sebuah proses sekuritisasi dapat tercapai apabila proses tersebut memenuhi empat syarat sebagai berikut:

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

(1) Kemampuan pelaku sekuritisasi (*securitizing actor*) dalam meyakinkan publik bahwa suatu obyek rujukan sedang menghadapi ancaman yang dapat berakibat fatal jika tidak ditangani secara cepat dan tepat. Kemampuan ini akan ditopang oleh ketersediaan data yang lengkap dan akurat sehingga dalam banyak kasus pejabat negara yang acapkali sukses dalam proses sekuritisasi seperti Menteri Kesehatan dalam kasus sekuritisasi virus SARS (*Severe Acute Respiratory Syndrome*) di Singapura dan sekuritisi virus H^1N^1 (Flu Burung) di Indonesia yang menggunakan data korban dan proses penularan virus tersebut untuk membuat kepanikan publik terhadap ancaman kesehatan.

(2) Pernyataan (*speech act*) yang dipakai harus mampu meyakinkan publik bahwa objek rujukan tertentu sedang menghadapi ancaman. Dalam konteks ini, pemilihan jargon politik dan terminologi yang tepat oleh pelaku sekuritisasi menjadi sangat penting. Hal penting lainnya yang perlu dipertimbangkan dalam konteks *speech act* adalah penggunaan data yang lengkap dan akurat. Hal ini menjelaskan mengapa walaupun secara teoretis sekuritisasi bukanlah wilayah eksklusif pejabat pemerintah, tetapi banyak kasus menunjukkan bahwa jaminan kesuksesan proses sekuritisasi ada di tangan pejabat pemerintah karena otoritas yang dimiliki dan ketersediaan data untuk mendukung *speech act* yang dibuat.

(3) Publik yang menjadi audiens harus memiliki tingkat pendidikan memadai dan akses informasi yang cukup untuk memahami dengan baik pesan-pesan yang disampaikan para pelaku sekuritisasi. Pendidikan yang memadai dan akses informasi merupakan hal penting untuk memberikan jaminan bahwa publik memahami *speech act* yang dilakukan pelaku sekuritisasi dan meresponsnya dengan tindakan rasional. Walaupun sekuritisasi tidak mensyaratkan tingkat pendidikan namun hal tersebut akan memberikan kontribusi penting bagi kesuksesan proses sekuritisasi sebuah obyek rujukan.

(4) Konteks sosial-ekonomi yang tepat akan berkontribusi terhadap proses sekuritisasi suatu isu. Seorang pelaku sekuritisasi akan berhasil dalam tindakannya apabila *speech act* diucapkan dalam konteks sosial-ekonomi yang tepat. Sebagai contoh, sekuritisasi pangan di dalam konteks negara Thailand yang mengalami surplus produk pertanian menjadi tidak tepat dan bakal mengalami kegagalan karena sangat kecil

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

> publik yang bakal merasa kekurangan pangan, sebaliknya sekuritisasi pangan akan berhasil apabila dilakukan di salah satu negara Afrika yang sedang mengalami kekeringan.

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah seberapa lama proses sekuritisasi itu sebaiknya berlangsung? Kapan proses sekuritisasi harus diakhiri dan dilanjutkan dengan desekuritisasi. Sekuritisasi, menurut Mazhab Kopenhagen adalah sebuah upaya untuk melakukan perubahan secara singkat. Karena itu tidaklah keliru untuk mengatakan bahwa sekuritisasi adalah sebuah langkah penyelesaian masalah yang bersifat temporer. Ketika aparat yang berwenang telah mengambil sejumlah tindakan darurat untuk menyelesaikan persoalan pelaku sekurtisasi dan publik secara umum merasa bahwa ancaman telah teratasi, maka proses sekuritisasi harus dihentikan dan diikuti dengan proses desekuritisasi yang mengembalikan keadaan gawat menjadi normal kembali sebagaimana tampak dalam Bagan 8.1. Langkah ini harus dilakukan karena ketika pelaku sekuritisasi sukses dalam *speech act* menjadikan suatu isu sebagai hal yang gawat, maka akan terbentuk semacam kepanikan di kalangan publik yang sedikit-banyak mempengaruhi kondisi ekonomi-politik nasional. Sebagai contoh, ketika Menteri Kesehatan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan sekuritisasi virus Flu Burung yang disebarkan oleh unggas, kepanikan publik yang mulai mengurangi atau bahkan menghentikan sama sekali konsumsi daging ayam sedikit mengganggu pertumbuhan ekonomi. Hal ini membuat Menteri Kesehatan segera melakukan langkah desekuritisasi untuk meredakan kepanikan publik ketika dirasakan krisis Flu Burung sudah mereda. Demikian halnya pada menjelang pemilihan presiden 2014, sejumlah ekonom di lembaga penelitian non-pemerintah, perusahaan multinasional yang didukung oleh Badan Pusat Statistik (BPS) mencoba melakukan sekuritisasi isu kemiskinan berakibat pada penurunan laju investasi sehingga sedikit menghambat pertumbuhan ekonomi.[12]

Kontribusi dan Kritik terhadap Mazhab Kopenhagen

Fakta bahwa konsep sekuritisasi yang dirancang oleh Mazhab Kopenhagen telah memberikan kontribusi penting bagi perkembangan kajian keamanan dalam studi Hubungan Internasional. Secara garis besar kontribusi tersebut meliputi

12 Bob S. Hadiwinata (2016). *'Poverty and Economic Security'*. Dalam Mely Caballero-Anthony (ed.). *'An Introduction to Non-Traditional Security Studies'*. London: SAGE, hlm. 90-91.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

empat hal. Pertama, pemahaman keamanan sebagai pernyataan (*speech act*) yang bersifat subyektif telah mengubah domain isu keamanan yang tidak lagi menjadi hak eksklusif suatu "negara" melainkan juga dapat diklaim oleh aktor-aktor non-negara. Dalam konteks terorisme, pembajakan di laut lepas dan kriminal transnasional kita dapat mengetahui bahwa penyebar ancaman adalah aktor-aktor non-negara seperti kelompok-kelompok teroris, para perompak di Somalia dan Selat Malaka, dan organisasi-organisasi kriminal transnasional yang tersebar di banyak negara. Dengan demikian, strategi penindakannya pun sama sekali berbeda dengan perang konvensional antar negara. Penindakan ancaman-ancaman jenis baru tersebut memerlukan aksi-aksi di luar kelaziman yang mendapat legitimasi dari konsep sekuritisasi Mazhab Kopenhagen.

Kedua, konsep sekuritisasi memperluas pemahaman isu keamanan itu sendiri. Jika pada mulanya isu keamanan didominasi oleh bahasan tentang militer dan pertahanan negara, maka perluasan (*widening*) isu keamanan memasukkan unsur-unsur non-militer seperti kriminal, penyakit pandemik, bencana alam, kemiskinan, dan bencana kelaparan yang dapat mengganggu eksistensi manusia. Bagi studi Hubungan Internasional, perluasan dimensi isu keamanan merupakan sebuah "berkat yang tersembunyi" (*blessing in disguise*) karena kajian keamanan yang merupakan salah satu sub-bidang studi utama Hubungan Internasional menjadi makin meluas. Peluang bagi para penstudi Hubungan Internasional untuk melakukan penelitian terhadap hal-hal baru seperti perdagangan manusia, pelibatan militer dalam berbagai operasi penaggulangan bencana alam, koordinasi antar negara dalam mencegah penyebaran virus-virus berbahaya, dan upaya kolaboratif mengatasi terorisme. Di banyak negara, terutama Indonesia, studi Hubungan Internasional menjadi semakin marak karena dianggap lebih menyentuh masalah kehidupan sehari-hari dan tidak lagi mempelajari isu-isu yang merupakan domain negara seperti militer, politik luar negeri, dan pertahanan negara.

Ketiga, konsep sekuritisasi yang memandang keamanan sebagai pernyataan subyektif oleh pelaku sekuritisasi tertentu telah membuka kesempatan bagi teori-teori baru HI di luar arus utama, terutama Teori Kritis dan Konstruktivisme, untuk ikut meramaikan kajian keamanan. Berkitan dengan Teori Kritis, kajian keamanan sedang berupaya memberikan dimensi baru tentang kajian keamanan dengan menekankan pada dimensi kemanusiaan dalam mengkaji masalah keamanan. Dengan memperkenalkan perspektif Aliran

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

Pemikiran Wales (*the Welsh School*)[13] para pakar HI Universitas Aberystwyth, Wales, menyatakan bahwa kajian keamanan hendaknya memprioritaskan pada tiga macam kebebasan hakiki umat manusia: (1) kebebasan dari rasa takut (*freedom from fear*); (2) kebebasan untuk mengejar kebutuhan (*freedom from pursuing needs*); dan (3) kebebasan untuk menjaga martabat (*freedom of maintaining dignity*). Sedangkan Konstruktivisme memberikan dasar teoretis bagi upaya menjelaskan bagaimana individu berperan penting dalam proses konstruksi sosial isu keamanan. Bahwa isu keamanan merupakan hasil dari persepsi ancaman oleh individu yang diekspresikan melalui pernyataan yang dapat diterima publik secara luas. Dalam konteks inilah baik Teori kritis dan Konstruktivisme mendapat tempat khusus dalam studi Hubungan Internasional.

Keempat, sekuritisasi ala Mazhab Kopenhagen yang berdampak pada perluasan isu keamanan yang tadinya didominasi oleh unsur militer-pertahanan menjadi gabungan antar aspek militer dan non-militer secara tidak langsung memberi kesempatan pada negara-negara sedang berkembang yang berkutat dengan masalah kemiskinan, ketimpangan pembangunan, penyakit menular, dan bencana alam untuk ikut bermain di dalam panggung keamanan internasional. Ketika kajian keamanan hanya bertumpu pada penggunaan senjata sebagai solusi setiap permasalahan keamanan, maka diskusi tentang keamanan internasional didominasi oleh "politik kekuasan negara-negara besar" (*Great Powers politics*) yang dianggap ikut bertanggung jawab dalam pemeliharaan keamanan internasional. Negara-negara besar yang melalui kekuatan ekonominya dapat membangun kekuatan militer yang dapat mendukung berbagai operasi militer di luar batas-batas wilayahnya dianggap memiliki peran penting dalam menyelesaikan masalah-masalah keamanan regional dan internasional. Pada saat bersamaan negara-negara sedang berkembang hanya dapat menyaksikan perlombaan senjata yang melibatkan negara-negara besar tanpa dapat melakukan apa-apa karena keterbatasan ekonomi. Namun ketika isu keamanan diperluas mencakup isu kehidupan sehari-hari maka negaranegara berkembang pun merasa terpanggil untuk menjadi pemain. Sebagai contoh, kesenjangan sosial-ekonomi dan krisis ekonomi yang memicu terjadinya bencana kemanusiaan seperti pembersihan

13 Nama *the Welsh School* dipakai untuk label pendekatan Teori Kriris terhadap isu keamanan. Nama Welsh (bentuk ajektif dari Wales) dikaitkan dengan Universitas Aberyswyth di Wales (Inggris) yang merupakan tempat didirikannya Aliran Pemikiran Teori Kritis dalam kajian keamanan seperti Andrew Linkalter, Kenneth Booth, Kenneth Krause, dan Michael C. Williams.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

etnis, genosida dan konflik identitas berkepanjangan telah mendorong negara-negara berkembang untuk melakukan pembenahan dengan membuat kebijakan sosial-ekonomi yang mendorong pemerataan. Maka, benarlah sinyalemen Barry Buzan bahwa perluasan kajian keamanan yang meliputi lima sektor: militer, politik, ekonomi, kemasyarakatan, dan lingkungan hidup dapat mendorong pemerintah negara-negara pinggiran (negara-negara sedang berkembang) untuk mengelola dengan baik kelima sektor tersebut demi mendapat legitimasi dan pengakuan internasional.[14]

Terlepas dari keempat poin sumbangan bagi perkembangan kajian keamanan dan studi Hubungan Internasional sebagaimana dibahas di atas, Mazhab Kopenhagen sebagai sebuah perspektif baru dalam kajian keamanan mendapat sejumlah kritik yang melibatkan para pakar Hubungan Internasional yang terbagi ke dalam dua kelompok: mereka yang merasa terancam jika keamanan tidak lagi memfokuskan pada aspek militer-strategis dan mereka yang tidak rela jika domain kajian keamanan tidak lagi merupakan wilayah eksklusif negara. Kritik pertama datang dari Benjamin Miller yang mewakili pemikiran Realisme. Menurut Miller, upaya untuk memperluas cakupan isu keamanan dengan memasukkan aspek-aspek non-militer merupakan langkah yang keliru untuk dua alasan. Pertama, memasukkan aspek non-militer sebagai sumber ancaman adalah tidak tepat karena dapat menghilangkan koherensi intelektual kajian keamanan itu sendiri yang memfokuskan pada kekerasan terorganisir dan konflik bersenjata. Kedua, perluasan konsep keamanan tampak menafikan credo kaum Realis tentang kekerasan dan peperangan dalam kondisi anarki.[15] Dengan demikian dapat dikatakan bahwa konsep sekuritisasi yang ditawarkan Mazhab Kopenhagen menghadapi tantangan ketidakjelasan konseptual (*conceptually vague*) sebagaimana dinyatakan oleh Benjamin Miller.

Kritik selanjutnya datang dari kubu Neo-Realis yang sebagaimana dikutip oleh Keith Krause dan Michael Williams yang menyatakan bahwa konsep sekuritisasi menarik konsep keamanan makin menjauh dari akar dan tradisi ilmiahnya sehingga pemahaman konsep keamanan itu sendiri menjadi tidak terfokus, tidak jelas, dan samar-samar. Dengan demikian kajian keamanan versi Mazhab Kopenhagen menjadi tidak jelas dan tidak bisa menghasilkan hal-hal

14 Barry Buzan (1997). 'New Partern of Global Security in the Twenty-First Century'. *International Affairs*, Vol. 67 No. 3, hlm. 441.

15 Benjamin Miller (2001). 'The Concept of Security: Should It be Redifined?'. *Journal of Strategic Studies*, Vol. 24 No. 2, hlm. 14.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

yang konkret dalam konteks kebijakan publik.[16] Ketidakjelasan kajian keamanan menjadi makin kompleks manakala kita harus memisahkan isu keamanan dari otoritas negara. Walaupun Mazhab Kopenhagen berupaya keras untuk memperluas domain keamanan dengan memasukkan aktor-aktor non-negara, namun sulit dipungkiri adanya fakta bahwa upaya penegakan keamanan memerlukan otoritas negara, terutama apabila menyangkut upaya mengatasi ancaman skala besar dan kebutuhan untuk memobilisasi militer. Sekalipun kita dapat berargumentasi bahwa ancaman non-militer seperti bencana alam, kerusakan lingkungan hidup, dan penyebaran virus berbahaya memberi peluang besar pada keterlibatan aktor non-negara, tetapi untuk menggalang tindakan skala besar tetap memerlukan peran negara dalam penyediaan payung hukum dan koordinasi antar aktor.[17] Ketidakjelasan peran negara dalam proses sekuritisasi inilah yang membawa Mazhab Kopenhagen pada kesulitan metodologis mengenai siapa subyek utama keamanan: aktor negara atau non-negara? Poin kritis ini sangat mengemuka di kalangan pemikir Hubungan Internasional yang tidak rela jika pembahasan masalah keamanan berada di luar domain negara.

Kritik lainnya yang relevan bagi upaya menyempurnakan proposisi teoretis Mazhab Kopenhagen adalah masalah etis dari proses sekuritisasi. Dalam hal ini terdapat kerentanan di dalam proses sekuritisasi yang dapat dipakai aktor politik tertentu sebagai alat untuk menjatuhkan lawan politik. Di dalam sistem politik tertentu yang mengharuskan pemimpin untuk saling berkompetisi mendapat dukungan rakyat, sekuritisasi berpotensi menjadi alat untuk menjatuhkan pihak tertentu. Sebagai contoh, di Indonesia saat menjelang Pemilihan Umum 2014, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menyadari bahwa partainya - yang diguncang berbagai kasus korupsi - akan kehilangan banyak suara di DPR mencoba menunjukkan kepada rakyat Indonesia bahwa pemerintahnya telah berhasil menurunkan angka kemiskinan secara signifikan. Sebaliknya beberapa NGO dan lembaga riset independen menekankan bahwa masalah kemiskinan belum teratasi. Perbedaan pendapat ini berujung pada perang pernyataan desekuritisasi dan sekuritisasi kemiskinan di Indonesia di berbagai media. Kasus tersebut menunjukkan bahwa tanpa pembahasan mengenai berbagai persoalan etis yang bakal muncul, konsep sekuritisasi yang dicanangkan Mazhab Kopenhagen akan menghadapi persoalan etis.

16 Keith Krause dan Michael Williams (1996). 'Broadening the Agenda of Security Studies: Politics and Methods'. *Mershon International Studies Review* No. 40, hlm. 232.

17 *Ibid.*, hlm. 233.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

Kesimpulan

Bab ini telah mendiskusikan perubahan besar dalam kajian keamanan sebagai sub-bidang kajian studi Hubungan Internasional yang ikut mempengaruhi arah perkembangan studi Hubungan Internasional itu sendiri. Konsep sekuritisasi yang diperkenalkan Mazhab Kopenhagen telah memberikan dampak penting bagi kajian keamanan dalam konteks pendalaman (*deepening*) - yakni upaya untuk memperdalam peran aktor keamanan dari tingkat negara, kemasyarakatan, dan ke tingkat individu - dan perluasan (*widening*) yang memperluas cakupan kajian keamanan dengan menggabungkan aspek-aspek militer dan non-militer yang dapat mengancam umat manusia. Dapat disimpulkan bahwa kontribusi penting Mazhab Kopenhagen bagi kajian keamanan sebagai sub-bidang kajian dalam studi Hubungan Internasional adalah membuat isu keamanan tidak lagi sebuah topik eksklusif yang selalu dikaitkan dengan otoritas negara, tetapi lebih menempatkan isu keamanan dalam kehidupan manusia sehari-hari seperti pelanggaran Hak Asasi Manusia, bencana alam, kerusakan lingkungan hidup, penyebaran virus berbahaya, kriminalitas, dan sebagainya.

Namun sebagai pemikiran baru dalam ranah kajian keamanan, Mazhab Kopenhagen menghadapi sejumlah kritik yang datang dari kelompok pemikir yang merasa terancam jika isu keamanan tidak lagi merupakan masalah eksklusif yang secara tradisional membahas aspek militer-strategis suatu negara dan kelompok yang merasa gundah ketika isu keamanan dilepaskan dari domain eksklusif negara. Bagi kelompok pertama perluasan kajian keamanan dengan memasukkan unsur-unsur non-militer merupakan tindakan mencampuradukkan secara paksa isu keamanan dengan isu pembangunan; sedangkan bagi kelompok kedua upaya untuk memasukkan aktor-aktor non-negara sebagai pihak yang ikut bertanggungjawab terhadap masalah keamanan adalah langkah yang berpotensi menimbulkan masalah metodologis.

Terlepas dari berbagai kontroversi yang menyertainya, Mazhab Kopenhagen telah memberikan warna baru bagi kajian keamanan. Untuk itulah demi penyempurnaan argumen-argumen Mazhab Kopenhagen, kita dapat bersepakat dengan himbauan Ole Waever, salah satu pencetus gagasan sekuritisasi, untuk melakukan riset-riset tentang keamanan non-tradisional dalam rangka mempertajam proposisi teoretis Mazhab Kopenhagen.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

BAGIAN KEEMPAT
TEORI-TEORI REFLEKTIVIS

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

BAB 9

"PEMBELOKAN LINGUISTIK" (*THE LINGUISTIC TURN*) DAN TEORI-TEORI REFLEKTIVIS DALAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

Pengantar

Barangkali tidaklah berlebihan untuk menyatakan bahwa studi Hubungan Internasional (HI) merupakan cabang ilmu sosial yang paling muda dan dinamis. Dibandingkan dengan ilmu sosial lainnya seperti filsafat, ilmu hukum, ilmu ekonomi, ilmu politik, sosiologi, psikologi, antropologi, dan lain-lain, HI sebagai ilmu sosial yang berdiri sendiri muncul relatif belakangan. Sekalipun sebagaimana dinyatakan Barry Buzan dan Richard Little (2000) bahwa kajian sistematis tentang hubungan antar-aktor internasional sesungguhnya sudah dimulai sejak zaman perunggu (*Sumerian*) pada sekitar 3500 BC dalam bentuk hubungan antar negara-kota (*city-states*) dan berkembang pesat pada pasca perjanjian Westphalia tahun 1648 ketika konsep negara-bangsa (*nation-states*) diperkenalkan; namun kajian-kajian semacam itu ditempatkan sebagai sub-kajian cabang ilmu sosial lain seperti ilmu filsafat, ilmu politik, dan hukum internasional. Sebagai displin ilmu yang mandiri, studi HI resmi berdiri sejak tahun 1919 ketika Sir Alfred Zimmern ditunjuk untuk menduduki posisi guru besar (*chair*) dengan nama jabatan *Woodrow Wilson Professor of International Relations* di *University of Wales at Aberyswyth*, Inggris.[1] Dalam usia yang masih relatif muda itu HI tumbuh menjadi disiplin ilmu yang dinamis dan terbuka terhadap pengaruh ilmu-ilmu lainnya dalam hal metodologi, asumsi, dan penyusunan proposisi teoretisnya.

1 Barry Buzan dan Richard Little (2000). *'International Systems in World History: Remaking the Study of International Relations'*. Oxford: Oxford University Press, hlm. 1.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

Ada sekurang-kurangnya tiga hal penting yang memberikan pengaruh besar bagi perkembangan studi HI. Peristiwa pertama adalah masuknya pengaruh pemikiran Thucydides, Thomas Hobbes, dan Nicolo Machiaveli yang melihat manusia sebagai makhluk egosentrik yang cenderung menggunakan segala cara -termasuk kekerasan- untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Peristiwa ini merombak keyakinan sebelumnya yang diinspirasi oleh prinsip Liberalisme -yang berkembang sejak era pencerahan (*enlightenment*) yang meyakini bahwa manusia sebagai makhluk kooperatif akan saling bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Peristiwa ini lazim dikenal sebagai "Perdebatan Besar Pertama" (*First Great Debate*) yang terjadi pada dekade 1940-an ketika E.H. Carr dalam karyanya *The Twenty Years Crisis* (1944) menghujat tradisi berpikir Liberal-Utopianisme yang dianggap bertanggungjawab terhadap gagalnya LBB (Liga Bangsa-Bangsa) dalam mencegah pecahnya Perang Dunia Kedua. Peristiwa tersebut sekaligus menandai kemunculan Realisme sebagai paradigma dominan dalam studi HI.

Peristiwa besar kedua adalah "Revolusi Behavioralisme" dalam ilmu sosial yang menghendaki perbaikan metodologi dalam ilmu sosial, termasuk studi HI. Peristiwa yang berujung pada "Perdebatan Besar Kedua" (*Second Great Debate*) dalam studi HI ini terjadi pada dekade 1960-an ketika Morton Kaplan dalam tulisannya di jurnal *World Politics* menyerang metode historis/tradisionalis yang dianggapnya sama sekali tidak berkarakter ihmiah karena terlalu mengandalkan pada "intuisi" dan "subjektivitas" peneliti dalam menjelaskan berbagai peristiwa internasional. Untuk meningkatkan kadar ilmiah riset-riset HI, Kaplan mengusulkan penggunaan metode saintifik yang dipinjam dari ilmu-ilmu eksakta demi mencapai objektivitas, validitas dan pengukuran dalam riset-riset HI.[2] Kritik ini langsung dijawab oleh Hedley Bull dalam jurnal yang sama dengan menyatakan bahwa metode saintifik yang mengandalkan pada kaidah-kaidah ilmiah cenderung terlalu menyederhanakan fakta-fakta HI yang sangat kompleks dan tidak dapat diprediksi. Bull meyakini bahwa "subjektivitas" dan "intuisi" sulit dihindari seorang peneliti ketika membahas masalah internasional karena memang begitulah seharusnya kita memahami fakta sosial-politik. Sebaliknya Bull menyatakan bahwa penekanan pada metode saintifik akan membuat riset HI terdistorsi oleh kebenaran yang dipaksakan sehingga menjadi kurang relevan bagi perkembangan ilmu pengetahuan itu

2 Morton Kaplan (1966). 'The New Great Debate: Traditionalism vs. Science in International Relations'. *World Politics*, Vol. 19 No. 1, hlm. 120.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

sendiri.[3] Debat Besar Kedua yang juga dikenal dengan sebutan "*Kaplan-Bull Debate*" atau "*Methodological Debate*" ini mewarnai kemunculan metode saintifik yang lebih menekankan pada hubungan kausal, presisi, validasi, dan uji hipotesis dalam penelitian yang kemudian mendominasi studi HI pasca Perang Dunia, terutama di Amerika Serikat.

Peristiwa besar ketiga yang berpengaruh bagi perkembangan studi HI kontemporer adalah "Pembelokan Linguistik" (*The Lingistic Turn*)[4] atau pemberontakan paradigmatik terhadap ilmu sosial produk abad pencerahan (*enlightenment*) yang dianggap berpretensi mengejar kebenaran universal dan uniformitas pengetahuan. Peristiwa yang berujung pada "Perdebatan Besar Ketiga" (*Third Great Debate*) ini terjadi pada dekade 1980-an ketika sekelompok pemikir progresif HI seperti James Der Derian, Andrew Linklater, Richard Ashley, Alexander Wendt, J. Ann Tickner, dan beberapa lainnya mempertanyakan dominasi tradisi berpikir arus utama (*mainstream*) seperti Liberalisme, Neo-Liberalisme, Realisme, dan Neo-Realisme yang dianggap terbelenggu oleh determinisme dan pengejaran kebenaran universal; dan mengusulkan cara baru dalam memandang berbagai fenomena internasional. Richard Ashley, misalnya, memulai pemberontakan dengan mengecam Neo-Realisme yang dianggap bersalah (*guilty*) karena mengembangkan model tentang negara secara simplistik dengan mengabaikan unsur ideologi, identitas, dan nilai-nilai budaya yang ada di dalamnya. Neo-Realisme dianggapnya bersalah karena penekanannya pada struktur cenderung menghasilkan analisis yang ahistoris dan tidak relevan dengan kenyataan.[5] Sementara itu, dengan bertumpu pada pemikiran Teori Kritis Mazhab Frankfurt,[6] Andrew Linklater menggugat "pemikiran-pemikiran menyimpang" (*distorted thoughts*) yang muncul dari teori-teori arus utama, terutama menyangkut status negara sebagai

3 Hedley Bull (1966). 'International Theory: The Case for a Classical Approach', *World Politics*, Vol. 18 No. 1, hlm. 361-377.

4 Pembelokan Linguistik (*The Linguistic Turn*) adalah istilah yang dimunculkan oleh Richard Rorty pada dekade 1960-an untuk menyebut gerakan revolusi filosofis yang mengkritik dominasi konsep-konsep produk abad pencerahan dan mengusulkan untuk kembali kepada simbol-simbol linguistik yang dianggap mewakili konteks lokal dan kaum marjinal dalam ilmu pengetahuan. Lihat Richard Rorty (1967). 'Introduction: Metaphilosophical Difficulties of Linguistic Philosophy', *The Linguistic Turn: Essays in Philosophical Method*. Chicago: University of Chicago Press, hlm. 9-10.

5 Richard K. Ashley (1983). 'The Poverty of Neorealism', *International Organization*, Vol. 38 No. 2, hlm. 225-286, yang dicetak ulang dalam karya kompilasi Robert O. Keohane (ed.) (1984) '*Neorealism and Its Critics*', New York: Columbia University Press.

6 Mazhab Frankfurt (*Frankfurt School*) yang diasosiasikan dengan sejumlah nama seperti Theodor Adorno, Max Horkheimer, dan Jurgen Habermas adalah pencetus Teori Kritis yang menyerukan agar ilmu sosial lebih diabdikan kepada pemenuhan kepentingan umat manusia.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

aktor utama HI, kecenderungan negara untuk memaksimalisasi kekuasaan, dan keyakinan bahwa kepentingan nasional menjadi sumber motivasi negara dalam pergaulan internasional.[7] Sementara itu, Alexander Wendt mengusulkan agar para pakar HI menggunakan konsep "interaksionisme simbolik" (*symbolic interactionism*)[8] untuk lebih memahami interaksi sosial yang dibentuk oleh bahasa, intensi, identitas, dan kepentingan. Interaksi simbolik ini dapat membentuk pola-pola hubungan tertentu yang menentukan "pertemanan" atau "permusuhan". Konsep ini tidak saja memberikan jawaban atas pertanyaan mengapa kondisi anarki tidak selalu menciptakan peperangan, tetapi juga membantah pandangan Neo-Realisme bahwa perdamaian dapat terjadi hanya jika ada perimbangan kekuatan.[9] Konsep yang oleh Nicolas Onuf dipopulerkan sebagai Konstruktivisme dewasa ini menjadi tren pemikiran terbaru dalam studi HI.

Tanpa maksud untuk meremehkan peristiwa-peristiwa yang mengarah pada Perdebatan Besar Pertama dan Kedua, Bab ini mencoba untuk membahas tentang bagaimana peristiwa "Pembelokan Linguistik" (*The Linguistic Turn*) dalam filsafat telah membuka jalan bagi munculnya teori-teori baru HI diluar arus utama yang bernuansa "Reflektivis" seperti tampak pada pemikiran Posmodernisme, Feminisme, Teori Kritis dan Konstruktivisme. Pembahasan ini didasarkan pada argumen bahwa sebagaimana halnya Revolusi Behavioralisme pada dekade 1950-an berkontribusi terhadap munculnya teori-teori baru arus utama (*mainstream*) HI seperti Neo-Realisme dan Neo-Liberalisme, maka peristiwa "Pembelokan Linguistik" (*The Linguistic Turn*) telah menciptakan Debat Besar Ketiga dalam studi HI yang mengarah pada terciptanya teori-teori di luar *mainstream* seperti Feminisme, Posmodernisme, Teori Kritis, dan Konstruktivisme. Bab ini akan dibagi menjadi beberapa bagian penting. Bagian pertama membahas tentang latar belakang dan argumen utama penulis. Bagian kedua akan membahas tentang bagaimana "*The Linguistic Turn*" masuk ke dalam studi HI dan pengaruhnya terhadap perkembangan teori-teori HI. Bagian ketiga akan mengelaborasi bagaimana pemikiran Mazhab Inggris (*English*

7 Andrew Linklater (2007). '*Critical Theory and World Politics: Citizenship, Sovereignty and Humanity*'. London: Routledge.

8 Konsep "interaksionisme simbolik" dikembangkan oleh sosiolog Amerika Serikat George Herbert Mead yang memandang perlunya melihat manusia secara utuh dengan merujuk pada identitas kultural, intensi, dan kepentingannya. Lihat George H. Mead (1910). 'Social Consciousness and the Consciousness of Meaning'. *Psychological Bulletin No.7*, hlm. 397-405.

9 Alexander Wendt (1992). 'Anarchy is What States Make of It: The Social Construction of Power Politics'. *International Organization*, Vol. 46 No. 2, hlm. 391-425.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

School) membuka jalan bagi munculnya teori-teori HI di luar arus utama. Bagian keempat akan membahas secara ringkas bagaimana teori-teori di luar arus utama - Posmodernisme, Feminisme, Teori Kritis, dan Konstruktivisme - menampilkan karakter "Reflektivis" dengan menggugat konsep-konsep dasar yang selama ini dianggap sebagai "kebenaran" dan bagaimana mereka secara pelan tetapi pasti mulai mendapat tempat dalam studi HI kontemporer. Bagian kelima akan menyimpulkan keseluruhan pembahasan.

"The Linguistic Turn" dan Pengaruhnya bagi Studi Hubungan Internasional

Ketika terjadi "Revolusi Behavioralisme" dalam ilmu sosial pada tahun 1930-an yang dibawa ke dalam sosiologi oleh Talcot Parsons pada dekade 1940-an dan dibawa ke dalam ilmu politik oleh David Easton pada tahun 1950-an, serta ke dalam studi HI oleh Morton Kaplan (1960-an) dan Kenneth Waltz (1970-an), agenda riset HI menjadi lebih diarahkan pada upaya untuk menjaga obyektivitas penelitian (*objectivity*), validasi hasil penelitian (*validity*), dan pengukuran yang tepat (*precision*). Sejak saat itu makin banyak pemikir HI merasa perlu mengadopsi metode saintifik yang dipinjam dari ilmu eksakta demi memenuhi syarat keilmuan hasil penelitian. Karya Kenneth Waltz, *Theory of International Politics* (1979), misalnya, menyatakan bahwa studi Hi seharusnya lebih berani menerapkan metode yang lebih mengandung kepastian (*rigorous*) sebagaimana ahli ekonomi menghitung untung-rugi dalam menjalankan aktivitas bisnis. Dalam karyanya itu Waltz mencoba membuat model politik internasional di mana negara sebagai aktor utama diasumsikan berperilaku rasional, yakni: mereka akan menjadi agresif jika memiliki kekuatan ekonomi-militer melebihi negara-negara lain; berperilaku defensif jika tidak yakin dapat memenangkan peperangan; dan berperilaku normal apabila terjadi perimbangan kekuatan (*Balance of Power*). Dengan demikian, situasi bipolar (perimbangan kekuatan antara dua kekuatan *superpower*) adalah situasi ideal yang dapat menghindarkan negara-negara egosentrik yang berada pada suasana anarkis dari peperangan.[10]

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa karya Waltz tersebut memberikan pengaruh besar bagi studi HI sekaligus menjadi simbol "kemenangan" metode saintifik atas metode historis/tradisionalis dalam

10 Kenneth N. Waltz (1979). *'Theory of International Politics'*, terutama Bab 6 *'Anarchic Orders and Balance of Power'*, New York: Random House, hlm. 102-128.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

Debat Besar Kedua, yang membuat banyak penstudi HI - terutama di Amerika Serikat dan daerah-daerah yang dipengaruhinya seperti Amerika Latin, Asia Timur dan Asia Tenggara - berpaling dari metode historis/tradisionalis ke metode saintifik-positivistik. Sejak saat itu banyak literatur HI menggunakan metode saintifik yang mengutamakan pada pembuatan model dalam rangka simplifikasi fakta-fakta, uji korelasi antar variabel, dan validasi teori, sebagai suatu metode yang mendominasi riset HI terutama di benua Amerika. Maka tidak mengherankan jika paradigma yang lazim dikenal sebagai Neo-Realisme atau Realisme Saintifik mendominasi studi HI. Bagi Waltz, dekade 1970-an dan 1980-an merupakan zaman keemasan karena teori tentang Bipolaritas dan *Balance of Power* mendapat pembenaran dari fenomena Perang Dingin di mana Bipolaritas antara Ameria Serikat dan Uni Soviet telah menciptakan situasi *Balance of Power* yang pada gilirannya menciptakan perdamaian dalam situasi anarkis.

Situasi berubah drastis ketika studi HI mulai terpengaruh oleh "pemberontakan terhadap positivisme". Di bidang filsafat, Richard Rorty (1967) menengarai adanya semacam revolusi filosofis dalam bentuk "pembelokan linguistik" (*the linguistic turn*) di mana perhatian dialihkan dari konsep-konsep dan ide-ide universal ke kata-kata dan simbol-simbol linguistik yang dianggap lebih mewakili konteks lokal. Sekalipun simbol-simbol linguistik tersebut tampak paradoksal, absurd, dan tidak jelas tetapi harus tetap diperhitungkan karena memiliki maksud tertentu.[11] Keinginan untuk menggali secara lebih dalam hingga ke simbol-simbol linguistik yang mewakili maksud suatu subjek ternyata juga muncul dalam cabang-cabang ilmu sosial yang lain. Di bidang sosiologi dan antropologi, misalnya, terjadi pemberontakan terhadap produk-produk penelitian abad pencerahan (*enlightenment*) yang lebih mengutamakan pada uniformitas dan universalitas. Pemberontakan yang dipelopori oleh kaum "*romanticist*"[12] ini mempersoalkan kesewenang-wenangan (*arbitrariness*) kelompok dominan, subordinasi (*subordination*) kaum marjinal, dan pengabaian (*negligence*) konteks lokal ilmu sosial; dan pada saat bersamaan mereka menganjurkan pendekatan semiotika-simbolik, penghapusan batas-batas

11 Richard Rorty (1967). *Op cit.*, hlm. 9.

12 Istilah "*Romanticist*" dipakai oleh Richard Schweder untuk merujuk pada para pakar sosiologi-antropologi yang memulai pemberontakan terhadap ilmu sosial abad pencerahan yang diasosiasikan dengan sejumlah nama besar seperti Goethe, Schiller, Hume, Leibnitz, Levy-Bruhl, Wittgenstein, Feyerabend, dan Clifford Geertz. Lihat Ricard Schweder (1984). '*Anthropology's Romantic Rebellion against the Enlightenment, or there's More to Thinking than Reason and Evidence*', dalam Richard Schweder dan Robert LeVine (1984)(ed.) '*Culture Theory: Essays on Mind, Self and Emotion*'. Cambridge: Cambridge University Press, hlm. 28.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

antara tradisional-modern, dan penghargaan pada konteks lokal yang tidak lagi mengejar kebenaran universal, uniformitas konsep-konsep, dan pembuktian dalam riset ilmu sosial.[13]

Pemberontakan paradigmatik dalam ilmu sosial yang menginspirasi berbagai gerakan kritik ini kemudian membuka kesempatan bagi berbagai cabang ilmu sosial - termasuk studi HI - untuk menggugat kebenaran dan relevansi konsep-konsep dan teori-teori yang sudah mapan; dan pada saat bersamaan menawarkan cara pandang lain yang tidak mengikuti syarat-syarat keilmuan ala abad pencerahan seperti kebenaran universal, uniformitas, presisi, dan adanya bukti yang kuat (*hard evidence*). Hal paling utama yang dituntut oleh gerakan ini adalah penghentian kesewenang-wenangan (*arbitrarinessfree*), penghentian subordinasi (*non-subordination*), penghentian dikotomi tradisional-modern, dan penghapusan dikotomi superior-inferior (*non-hierarchy*). Hal-hal inilah yang melatarbelakangi munculnya teori-teori baru di dalam studi HI yang berada di luar arus utama. Pemikir HI yang posmodernis, seperti Richard Ashley, misalnya, mempersoalkan dominasi Neo-Realisme yang dianggapnya bersalah karena beberapa hal. Pertama, perlakuan terhadap negara sebagai model tampak mengabaikan fakta bahwa prilaku negara tidak hanya dibentuk oleh "kepentingan", melainkan juga oleh unsur ideologi, identitas budaya, dan intensi mereka. Kedua, pendapat Waltz bahwa negara berkecenderungan rasional dan dapat diprediksi tampak mengabaikan subyektivitas para pembuat keputusan dan para peneliti yang dapat mempengaruhi analisis terhadap perilaku negara. Ketiga, kegagalan Neo-Realisme untuk melihat sejarah sebagai "proses" telah membuatnya lebih mementingkan struktur sehingga mengkompromikan kebenaran basil penelitian.[14] Sementara itu pemikir HI dari kubu feminis, seperti Cynthia Enloe, misalnya menyatakan bahwa penjelasan Realisme bahwa setiap negara harus bersiap-siap untuk menghadapi peperangan - karena hakikat negara untuk selalu memaksimalisasi kekuasaan dalam politik internasional yang anarkis - memberikan justifikasi teoretis bagi sifat maskulin entitas negara yang menghasilkan analisis HI yang berbias gender.[15] Maka sejak dekade 1980-an banyak teoretisi HI yang diinspirasi oleh fenomena "pembelokan linguistik"

13 *Ibid*., hlm. 28-33.

14 Richard Ashley (1984). '*The Poverty of Neo-Realism*', dalam Robert O. Keohane (ed.). '*Neo-Realism and Its Critics*'. New York: Columbia University Press, hlm. 268-294.

15 Cynthia Enloe (1990). '*Bananas, Beaches and Bases: Making Feminist Sense of International Politics*'. Los Angeles: University of California Press, hlm. 15-18.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

(*The Lingistic Turn*) memberikan pukulan bertubi-tubi terhadap teori-teori arus utama, terutama Realisme dan Neo-Realisme.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa "Pembelokan Linguistik" (*The Linguistic Turn*) telah mendorong studi HI untuk lebih berani meninggalkan tradisi berpikir abad pencerahan untuk kemudian lebih mengembangkan teori-teori baru di luar arus utama. Para pemikir di luar arus utama ini mendorong pakar HI kontemporer untuk berpaling kepada simbol-simbol lingustik, identitas budaya, intensi, dan norma-norma untuk menemukan pola-pola hubungan sebagai "kawan" atau "lawan" dalam hubungan internasional. Upaya ini secara sistematis sesungguhnya telah dimulai di Inggris pada dekade 1950-an di mana para pakar Inggris - khususnya Charles Manning dan Martin Wight - yang berambisi membuat teori alternatif di luar arus utama tanpa harus menafikan teori-teori yang sudah ada, terutama Liberalisme dan Realisme.

English School sebagai Pembuka Jalan Bagi Teori-teori Alternatif

Sebagaimana telah disinggung di awal tulisan ini, perkembangan studi HI di Inggris - khususnya di *London School of Economics and Political Science* - melahirkan suatu aliran pemikiran yang lazim dikenal dengan sebutan "Mazhab Inggris" (*English School*). Mazhab ini mengupayakan pembentukan teori-teori HI di luar arus utama dengan tujuan untuk melengkapi penjelasan-penjelasan teori-teori sebelumnya, terutama Liberalisme clan Realisme. Apa sesungguhnya "Mazhab Inggris" itu? Apa yang membedakannya dari teori-teori lain, khususnya arus utama? Dengan mengutip Robert Jackson, Barry Buzan mendefinisikan Mazhab Inggris (*English School*) sebagai:

> *A variety of theoretical inquiries which conceive of international relations as a world not merely of power and prudence or wealth or capability or domination but also one of recognition, association, membership, equality, equity, legitimate interests, rights, reciprocity, customs and conventions, agreements and disagreements, disputes, offenses, injuries, damages, reparations, and the rest: the normative vocabulary of human conduct.*[16]
>
> (Suatu bentuk investigasi teoretis yang menelusuri hubungan internasional tidak semata-mata sebagai kajian tentang kekuasaan dan kebajikan atau kesejahteraan atau kapabilitas atau dominasi, tetapi berkaitan dengan

16 Robert Jackson (1996). 'Is There a Classical International Theory?' *International Theory: Positivism and Beyond*, hlm. 203-218, dalam Barry Buzan (2004). '*From International to World Society: English School Theory and the Social Structure of Globalisation*'. Cambridge: Cambridge University Press, hlm. 6.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

> pengakuan, perhimpunan, keanggotaan, kesetaraan, kesamaan, kepentingan yang absah, hak, timbal-balik, kebiasaan dan konvensi, kesepakatan dan ketidaksepakatan, pertikaian, penyerangan, pencideraan, kerusakan, perbaikan, dan segala perbendaharaan kata normatif mengenai perilaku manusia).

Definisi ini mencerminkan karakter eklektik dari Mazhab Inggris yang mencoba menyatukan antara Liberalisme, Realisme, dan Teori Kritis. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Mazhab Inggris muncul untuk melengkapi jawaban Realisme dan Neo-Realisme terhadap pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti: mengapa negara-negara yang pada hakikatnya egosentrik (*selfish*) tidak saling menyerang yang dapat menciptakan peperangan massal (*war-of-all-against-all*)? Apakah memungkinkan adanya kerja sama dalam suatu kondisi anarkis (*cooperation under anarchy*)? Dan bagaimana membuat anggota komunitas internasional untuk tidak saling menyerang dalam situasi anarkis? Berbeda dengan Realisme dan Neo-Realisme yang cenderung memberikan jawaban pesimistis terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut; dan juga untuk menghindari jebakan optimisme berlebihan yang ditawarkan oleh Liberalisme dan Neo-Liberalisme, Mazhab Inggris mencoba menawarkan jalan tengah yang dapat diterima akal sehat dalam memahami fenomena hubungan internasional.

Mereka beranggapan bahwa argumen Realisme Klasik tentang negara sebagai aktor utama dalam hubungan internasional adalah benar adanya, tetapi mereka tidak sepakat bahwa perdamaian tercipta semata-mata hanya karena ketakutan suatu negara untuk memulai peperangan seperti dikemukakan Realisme Klasik; atau mereka takut memulai suatu peperangan karena adanya perimbangan kekuasaan (*Balance of Power*) sebagaimana dinyatakan oleh Neo-Realisme atau Realisme Saintifik. Sebaliknya, pencetus Mazhab Inggris meyatakan bahwa alasan mengapa negara tidak melakukan serangan terhadap negara lain adalah juga karena kepatuhan (*compliance*) mereka terhadap hukum dan aturan internasional dan juga sikap menahan diri (*self-restraint*) untuk tidak melanggar nilai dan norma pergaulan internasional. Sikap seperti ini - kepatuhan hukum dan kesadaran untuk menahan diri - merupakan konsekuensi logis dari kesadaran negara-negara sebagai bagian dari masyarakat internasional untuk mematuhi "aturan koeksistensi" (*rules of coexistence*).Hal inilah yang membedakan Mazhab Inggris dari teori-teori arus utama. Maka, untuk mencari alasan mengapa negara mengembangkan sikap patuh hukum, menahan diri, dan kesadaran bersama untuk mematuhi aturan koeksistensi diperlukan penggalian lebih dalam dengan melihat pada norma-norma,

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

identitas budaya, ideologi, intensi, dan kepentingan setiap anggota komunitas internasional.

Sekalipun pencetus Mazhab Inggris seperti Charles Manning, Martin Wight, dan Adam Watson tidak menafikan kepiawaian metode saintifik, tetapi bergabungnya Hedley Bull yang membawa gagasan "masyarakat internasional" (*international society*)[17] yang terdiri dari aktor-aktor yang patuh hukum, bersikap menahan diri, dan memiliki itikad baik yang memungkinkan terjadinya ko-eksistensi damai dalam hubungan antar-bangsa telah membawa metode hermeunetik-interpretif (*hermeneutics-interpretive*) yang dikembangkan dalam antropologi dan sosiologi ke dalam studi HI. Pendapat Bull – yang diamini oleh Barry Buzan – bahwa "masyarakat internasional" dibangun atas dasar moralitas dan nilai-nilai ko-eksistensi damai ini telah makin mendekatkan Mazhab Inggris kepada metode hermeneutika-interpretif (*hermeneutics-interpretive*) yang merujuk pada simbol-simbol linguistik dan penghargaan terhadap nilai-nilai budaya sebagaimana diperjuangkan oleh para revolusioner dalam pemberontakan filosofis ilmu sosial terutama filsafat, sosiologi dan antropologi yang telah dibahas pada bagian sebelumnya. Maka, tidaklah berlebihan untuk menyatakan bahwa Mazhab Inggris – terutama pasca bergabungnya Hedley Bull pada dekade 1970-an dan Barry Buzan pada dekade 1990-an – telah membuka jalan bagi diadopsinya metode hermeneutika-interpretif ke dalam studi HI yang pada gilirannya mendorong munculnya teori-teori baru di luar arus utama yang bernuansa reflektivis seperti Posmodernisme, Feminisme, dan Konstruktivisme.

Nuansa "Reflektivis" dalam Teori-teori di Luar Arus Utama

Kegundahan terhadap positivisme-empirisisme dalam ilmu sosial telah mendorong sejumlah pakar untuk menggugat dasar-dasar ontologis, epistemologis, dan aksiologis ilmu-ilmu sosial. Dalam situasi ini, para pemikir progresif mulai mempertanyakan konsep-konsep dasar pengetahuan positivis-empiris seperti misalnya "kebenaran ilmiah", "rasionalitas", "objektivitas", dan "regularitas". Dalam studi HI, Yosef Lapid (1989) menyatakan bahwa

17 Bull mengusulkan konsep "International Society" yang dibangun atas dasar nilai-nilai budaya dan moralitas yang mendorong terciptanya "*peaceful co-existence*". Konsep tersebut telah teruji sanggup menciptakan perdamaian skala besar seperti tampak pada sistem persekemakmuran Inggris (*British Commonwealth*) dengan komunitas majemuk yang sanggup untuk saling menahan diri, patuh hukum, dan saling menghargai satu sama lain demi perdamaian. Lihat Hedley Bull (1977). '*The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics*'. London: MacMillan, hlm. 26-35.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

gugatan semacam ini dimanifestasikan dalam bentuk "gerakan reflektivis", yang meliputi dua hal penting: pertama, gerakan "pembebasan" (*liberating*) pengetahuan dari dogmatisme dan pemujaan berlebihan terhadap metode; dan kedua, upaya "rekonstruksi sistematis" (*systematic reconstruction*) dengan membuat analisis kritis untuk menghindarkan teori sosial dari bias-bias yang tidak perlu akibat adanya pemikiran-pemikiran yang menyimpang (*distorted thoughts*).[18] Tantangan terhadap *orthodoxy* yang diletakkan oleh teori-teori arus utama ini, menurut Stephen Chan dan Cerwyn Moore (2006), datang dari kelompok "reflektivis" yang terdiri dari feminisme, posmodernisme, teori kritis, dan konstruktivisme.[19]

Dengan nada yang hampir sama, pemikir Teori Kritis dalam HI mempersoalkan validitas proposisi teori-teori arus utama - terutama Realisme dan NeoRealisme - yang dinilai mengandung "pemikiran-pemikiran menyimpang" (*distorted thoughts*). Di dalam karyanya berjudul *Beyond Marxism and Realism: Critical Theory and International Relations* (1990), Andrew Linklater menyatakan bahwa Teori Kritis dalam studi HI seharusnya meluruskan "*distorted thoughts*" dalam teori-teori arus utama HI yang meliputi tiga hal: pertama, sistem internasional yang berkarakter "anarkis" telah membuat negara harus bertindak "self-help" untuk menjaga kelangsungan hidupnya; kedua, perilaku negara ditentukan oleh besar-kecilnya kekuatan militer-ekonomi masing-masing; dan ketiga, keharusan "self-help" membuat perdamaian dalam sistem internasional tercipta dalam kondisi saling curiga (*mutual distrust*) dan rasa tidak aman (*insecurity*).[20] Pemikiran menyimpang ini, menurut Linklater, telah membawa pesimisme berlebihan (*over-pessimism*) terhadap prospek perdamaian dunia yang mendominasi studi HI, terutama di era Perang Dingin. Untuk mengatasinya, Linklater mengusulkan agar studi HI memperluas kajiannya dengan membahas tema-tema di luar fokus perhatian teori arus utama (perang dan damai) dan mulai membahas tema-tema yang berkaitan dengan masalah kemanusiaan (*humanity*) yang menyangkut

18 Yosef Lapid (1989). 'The Third Debate: On the Prospects of International Theory in The Post-Positivist Era'. *International Studies Quarterly*, Vol. 33 No. 3, hlm. 236-237.

19 Stephen Chan dan Cerwyn Moore (2006). '*Approaches to International Relations: Contemporary Reflexive Approach*', Dalam Stephen Chan dan Cerwyn Moore (ed.). '*Theories of International Relations Vol. IV: Contemporary Reflexive Approaches in International Relations*'. London: SAGE, hlm. vii-viii.

20 Andrew Linklater (1990). '*Beyond Marxism and Realism: Critical Theory and International Relations*'. London: MacMillan, hlm. 12-14.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

keadilan global (*global justice*), perlindungan hak asasi manusia (*human rights protection*), dan emansipasi manusia (*human emancipation*).[21]

Namun sebelum melakukan semua itu, studi HI harus terlebih dulu memberikan solusi bagi tiga macam problem utama HI kontemporer, yakni: (1) *problem of community*: penggunaan kategori yang tidak memberi kewajiban optimal bagi anggotanya untuk menjaga nilai-nilai universal; (2) *problem of citizenship*: penggunaan kategori yang hanya menuntut loyalitas sempit kepada negara-bangsa; dan (3) *problem of harm*: pemahaman terhadap tindak kekerasan yang hanya dibatasi pada perang antar-bangsa. Untuk mengatasinya, Linklater mengusulkan dikembangkannya pemikiran pasca-Westphalia dalam studi HI yang menjunjung tinggi kesadaran kosmopolitan sebagai bagian dari "warga dunia" (*global citizen*) yang berkewajiban untuk mengabadikan nilai-nilai kemanusiaan universal seperti *freedom from oppression* (kebebasan dari ancaman), *freedom of pursuing needs* (kebebasan untuk menyalurkan kebutuhan), dan *freedom to maintain dignity* (kebebasan untuk hidup bermartabat).[22] Para pemikir Teori Kritis HI lainnya seperti Robert Cox, Heiki Potomaki dan Alejandro Colas tampak mereproduksi gagasan-gagasan Linklater, termasuk mengusulkan penggunaan konsep-konsep Marxis seperti determinisme ekonomi, materialisme sejarah, dan hegemoni dan kontra-hegemoni dalam menganalisis berbagai masalah internasional.

Kesimpulan

Tulisan ini mencoba membahas bagaimana "Pembelokan Linguistik" (*The Linguistic Turn*) telah mendorong munculnya pemberontakan filosofis dalam studi HI yang mempengaruhi kemunculan pemikiran-pemikiran baru di luar teori-teori arus utama. Karena nuansa budaya yang demikian kental dalam pemberontakan ini, maka dapat dikatakan bahwa peristiwa ini adalah juga gerakan masuknya pengaruh sosiologi-antropologi ke dalam studi HI kontemporer. Pemikiran-pemikiran di luar arus utama ini tampak bergenre kontemplatif atau "reflektivis" karena selain mengandung tingkat abstraksi tinggi dan hipotetis, juga menggugat aspek-aspek ontologis, epistemologis,

21 Andrew Linklater (2006 [1986]). 'Realism, Marxism and Critical International Theory'. *Review of International Studies*, Vol. 12 No. 4, hlm. 301-312, dalam Stephen Chan dan Cerwyn Moore (ed.). *'Theories of International Relations Vol. III: Approaches to International Relations-Structuralism'*. London: SAGE, hlm. 113-117.

22 Andrew Linklater (1990). *Op cit.*, hlm. 6.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

dan aksiologis teori-teori arus utama yang terkontaminasi oleh determinisme, keharusan memenuhi kebenaran ilmiah, dan selera kaum elite. Di tengah-tengah dua hal yang saling bertentangan itu (Positivisme vs. Postpositivisme), kehadiran *English School* yang membuka peluang bagi diterapkannya metode hermeneutika-interpretif dalam studi HI telah memberikan dorongan lebih besar bagi revolusi filosofis dalam studi HI.

Tidak dapat dipungkiri bahwa gugatan-gugatan yang muncul dari teori-teori "Reflektivis" seringkali diikuti dengan kritik pedas terhadap mazhab-mazhab dominan dalam studi HI, khususnya Realisme dan Neo-Realisme. Sebagaimana telah dibahas pada tulisan ini, teori-teori "Reflektivis" yang diwakili oleh Feminisme, Posmodernisme, *Critical Theory* dan Konstruktivisme memiliki kemiripan, terutama dalam hal mempertanyakan premis-premis yang dianggap sebagai kebenaran satu-satunya dan juga berbagai kontaminasi yang menyebabkan munculnya pemikiran-pemikiran menyimpang (*distorted thoughts*) dalam teori-teori arus utama HI. Namun Konstruktivisme tampak sedikit berbeda dalam hal menempatkan dirinya bukan sebagai "penghancur" teori-teori arus utama, tetapi lebih sebagai "penyelaras" teori-teori sebelumnya dengan upaya untuk menghadirkan unsur yang selama ini dilupakan oleh teori-teori arus utama, yakni interaksi simbolik yang dipandang ikut membentuk pola-pola hubungan antar subjek dalam HI. Walaupun Konstruktivisme tampak mencoba memisahkan diri dari ortodoksi rasionalisme dalam tradisi berpikir Amerika Serikat, tetapi kecenderungannya untuk melakukan sintesis dengan cara mengkompromikan kontradiksi-kontradiksi yang ada, tidak bisa dipungkiri sebagaimana disinyalir oleh para pengritiknya, khususnya Hidemi Suganami,[23] Stefano Guzzini dan Anna Leander,[24] serta Maja Zehfuss.[25]

Walaupun tingkat abstraksi tinggi membuat teori-teori "Refleksivis" ini sulit diterapkan secara utuh dalam menganalisis berbagai fenomena internasional sebagaimana halnya Realisme atau Neo-Realisme memberikan eksplanasi logis dan terukur, tetapi para pemikir Konstruktivis menyadari bahwa pemikiran yang mereka hasilkan belumlah pantas untuk disebut sebagai "teori". Bagaimanapun juga, sebagaimana dinyatakan oleh Alexander Wendt,

23 Hidemi Suganami (2006). *Op cit.*, hlm. 57-72.

24 Stefano Guzzini dan Anna Leader (2006). '*Wendt's Constructivism: A Relentless Quest for Synthesis*', dalam Stefano Guzzini dan Anna Leader (ed.). '*Constructivism and International Relations*'. London: Routledge, hlm. 73-91.

25 Maja Zehfuss (2006). '*Constructivism and Identity: A Dangerous Liaison*', dalam Stefano Guzzini dan Anna Leader (ed.). '*Constructivism and International Relations*'. London: Routledge, hlm. 92-116.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

bahwa Konstruktivisme menawarkan penjelasan alternatif yang merujuk pada proses interaksi simbolik yang mengkonstruksi identitas bersama (*common identity*) dan ikut membentuk pola-pola hubungan antar subjek dalam hubungan antar-bangsa.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.

Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

BAB 10

FEMINISME DALAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL: KRITIK TERHADAP MASKULINITAS REALISME DAN RENDAHNYA REPRESENTASI PEREMPUAN

Pengantar

Bab ini akan membahas tentang masuknya pengaruh feminisme dalam studi HI. Ketika dalam cabang ilmu sosial lainnya seperti politik, sosiologi, ekonomi, antropologi, dan yang lainnya telah mengadopsi pemikiran feminisme sejak dekade 1950-an, studi HI temasuk yang paling belakangan dalam memasukkan perspektif gender ke dalam kajian HI melalui beberapa pakar feminis. Pada akhir dekade 1980-an dan awal dekade 1990-an muncul generasi pertama pemikir feminis HI seperti Harding (1986), Tickner (1992), Zalewsky (1993), Sylvester (1994), dan beberapa lainnya melibatkan diri dalam 'Debat Besar Ketiga' (*Third Great Debate*) antara positivis berhadapan dengan pos-positivis (lihat Bab 3) dengan mempertanyakan eksklusivitas, penekanan pada negara (*state centric approach*), dan karakter positivistik (uji hipotesis, validitas data, parameter, dan lain-lain) dari teori-teori arus utama HI pada waktu itu.

Feminisme dalam studi HI muncul sejak dekade 1990-an ketika para pemikir progresif HI gundah dengan dominasi maskulinitas dalam kajian HI. Para pemikir feminis generasi pertama seperti Cynthia Enloe, Cynthia Weber, dan Jean Elsthain mempersoalkan teori-teori arus utama HI yang cenderung mengabaikan perspektif perempuan dalam menganalisis berbagai persoalan internasional. Mengomentari karya monumental Kenneth Waltz, *Man, the State and War*, Jean Elsthain (1995), mempersoalkan penekanan pada posisi sentral "*man*" dan pengabaian peran "*woman*" dalam penyusunan strategi dan kebijakan luar negeri sehingga menghasilkan analisis yang bernuansa

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

"chauvinisme laki-laki" (*male chauvinism*).[1] Sementara itu pemikir feminis generasi kedua seperti Ann Tickner, Viviene Jabri, Jill Stearn, Jacqui True, dan yang lainnya menuntut perluasan batas-batas bidang kajian HI dengan lebih memperhitungkan perspektif kaum perempuan. Dalam konteks ini mereka menyerukan adanya pengarus-utamaan gender (*gender mainstreaming*) dalam studi HI, yakni mengangkat isu gender dalam berbagai peristiwa internasional: gerakan separatis, terorisme, konflik primordial, hubungan ekonomi global, pembuatan kebijakan luar negeri, dan peperangan.[2] Bagi mereka selama ini studi HI hanya mempelajari setengah dari keseluruhan ilmu yang seharusnya dipelajari, yakni hanya mempelajari fenomena HI dari kacamata kaum maskulin, tanpa memberi ruang yang cukup bagi perspektif feminin yang bukan tidak mungkin dapat menawarkan nuansa yang berbeda. Maka kemunculan kaum feminis dalam studi HI dapat dipandang sebagai suatu upaya kolektif tidak saja untuk menggugat dominasi maskulinitas dalam kajian HI melainkan juga sebagai upaya untuk menawarkan "setengah kebenaran lainnya" (*the other half of truth*) dalam studi HI.

Apa itu Feminisme?

Sebelum kita membahas lebih jauh tentang bagaimana pemikiran Feminisme mempengaruhi studi HI, ada baiknya kita melihat definisi dan sejarah singkat Feminisme sebagai teori maupun gerakan sosial yang secara konsisten mencoba memperjuangkan kesetaraan hak-hak kaum perempuan agar setara dengan kaum laki-laki. Secara definitif., Karen Offen (1988) memahami feminisme sebagai "suatu teori dan/atau gerakan sosial yang berkaitan dengan upaya peningkatan posisi kaum perempuan melalui cara-cara tertentu untuk mendapatkan hak-hak politik, hukum, dan ekonomi sebagaimana yang didapatkan oleh kaum laki-laki" (*a theory and/or movement concerned with advancing the position of women through such means as achievement of political, legal, and economic rights equal to those granted men*).[3]

1 Jean Bethe Elsthain (1995). 'Feminist Themes and International Relations'. Dalam Stephen Chan dan Cerwyn Moore (ed.). *'Theories of International Relations Vol. IV: Contemporary Reflexive Approaches in International Relations'*. London: SAGE, hlm. 119.

2 Lihat Stephen Chan dan Cerwyn Moore (ed.). *'Theories of International Relations Vol. IV: Contemporary Reflexive Approaches in International Relation's*. London: SAGE, khususnya Bab 65, 66, dan 67.

3 Karen Offen (1988). 'Defining Feminism: a Comparative Historical Approach'. *Sign: Journal of Women in Culture and Society*, Vol.14 No.1, hlm. 123.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

Definisi tersebut pada umumnya mengacu pada berbagai upaya secara teoretis maupun praksis untuk memperjuangkan kesetaraan hak-hak kaum perempuan dan laki-laki, khususnya di bidang politik, hukum, dan ekonomi. Feminisme sebagai fenomena muncul untuk pertama kalinya di *Seneca Falls*, Amerika Serikat pada tahun 1848 sebagai gerakan kaum perempuan untuk memperjuangkan hak mereka untuk ikut memilih dalam pemilihan umum. Tampak bahwa Feminisme, sejak kemunculannya di Amerika Serikat, kental dengan nuansa "persamaan hak antara laki-laki dan perempuan" dan upaya "peningkatan" posisi perempuan dalam konteks perjuangan kesetaraan hak. Nuansa semacam ini tampak mendominasi pemahaman Feminisme dalam kultur Barat, terutama di dalam budaya Anglo-Saxon (Inggris) dan Eropa Daratan.

Selanjutnya, ketika kesadaran Feminisme mulai muncul di Eropa Daratan, kaum perempuan Eropa (Jerman, Perancis, Swedia, dan lain-lain) mulai mencoba mencari bentuk pemahaman Feminisme tersendiri yang berbeda dengan arus utama kultur Barat dalam konteks budaya Anglo Saxon. Menyadari adanya perbedaan seksual antara laki-laki dan perempuan, kaum perempuan Eropa Daratan (di luar Anglo Saxon) kurang mementingkan persamaan hak dan perjuangan untuk meningkatkan posisi perempuan, sebaliknya mereka lebih memahami Feminisme sebagai bagian dari gerakan "*women's liberation*" (pembebasan perempuan) atau sebagai gerakan "*women's emancipation*" (emansipasi perempuan). Maka, perbedaan signifikan antara Feminisrne di antara kedua budaya tersebut adalah bahwa manakala budaya Anglo Saxon lebih memfokuskan pada "persamaan hak antara laki-laki dan perempuan", budaya Eropa Daratan lebih memahami Feminisme sebagai "hak-hak kaum perempuan" tanpa pretensi untuk menyamakan kaum laki-laki dan perempuan. Terlepas dari perbedaan pemahaman ini, pada kedua kultur inilah - Anglo Saxon dan Eropa Daratan - Feminisme sebagai teori dan praksis tumbuh dan berkembang dan menyebar ke seluruh dunia.[4]

Di negara-negara sedang berkembang pemahaman Feminisme lebih dikaitkan dengan bagaimana upaya untuk meningkatkan perempuan dalam pembangunan. Upaya ini tidak saja menyangkut peningkatan secara kuantitas, melainkan juga dari dimensi kualitas di mana perempuan seharusnya tidak lagi dianggap sebagai "objek" (sasaran) pembangunan, yakni upaya untuk membuat

4 *Ibid.*, hlm. 124-127.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

kaum perempuan mandiri secara ekonomi dengan membekali mereka dengan keterampilan-keterampilan tambahan (jahit-menjahit, menyulam, memasak, dan membuka usaha kecil) untuk menopang pendapatan (*income*) keluarga sebagaimana dikemukakan oleh Ester Boserup (1970) sebagai perspektif "*Women in Development*" (WID) yang kemudian dipakai sebagai dasar pencanangan "Dekade Perempuan" (*Women's Decade*) oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).[5] Teori Feminisme mempengaruhi kaum perempuan negara berkembang untuk keluar dari tradisi berpikir WID untuk kemudian masuk ke dimensi berpikir baru yang lebih mencerminkan adanya kesetaraan gender. Perspektif yang bernuansa egalitarian dan perjuangan ini disebut oleh Naila Kabeer, aktivis dan pengajar tentang gender dan pembangunan *di School of Oriental and African Studies* (SOAS) *London*, sebagai perspektif "*Gender and Development*" (GAD) yang hingga saat ini menjadi sumber inspirasi bagi program-program pemberdayaan perempuan di negara-negara sedang berkembang.[6]

Pemaparan singkat mengenai berbagai nuansa Feminisme ini dimaksudkan untuk memberikan latar belakang informasi mengenai bagaimana Feminisme sebagai teori dan gerakan sosial mempengaruhi berbagai bidang kehidupan sosial dan politik hingga akhirnya pada dekade 1990-an memberikan warna baru dalam studi HI. Pemikiran Feminisme dimanfaatkan oleh sejumlah pakar I-II untuk mempertanyakan dominasi maskulinitas dalam studi HI terutama perspektif Realisme yang menghendaki negara untuk selalu menampilkan karakter kuat (*macho*) dan siap menghadapi peperangan dalam percaturan politik internasional. Feminisme menuntut dimasukkannya karakter femininitas yang cederung dikaitakn dengan sikap lemah lembut (*soft*), peduli (*caring*), dan mengutamakan dialog daripada peperangan dalam kancah politik internasional.

Mempersoalkan Maskulinitas dalam Teori Arus Utama HI

Disiplin HI yang didominasi kaum maskulin menunjukkan bagaimana karakter feminin kurang dihargai eksistensinya. Sebagai contoh, pada sub-kajian politik luar negeri – sebagaimana ditengarai oleh J. Ann Tickner (2011) – sejumlah kecil kaum perempuan memang berhasil menembus barikade dengan

5 Lihat Ester Boserup (1970). '*Women's Role in Economic Development*'. London: George Allen & Unwin, hlm. 233-235.

6 Lihat Naila Kabeer (1994). '*Reversed Realities: Gender Hierarchies in Development Thoughts*'. London: Verso, hlm. 81.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

menjadi bagian dari kaum elite pembuat keputusan namun mereka dipersepsi sebagai kelompok yang "terlalu emosional" dan "terlalu lemah" sehingga berpotensi membahayakan keselamatan negara ketika harus bersentuhan dengan masalah keamanan nasional dan integritas teritorial.[7] Hal ini terjadi karena karakter kuat seorang pemimpin yang tegas dan tidak kenal kompromi sangat dibutuhkan untuk menjamin kelangsungan hidup suatu negara dalam situasi politik internasional yang anarkis sebagaimana diyakini oleh kaum Realis dan Neorealis. Persepsi negatif bahwa kaum perempuan dengan karakter feminin "tidak cocok" untuk berkecimpung di dalam hubungan antar-negara yang berorientasi pada perebutan kekuasaan ini pada gilirannya berkontribusi terhadap kecilnya jumlah perempuan yang menaruh minat pada studi HI, khususnya yang menyangkut sub-bidang kajian keamanan dan politik luar negeri.

Karena itu, kenyataan bahwa berbagai teks utama studi Hl -terutama Realisme dan Neorealisme- cenderung menggunakan istilah *men* (laki-laki) sebagai sebutan untuk individu yang terlibat dalam politik internasional, tanpa sedikit pun menyinggung keterlibatan kaum perempuan, bukanlah hal yang tidak disengaja. Sebagai contoh, salah satu buku teks yang menjadi rujukan bagi perspektif Neorealisme karangan Kenneth Waltz (1959) berjudul *Man, the State and War* membahas tiga penyebab perang dari tiga peringkat analisis yang berbeda. Pertama, pada peringkat individual perang disebabkan oleh hakikat manusia yang egoistik dan agresif. Kedua, pada peringkat nasional, perang dapat terjadi karena dinamika politik di dalam negara yang mendorong suatu negara untuk melakukan tindakan agresif demi pencapaian kepentingan nasionalnya. Ketiga, pada tataran regional/internasional, perang dapat terjadi akibat ketiadaan keseimbangan kekuatan (*Balance of Power*), di mana negara yang secara ekonomi-militer lebih kuat cenderung berperilaku agresif - dengan cara melakukan invasi militer dan okupasi - kepada negara-negara yang lebih lemah seperti dilakukan oleh milisi Serbia yang memicu Perang Dunia Pertama dan tindakan Hitler yang menginvasi Polandia dan memicu Perang Dunia Kedua.[8]

Pikiran yang dikembangkan oleh Realisme dan Neorealisme ini kemudian membentuk pencitraan bahwa politik internasional merupakan

7 J. Ann Tickner (2011). 'Feminism and Security'. Dalam Christoper W. Hughes dan Lai Few Meng (ed.). *'Security Studies: A Reader'*. London: Routledge, hlm. 45.

8 Kenneth Waltz (1959). *'Man, the State, and War: a Theoretical Analysis'*. New York: Columbia University Press.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

dunia kaum pria. J. Ann Tickner (1992) mensinyalir bahwa lingkungan politik internasional yang dihuni oleh para pemimpin negara, diplomat, prajurit, dan pejabat negara lainnya pada umumnya adalah kaum pria; kalaupun ada sejumlah kecil perempuan di dalam lingkungan tersebut mereka pada umumnya tidak menduduki posisi penting sehingga kurang berpengaruh dalam proses pembuatan politik luar negeri. Di Amerika Serikat, misalnya, pada tahun 1987, terdapat 4% perempuan di Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan negara adikuasa tersebut tetapi tidak satupun menduduki jabatan penting. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Donald Regan, kepala rumah tangga Gedung Putih, dalam wawancaranya dengan harian *Boston Globe* (edisi 10 Oktober 1985) menjelang pertemuan puncak negara adikuasa di Jenewa pada tahun 1985 yang menyatakan bahwa: "Kaum perempuan tidak akan mengerti bagaimana peluncuran peluru kendali dapat menambah bobot perundingan tentang penentuan nasib Afghanistan, tentang pelaksanaan prinsip Hak Asasi Manusia di seluruh dunia... kebanyakan kaum perempuan lebih menyukai berbicara mengenai aspek kemanusiaan dari berbagai fenomena yang sedang terjadi".[9] Komentar dari pejabat tinggi Gedung Putih tersebut seolah-olah menegaskan bahwa politik internasional bukan dunia yang tepat bagi kaum perempuan.

Masih di Amerika Serikat pandangan *stereotype* yang menyatakan bahwa perempuan hanya cocok di bidang-bidang kebijakan publik tertentu yang memerlukan sifat kepedulian sosial, penyediaan jasa, dan perluasan akses bagi masyarakat seperti bidang pertanian, pangan, dan pendidikan ternyata telah terjadi sejak lama. Sebagai contoh, pada tahun 1972, ketika seorang perempuan yang terpilih sebagai anggota *House of Representatives*, Bella Abzug, meminta lembaga itu untuk melibatkan perempuan di dalam Komisi Urusan Persenjataan (*House Armed Services Committee*) karena sudah lebih dari 2 dekade tidak pernah ada perempuan di komisi tersebut. Dapat diduga, usulan tersebut ditolak oleh pimpinan *House of Representatives* dengan alsan bahwa perempuan lebih cocok duduk di komisi pertanian, pangan, dan pendidikan dan tidak cocok di komisi urusan persenjataan.[10] Pandangan ini tentu saja membuat kaum Feminis Amerika Serikat, dan juga di seluruh dunia geram. Maka perjuangan mereka untuk mengubah cara berpikir yang merendahkan kaum perempuan ternyata

9 J. Ann Tickner (1992). *'Gender in International Relations: Feminist Perspectives on Achieving Global Security'*. New York: Columbia University Press, hlm. 3-4.

10 *Ibid.*, hlm. 5.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

membuahkan hasil. Sejak tahun 2000-an perempuan di Amerika Serikat dan banyak tempat di dunia mulai mendapat peran penting dalam penentuan politik luar negeri dan politik pertahanan. Di Amerika Serikat kita mengenal Condoleezza Rice yang pernah menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Amerika Serikat pada pemerintahan Presiden George W. Bush (2005-2009) dan Hillary Clinton pada pemerintahan Presiden Barrack Obama (2009-2013).

Perspektif Feminisme dalam Studi HI

Feminisme, bersama dengan Posmodernisme, Teori Kritis, dan Konstruktivisme berada dalam kelompok Teori Reflektivis yang dalam Perdebatan Besar Ketiga mencoba melepaskan diri dari tradisi berpikir arus utama yang dibentuk oleh teks-teks HI yang mempostulasi karakter negara maskulin sebagaimana digambarkan dalam teks Kenneth Waltz (1959) *Man, the State and War* dan menuntut pemahaman baru tentang politik global yang memberi tempat bagi persepsi kaum marjinal.[11] Tampak bahwa masuknya pengaruh Feminisme dalam studi HI dilandasi oleh kegalauan kaum Feminis terhadap absennya perempuan dalam kancah politik internasional. Marjinalisasi kaum perempuan dalam studi HI merupakan akibat dari tipologi biner antara karakter maskulin yang diasosiasikan dengan sifat-sifat seperti kekuatan, rasionalitas, independen, dan melindungi yang sangat berbeda dengan karakter feminin yang dikaitkan dengan sifat-sifat seperti lemah lembut, emosional, relasional, dan keinginan untu dilindungi. Dalam politik internasional yang anarkis, negara lebih membutuhkan karakter maskulin untuk menjamin kelangsungan hidupnya. Maka, tidak mengherankan jika perspektif arus utama teori HI - Realisme dan Neorealisme - lebih memberi tempat pada maskulinitas.

Namun demikian, turbulensi politik global pada pasca serangan teroris ke Menara Kembar di Amerika Serikat pada 11 September 2001 telah memberikan momentum bagi Feminisme, terutama ketika aktor non-negara dan kaum marjinal dalam politik internasional mulai menebar ancaman bagi keamanan negara dan individu. Dalam konteks ini, Feminisme bersama dengan Teori Kritis, Posmodernisme dan Konstruktivisme menawarkan perspektif baru dalam memandang politik internasional yang diwarnai oleh politik identitas,

11 Jacqui True (2005). 'Feminism'. Dalam Scott Burchill, *et al. 'Theories of International Relations edisi ketiga'*. London: Palgrave, hlm. 213; J. Ann Tickner dan Laura Sjoberg (2013). "Feminism". Dalam Tim Dunne, Milja Kurki, dan Steve Smith (ed.). *International Relations Theories: Discipline and Diversity edisi ketiga*. Oxford: Oxford University Press, hlm. 206.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

interaksi simbolik, dan ketidakpastian. Sejak berkhirnya Perang Dunia Kedua hingga berakhirnya Perang Dingin, perdamaian dunia mengandalkan pada peran negara besar (*major powers*) dalam memikul tanggung jawab sebagai penjaga ketertiban dan stabilitas dunia. Saat ini, ketika aktor non-negara menjadi pemain penting dalam memelihara keamanan dunia, penyelesaian terhadap keamanan negara dan keamanan individu memerlukan upaya yang lebih dari sekadar melimpahkan tanggung jawab pada negara-negara besar sebagai penjaga perdamaian. Apalagi ketika sejak berakhirnya Perang Dingin ancaman keamanan lebih banyak datang dari unsur non-militer seperti penyakit pandemik, bencana alam, kerusakan lingkungan, kemiskinan, kriminalitas, dan konflik identitas, pendekatan konvensional - perang dan diplomasi - tidak lagi memadai untuk memberikan solusi jangka panjang bagi persoalan-persoalan non-tradisional tersebut.

Di antara berbagai perspektif baru dalam studi HI, menurut Jacqui True seorang pakar Feminis dalam HI, Feminisme muncul dalam tiga bentuk untuk menawarkan cara baru dalam memahami fenomena politik internasional.[12] Ketiga bentuk tersebut, masing-masing adalah: (1) feminisme empris yang membahas keterwakilan perempuan dalam studi HI sebagai fakta empiris yang harus mendapat perhatian; (2) feminisme analitis yang memakai gender sebagai kategori teoretis untuk mengungkapkan bias gender dalam studi HI; dan (3) feminis normatif yang melihat proses pembentukan teori sebagai agenda normatif dalam melihat perubahan sosial-politik dalam studi HI. Masing-masing dari bentuk perspepektif feminisme in akan dibahas secara lebih detail.

Feminisme Empiris

Feminisme empiris melihat fakta empiris yang menunjukkan adanya "diskriminasi seksual" (*sexist exclusion*) dalam studi HI di mana kegiatan pengajaran dan penelitian tentang HI didominasi oleh kaum laki-laki. Dengan merujuk pada karya fenomenal J. Ann Tickner (1992) *Gender in International Relations: Feminist Perspectives on Achieving Global Security*, Jacqui True mengungkapkan kegalauan kaum Feminis yang terganggu oleh rendahnya keterwakilan kaum perempuan dalam pengajaran dan penulisan teks-teks dalam studi HI. Situasi ini diperkuat oleh Cynthia Enloe yang dalam karyanya *Bananas, Beaches and Basses: Making Feminist Sense of International*

12 Jacqui True (2005). *Op cit.*, hlm. 214.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

Politics (1990) bahwa kehadiran perempuan dalam aktivitas pembuatan dan pelaksanaan Politik Luar Negeri yang sangat rendah, karena keterlibatan kaum perempuan dalam politik internasional cenderung diasosiasikan dengan politik "lemah lembut" (feminin) atau *soft (feminine) politics* yang terkait dengan kegiatan kuliner, musik, dan pesta-pesta pantai yang sering ditampilkan para istri diplomat.

Studi empiris kaum Feminis juga mendapatkan bahwa konstruksi organisasi internasional berbasis gender yang mencoba merombak situasi di mana banyak organisasi di tingkat nasional maupun internasional yang didominasi oleh kaum elite laki-laki melalui "pengarusutamaan gender" (*gender mainstreaming*). Dewasa ini proses *gender mainstreaming* secara terus-menerus dalam organisasi internasional telah berhasil meningkatkan keterlibatan kaum perempuan untuk menduduki posisi sentral dalam pembuatan keputusan di organisasi internasional. Sebagai contoh, saat ini makin banyak perempuan menjadi direktur dan menduduki posisi-posisi strategis di berbagai organisasi internasional seperti *World Health Organization* (WHO), *United Nations International Children's Emergency Fund* (UNICEF), *Unitend Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR), *the World Food Programme* (WFP), *the World Population Fund* (WPF), dan *International Monetary Fund* (IMF). Masuknya kaum perempuan dalam posisi strategis pada organisasi internasional tersebut membawa dampak bagi munculnya kebijakan yang lebih sensitif terhadap gender dan timbulnya pandangan tentang pentingnya penekanan terhadap perspektif kesetaraan gender (*gender equality*) dalam setiap kebijakan.

Keterlibatan perempuan dalam pembentukan moralitas global tampak sangat marak di kalangan aktor non-negara. Kaum perempuan yang acapkali menjadi korban proses marginalisasi sosial-ekonomi dan harus menjalani profesi-profesi rentan seperti pekerja seks, pembantu rumah tangga, pedagang informal, dan sebagainya dewasa ini mulai menampilkan diri dengan status sosial yang lebih tinggi. Akhir-akhir ini kita sering mendengar makin banyak perempuan terlibat dalam berbagai kampanye anti-kekerasan, penolakan terhadap penggunaan ranjau darat dalam peperangan, serta kampanye perlucutan senjata nuklir atau *Campaign for Nuclear Disarmament* (CND). Di Amerika Latin, misalnya, di tengah-tengah krisis ekonomi yang membuat penduduk kehilangan pekerjaan dan pendapatan, para perempuan membentuk "dapur umum" (*olla communes*) untuk menyediakan makan gratis bagi

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

mereka yang membutuhkan. Di kawasan yang rentan konflik seperti Palestina, Balkan, dan Afrika kelompok perempuan yang menamakan diri mereka sebagai "Perempuan Berbaju Hitam" (*Women in Black*) berkampanye memprotes militerisasi, perdagangan senjata ilegal, dan kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak.[13]

Tampak bahwa studi empiris tentang gender sanggup memberikan dampak kebijakan dan efek material yang signifikan bagi upaya untuk memperluas akses bagi kaum perempuan untuk menduduki posisi-posisi strategis dalam berbagai organisasi nasional maupun internasional serta kesempatan untuk membentuk moralitas global. Dengan menghadirkan fakta empiris tentang pengabaian kaum perempuan dalam berbagai peristiwa penting, pembuatan kebijakan, dan pengendali sebuah proses, maka kaum Feminis Empiris telah membuka jalan bagi timbulnya pemikiran tentang kesetaraan gender yang sangat penting bagi upaya pengarusutamaan gender dalam studi HI untuk menghasilkan wajah HI yang utuh dan tidak lagi didominasi oleh maskulinitas.

Feminisme Analitis

Feminisme Analitis berusaha melangkah lebih jauh dengan cara melakukan dekonstruksi terhadap kerangka teoretis dalam HI yang memiliki bias gender dengan menempatkan karakter maskulin sebagai sifat yang diinginkan (*desirable character*) dalam politik internasional. Realisme sebagai aliran pemikiran yang dominan menyatakan dengan tegas bahwa dalam politik internasional yang anarkis - yang ditandai dengan tidak adanya pemerintahan dunia yang mempunayi otoritas untuk mengontrol tindakan setiap negara – negara harus tampil kuat (dengan membangun kekuatan militer yang memadai) untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Karena itu tidak mengherankan jika teks-teks standar HI (yang didominasi oleh Realisme) selalu menampilkan negara dalam karakter laki-laki bersenjata yang selalu siap untuk berperang. Fokus pada karakter laki-laki ini dalam studi HI dapat kita lihat, misalnya, dari definisi H.J. Morgenthau (tokoh Realisme klasik) tentang "kekuasaan" (*power*) sebagai "***men's*** *control over the actions of other* ***men***" dan juga judul buku Kenneth Waltz (tokoh Neorealisme) ***Man***, *the State and War* (1959) yang menandai kemunculan Neorealisme.

13 *Ibid.*, hlm. 219-220.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

Bagi para pengikut Feminisme Analitis, pandangan sempit (*myopic*) seperti ini telah membatasi studi HI sebagai bidang studi yang didominasi kaum laki-laki (*male-dominated field of study*), sehingga studi HI tidak mewakili keseluruhan karakter manusia terutama dari sisi gender, yakni karakter laki-laki yang maskulin, dan karakter perempuan yang feminin. Untuk mendapatkan wajah studi HI yang utuh, para pengikut Feminis Analitis mengusulkan dekonstruksi pola pikir yang dibentuk oleh Realisme dan Neorealisme. Dekonstruksi ini sangat substansial karena kaum Feminis menengarai bahwa proses pembuatan teori (*theorizing*) dalam studi HI - yang oleh Scott Burchill dan Andrew Linklater dimaknai sebagai sebuah proses pemberian makna terhadap suatu obyek penelitian[14] - cenderung menampilkan secara parsial karakteristik politik internasional yang diwarnai dengan karakter laki-laki yang maskulin. Sebagaimana dikatakan J. Ann Tickner, teori-teori HI yang menampilkan karakter negara (sebagai aktor utama politik internasional) yang bersifat "rasional" (*rational*), "maksimalisasi keamanan" (*security maximizing*), dan "mencari kekuasaan" (*power seeking*) tampak hanya menghadirkan wajah maskulin negara dan mengabaikan karakter lainnya seperti sifat "dialog persahabatan" (*friendly dialog*), "kepedulian" (*caring*), dan "non-kekerasan" (*non-violence*).[15]

Dorongan kaum Feminis Analitis untuk membuat teori-teori HI yang mempunyai cakupan lebih luas dari sekadar memberi makna terhadap masalah militer-strategis, peperangan, dan perdamaian menjadi sangat relevan, terutama pada masa pasca Perang Dingin, ketika signifikansi isu militer-strategis menjadi berkurang dan membuat para ahli keamanan memperluas cakupan kajiannya meliputi isu-isu keamanan non-tradisional seperti krisis ekonomi, kerusakan lingkungan, bencana alam, perdagangan manusia, kemiskinan, penyakit pandemik, dan kriminalitas internasional yang dapat mengancam keamanan individu. Dalam konteks ini, Feminisme sangat menghargai kontribusi Teori Kritis (*Critical Theory*) dalam mendekatkan studi HI pada upaya untuk meningkatkan kemaslahatan manusia dan memperjuangkan emansipasi manusia pada tiga hal penting: kebebasan dari rasa takut (*freedom from fear*), kebebasan untuk mendapatkan kebutuhan dasar (*freedom of pursuing basic needs*), dan kebebasan untuk memelihara martabat (*freedom of maintaining*

14 Scott Burchill dan Andrew Linklater (2005). 'Introduction'. Dalam Scott Burchill, *et al.* '*Theories of International Relations*'. London: Palgrave, hlm. 12.

15 J. Ann Tickner (1992). *Op cit.* hlm. 70.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

dignity). Feminisme juga sangat berterimakasih kepada Teori Konstruktivis yang memasukkan unsur kepentingan (*interests*), maksud (*intention*), dan identitas (*identities*) dalam menganalisis hubungan antar aktor internasional. Ketiga hal tersebut menentukan apakah hubungan antar aktor yang ada bersifat "persahabatan" seperti tampak dalam hubungan antara AS dan Inggris atau bersifat "rivalitas" seperti tampak dalam hubungan antara India dan Pakistan. Posmodernisme berkontribusi dalam menantang teori-teori arus urama untuk menghadirkan perspektif kaum marjinal yang tadinya dianggap sepele oleh studi HI.

Feminisme Normatif

Feminisme Normatif mencoba menghadirkan kembali unsur etika, norma, dan nilai dalam penyusunan teori-teori HI. Feminisme Normatif sepakat dengan pemikir Teori Kritis Robert Cox yang menyatakan bahwa dalam melihat isu tertentu seperti kemiskinan dan krisis kemanusiaan seorang peneliti mau tidak mau harus mengambil posisi politik (*political stance*) tertentu dan tidak mungkin sepenuhnya obyektif.[16] Dengan demikian tampak bahwa berbagai kajian yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar manusia akan mendorong peneliti untuk bersikap subjektif. Subjektivitas ini hendaknya dituntun oleh etika, norma dan nilai tertentu agar tidak menghilangkan nuansa akademis penelitian tersebut. Sebagai contoh, pemikir Feminis menghadirkan berbagai topik penelitian yang menggambarkan aktivitas kaum perempuan di negara sedang berkembang untuk memberikan masukan bagi penyusunan agenda bantuan kemanusiaan, intervensi kemanusiaan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang sensitif gender. Tampak bahwa Feminisme Normatif menawarkan studi HI yang berdimensi kebijakan (*policy-oriented*) yang sensitif gender.

Feminisme Normatif juga menawarkan cara pandang baru dalam melihat fenomena politik internasional seperti perang. Cynthia Enloe (1994), misalnya, mencoba untuk melakukan perubahan radikal dalam memandang peperangan. Dengan menghadirkan penderitaan para ibu rumah tangga Rusia yang kehilangan anaknya dalam pertempuran di Afghanistan, Enloe menghadirkan perspektif feminin dalam melihat peperangan di mana para ibu rumah tangga Rusia yang kehilangan putranya di medan perang merasa bahwa

16 Robert Cox (1987). '*Production, Power and World Order: Social Forces in the Making of History*'. New York: Columbia University Press, hlm. 208.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

pengorbanan putra mereka terasa sia-sia di medan peperangan yang dirancang untuk memenuhi ambisi pemimpin Uni Soviet untuk melampiaskan dorongan maskulinitas mereka untuk menguasai Afghanistan. Karena itu, mereka bersepakat untuk menyerukan kepada pemerintah agar menarik pasukan Soviet dari Afghanistan pada akhir dekade 1980an yang berujung pada berakhirnya Perang Dingin.[17] Agenda riset yang ditawarkan Cynthia Enloe dan pakar Feminis lainnya seolah-olah menunjukkan suatu upaya untuk mendudukkan perspektif feminin sejajar dengan perspektif maskulin dalam mengkaji berbagai peristiwa internasional termasuk peperangan untuk melengkapi kepingan *puzzle* yang tidak utuh tentang studi HI.

Kontribusi Pemikiran Feminisme dalam Kajian Hubungan Internasional

Ketika teori-teori konvensional HI memberikan perhatian khusus pada aktivitas "negara-negara besar" (*great powers*) sebagai aktor utama dalam sistem internasional. Sebagaimana dikatakan Kenneth Waltz, John Mearsheimmer, dan pemikir Neorealis lainnya bahwa perdamaian dapat terjadi jika terjadi perimbangan kekuatan (*balance of power*) di antara negara-negara besar sehingga keinginan mereka untuk memulai peperangan dapat dicegah. Pemikiran semacam ini mengukuhkan pandangan bahwa studi HI tidak saja didominasi oleh karakter maskulin tetapi juga menunjukkan bahwa politik internasional adalah *privilege* bagi negara-negara besar (*great powers*) yang seolah-olah memikul tanggungjawab sebagai penjaga ketertiban dan keselamatan dunia.

Dalam konteks ini, feminisme yang melihat hubungan internasional dari sudut pandang kaum pinggiran/marjinal dapat menawarkan cara pandang alternatif yang sebelumnya diabaikan dalam studi HI. Sebagai contoh, dalam membahas tentang peperangan, jika sebelumnya pembahasan didominasi oleh diskusi tentang strategi memenangkan pertempuran, pemakaian senjata-senjata canggih, dan bagaimana menjalin aliansi, dan sebagainya, maka pemikiran feminisme menawarkan cara pandang baru dengan melihat unsur penderitaan dalam peperangan, yakni bagaimana posisi kaum perempuan dalam posisi sebagai korban: menjadi korban kekerasan, mengalami kehilangan anggota keluarga, kehilangan harta-benda, menjadi pengungsi, dan sebagainya. Sama

17 Cynthia Enloe (1994). '*Morning After: Sexual Politics at the End of the Cold War*'. Berkeley: University of California Press, hlm. 223-224.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

halnya ketika studi HI mengupas tentang krisis ekonomi berskala global, secara konvensional pembahasan terfokus pada kegagalan kebijakan pemerintah, tekanan eksternal, keleinahan sumberdaya manusia, dan lain-lain, pemikiran feminisme menawarkan cara pandang berbeda dengan melihat bagaimana kaum perempuan harus menanggung "beban ganda" (*double burden*): mengurus rumah tangga dan bekerja untuk mendapat penghasilan tambahan bagi keluarga. Tampak bahwa pemikiran feminisme menawarkan perspektif humanisme dalam memandang berbagai fenomena internasional seperti peperangan, krisis ekonomi, kemiskinan dan sebagainya.

Dalam rangka perkembangan studi HI sebagai disiplin ilmu, Feminisme memberikan tiga kontribusi penting: (1) Meredefinisi konsep keamanan; (2) Menatahkan mitos "Laki-laki sebagai Pelindung, Perempuan sebagai Yang Dilindungi"; dan (3) Memberikan gambaran komprehensif tentang masalah keamanan sosial-ekonomi.[18] Masing-masing poin tersebut akan dibahas secara lebih rinci di bawah ini.

Meredefinisi Konsep Keamanan

Sebagaimana kita ketahui para pakar HI konvensional cenderung mendefenisikan "keamanan" (*security*) dalam konteks perlindungan terhadap keamanan negara. Dengan demikian tampak bahwa studi HI, terutama perspektif Realisme, melihat bahwa subjek dari "keamanan" adalah segala yang berkaitan dengan negara yang biasanya dikaitkan dengan tiga unsur utama: kedaulatan, wilayah, dan sumberdaya alam. Pemahaman konvensional tentang keamanan cenderung merujuk pada upaya negara untuk melindungi kedaulatan, wilayah dan sumber daya alamnya dari ancaman pihak lain melalui pembangunan kekuatan militer atau pertahanan yang mumpuni. Dalam menyusun strategi pertahanan biasanya berlaku adagium: "semakin besar persepsi ancaman yang dihadapi suatu negara, maka semakin besar pula komitmen negara tersebut untuk memperkuat kekuatan militernya melalui peningkatan kuantitas dan kualitas pasukan serta belanja persenjataan". Adagium ini berlaku bagi negara Tiongkok yang meningkatkan anggaran pertahanannya untuk mengimbangi kehadiran Amerika Serikat dan Russia di Laut Tiongkok Selatan.

18 J. Ann Tickner dan Laura Sjoberg (2013). 'Feminisni'. Dalam Tim Dunne, Milja Kurki, dan Steve Smith (ed.). '*International Relations Theories: Dicipline and Diversity edisi ketiga*'. Oxford: Oxford University Press. hlm. 212-214.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

Pandangan konvensional tentang "keamanan" yang hanya memfokuskan pada upaya menjaga kedaulatan, wilayah, dan sumberdaya alam suatu negara telah diperdebatkan sejak dekade 1980-an. Richard H. Ullman, pakar HI Universitas Princeton Amerika Serikat, menyatakan bahwa adanya perubahan persepsi ancaman mengharuskan studi HI memperluas lingkup kajian keamanan dengan menjangkau aspek-aspek non-militer seperti krisis ekonomi, kerusakan lingkungan, dan kriminalitas yang dapat mengancam rasa aman warga.[19] Dengan nada yang hampir sama para pakar keamanan yang tergabung dalam Aliran Pemikiran Kopenhagen (*the Copenhagen School*) seperti Barry Buzan, Ole Waever, Lene Hansen, dan Jaap de Wilde meyatakan bahwa pada pasca Perang Dingin ketika signifikansi penggunaan kekuatan militer makin berkurang, maka kajian keamanan harus melakuan dua langkah strategis: (1) Pendalaman (*deepening*): memperdalam subjek keamanan mulai dari negara (*state*) menuju ke masyarakat (*society*), dan individu (*individual*), di mana rasa aman hendaknya dirasakan oleh negara, masyarakat, dan individu sekaligus; dan (2) Perluasan (*widening*): perluasan lingkup kajian yang menggabungkan masalah tradisional dan non-tradisional sehingga kajian keamanan meliputi dimensi yang luas seperti aspek militer, ekonomi, politik, sosial, dan lingkungan.[20]

Feminisme mempertegas upaya Aliran Pemikiran Kopenhagen dalam pendalaman (*deepening*) dan perluasan (*widening*) konsep keamanan karena langkah-langkah tersebut sesuai dengan agenda Feminisme dalam melihat esensi ancaman terhadap keamanan dalam lingkup yang lebih luas. Mereka mendukung langkah perluasan (*widening*) konsep keamanan karena memberikan justifikasi teoretis dalam upaya mengidentifikasi sumber ancaman yang meliputi kekerasan dalam rumah tangga, pemerkosaan, kemiskinan, subordinasi perempuan, kerusakan lingkungan, dan peperangan. Feminisme juga bersepakat dengan langkah pendalaman (*deepening*) karena ancaman keamanan non-tradisional menjadikan negara, masyarakat dan individu sebagai target.[21] Dapat dikatakan bahwa Feminisme ikut berkontribusi dalam meredefinisi konsep keamanan dengan cara menegaskan kembali langkah

19 Richard H. Ullman (1983). 'Redefining Security'. *International Security*, Vol. 8 No. 1, hlm. 129-153.
20 Barry Buzan, Ole Waever, Jaap de Wilde (1998). '*Security: a New Framework for Analysis*'. New York: Lynne Rienner; Barry Buzan dan Lene Hansen (2009). '*The Evolution of International Security Studies*'. Cambridge: Cambridge University Press, hlm. 187-225.
21 J. Ann Tickner dan Laura Sjoberg (2013). *Op cit.*, hlm. 213.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

Aliran Pemikiran Kopenhagen dalam melakukan pendalaman dan perluasan konsep keamanan agar tetap menjadi bagian penting dari studi HI.

Mematahkan Mitos "Laki-laki sebagai Pelindung, Perempuan sebagai yang Dilindungi"

Tidak dapat dipungkiri bahwa narasi di hampir seluruh dunia didominasi oleh mitos maskulinitas dan femininitas yang menempatkan laki-laki (yang mewakili maskulinitas) sebagai pelindung (*protectors*) dan perempuan (yang mewakili femininitas) sebagai yang dilindungi (*the protected*). Mitos semacam ini tersebar ke seluruh dunia melalui komik-komik superhero, antara lain komik Superman seperti terlihat pada Gambar 10.1. yang menunjukkan citra laki-laki yang maskulin selalu identik dengan simbol kekuatan dan kepahlawanan, dan perempuan yang feminin merupakan simbol kelemahan, korban kejahatan, dan memerlukan perlindungan.

Gambar 10.1
Penyebaran Mitos "Laki-laki sebagai Pelindung, Perempuan yang Dilindungi" melalui Komik *Superman*

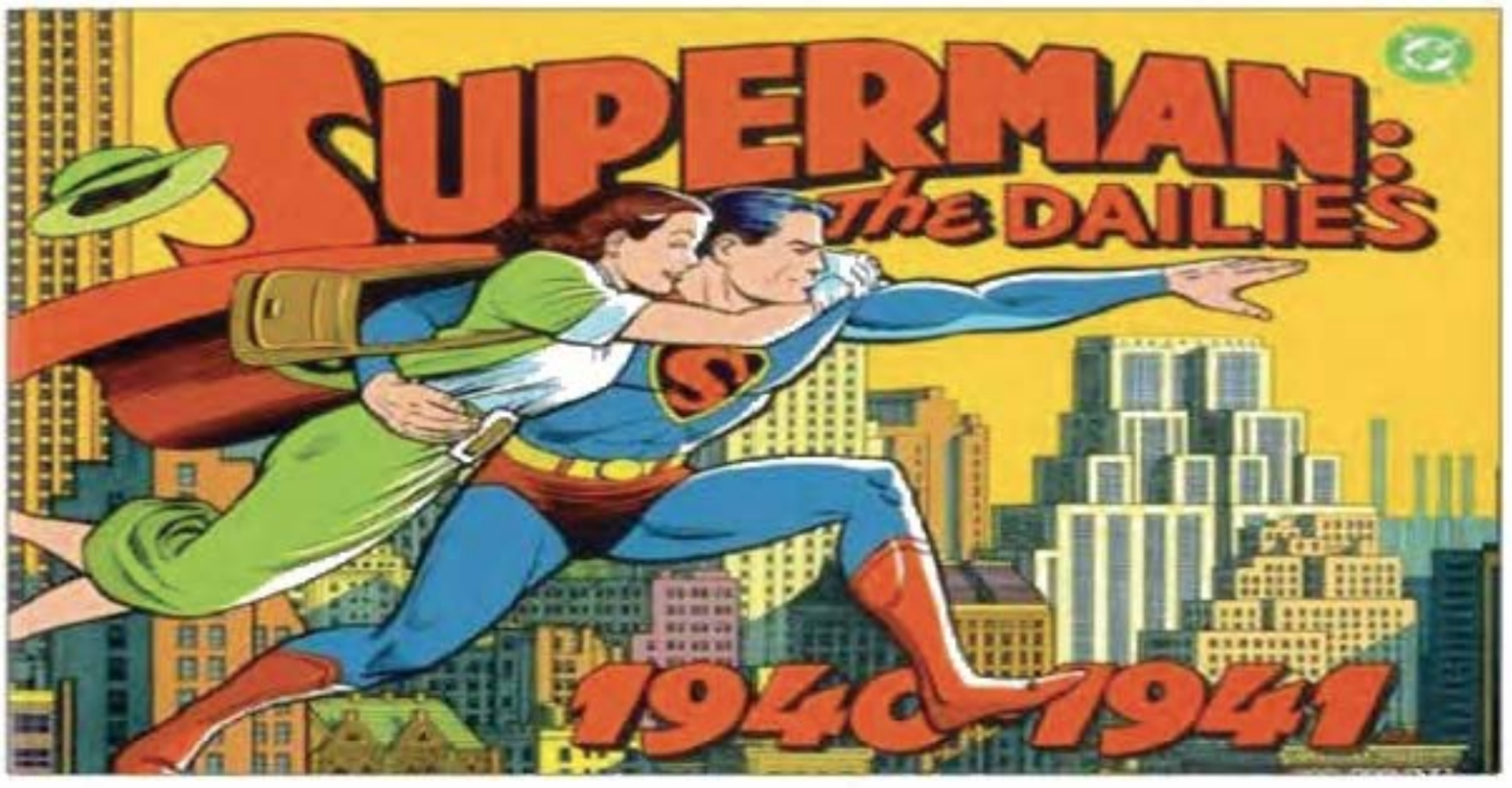

Sumber: Bahan Kuliah Teori-teori Hubungan Internasional, FISIP-UNPAR, 2016.

Suka atau tidak suka, mitos seperti ini melekat di pikiran hampir semua orang di dunia sehingga dikotomi antara maskulinitas-kekuatan-kepahlawanan dengan femininitas-kelemahan-korban tidak dapat dihindarkan. Kaum Feminis melihat hal ini tidak saja sebagai sesuatu yang merendahkan kaum perempuan, melainkan juga sebagai cara pandang yang ikut mempengaruhi penempatan

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

perempuan sebagai korban kekerasan di dalam konflik atau peperangan. Fakta empiris tampaknya mempertegas posisi perempuan dan anak-anak sebagai kaum lemah yang memerlukan perlindungan. Pada tahun 1999, misalnya, *United Nations High Commissioner of Refugees* (UNHCR) memperkirakan sekitar 75 persen pengungsi korban perang di seluruh dunia adalah kaum perempuan dan anak-anak.[22]

Feminisme bahkan menggugat pemosisian kaum perempuan sebagai korban peperangan. Dalam bukunya *Gender, Justice and the Wars* (2006), Laura Sjoberg menyatakan bahwa pandapat yang menempatkan kaum perempuan sebagai kelompok masyarakat sipil yang lemah, rentan, dan butuh perlindungan membuat peperangan semakin rumit dan sulit untuk diselesaikan. Penelitian oleh kaum Feminis menunjukkan bahwa perempuan sering mengalami penderitaan yang tidak proporsional di mana mereka sering menghadapi risiko pemerkosaan dan berbagai bentuk penyiksaan lainnya. Dalam kasus invasi militer Irak ke Kuwait pada awal 1990-an misalnya, banyak perempuan Kuwait menjadi korban pemerkosaan bukan sekadar akibat "kecelakaan peperangan" (*accident of war*), tetapi strategi militer yang diterapkan oleh militer Irak untuk melampiaskan kebencian etnis dan upaya menebar rasa takut kepada warga Kuwait. Peristiwa serupa terulang kembali di eks Yugoslavia beberapa tahun kemudian di mana ribuan perempuan Bosnia dan Kosovo menjadi korban pemerkosaan dengan alasan yang hampir sama.[23]

Dalam konteks ini, Feminisme mencoba untuk mematahkan mitos yang cenderung memosisikan perempuan sebagai kelompok lemah, rentan, dan korban kekerasan kaum laki-laki. Dalam perkembangan selanjutnya, pakar Feminis dalam HI mencoba mematahkan mitos tersebut dengan mengangkat topik perempuan sebagai pelaku kekerasan dalam konflik bersenjata. Dengan mengangkat kasus bom bunuh diri yang melibatkan "*Black Widows*" (para janda Chechnya yang kehilangan suami dalam perang melawan Rusia), Lori Poloni-Staudinger dan Candice D. Ortbars dalam bukunya berjudul *Terrorism and Violent Conflict: Women's Agency, Leadership and Responses* (2013) menyatakan bahwa perempuan tidak selamanya memposisikan diri sebagai korban peperangan, ada kalanya mereka ikut angkat senjata walaupun dengan alasan untuk membalas dendam kematian anggota keluarganya seperti tampak

22 *Ibid.*, hlm. 214.

23 Laura Sjoberg (2006). *'Gender, Justice and the Wars in Iraq: a Feminist Reformulation of Just War Theory'*. Oxford: Lexington Books, hlm. 137-138.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

pada kasus Chechnya, Basque, gerilyawan FARC di Colombia, dan tempat-tempat lain di dunia.[24] Peneliatian semacam ini merupakan bukti konkret perjuangan kaum Feminis untuk mematahkan mitos lama yang merendahkan status perempuan terutama dalam peperangan.

Memberikan Gambaran Komprehensif tentang masalah Keamanan Sosial-Ekonomi

Sementara analisis kaum Feminis tentang keamanan cenderung mengacu pada masalah gender dalam peperangan yang cenderung menempatkan perempuan sebagai korban yang berusaha diubah dengan menampilkan fakta empiris kaum perempuan sebaga agen kekerasan dalam peperangan. Dalam beberapa kasus seperti bom bunuh diri yang dilakukan para pejuang Chechnya terhadap sejumlah sasaran di Rusia, skuad bom bunuh diri yang melibatkan para janda perang di Irak, pasukan Inong Bale dalam perang Aceh, para perempuan korban perang yang menuntut keadilan pada pasca Perang di Amerika Latin, dan sejumlah kasus lainnya menunjukkan adanya perubahan batu pendulum mengenai posisi perempuan dalam perang yang tidak lagi selalu menjadi korban, tapi ada kalanya juga menjadi pelaku perang.

Dalam konteks keamanan sosialekonomi, perempuan dapat lebih fasih bercerita mengenai penderitaan akibat gangguan keamanan sosial ekonomi. Di Amerika Latin, misalnya, ketika banyak negara menghadapi krisis ekonomi, para ibu rumah tangga beramai-ramai mendirikan dapur umum (*olla communes*) untuk memberikan makanan kepada para pengangguran yang kehilangan penghasilan akibat krisis ekonomi. Hal serupa juga dilakukan para ibu rumah tangga di Jakarta pasca krisis moneter tahun 1997-1998 yang membentuk kelompok Suara Ibu Peduli (SIP) yang membuka pasar sembako murah bagi mereka yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja perusahaan-perusahaan yang mengalami kebangkrutan. Krisis ekonomi juga memberikan beban tambahan kepada ibu rumah tangga yang harus bekerja ekstra untuk menambah penghasilan keluarga untuk membayar tagihan listrik, tagihan telepon, kenaikan harga sembako, dan sebagainya sembari tetap melaksanakan pekerjaan rumah tangga. Karena mereka yang mengalami secara langsung penderitaan itu, maka kaum perempuan biasanya lebih mampu memberikan gambaran secara krisis tentang gangguan keamanan sosial-ekonomi.

---

24 Iori PoloniStaudinger dan Candice D. Ortbars (2013). *'Terrorism and Violent Conflict: Women's Agency, Leadership and Responses'*. London: Springer, hlm. 34.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

Kesimpulan

Bagian ini telah membahas bagaimana kaum feminis telah memberi warna dalam studi Hubungan Internasional. Muncul sejak 1980-an dan menguat pada 1990-an feminisme dalam studi Hubungan Internasional menggugat studi HI dari dua sisi. Pertama, rendahnya representasi kaum perempuan dalam studi HI baik sebagai akdemisi, peneliti maupun praktisi. Kedua, dominasi maskulinitas dalam studi HI terutama analisis Realisme yang mempostulasi kiprah negara dengan karakter yang macho untuk menjamin kelangsungan hidupnya dalam hubungan negara yang bernuansa politik kekuasaan (*power politics*). Dalam kondisi demikian, kaum feminis mengatakan bahwa dominasi laki-laki dalam perkembangan teori maupun praktik hubungan antar bangsa membuat studi HI hanya mampu menggambarkan setengah saja dari fenomena internasional, yakni fakta dari perspektif laki-laki. Untuk itulah feminisme hadir untuk memberikan gambaran yang lebih utuh tentang fenomena internasional dari pespektif laki-laki dan perempuan.

Kehadiran feminisme mencoba untuk memberikan gambaran dari tiga aspek. Pertama, secara empiris kaum feminis menyodorkan fakta bahwa kehadiran perempuan dalam pengembangan teori dan praktik HI ternyata masih sangat mnimal. Kedua, secara analitis tampak bahwa sejumlah masalah struktural telah membatasi partisipasi kaum perempuan dalam pengembangan teori dan praktik HI. Perempuan masih dikesampingkan karena adanya kesadaran yang salah (*false consciousness*) bahwa perempuan identik dengan sikap lemah-lembut, emosional, dan kepedulian yang tidak cocok dengan hakikat politik internasional yang bernuansa perjuangan demi kekuasaan. Dengan kata lain, perempuan dianggap kurang *trenggina*s ketika harus berbicara mengenai persenjataan dan strategi peperangan. Ketiga, secara normatif kaum perempuan seringkali diasosiasikan sebagai makhluk lemah yang harus dilindungi. Hal ini ditampilkan dalam komik-komik superhero seperti *Superman, Batman, Spiderman*, dan lain-lain. Sehingga akibatnya, dalam peperangan pun perempuan lebih sering ditempatkan sebagai korban, bukan pelaku. Kaum feminis hadir dalam studi HI untuk meronbak segala logika yang tampak merendahkan status kaum perempuan.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

BAB 11

POSMODERNISME: MENGGUGAT MODERNITAS DAN MEMPERTANYAKAN POSITIVISME

Pengantar

Dewasa ini, perspektif Posmodernisme membayang-bayangi kehidupan sosial kita. Pandangan Posmodernis mempertanyakan berbagai hal (asumsi, nilai, teori, dan konsep) yang selama ini kita yakini sebagai kebenaran yang tidak dapat dibantah. Di dalam aspek seni-budaya dan arsitektur, Posmodernisme menggugat konsep "keindahan" yang dinilai mewakili pandangan kaum elite. Dalam ilmu sosial, Posmodernisme menggugat asumsi-asumsi epistemologis keilmuan yang menekankan pada objektivitas dan hubungan kausal serta kebenaran tunggal yang dipaksakan.[1] Dalam konteks studi Hubungan Internasional, Posmodernisme mempertanyakan keseluruhan pandangan duniawi (*world views*) yang mencakup aspek politik, sosial, dan budaya. Menurut kaum Posmodernis, legitimasi berbagai pandangan duniawi tersebut patut dipersoalkan karena hanya mewakili pandangan kelompok yang dominan dan tidak mewakili suara kaum marjinal. Dapat dikatakan bahwa kemunculan Posmodernisme sebagai aliran pemikiran masa kini sebagai wujud ketidakpuasan terhadap modernisme. Secara historis, Posmodernisme merasa terganggu oleh dominasi pemikiran "abad pencerahan" (*enlightenment*) yang menentukan pandangan duniawi. Dalam ilmu pengetahuan modern, Posmodernisme merasa tidak nyaman dengan ilmu modern yang membangun reputasinya melalui objektivitas, prosedur riset yang ketat, pengungkapan hal-

1 Pauline Rosenau (1992). *'Post-Modernism and the Social Sciences: Insights, Inroads, and Intrusions'*. Princeton: Princeton University Press, hlm. 3.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

hal material daripada peristiwa metafisik, dan pemaksaan kebenaran tunggal atau fundasionalisme.[2]

Senada dengan pemikir Feminis, teoretisi Posmodernisme dalam studi HI seperti R.B.J. Walker, Richard Ashley, James Der Derian, dan lain-lain menggugat teori-teori arus utama yang mereka anggap terkontaminasi oleh "determinisme" (pemaksaan kebenaran), "logosentrisme" (pembatasan melalui nilai dan norma yang dianut oleh kelompok dominan) dan "inter-tekstualitas" (batasan yang dibuat oleh teks-teks terdahulu yang menjadi standar acuan). Dalam kondisi demikian, riset-riset HI mengandung bias-bias yang menyesatkan. Dalam artikelnya berjudul *Virtuous War/Virtual Theory* (2006 [2000]), James Der Derian menyatakan bahwa pergelaran teknologi mesin perang (pesawat tempur, tank, bom pintar, kapal selam nuklir, kapal induk, senapan sergap, dan lain-lain) telah mengubah secara signifikan makna "peperangan" (*war*) dari makna sebagai instrumen pertahanan negara menjadi virtualisasi teknologi penghancur paling mutakhir.[3]

Tampak bahwa Der Derian menengarai kuatnya pengaruh determinisme dan logosentrisme dalam riset-riset tentang perang modern sehingga mendistorsi makna sesungguhnya peperangan. Siaran media massa (televisi, media sosial, koran, dan majalah berita) yang menggelar penggunaan teknologi mutakhir perang modern telah melupakan aspek destruktif dan bencana kemanusiaan yang ditimbulkan oleh peperangan. Dengan nada hampir sama, David Campbell (2006 [2001]) menyatakan bahwa teks-teks standard HI di Amerika Utara -terutama Realisme dan Neo-Realisme- yang menekankan pada pentingnya perebutan kekuasaan, pencapaian kepentingan nasional, penjagaan keamanan nasional, pemeliharaan kedaulatan negara, dan perimbangan kekuatan (*Balance of Power*) telah mendominasi batasan-batasan konsep-konsep baku HI sehingga menimbulkan kecurigaan terhadap motif politik dibalik dominasi teori-teori HI Amerika Utara.[4] Dalam tulisan tersebut Campbell menemukan bahwa inter-tekstualitas - yang menempatkan teks-teks standar sebagai sumber acuan / kebenaran - tidak saja mengabaikan "kebenaran ilmiah", tetapi juga berpotensi untuk ditunggangi motif politik

---

2 *Ibid.*, hlm. 9.

3 James Der Derian (2006 [2000]). '*Virtuous War/Virtual Theory*'. Dalam Stephen Chan dan Cerwyn Moore (ed.). '*Theories of International Relations Vol IV: Contemporary Reflexive Approaches in International Relations*'. London: SAGE, hlm. 211-214.

4 David Campbell (2006 [2001]). '*International Engagements: The Politics of North American International Relations Theory*'. Dalam Stephen Chan dan Cerwyn Moore (2006) (ed.). *Op cit.*, hlm. 230-235.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

suatu kelompok yang berambisi untuk mendominasi diskursus studi HI. Karena itu, posmodernisme menyarankan dekonstruksi terhadap konsep-konsep baku HI yang menyangkut pengungkapan berbagai konstruksi/asumsi artifisial yang terlanjur dipahami sebagai "kebenaran" dalam studi HI dan juga mendorong studi HI untuk lebih memperhitungkan suara-suara kaum marjinal yang ikut membentuk diskursus studi HI kontemporer.[5]

Untuk membahas bagaimana Posmodernisme berpengaruh dalam studi HI, Bab ini akan dipecah ke dalam beberapa bagian. Bagian pertama adalah pendahuluan yang membahas tentang kemunculan Posmodernisme dalam ilmu sosial dan studi Hubungan Internasional. Bagian kedua akan melihat kehadiran Posmodernisme sebagai gerakan intelektual yang menggugat berbagai aspek kehidupan modern dengan membahas trilogi Pierre Bourdieu, konsep hiper-realitas Jean Baudrillard, dan konsep *Power/Knowledge* Michel Faucault. Bagian ketiga membahas tentang kritik Posmodernisme terhadap logika positivisme yang menghasilkan teori-teori arus utama dalam studi HI. Posmodernisme merasa terganggu dengan produk positivisme yang terkontaminasi oleh beberapa unsur negatif seperti dominasi kaum elite (logosentrisme), ketergantungan pada teks-teks yang dutulis oleh pakar-pakar terakreditasi (intertekstualitas), dan pemaksaan kebenaran tunggal oleh para elite yang dianggap mumpuni (fundasionalisme). Bagian keempat akan membahas solusi yang ditawarkan Posmodernisme untuk mengatasi berbagai persoalan yang ditinggalkan modernitas dan logika positivistik.

Gugatan terhadap Modernitas

Kuatnya nuansa protes terhadap kemapanan yang dihasilkan oleh kehidupan modern yang membelenggu umat manusia pada kesadaran semu yang dipaksakan untuk dapat bertahan dalam kehidupan modern yang serba impersonal, rasional dan komersial telah melahirkan manusia-manusia modern yang kehilangan hakikat kemanusiaannya untuk bertenggang-rasa, berjiwa sosial, dan saling bekerja sama. Akibat tuntutan kehidupan modern, manusia akan memerangkap diri pada rutinitas kehidupan yang mengandung unsur impersonal (yang didasarkan pada hubungan transaksional), sifat rasional (selalu mengandalkan kalkulasi untung-rugi), dan pertimbangan komersial

5 C. Constantinou (1994). 'Diplomatic Representation, or, Who framed the Ambassadors?'. *Millenium*. Vol. 23 No. 1, hlm. 22-23.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

(upaya untuk mengukur segala sesuatu dengan uang). Dengan demikian, kehidupan modern telah memerangkap manusia dalam karakter yang diwarnai oleh tumpulnya kepekaan sosial, keinginan untuk mengeksploitasi sesama, dan perilaku yang egosentrik. Bias kehidupan modern ini dituliskan oleh kaum pemikir filsafat struktural Perancis seperti Pierre Bourdieu, Jean Baudrillard, Michel Faucault, dan Jacques Derrida di dalam berbagai karya tulis yang menginspirasi gerakan Posmodernisme. Bagian ini akan membahas keempat pemikir yang menginisiasi gerakan protes Posmodernisme.

Pierre Boudieu dan Konsep Trilogi (Habitus, Capital, dan Field)

Lahir di daerah terpencil di Barat Daya Perancis, Bourdieu dididik sebagai seorang ahli filsafat. Pada masa Perang Kemerdekaan di Aljazair, Bourdieu justru datang ke negara tersebut untuk menjadi seorang guru ilmu sosial di sebuah sekolah di Algiers. Pengalamannya di Aljazair membuat Bourdieu melirik sosiologi sebagai bidang kajian yang lebih menarik perhatian. Bahkan buku pertama yang ditulisnya pada pertengahan dekade 1960-an berjudul *Sociologie d'Algerie* (Sosiologi Aljazair). Sejak saat itu Bourdieu lebih menempatkan diri sebagai sosiolog. Karya-karyanya yang fenomenal menempatkan Bourdieu sebagai seseorang yang secara konsisten "menginvestigasi secara kritis kapitalisme modern".[6]

Hal yang memotivasi Bourdieu dalam menulis karya-karyanya tidak lain adalah ketidaksetaraan (*inequality*). Adalah kegundahannya terhadap ketidaksetaraan yang terjadi pada masyarakat sekelilingnya itu yang mendorong Bourdieu untuk menulis sejumlah karya dalam bentuk monograf. Pada akhir dekade 1960-an Bourdieu mengupas ketidaksetaraan di lingkungan lembaga kemahasiswaan di Perancis dalam esainya yang diberi judul *Les Heritiers*. Pengamatan kritisnya juga dialamatkan pada suasana kehidupan para dosen dalam karyanya yang berjudul *La Reproduction*. Kehidupan para guru besar yang penuh dengan intrik politik juga tidak luput dari pengamatannya yang kemudian dia tulis dengan judul *Homo Academicus*. Seni dan budaya pun tidak luput dari perhatian Bourdieu dalam sejumlah karyanya, antara lain, adalah *L'Amour de l'art*, *La Distinction* dan *Les Regles de l'art*. Sepanjang hidupnya Bourdieu dikenal sebagai pemikir yang menghadirkan trilogi – tidak sedikit juga sosiolog yang menyebutnya dengan istilah *holy trinity* –

6 Anonim. 'Pierre Bourdieu (1930-2002)'. *New Left Review*, No. 14.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

yang terdiri dari *habitus*, *capital*, dan *field*. Secara sederhana, "*habitus*" dapat didefinisikan sebagai "kumpulan prinsip-prinsip dan disposisi-disposisi yang mengintegrasikan pengalaman masa lalu, kelas, gender, lingkungan sosial, bidang pekerjaan, dan sebagainya yang membentuk praktik, perbuatan, dan representasi seseorang dalam berinteraksi dengan objek maupun subjek di sekelilingnya".[7] Sedangkan "*capital*", menurut Bourdieu adalah modal yang dapat dipergunakan sebagai senjata sekaligus pertaruhan oleh seseorang atau lembaga tertentu dalam perjuangan mereka untuk menguasai bidang-bidang tertentu. Jadi, "*capital*" hanya akan berfungsi bila ada "*field*" atau bidang-bidang tertentu di mana "*capital*" tersebut dapat dipergunakan.[8] Sedangkan "*field*" dapat diartikan sebagai "konfigurasi dari hubungan-hubungan objektif antar berbagai posisi".[9] Dalam setiap "*field*", menurut Bourdieu, berbagai pihak (terutama yang memiliki kekuasaan dan kapital) cenderung untuk memaksakan kehendak mereka sehingga konteks hubungan di dalam "*field*" dapat bernuansa dominasi dan subordinasi.[10]

Secara politis, Bourdieu selalu berada di lingkaran "kiri" (Left). Hal yang memotivasinya untuk selalu berpikir kritis dan cenderung radikal adalah ketimpangan dan ketidakadilan yang muncul dalam masyarakat kapitalis modern (Eropa dan Amerika Utara). Kekecewaannya pada pemerintahan Francois Mitterand (1980-an), di mana dia menyebutnya sehagai "kaum sosialis yang menerapkan neoliberalisme" membuat Bourdieu nyaris frustrasi. Hal itu pula yang mendorong Bourdieu untuk menjadi aktivis dan bahkan mendorong para ilmuwan sosial untuk ikut menjadi aktivis dengan melakukan protes terhadap globalisasi yang makin memperluas pengaruh neoliberalisme. Bahkan dalam beberapa kesempatan dia terjun langsung ke lapangan memberikan dukungan kepada gerakan pemogokan besar-besaran, terutama pada masa pemerintahan Juppe. Dia juga aktif berbicara dan mengorganisasi kekuatan oposisi terhadap pemerintahan Jospin. Pada akhir hidupnya, Bourdieu bahkan aktif mengecam korupsi dan juga sikap konformisme (kompromis) yang ditujukkan para intelektual Perancis melalui esai-esainya di berbagai media Perancis.[11]

7 Pierre Bourdieu (1999). '*The Logic of Practice*'. Cambridge: Polity Press, hlm. 53.
8 Pierre Bourdieu (2993). 'Some Properties of Field'. (Diterjemahkan oleh Richard Nice). *Sociology in Question*, Vol. 28 No. 2, hlm. 72-77.
9 Pierre Bourdieu dan Lois J. D. Wacquant (1992). '*An Invitation to Reflexive Sociology*'. Chicago: University of Chicago Press, hlm. 97.
10 *Ibid.*
11 Anonim. '*Pierre Bourdieu (1930-2002)*'. *Op cit.*

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

Satu hal yang menjadi obsesi Bourdieu hingga akhir hayatnya adalah bagaimana membentuk semacam gerakan sosial global yang menggabungkan berbagai kekuatan: kaum intelektual, aktivis lingkungan hidup, gerakan buruh, aktivis sayap kiri, dan berbagai eksponen gerakan anti-neoliberalisme lainnya. Bourdieu tidak terlalu puas dengan kaum intelektual dewasa ini yang menurutnya cenderung "mendiamkan" berbagai ketimpangan, ketidakadilan, penindasan dan kerusakan lingkungan akibat globalisasi dan ekspansi neoliberalisme. Menurutnya, intelektual yang memiliki integritas dan tanggung jawab seharusnya bersuara (*speak out*) meneriakkan segala macam persoalan yang pada akhirnya menimbulkan dehumanisasi umat manusia. Kekecewaan juga dialamatkan pada kaum sosialis. Menurut Bourdieu, di Eropa dan tempat-tempat lain di dunia, sosialisme telah makin bergerak ke kanan. Keberpihakan mereka pada kalangan yang tidak beruntung (*the disadvantaged*) telah bergeser kepada kalangan pemilik modal. Bahkan di beberapa tempat di Eropa gerakan buruh seolah-olah tunduk kepada globalisasi. Hal ini terungkap di dalam dialog panjang Bourdieu dengan seorang intelektual pemenang Hadiah Nobel dari Jerman, Gunther Grass.[12]

Kegundahan dan frustrasi pada diri Bourdieu sangat beralasan. Bagi dia, neoliberalisme yang menciptakan berbagai ketidakadilan dan ketimpangan akan semakin berbahaya, terutama karena dewasa ini di beberapa tempat di Eropa kebijakan ekonomi neoliberal justru diimplementasikan oleh pemerintahan yang mengklaim sebagai rezim sosialis. Rasa frustrasi Bourdieu tidak saja muncul karena kaum sosialis telah terkooptasi oleh neo-liberalisme, tetapi juga karena negara telah dianggapnya gagal untuk berperan sebagai penjaga (*watchdog*) bagi ideologi sosialisme. Dengan demikian mudah dipahami jika Bourdieu mulai berpaling pada kekuatan-kekuatan di luar negara untuk memainkan peran sebagai pengawal ideologi sosialis yang lebih menjamin pemerataan dan kesetaraan.

Kekuatan non-negara yang dilirik Bourdieu tidak lain adalah gerakan sosial pada skala global. Bagi Bourdieu, selama ini gerakan sosial seolah-olah dibatasi oleh sekat-sekat batas negara, sehingga gemanya sangat lemah, seperti dikatakannya:

12 Transkip dari dialog antara Pierre Bourdieu dan Gunther Grass dapat dilihat pada jurnal *New Left Review* No. 4, Maret-April 2002, hlm. 63-77.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

Dewasa ini sesungguhnya telah muncul berbagai tekanan agar kaum sosial demokrat yang sedang berkuasa sungguh-sungguh menerapkan wacana sosialis. Tetapi, patut disayangkan bahwa gerakan kritis semacam itu ternyata masih sangat lemah, terutama karena aktivitasnya masih terbatas pada tingkat nasional saja. Pertanyaannya sekarang adalah: bagaimana caranya agar kita dapat membentuk aliansi gerakan sosial transnasional yang menyuarakan wacana sosialis.[13]

Sangat terasa bahwa Bourdieu mengharapkan terwujudnya sebuah gerakan transnasionalyang mampu memberikan berbagai tekanan kepada neoliberalisme. Bagi dia, ketika negara – dan bahkan lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan internasional seperti *International Monetary Fund* (IMF), *The World Bank*, dan *World Trade Organization* (WTO) – sudah terkooptasi oleh neoliberalisme, maka jalan satu-satunya adalah mempersatukan para aktivis dan intelektual ke dalam suatu gerakan sosial transnasional yang memperjuangkan tegaknya wacana sosial-demokrat.

Ulasan di atas telah menggambarkan potret Bourdieu sebagai intelektual dan aktivis, pandangan Bourdieu tentang dampak globalisasi yang semakin memperbesar jarak antara pihak yang "kuat" dan yang "lemah", dan kebangkitan gerakan perlawanan terhadap globalisasi sejak dari "pertempuran di Seattle" (*Battle of Seattle*) di negara bagian Washington, Amerika Serikat, pada tahun 1999. Bagi banyak pengamat, *Battle of Seattle* merupakan awal dari kebangkitan masyarakat sipil global (*global civil society*) dan sekaligus juga awal dari kemunculan gerakan sosial global (*global social movement*) yang menggabungkan masyarakat dari berbagai elemen untuk bersama-sama memperjuangkan ketimpangan sosial, ketidakadilan global, kerusakan lingkungan hidup, penindasan terhadap kaum perempuan, dan keserakahan korporasi bisnis.

Jean Baudrillard dan Konsep Hiper-realitas

Jean Baudrillard adalah seorang sosiolog dan filsuf Perancis yang banyak menulis tentang media dan budaya kontemporer. Dengan menggunakan pentingnya komunikasi melalui simbol-simbol (semiotika) yang dikembangkan oleh Gilles Deleuze, Jean-Francois Lyotard, Michel Foucault, Jacques Derrida, dan Jacques Lacan, Baudrillard mencoba mengkritisi perilaku konsumeris masyarakat

13 Gunther Grass dan Pierre Bourdieu (2002). 'The Progressive Restoration: A Franco-German Dialogue'. *New Left Review* No. 14, hlm. 66.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

modern dalam kaitannya dengan peran media dan teknologi komunikasi dalam menghadirkan fakta-fakta sehingga membuat orang terbelenggu pada sikap-sikap konsumerisme. Di dalam karyanya *Simulacra and Simulation* (1981) Baudrillard menyatakan bahwa keingintahuan (*curiousness*) manusia modern dapat menjebak mereka ke dalam situasi "hiper-realitas" di mana pemahaman mereka terhadap sesuatu tidak lagi mencerminkan fakta yang sesungguhnya tetapi dibungkus oleh berbagai imajinasi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Dua unsur yang menurut Baudrillard dapat membentuk hiper-realitas: (1) simulasi: pencampuran antara "realitas" dan "representasi" sehingga orang cenderung melihat sesuatu sebagai model yang tidak mencerminkan realitas sesungguhnya; dan (2) simulacrum: imajinasi tentang sesuatu yang tidak selalu mewakili keadaan yang nyata.[14]

Dalam mengembangkan gagasan tentang hiperrealitas, Baudrillard menyatakan bahwa setiap objek memiliki empat macam nilai: (1) *Nilai fungsional (functional value)*, yakni penting atau tidaknya objek tertentu dinilai dari fungsinya sebagai alat, misalnya pakaian untuk melindungi tubuh, pensil untuk menulis dan seterusnya; (2) *Nilai tukar (exchange value)*, yakni harga suatu objek jika dikonversikan ke dalam nilai uang seperti misalnya harga seporsi makanan setara dengan gaji per jam seseorang, harga sebuah jam tangan setara dengan gaji seminggu, dan seterusnya; (3) *Nilai simbolik (symbolic value)*, yakni arti simbolik suatu objek yang dikaitkan dengan peristiwa tertentu seperti misalnya saja benda tertentu sebagai hadiah ulang tahun, hadiah kelulusan studi, hadiah pernikahan dan sebagainya mempunyai arti simbolik untuk mengingat peristiwa tertentu bagi penerimanya; dan (4) *Nilai penanda (sign value)*, yakni nilai yang menandai perbedaan dengan benda-benda serupa dan menentukan status pemiliknya seperti misalnya cincin berlian lebih bernilai dibanding dengan cincin biasa, jam tangan merek terkenal menunjukkan status sosial pemiliknya, dan seterusnya. Keempat macam nilai tersebut - terutama nilai simbolik dan nilai penanda - dapat membuat suatu objek menjadi sebuah komoditas yang cenderung ditampilkan sebagai hiper-realitas.

Sebuah contoh lain yang menunjukkan bagaimana hiper-realitas telah membius manusia modern sedemikian rupa sehingga melupakan fakta yang sesungguhnya adalah bagaimana manusia modern memandang Disneyland. Di dalam karyanya *Travels in Hyperreality* (1986), Umberto Eco menyatakan bahwa

14 Jean Baudrillard (1981). '*Simulacra and Simulation*'. Ann Arbor: University of Michigan Press, hlm. 41-42.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

Disneyland adalah contoh paling tepat tentang hiper-realitas. Sebagai tempat hiburan yang menampilkan tokoh-tokoh imajiner (Mickey Mouse, Donald Duck, Goofy, dan lain-lain), bangunan-bangunan istana dan dikombinasi dengan berbagai permainan telah membawa manusia modern ke alam fantasi. Dengan teknologi yang mereka kembangkan mereka mampu mengaburkan batas antara fakta dengan fantasi.[15] Pesona yang ditimbulkan oleh hiper-realitas Disneyland dapat diukur dari banyaknya pengunjung yang mengantri panjang di setiap pintu masuk Disneyland di Los Angeles dan Florida, Amerika Serikat, sehingga mendorong pemiliknya untuk membuka beberapa cabang di seluruh dunia seperti di Perancis, Hong Kong, dan Jepang. Bagi Baudrillard, Disneyland adalah suatu "dunia imajiner" yang dihadirkan sebagai hiperrealitas yang telah membius manusia modern untuk memuaskan imajinasi mereka dan membuatnya seolah-olah sebagai sesuatu yang nyata. Baudrillard menyadari bahwa lokasi Disneyland di Los Angeles bukanlah sesuatu yang nyata, tetapi merupakan sesuatu yang hiper-real. Mesin hiburan Disneyland telah mampu mencampuradukkan antara imajinasi, fiksi, dan kenyataan dengan cara melakukan "pengaburan realitas sehingga tidak lagi menjadi sebuah realitas".[16]

Dalam kaitannya dengan studi Hubungan Internasional, karya-karya para pemikir positivisme yang sangat menyukai pembuatan model-model untuk menjelaskan berbagai fenomena sosial seolah-olah mencerminkan upaya mereka yang mencoba menghadirkan fakta internasional sebagai hiperrealitas sehingga mendistorsi fakta sesungguhnya. Sebagaimana dikatakan James Der Derrian bahwa para pakar Hubungan Internasional yang sangat dipengaruhi positivisme cenderung menghadirkan perang – sebagai salah satu fenomena internasional – seolah-olah pameran senjata dengan teknologi paling mutakhir. Dalam Perang Teluk misalnya, kita dapat melihat bagaimana media massa berbicara panjang lebar mengenai bagaimana tank-tank dengan teknologi mutakhir milik Amerika Serikat mempecundangi tentara Irak. Dalam Perang di Balkan, kita juga bisa melihat bagaimana tentara NATO menghantam sasaran-sasaran di Serbia dengan menggunakan "bom pintar" (*smart bombs*).[17] Penggambaran semacam ini yang kemudian mendistorsi fakta karena mencampuradukkan antara realitas dan imajinasi yang kemudian menafikan esensi perang sebagai bencana kemanusiaan dan penderitaan.

15 Umberto Eco (1983). *'Travels in Hyperreality'*. New York: Harvest Book, hlm. 48.
16 Jean Baudrillard (1981). *Op cit.*, hlm.162-184.
17 James Der Derian (2000). 'Virtuous War / Virtual Theory'. *International Affairs*, Vol. 76 No. 4, hlm. 771-788.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

Michel Foucault dan Konsep Knowledge/Power

Michel Foucault adalah seorang filsuf dan sejarawan Perancis yang memfokuskan pada penelaahan tentang hubungan antara ilmu pengetahan (*knowledge*) dengan kekuasaan (*power*). Bagi Foucault, ada hubungan mutual antara ilmu pengetahuan dan kekuasaan. Di satu sisi, kekuasaan tumbuh dan berkembang atas dasar ilmu pengetahuan; di sisi lain, kekuasaan cenderung mereproduksi dan menciptakan kembali ilmu pengetahuan. Dengan demikian tampak bahwa ilmu pengetahuan tidak pernah bebas nilai (netral) karena ditentukan oleh besarnya kekuasaan. Foucault menyadari betapa sulitnya membantah kenyataan bahwa arah perkembangan ilmu pengetahuan bidang apa pun sangat ditentukan oleh sebuah institusi yang otoriter dan sentralistik. Maka berbeda dengan Jean-Paul Sartre yang menyatakan bahwa ilmu pengetahuan bersifat sentralistik dan menganut kebenaran tunggal, Foucault lebih menginginkan ilmu pegetahuan yang terdesentralisasi dan mengakui kebenaran majemuk.[18]

Foucault di dalam berbagai tulisannya menawarkan pemahaman tentang kekuasaan versi strukturalis Perancis bahwa selain kekuasaan itu berada di tangan segelintir orang berkuasa dan sejumlah kecil lembaga yang otoritatif, kekuasaan juga menyebar ke seluruh anggota masyarakat dengan menyentuh badan mereka, menentukan perilaku mereka, dan membentuk diskursus mereka dalam menjalani kehidupan sehari-hari.[19] Dalam kaitannya dengan ilmu pengetahuan, kekuasaan merupakan unsur terpenting dalam pembentukan ilmu pengetahuan. Dengan kata lain, pembentukan ilmu pengetahuan merupakan genealogi kekuasaan di mana power merupakan hasil konstruksi sosial dan lahir dari konteks historis tertentu. Historisasi kekuasaan inilah yang membuat semua atribut kekuasaan (karakteristik, pengaruh, dan bobotnya) menjadi milik periode sejarah tertentu. Dengan demikian kekuasaan tidak permanen karena dibatasi oleh konteks sejarah seperti halnya ilmu pengetahuan yang juga dinamis, berubah sesuai dengan konteks sejarah yang ada. Karena itu Foucault menawarkan dua cara memandang kekuasaan. Pertama, secara tradisional kekuasaan dipandang sebagai "arkeologi ilmu pengetahuan" (*archeology of knowledge*) yang datang dari kelompok elit dan menyebar ke seluruh masyarakat secara *top-down* dan memarjinalkan kekuasaan kaum lemah. Kedua, pada masyarakat modern terdapat proses terbalik yang disebut

18 Michel Foucault (1977), *'Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972-1977'*. New York: Pantheon Books, hlm. 110-114.

19 *Ibid.*, hlm. 56-58.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

"genealogi ilmu pengetahuan" (*genealogy of knowledge*) di mana kekuasaan-kekuasaan marjinal mulai mendapat tempat.

Merujuk pada landasan filosofisnya yang menekankan pada pentingnya keberpihakan dan menafikan netralitas, maka banyak yang menyatakan bahwa pemikiran Faoucault menjadi landasan berpikir Teori Kritis. Walaupun tidak memiliki keterkaitan dengan para pemikir Mazhab Frankfurt tentang Teori Kritis, tetapi landasan filosofis bahwa ilmu pengetahuan - yang sangat dipengaruhi oleh kekuasaan - tidak pernah bebas nilai menempatkan Foucault satu kubu dengan para penganut Teori Kritis dan Neo-Marxisme. Sementara itu pendekatan Foucault tentang seksualitas yang menyatakan bahwa identitas gender merupakan hasil konstruksi sosial yang nomenklaturnya dikaitkan dengan karakteristik tubuh seringkali menjadi dasar filosofis bagi kaum feminis untuk memperjuangkan kesetaraan gender. Situasi ini yang membuat banyak orang menyatakan bahwa Foucault adalah seorang feminis. Terlepas dari berbagai atribut yang dilekatkan pada Foucault, studi Hubungan Internasional dapat belajar tentang bagaimana keterkaitan antara perkembangan teori-teori Hubungan Internasional dan kekuasaan serta menyadari betapa pentingnya untuk mendengarkan pemikiran-pemikiran kaum marjinal dalam rangka memperkuat teori Hubungan Internasional.

Jacques Derrida dan Dekonstruksi

Jacques Derrida adalah filsuf Perancis kelahiran Aljazair yang memperkenalkan analisis semiotika untuk mengeksplorasi kesenjangan antara teks (*text*) dan maksud (*intention*) yang seringkali mengaburkan hasil penelitian. Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, Derrida mengusulkan teknik dekonstruksi dalam membaca sebuah teks, yakni tindakan untuk memahami teks dari dua sisi: (1) sisi sinkronik (*synchonic*), yakni apa yang dituliskan penulis seperti tertera dalam teks; dan (2) sisi diakronik (*dyachronic*) yakni maksud penulis yang tidak tampak dalam teks menyangkut sesuatu yang diinginkan oleh penulis. Dengan membaca teks melalui dua cara interpretasi semacam ini dapat memberikan perspektif yang lengkap terhadap kandungan sebuah teks, baik apa yang tertulis maupun yang diinginkan oleh penulis teks

Teknik dekonstruksi atau *double deconstructive reading* yang digagas Derrida ini tidak hanya membuka kesempatan bagi pemahaman lebih komprehensif terhadap sebuah teks tetapi juga membantu pembaca dalam mengidentifikasi kesewenang-wenangan (*arbritrariness*) yang seringkali

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

tersembunyi di dalam suatu teks. Dekonstruksi, menurut Derrida, muncul karena tiga hal penting: (1) Keinginan kuat manusia untuk selalu mengkritisi akal sehat manusia sebagaimana digambarkan dalam karya filsuf abad ke-18 Immanuel Kant *Critique of Pure Reason* (1922); (2) Keyakinan bahwa teks dapat hidup lebih lama dari sang penulisnya dan menjadi bagian dari lingkungan budaya penulis itu sendiri; dan (3) Dorongan untuk mengevaluasi dialektika klasik Barat yang bermakna pertentangan antara: realitas vs. fiksi, filsafat vs. puisi, pengakuan jujur (*revelation*) vs. alasan (*reason*), dan seterusnya. Ketiga kecenderungan inilah yang ada dalam pikiran setiap pembaca teks produk budaya modern sehingga mendorong penggunaan teknik dekonstruksi sebagaimana digagas Derrida. Teknik Dekonstruksi inilah yang membuat Derrida memberikan pengaruh besar dalam pemikiran ilmu sosial, khususnya di bidang ilmu hukum, sosiologi, filsafat, linguistik, dan sastra.

Dalam konteks studi Hubungan Internasional, kontribusi teknik dekonstruksi Derrida dapat dilihat pada karya-karya pemikir Hubungan Internasional posmodernis seperti Richard Ashley, R.B.J. Walker, dan James Der Derrian yang menghimbau para peminat studi HI untuk melihat secara kritis teks-teks standar Hubungan Internasional sebagaimana telah dilakukan kaum Feminis (lihat Bab 10 buku ini) dan para pemikir Teori Kritis (lihat Bab 7 buku ini). Baik pemikir Feminis maupun Teori Kritis cenderung memandang teks-teks standar HI dari sisi sinkronis dan diakronis yang kemudian menemukan bias-bias dan distorsi-distorsi pemikiran yang perlu disempurnakan.

Kritik terhadap Positivisme

Keberatan Posmodernisme terhadap modernitas yang dianggap secara sewenang-wenang membelenggu manusia dalam pola hidup hedonistik, komersial, asosial, dan konsumeris ternyata terbawa pula dalam mempersoalkan ilmu sosial modern yang berkarakter positivistik (pencarian hubungan kausalitas), empirisis (mengandalkan pada data empiris yang valid), dan model rasional-logis (pembuatan model yang logis-rasional). Karakter tersebut telah menjadi konsensus di kalangan para pakar bahwa ilmu sosial modern harus seperti itulah keadaannya. Konsensus itu, menurut Posmodernisme, tampak sangat rentan karena tidak relevan dengan pemenuhan kebutuhan manusia. Menurut Pauline Rosenau (1992), ada enam poin kritik Posmodernisme terhadap ilmu sosial modern.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

Pertama, ilmu sosial modern dianggap gagal memenuhi janjinya untuk menghasilkan suatu hasil yang dramatis sehingga memicu sikap sinis dari para ilmuwan dan masyarakat luas. Ambisi ilmu sosial modern untuk menghasilkan teori-teori yang sahih dan prediksi masa depan yang tepat tidak berhasil diwujudkan sehingga harapan yang meluap-luap berakhir dengan kekecewaan. Kedua, dalam banyak kasus ilmu sosial modern menjadi alat manipulasi dan penyalahgunaan oleh pemilik kekuasaan. Banyak kasus menunjukkan para penguasa memanipulasi ilmu sosial modern untuk memenuhi kepentingannya dengan mengorbankan prinsip keadilan dan realitas sosial. Ketiga, terdapat kesenjangan yang nyata antara bagaimana ilmu sosial seharusnya berfungsi dengan kenyataan yang ada. Hal ini membuat ilmu sosial modern tidak berhasil mempertahankan standard kualitasnya. Keempat, adanya pemahaman keliru bahwa ilmu sosial modern dapat memberikan solusi bagi semua permasalahan kemanusiaan pada abad modern ini. Pada kenyataannya saat ini banyak masalah sosial seperti kemiskinan, kekurangan pangan, degradasi lingkungan, pelanggaran Hak Asasi Manusia, penindasan, dan sebagainya tidak berhasil diselesaikan oleh ilmu sosial modern. Kelima, ilmu sosial modern tampak sengaja mengabaikan dimensi mistik dan metafisik eksistensi manusia karena ilmuwan sosial beranggapan bahwa kedua aspek tersebut bersifat trivial dan tidak layak diperhatikan. Hal ini mencerminkan bahwa ilmu sosial modern terbelenggu oleh empirisismelogis dan rasioalitas. Keenam, ilmu sosial modern kurang memberi tempat pada faktor normatif dan etik dalam aktivitas penelitian. Dalam hal ini, ilmu sosial modern terlalu menekankan pada hal-hal konkret dan kurang memperhatikan hal-hal abstrak.[20]

Berbagai poin keberatan yang dikemukakan oleh Posmodernisme mendorongnya untuk memberikan kritik substantif, yakni mempersoalkan dasar ontologis (bidang dan objek kajian), dasar epistemologis (bagaimana pengetahuan itu didapat atau metodologi), dan dasar aksiologis (bagaimana pengetahuan itu dipakai) ilmu sosial modern. Bagi pemikir Posmodernis, ilmu sosial modern tidak saja gagal memberikan solusi bagi berbagai permasalahan manusia, tetapi juga mengandung kelemahan substantif karena terkontaminasi oleh tiga hal: logosentrisme, intertekstualitas, dan fundasionalisme. Masing-masing poin tersebut akan dibahas secara lebih rinci di bawah ini.

20 Pauline Rosenau. *Op cit.*, hlm. 10.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

Logosentrime

Logosentrime adalah istilah yang dipakai oleh Jacques Derrida (1930-2004), seorang filsuf Perancis kelahiran Aljazair, yang di dalam karyanya *Of Gramatology* (1967) mencoba menganalisis hubungan antara pernyataan (*speech*) dengan pembuatan karya tulis (*writing*) dalam konteks lingusitik tertentu. Bagi Derrida, logosentrisme adalah suatu situasi di mana pernyataan (*speech*), bukan tulisan (*writing*), memberi makna dasar bagi komunikasi yang kita bangun. Logosentrisme memiliki nuansa etnosentris atau eksklusif jika terus-menerus dikomunikasikan secara berulang-ulang sehingga menjadi semacam "pemberi arti transendental" (*transcendental signifier*) yang menjadi penanda metafisik keberadaan kita (*methaphisics of presence*).

Dengan merujuk pada karya ahli linguistik Ferdinand de Sausure, Derrida menyatakan bahwa setiap objek mengandung dua aspek: (1) realitas (*reality*): kondisi faktual yang menunjukkan bahwa sesuatu itu ada; dan (2) penampilan (*appearance*): suatu representasi yang dibuat seseorang bahwa sesuatu itu memang ada. Demikian halnya dalam ilmu filsafat, setiap kata selalu dapat dibuat pembedaan atas "pernyataan lisan" (*oral statement*) yang mewakili realitas dengan "teks tertulis" (*written text*) yang mewakili penampilan atau representasi sesuatu. Kedua hal itu harus selalu disandingkan untuk mendeteksi otentisitas atau ketidakaslian sesuatu. Logosentrisme, menurut Derrida, adalah sebuah fenomena linguistik yang sering menjebak manusia modern yang cenderung memisahkan "pernyataan lisan" dari "teks tertulis"; dan pemihakan kepada "teks tertulis" yang dianggap lebih memberi pemahaman dapat mengarah pada penonjolan pada citra (*image*) dan menafikan otentisitas objek.

Dengan demikian, penulis yang piawai dalam merepresentasi sesuatu cenderung memiliki superioritas sehingga karya-karyanya dapat dipakai sebagai rujukan utama. Hal inilah yang menjadi ciri utama ilmu pengetahuan Barat modern yang perlu dipersoalkan. Sementara penulis kurang piawai dalam mengemas tulisannya - sekalipun pengetahuannya terhadap sesuatu sangat mendalam - tidak akan dianggap sebagai pakar yang kompeten di bidang tersebut sehingga karyanya pun berada dalam posisi marjinal, dan tidak akan pernah menjadi rujukan utama. Akibatnya banyak cabang ilmu pengetahuan hanya didominasi oleh sekelompok kecil elite yang membentuk arus utama, sementara suara-suara yang di luar - apalagi melawan - arus memiliki risiko pengabaian atau bahkan pengisolasian.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

Intertekstualitas

Ketika Ferdinand de Sausure memperkenalkan konsep "*intersubjectivity*" dalam dunia semiotika, Julia Kristeva (seorang filsuf dan novelis Perancis keturunan Bulgaria) mencoba menerapkannya di dalam karya-karya tekstual dengan memakai istilah "*intertextuality*" yang mengacu pada hubungan teks yang satu dengan teks-teks lainnya melalui pengutipan langsung, para frase, penerjemahan, parodi, ilustrasi, dan bahkan plagiarisme. Hubungan intertekstualitas ini didasari oleh berbagai tingkat hubungan: (1) aksidental: ketika dua atau lebih mengacu pada cerita yang sama secara kebetulan; (2) opsional: penulis ingin memperkuat argumennya dengan mengutip teks yang ditulis orang lain; dan (3) obligatori: penulis dihadapkan pada kewajiban untuk mengutip definisi konsep tertentu dari penulis yang dianggap sangat mumpuni.

Hubungan intertekstualitas semacam ini membuat setiap penulis karya studi Hubungan Internasional - terutama yang muncul belakangan - tidak pernah lepas dari teks-teks sebelumnya terutama teks-teks klasik seperti karya Edward H. Carr *The Twenty Years Crisis* (1919), H.J. Morgenthau *Politics Among Nations* (1948), Kenneth Waltz *Theory of International Politics* (1979), Norman Angell *The Great Illusion* (1911), dan lain-lain. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa para peneliti tidak bisa lepas dari "kewajiban" untuk mencantumkan teks-teks klasik terdahulu demi mendapat dukungan penguatan argumen, contoh ilustratif atau legitimasi tekstual. Bagi kaum Posmodernis hal ini tidak saja mengekang kebebasan seorang peneliti untuk memaksimalkan daya kreativitasnya tetapi juga memaksa peneliti untuk meneruskan tradisi atau perspektif yang dimulai oleh para pendahulunya. Dalam hal ini peneliti tidak benar-benar berpeluang membuka cakrawala baru bagi hasil penelitiannya, sebaliknya mereka seolah-olah harus patuh pada tradisi yang ada yakni mempertahankan atau mengembangkan perspektif yang sudah ada.

Foundasionalisme/Kebenaran Tunggal

Salah satu prinsip penting dalam penelitian positivistik adalah apa yang oleh filsuf Perancis Rene Descartes (1596-1650) disebut "*Foundationalism*", yakni keyakinan bahwa suatu pengetahuan harus didasarkan pada "keyakinan yang dapat dibenarkan" (*justified belief*) berupa kebenaran tunggal yang didukung oleh premis-premis yang tidak meragukan. Dengan demikian, para peneliti harus berlomba-lomba untuk mendapatkan *justified belief* terhadap hasil penelitiannya dalam rangka untuk membentuk kebenaran tunggal atau

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

kebenaran yang tidak dapat dibantah. Bagi kaum Posmodernis, pemberlakuan *Foundationalism* dalam ilmu pengetahuan berarti menerapkan kesewenang-wenangan untuk memaksa agar kita tunduk pada interpretasi sebagai kebenaran tunggal. Untuk itulah tokoh Posmodernis seperti Richard Rorti dan Jacques Derrida sangat mengkritisi *Foundationalism* dengan mengatakan validitas pengetahuan tertentu hanya dapat diuji dengan membandingkannya dengan pengetahuan-pengetahuan lainnya. Demikian halnya interpretasi yang benar tentang suatu peristiwa tertentu dengan membandingkannya dengan interpretasi-interpretasi lainnya.

Kelompok filsuf seperti Rorti, Derrida, Nietzsche, dan Foucault yang menolak mentah-mentah *Foundationalism* ini lazim dikenal sebagai kaum *Anti-foundationalism* atau *Anti-essentialism* atau *Non-foundationalism* yang pada intinya menolak prinsip yang mendukung adanya kebenaran tunggal. Sebagai kelompok yang memperjuangkan suara-suara kaum marjinal, kaum Posmodernis menolak kebenaran tunggal dengan alasan bahwa ilmu pengetahuan harus memberi tempat pada interpretasi majemuk, terutama interpretasi di luar arus utama. Dalam studi Hubungan Internasional prinsip *Anti-foundationalism* ini mendapat dukungan dari perspektif Teori Kritis dan Feminisme. Bagi perspektif Teori kritis, interpretasi Neo-Realisme bahwa politik internasional bersifat anarkis dan karena itu setiap negara harus memperjuangkan eksistensinya dengan segala cara adalah pemaksaan kebenaran tunggal. Demikian halnya kaum Feminis sangat berkeberatan dengan dominasi perspektif Realisme yang menyatakan bahwa politik internasional yang penuh dengan "perjuangan demi kekuasaan" sehingga negara perlu selalu bersiap-siap untuk berperang merupakan kebenaran tunggal yang dipaksakan. Mereka juga merasa terganggu dengan postulasi Realisme bahwa politik internasional membutuhkan negara yang berkarakter maskulin.

Karya-karya Berpengaruh HI Bernuansa Posmodernisme

Pada bagian ini akan dibahas beberapa karya pilihan yang sangat berpengaruh dalam mempopulerkan perspektif Posmodernisme di dalam studi Hubungan Internasional. Walaupun banyak karya-karya Posmodernis lainnya yang juga ikut mempopulerkan Posmodernisme di dalam studi Hubungan Internasional, tetapi kelima karya yang akan dibahas di bawah ini merupakan karya-karya yang mewakili berbagai nuansa di dalam Posmodernisme di dalam studi Hubungan

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

Internasional. Lima karya pilihan yang akan ditampilkan ringkasannya di sini adalah sebagai berikut:

- R.B.J. Walker (1993). '*Inside/Outside: International Relations as Political Theory*'. Cambridge: Cambridge University Press.
- James Der Derian (2000) 'Virtuous War/Virtual Theory'. *International Affairs*, Vol. 76 No.4, hlm. 771-788.
- Richard Ashley (1987). 'The Geopolitics of Geopolitical Space: Towrads a Critical Social Theory of Internaional Politics'. *Aternative* Vol. 12, hlm. 403-434.
- Michael J. Shapiro (1998). 'The Events of Discourse and the Ethics of Global Hospitality'. *Millenium*, Vol. 27 No. 3, hlm. 695-713.
- Roland Bleiker (2001). 'The Aesthetic Turn in International Political Theory'. *Millenium*, Vol. 30 No. 3, hlm. 509533.

R.B.J. Walker (1993). *Inside/Outside: International Relations as Political Theory. Cambridge: Cambridge University Press*

Karya pertama yang akan dibahas adalah sebuah buku karangan R.B.J. Walker yang memfokuskan pada aspek historisitas dan spasialitas teori-teori Hubungan Internasional. Bagi Rob Walker, teori yang dapat mengkritisi teori-teori formal Hubungan Internasional yang didominasi oleh Realisme dan Liberalisme adalah teori-teori politik yang mengandung aspek hitorisitas (*historicity*) dan spasialitas (*spaciality*). Dari sisi historisitas, teori politik mengandung tiga macam problematika yang layak didiskusikan. Problem pertama menyangkut interpretasi terhadap struktur dan proses politik internasional yang cenderung dilihat dari sudut pandang politik modern yang menjunjung tinggi kebenaran tunggal, menolak secara tegas keberadaan perspektif majemuk, dan meragukan keberadaan subjektivitas dalam penelitian ilmiah. Syarat-syarat keilmuan yang ditetapkan oleh budaya modern membuat pemahaman politik internasional-termasuk konsep-konsep baku seperti kedaulatan negara, batas teritorial, kekuasaan, perimbangan kekuatan, dan sebagainya - sangat bergantung pada perspektif modernitas. Problem kedua menyangkut kategori-kategori bagaimana perubahan historis harus dipahami sangat dipengaruhi oleh teori sosial-politik modern yang sangat menonjolkan progresivitas (*progresiveness*), pencerahan (*enlightenment*), universalisme (*universalism*), dan linearitas sejarah (*historical linearity*). Maka tidak mengherankan jika dalam penelitian politik internasional

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

diberlakukan syarat-syarat adanya progresivitas, pencerahan, universalisme, dan linearitas sejarah yang harus menjadi acuan bagi produk penelitian yang baik. Problem ketiga menyangkut bagaimana kondisi sosial politik modern menghadapi kritik permanen dari kelompok-kelompok yang mempertanyakan dominasi budaya modern dalam politik internasional kontemporer dengan cara mempertanyakan konsep-konsep baku seperti kedaulatan negara, kekuasaan, kepentingan nasional, integritas teritorial, dan sebagainya sebagai sesuatu yang bersifat relatif, tidak mutlak, dan multi interpretasi.[21]

Secara spasial, teori-teori Hubungan Internasional kontemporer tampak berada di persimpangan jalan (*disjuncture*) antara etika internasional dan hubungan antar negara berdasarkan kepentingan nasional. Dalam kondisi demikian, teori-teori Hubungan Internasional kontemporer - yang didominasi oleh Realisme dan Neorealisme - seolah-olah mengajarkan kepada para penstudi HI bahwa adagium "di dalam hubungan internasional tidak berlaku etika karena yang menjadi pertimbangan adalah kepentingan nasional" merupakan suatu kebenaran yang tidak dapat dibantah. Persoalan spasial semacam inilah yang menjadi perhatian utama R.B.J. Walker. Karena itu, Walker mengusulkan agar peminat studi HI mau bergerak di luar linearitas sejarah dengan mempertanyakan secara kritis konsep-konsep baku seperti kedaulatan, integritas teritorial, kekuasaan, kepentingan nasional, dan sebagainya. Dia pun menyarankan agar para peminat sstudi HI mau bergerak di luar spasialitas yang ada dengan memasukkan unsur etika dan moral di dalam pembahasannya.

James Der Derian (2000). 'Virtuous War/Virtual Theory'. *International Affairs*, Vol. 76 No. 4, hlm. 771-788.

Di dalam artikel ilmiah tersebut, Der Derian memperkenalkan konsep "Peperangan Virtual" (*Virtual War*) yang merepresentasikan peperangan secara virtual atau dari jarak jauh yang kini menjadi tren dalam mempersepsi peperangan, terutama di kalangan generasi muda. Dalam penelitiannya terhadap kalangan muda Israel, Der Derian menunjukkan bahwa mereka memahami peperangan secara virtual ibarat bermain *game* di layar komputer. Hal ini

21 R.B.J. Walker (199.3). *'Inside/Outside: International Relations as Political Theory'*. Cambridge: Cambridge University Press, hlm. 10-13.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

yang barangkali membuat mereka kurang sensitif terhadap penderitaan orang Palestina di Jalur Gaza yang acapkali menjadi sasaran pengeboman dan isolasi.

Distorsi pemahaman tentang peperangan rupanya seiring dengan perkembangan media televisi, media elektronik dan media sosial yang memuat hiruk-pikuk tentang peperangan dengan menonjolkan aspek teknologi mutakhir yang dipakai di dalam peperangan tersebut. Di dalam membahas perang di Balkan, berbagai media tersebut sangat mengekspos bagaimana penggunaan pesawat tempur generasi terbaru yang diproduksi oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa serta penggunaan Bom Pintar (*Smart Bombs*) yang bisa mengidentifikasi mana sasaran dan bukan sasaran. Di dalam kasus Perang Teluk, berbagai media menyuguhkan bagaimana kepiawaian tank dan kendaraan tempur generasi baru Amerika Serikat dalam menembus gurun pasir yang ganas untuk menyerang pasukan Irak.

Pendistorsian persepsi tentang peperangan yang terjadi akhir-akhir ini sekali lagi membuktikan alasan kekhawatiran Jean Baudrillard bahwa masyarakat modern cenderung sulit membedakan antara hal yang virtual dengan hal yang nyata karena teknologi modern telah membuat mereka kurang peka terhadap jarak, durasi kronologis, dan beda antara realitas dan virtualitas.[22] Dalam jangka panjang, pendistorsian persepsi tentang peran dapat menghilangkan kepekaan seseorang untuk melihatnya sebagai bencana kemanusiaan yang harus dihindari. Sebaliknya mereka akan menganggap peperangan sebagai arena untuk unjuk teknologi mesin perang paling mutakhir. Hal ini sungguh menyedihkan karena dapat memperkecil peluang untuk mewujudkan perdamaian dunia dan juga upaya untuk memperbesar peluang kerja sama internasional.

Richard Ashley (1987). 'The Geopolitics of Geopolitical Space: Towards a Critical Social Theory of Internaional Politics'. *Alternatives* Vol. 12, hlm. 403-434.

Di dalam tulisan ini Richard Ashley berbicara mengenai persoalan yang dihadapi oleh pakar Hubungan Internasional dalam menerapkan perspektif Teori Kritis ke dalam politik internasional. Berbeda dengan para pencetus Teori Kritis dalam sosiologi yang dimotori oleh para pemikir Mazhab Frankfurt di mana premis-premis yang diajukan lebih mudah dielaborasi dengan contoh-contoh yang diambil dari komunitas sosial yang ada. Sebaliknya dalam

22 James Der Derian (2006 [2000]). *Op cit.*, hlm. 214.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

politik internasional sulit bagi para pakar untuk merujuk pada fakta-fakta di dalam komunitas internasional yang sulit dilihat wujudnya, sehingga segala premis yang mengandung unsur kritis sulit dibuktikan dengan mengacu pada komunitas internasional yang terlihat abstrak dengan tingkat analisis yang luas. Dengan kata lain, para pakar Teori Kritis dalam studi Hubungan Internasional menghadapi tantangan dalam membuat predisposisi praktis yang menyangkut upaya mengidentifikasi secara tepat perilaku aktor internasional (negara maupun non-negara), perilaku umum, dan karakter spesifik mereka. Dengan latar belakang demikian, maka para pakar Teori Kritis dalam studi Hubungan Internasional tidak akan sanggup membuat konsep dasar yang berlaku universal seperti halnya Husserl berbicara mengenai "*lebenswelt*", Kuhn mengenai "*paradigm*", Habermas tentang "*background consensus*", atau Bourdieu tentang "*habitus*".[23]

Kesulitan ini disebabkan oleh ketidaknampakan "komunitas internasional" yang bisa kita amati seperti halnya kita bisa melihat eksistensi "komunitas sosial" dalam sosiologi. Dukungan empiris bagi premis Teori Kritis para sosiolog Mazhab Frankfurt datang dari komunitas sosial di Jerman pada masa Nazi Hitler yang mendorong orang untuk berpikir bahwa ilmu pengetahuan selayaknya diabdikan untuk kemaslahatan umat manusia bukan sebaliknya. Bagi Richard Ashley, hal ini tidak lain akibat kegagalan perspektif arus utama Realisme dalam mewujudkan suatu "Komunitas Politik Kekuasaan" (*the Community of Power Politics*") di dalam politik internasional.

Terlepas dari adanya kesulitan tersebut, studi Hubungan Internasional pernah melakukan analisis kritis sangat mendasar terhadap konsep "geopolitik" dalam politik internasional dengan menggunakan teknik *Double Deconstructive Reading* ala Jacques Derrida seperti yang telah dibahas pada bagian awal Bab ini. Menurut Ashley, dewasa ini "geopolitik" dalam politik internasional pasca Perang Dunia, dapat dibaca melalui dua cara pandang yang saling berlawanan. Cara pertama, geopolitik yang dibentuk oleh analisis liberal bahwa dunia kita sedang memasuki era "saling ketergantungan" (*interdependence*) yang akan membawa masyarakat dunia pada kerja sama saling menguntungkan. Ketika masyarakat dunia memasuki proses moderninasi yang mengharuskan pembangunan industri, alih teknologi, perluasan jaringan perdagangan internasional, dan

23 Richard K. Ashley (2006 [1987]). 'The Geopolitics and Geopolitical Space: Towards a Critical Social Theory in International Politics'. *Alternatives*, Vol. 12, dicetak kembali dalam Stephen Chan dan Cerwyn Moore (2006) (ed.) *Op cit.*, hlm. 1.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

penarikan modal asing mereka suka atu tidak harus melakukan kerja sama dengan negara lain, terutama di bidang ekonomi. Mengingat kebutuhan negara modern yang makin kompleks maka hampir semua negara harus saling bekerja sama untuk mendapat energi, bahan mentah dan pasar bagi produk-produk yang dihasilkannya. Cara pandang ini mengisyaratkan bahwa geopolitik yang paling masuk akal adalah yang mendorong masayarakat dunia untuk saling bekerja sama terutama di bidang ekonomi dan menghindari konflik dan peperangan dalam suasana saling ketergantungan.

Cara kedua, geopolitik yang dibentuk oleh analisis Neo-Marxis yang memandang bahwa situasi "saling ketergantungan" yang digagas oleh kaum Liberal tidak akan pernah tercipta. Bahkan sebaliknya, dengan tingkat kemampuan negara-negara yang sangat berbeda (terutama antara kelompok negara kaya di belahan bumi bagian Utara dengan kelompok negara miskin di belahan bumi bagian Selatan), maka geopolitik yang terjadi adalah hubungan asimetris yang eksploitatif. Dengan modal kelengkapan infrastruktur, ilmu pengetahuan, teknologi, dan keuangan yang berlimpah, dalam melakukan kerja sama ekonomi negara kaya dapat berkonsentrasi pada produksi barang-barang kapital yang memiliki *surplus value* tinggi; sedangkan dengan segala keterbatasan yang dimiliki negara miskin harus berkonsentrasi pada produksi barang-barang dengan teknologi rendah atau bahkan bahan mentah dengan *surplus value* rendah. Maka, yang bakal terjadi adalah relasi ketergantungan (*dependency*), di mana sistem dunia terbagi menjadi dua: kelompok negara "pusat" (*center*) yang kaya, dan kelompok negara "pinggiran" (*periphery*) yang miskin. Dalam relasi semacam ini, kelompok negara "pusat" cenderung makin kaya melalui proses eksploitasi masif terhadap kelompok negara "pinggiran" yang hanya mengandalkan pada ketersediaan bahan mentah dan ongkos pekerja yang murah.[24]

Walaupun evaluasi kritis terhadap fenomena internasional bukan hal yang mustahil, tetapi Richard Ashley masih meragukan apakah evaluasi kritis fenomena politik internasional dapat dilakukan secara optimal melalui perspektif posmodernisme. Ada beberapa alasan yang membatasi kita untuk melakukan evaluasi kritis terhadap fenomena politik internasional dari sudut pandang posmodernisme. Pertama, Realisme sebagai paradigma yang paling dominan dalam teori Hubungan Internasional tidak bisa benar-benar

24 *Ibid.*, hlm. 2-3.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

diperlakukan sebagai lawan (*opponent*) atau pihak eksternal karena premis-premis dasar Realisme mengenai "politik kekuasaan" dan "struktur anarkis dalam politik internasional" masih mendominasi narasi politik internasional. Bahkan para ahli sosiologi politik pun seperti Anthony Giddens, Charles Tilly, dan Theda Skocpol tidak pernah menafikan kebenaran premis Realisme walaupun mereka bersikap kritis. Kedua, pemahaman cara pandang alternatif seperti Teori Ketergantungan (*Dependency Theory*) dan Teori Sistem Dunia (*World System Theory*) tidak pernah mampu memberikan eksplanasi secara meyakinkan sebagaimana halnya Realisme menjelaskan tentang "politik kekuasaan" dan "politik internasional yang anarkis". Ketiga, cara pandang alternatif yang didasarkan pada analisis Neo-Marxis tidak memiliki dampak kebijakan-praktis (*practical policy impact*) tidak sekuat bagaimana Realisme telah menciptakan "negarawan Realis" (*Realist Statesmen*) yang melakukan praktik hubungan antar negara memakai premis-premis Realisme.[25] Namun demikian, terlepas dari berbagai hal tersebut di atas evaluasi kritis dalam politik internasional tetap dibutuhkan untuk mengeksplorasi cara pandang baru terhadap fenomena politik internasional di luar arus utama.

Michael J. Shapiro (1998). 'The Events of Discourse and the Ethics of Global Hospitality'. *Millenium*, Vol. 27 No. 3, hlm. 695-713.

Tulisan Michael J. Shapiro ini membahas tentang bagaimana diskursus (*discourse*) dalam studi Hubungan Internasional mengalami dinamika. Di dalam ilmu filsafat, para filsuf yang dianggap mumpuni seringkali dianggap sebagai pembuka jalan bagi pemikiran filsafat atau sebagai pembentuk "diskursus utama" (*master discourse*). Sebagai contoh Georg Wilhelm Friedrich Hegel yang mencetuskan pemikiran bahwa proses sejarah bergerak melalui suatu dialektika telah cukup membuatnya sebagai seorang pembentuk "diskursus utama" selama berabad-abad. Dalam studi Hubungan Internasional filsuf yang dapat disebut sebagai pembentuk "diskursus utama" adalah Immanuel Kant karena, menurut Shapiro, walaupun filsafat Kantian banyak dikritisi tetapi tetap mewariskan peninggalan (*legacy*) tentang Geografi Moral (*Moral Geographies*) yang mengatur tentang tata pergaulan antar bangsa. Kekuasaan yang dimiliki kaum filsuf erat berkaitan dengan "kekuasaan negara" (*state power*), sebagaimana dikatakan oleh Gilles Deleuze dan Felix Guattari (1987) bahwa:

25 *Ibid.*, hlm. 22-24.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

> Ketika filsafat mulai bertugas untuk memproduksi pengetahuan, dia dibekali dengan kekuasaan, izin, dan legitimasi doktrin yang dihasilkan oleh fakultas yang merupakan bagian dari kekuasaan negara. Secara akal sehat, keutuhan fakultas yang dibentuk oleh para pakar memiliki kekuasaan yang dapat dikatakan absolut.[26]

Kutipan di atas menunjukkan kepada kita bahwa para filsuf memiliki kekuasaan hampir tak terbatas yang diberikan oleh negara melalui fakultas tempat mereka beraktivitas memproduksi pengetahuan. Dalam konteks inilah Immanuel Kant meletakkan dasar filosofisnya untuk memperkuat "keramahtamahan global" (*global hospitality*) yang berpengaruh sejak abad ke-15 hingga abad ke-20. Hal penting yang dikedepankan oleh Kant adalah keniscayaan terjadinya perdamaian abadi (*perpetual peace*) dalam hubungan antar bangsa melalui tiga hal penting - yang lazim dikenal sebagai "Segitiga Kant" (*the Kantian Triangle*) - yang terdiri dari Demokrasi, Kerja sama Ekonomi, dan Organisasi Internasional.[27] Pada abad ke-17 pemikiran filosofis Kant mendapat dukungan dari perjanjian Westphalia 1648 yang memberi otoritas pada negara-bangsa untuk mengatur segala sesuatu yang berada di wilayah teritorialnya dan pemisahan agama dari politik. Pemikiran filsafat Kant dikuatkan dengan diskursus politik internasional pasca perjanjian Westphalia yang mensakralkan tiga elemen penting negara-bangsa, yakni: kedaulatan negara, integritas teritorial, dan identitas nasional yang harus terus dipelihara demi tegaknya perdamaian abadi.

Namun demikian era "keramahtamahan global" yang digagas oleh Kant mulai berkurang pengaruhnya ketika pada awal abad ke-20 para pemikir Realisme klasik mengeluarkan etika dan moralitas dari analisis politik international, melalui credo: "*There is no morality in international politics because morality can be seen as sign of weakness and incompetence*" sebagaimana dinyatakan oleh E.H. Carr dan H.J. Morgenthau. Realisme yang kemudian menjadi perspektif yang dominan, terutama sejak Perang Dunia Kedua hingga akhir Perang Dingin pada 1990, menjadi diskursus dan rujukan penting bagi penstudi Hubungan Internasional dalam menganalisis tentang peperangan dan perdamaian antar bangsa. Dapat dikatakan bahwa sejak 1930-an hingga 1990-

26 Giles Deleuze dan Felix Guattari (1987). '*A Thousand Plateus*'. Minneapolis: University of Minnesota Press, hlm.376 sebagaimana dikutip dalam Michael J. Shapiro (2006 [1998]). 'The Events of Discourse and Ethics of Global Hospitality'. *Millenium*, Vol. 27 No. 3. dalam Stephen Chan dan Cerwyn Moore (2006). *Op cit.*, hlm. 43.

27 Michael J. Shapiro (2006 [1998]). *Op cit.*, hlm. 50.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

an diskursus politik internasional tidak lagi merujuk pada "keramahtamahan global" sebagaimana digagas Immanuel Kant, melainkan lebih berbicara mengenai "perebutan kekuasaan" (*struggle for power*) dan "kesiagaan untuk berperang" (*preparedness for war*) dalam kondisi politik dunia yang anarkis.

Bagaimana diskursus Hubungan Internasional pada pasca 1990 setelah Perang Dingin berakhir? Pada era yang disebut Michael J. Shapiro sebagai diskursus Pasca-Kantian (*Post-Kantian Discourse*) ada upaya untuk mengembalikan unsur nilai dan etika ke dalam kajian politik internasional. Dengan merujuk pada karya Foucault, Shapiro menyatakan pentingnya melibatkan nilai dalam proses produksi sejarah karena tanpa mengacu pada nilai dan etika, sejarah akan ditentukan oleh kekuasaan. Dengan kata lain, bagaimana sejarah dipahami sangat tergantung pada sejumlah orang yang memiliki kekuasaan yang memproduksi sejarah melalui mekanisme komunikasi dan publisitas. Karena itu, sejalan dengan pemikiran Foucault, Shapiro menyatakan bahwa pemikiran Kantian tentang "pengetahuan dan legitimasi" (*knowledge and legitimation*) - yang dianggap tidak mencerminkan keadaan senyatanya - harus disubstitusi dengan "kekuasaan dan pemberlakuan" (*power and eventualization*) yang lebih mengungkapkan (*revealing*).[28]

Sejalan dengan pemikiran Foucault, tokoh posmodernisme lainnya Jean-Francois Lyotard menyatakan bahwa diskursus filosofis harus membantu kita dalam melakukan "penilaian reflektif" (*reflective judgement*). Penilaian reflektif di sini tidak dimaksudkan untuk mempertentangkan hukum-hukum atau premis-premis yang terkait dengan subjektivitas, melainkan sebuah upaya untuk mengakui hal-hal yang berbeda dan di luar kebiasaan, yang oleh Lyotard disebut dengan "*differend*" (situasi di luar kebiasaan). Dengan demikian, tampak bahwa Lyotard mengusulkan ketidakseragaman dalam bersikap terhadap fenomena atau peristiwa tertentu. Akibatnya, dalam politik internasional pun konsep-konsep yang dianggap sakral seperti kedaulatan negara, integritas teritorial, dan identitas nasional dapat dilakukan "penilaian reflektif". Maka, dapat dikatakan bahwa diskursus studi Hubungan Internasional Pasca-Kantian saat ini sangat dipengaruhi oleh pemikiran posmodernisme (yang diwakili oleh Michel Foucault dan Jean-Francois Lyotard) yang membuka kesempatan bagi munculnya pemahaman baru di luar kebiasaan (*differend*). Karena itu tidak mengherankan jika dalam studi Hubungan Internasional diskursus mengenai

28 *Ibid.*, hlm. 53.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

"intervensi kemanusiaan" mengalami perubahan dari yang tadinya dipersepsi sebagai "hak untuk mengintervensi" menjadi "kewajiban untuk melindungi" setelah banyak pakar mengusulkan pemahaman di luar kebiasaan terhadap ketiga konsep sakral negara-bangsa: kedaulatan negara, integritas teritorial, dan identitas nasional yang lebih fleksibel.

Roland Bleiker (2001). 'The Aesthetic Turn in International Political Theory'. *Millenium*, Vol. 30 No. 3, hlm. 509-533

Tulisan ini mencoba membahas tentang representasi peristiwa-peristiwa dalam studi Hubungan Internasional (konflik, peperangan, bencana kelaparan, konferensi tingkat tinggi, dan lain-lain) oleh media massa- yang menggabungkan unsur pengetahuan dan hiburan - telah mengakibatkan terjadinya penyimpangan metafora (*distorted metaphors*) yang tidak saja mengelabui publik tetapi juga membuat bingung para penstudi Hubungan Internasional. Para peminat studi Hubungan Internasional - yang merupakan ahli ilmu sosial yang memahami "fakta" tentang "dunia nyata" melalui upaya untuk membuat kesimpulan yang valid melalui serangkaian prosedur penelitian yang ketat - akan mengalami keterbatasan untuk mengklaim hasil penelitian mereka sungguh-sungguh otentik, apalagi jika mereka mengandalkan data dari media massa. Dalam situasi semacam ini, sekalipun para peminat studi Hubungan Internasional telah menerapkan metode saintifik mereka masih harus berjuang untuk menyatakan bahwa data yang mereka temukan merupakan temuan yang otentik akibat problematika representasi fakta dalam studi Hubungan Internasional.

Dalam tulisan ini Roland Bleiker mengusulkan pendekatan alternatif dalam penelitian Hubungan Internasional, yakni pendekatan "Estetik" (*Aesthetic Approach*) yang mengasumsikan bahwa kesenjangan antara representasi dan objek yang sedang diteliti merupakan fakta politik yang tidak bisa dipungkiri, sehingga sebuah karya dalam studi Hubungan Internasional harus dinilai berdasarkan nilai estetikanya. Ibarat sebuah lukisan, keindahan karya tersebut ditentukan oleh beberapa unsur estetik: sudut mana seorang peneliti (yang dapat disebut seniman) menyorot objeknya, teknik pewarnaannya, materi yang digunakan, *framing*-nya, goresan kuasnya, dan sebagainya. Berbeda dari Pendekatan Mimetik (yang mengandalkan pada model sebagai representasi sebuah objek) - pendekatan dominan dalam studi Hubungan Internasional yang dibawa oleh kaum saintifik - Pendekatan Estetik tidak berpretensi untuk

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

mengklaim bahwa objek yang ditampilkan peneliti (seniman) Hubungan Internasional sungguh-sungguh otentik.[29]

Hal yang memotivasi Roland Bleiker untuk mengagas Pendekatan Estetik dalam studi Hubungan Intemasional adalah rasa jengah terhadap dominasi Pendekatan Mimetik dalam kajian politik internasional. Bagi Bleiker, Pendekatan Mimetik yang memaksa orang untuk melihat fenomena politik internasional sebagai model hubungan kekuasaan (*power relations model*), model anarki tanpa kehadiran pemimpin dunia (*state of anarchy in the absence of world leaders model*), model perimbangan kekuasaan (*balance of power model*), dan sebagainya yang diusung oleh pakar Realisme dan Neo-Realisme seperti E. H. Carr, H. J. Morgenthau, Kenneth Waltz, James Rosenau, John Mearsheimmer, dan lain-lain tampak menafikan fakta bahwa ada kesenjangan antara model dengan objek, sehingga hubungan antara model yang mewakili (*the representation*) dengan objek yang diwakili (*the represented*) perlu dipersoalkan, sebagaimana dikatakan oleh Rainer Maria Rilke (sebagaimana dikutip Bleiker): "Kegilaan apa yang ada di otak mereka yang memaksa kita untuk menjelaskan tentang negara sesuai dengan apa yang mereka inginkan?".[30]

Usulan Bleiker tersebut merupakan bentuk dukungan bagi berbagai upaya sejak dekade 1980-an untuk menentang dominasi Pendekatan Mimetik yang dipelopori oleh kaum posmodernis yang meliputi dua gelombang. Gelombang pertama yang terjadi pada dekade 1980-an ketika sejumlah pemikir posmodernis mulai mempertanyakan pondasi positivisme dalam teori politik internasional yang secara tidak langsung berkontribusi terhadap reproduksi budaya kekerasan dan karakter maskulin negara yang ingin bertahan dalam sistem politik internasional yang anarkis. Gelombang kedua terjadi pada dekade 1990-an ketika sejumlah pemikir posmodernis mulai mengeksplorasi pendekatan-pendekatan yang mungkin dapat bermanfaat bagi perkembangan teori politik internasional dengan merujuk pada, misalnya, narasi puitis, gambar-gambar kartun, cerita fiksi, film sinematografi, dan sebagainya yang juga merepresentasi objek atau peristiwa tertentu dengan mengedepankan unsur estetika bukan otentisitas. Usulan Bleiker dapat dilihat dalam konteks ini, terutama kritik posmodernis terhadap positivisme pada gelombang kedua.

29 Ronald Bleiker (2006 [2001]). 'The Aesthetic Turn in International Political Theory'. *Millenium*, Vol. 30 No. 3 dalam Stephen Chan dan Cerwyn Moore (2006) (ed.). *Op cit.*, hlm. 299-300.

30 *Ibid.*, hlm. 298.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

Apa poin penting dari gagasan Ronald Bleiker yang dapat kita diskusikan? Dari apa yang disebutkan oleh Bleiker dalam tulisannya ini, barangkali kita mendapat tiga hal penting. Pertama, kesadaran bahwa representasi adalah suatu problematika dalam studi Hubungan Internasional. Dalam studi ini tidak akan pernah ada representasi, sekalipun telah menerapkan teknik analisis empiris yang paling sistematis dan canggih sekalipun, yang sungguh-sungguh identik dengan objek yang direpresentasi. Karena itu, baik Pendekatan Mimetik maupun Pendekatan Estetik akan selalu menghadapi masalah representasi. Hanya saja dengan mengadopsi Pendekatan Estetik, para peminat studi Hubungan Internasional dapat terhibur dengan penilaian orang terhadap karyanya dari sisi estetika. Kedua, berkaitan dengan poin pertama, peminat studi Hubungan Internasional mendapat pelajaran penting untuk selalu bersikap rendah hati (*modest*) dengan tidak mengklaim bahwa pengetahuannya tentang politik internasional adalah yang paling komprehensif dan benar. Jauh dari itu, kita hanya dapat mengklaim bahwa pengetahuan kita tentang politik internasional adalah interpretasi kita tentang fenomena tersebut. Ketiga, dengan mengakui bahwa representasi objek mengandung kesenjangan antara model yang direpresentasikan (*the representation*) dan objek yang direpresentasikan (*the represented*) berarti kita membuka kesempatan seluas-luasnya bagi upaya memperluas pengetahuan tentang politik internasional. Pengakuan terhadap perbedaan antara *the representation* dan *the represented* secara otomatis membuka ruang bagi berbagai interpretasi. Maka, perluasan pengetahuan di sini seharusnya dipahami tidak sekadar sebagai penambahan lapisan-lapisan interpretasi baru di luar interpretasi dominan, tetapi sebagai multi-interpretasi dari berbagai sudut pandang yang memiliki kekuatan estetik masing-masing.

Kesimpulan

Bab ini telah membahas bagaimana posmodernisme – sebagai pendekatan yang muncul dari ilmu linguistik, kritik seni, dan sosiologi – mulai merambah ke dalam studi Hubungan Internasional. Dalam sosiologi, pemikir posmodernis merasa jengah dengan pengaruh modernisme yang dianggap telah memanipulasi masyarakat sedemikian rupa sehingga perlu gerakan massal yang mengkritisi dominasi modernisme. Untuk kepentingan itu muncul-lah tokoh-tokoh kritis seperti Pierre Bourdieu dengan konsep trilogi-nya, Jean Baudrillard dengan ide hiper-realitas-nya, dan Michel Foucault dengan gagasan *Power/Knowledge*-nya.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

Di bidang ilmu pengetahuan, modernisme merambah bidang keilmuan melalui pendekatan positivistik. Bagi pemikir posmodernis, ilmu pengetahuan produk positivisme yang mendominasi dunia akademik bersalah karena tidak memberi kebebasan bagi seseorang untuk menghasilkan karya yang mencerminkan kreasinya. Mereka dibebani oleh kewajiban untuk mengikuti prosedur yang ada, menggunakan konsep dan definisi yang dianggap baku, mempercayai kebenaran tunggal, dan merujuk pada teks-teks terdahulu yang ditulis oleh pakar terakreditasi. Tidak mengherankan jika karya ilmiah positivistik tidak lebih dari sekadar upaya untuk menambah dan mengurangi karya-karya sebelumnya. Kaum pomodernis juga menyatakan bahwa pemujaan pada kebenaran tunggal membuat produk ilmu pengetahuan tampak sengaja mengabaikan suara-suara dari kaum marjinal (kaum miskin, kelompok minoritas, dan perempuan). Studi Hubungan Internasional pun tidak bisa bebas dari belenggu ini. Karena itu, sebagaimana telah dibahas pada Bab ini, pemikir posmodernis dalam studi Hubungan Internasional mengusulkan perbaikan melalui beberapa cara seperti mempersoalkan historisitas dan spasialitas sebagaimana digagas oleh R.B.J. Walker, melakukan kajian kritis dengan teknik *Double Deconstructive Reading* seperti dibahas oleh Richard K. Ashley, menetapkan batas antara yang "virtual" dan yang "real" sebagaimana dibahas Michael J. Shapiro, dan mempersoalkan representasi objek seperti dinyatakan oleh Roland Bleiker.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

BAB 12

KONSTRUKTIVISME: PENTINGNYA NORMA, KEPENTINGAN, IDENTITAS, DAN INTENSI DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL

Pengantar

Gugatan lain terhadap teori-teori arus utama yang tidak kalah sengitnya datang dari para pemikir Konstruktivisme. Tokoh Konstruktivis pertama yang mencoba untuk mempersoalkan keterbatasan dan kelemahan epistemologis teori-teori arus utama HI yang mengandalkan pada rasionalime aktor adalah Friedrich Kratochwil. Bagi Kratochwil, konstruksi hidup bersama dalam komunitas internasional adalah sebuah "proses pembelajaran" (*learning process*) interaksi antar subjek yang dibentuk oleh identitas (*identity*), kepentingan (*interests*), nilai-nilai (*values*) dan maksud (*intention*) yang membentuk pola-pola hubungan tertentu sebagai "sahabat" (*friends*) atau "musuh" (*enemies*) sebagaimana dituliskan dalam karyanya berjudul *Rules, Norms, and Decisions: On the Conditions of Practical and Legal Reasoning in International Relations and Domestic Affairs.*

Jadi tidak seperti Realisme yang meyakini bahwa hubungan antar-bangsa dibentuk oleh kebutuhan untuk memenuhi kepetingan semata, Konstruktivisme melihat pola interaksi yang dibentuk oleh beberapa unsur lain seperti norma, identitas, intensi dan bahasa yang menjadi bagian penting dari proses historis hubungan antar subjek.[1] Karya Kratochwil tersebut disambut baik oleh para pemikir HI karena dianggap mengandung inisi untuk menginterogasi kecenderungan dalam studi HI untuk "mengobjektifkan" (*objectify*) pemikiran-pemikiran, ide-ide dan kepentingan subjek demi keperluan penelitian. Bahkan dalam pembahasannya tentang Kratochwil, Martin Griffith, *et al.* menyatakan

1 Friedrich Kratochwil (1989). '*Rules, Norms, and Decisions: On the Conditions of Practical and Legal Reasoning in International Relations and Domestic Affairs*'. Cambridge: Cambridge University Press, hlm. 20-25.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

bahwa: "Jika Robert Keohane sering dianggap sebagai "penjaga utama" (*principal gate-keeper*) teori-teori arus utama HI, maka Kratochwil dapat dianggap sebagai "penjaga utama" (*principal gate-keeper*) pendekatan reflektivis di luar arus utama teori HI yang mempertanyakan aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis teori-teori arus utama".[2]

Pemikir Jerman lainnya yang ikut membangun teori Konstruktivis adalah Nicolas Onuf. Di dalam bukunya berjudul *World of Our Making*, Onuf menyatakan bahwa pemikiran Konstruktivis dipengaruhi oleh '*The Linguistic Turn*' setidaknya menyangkut tiga hal. Pertama, simbol-simbol linguistik (bahasa) memiliki fungsi konstitutif, yakni apa yang kita bicarakan dan ditangkap pihak lain membentuk dunia sebagaimana kita persepsikan. Kedua, perkataan (*speech act*) dan berbagai turunannya berupa kebijakan dan aturan merupakan media konstruksi sosial sehingga menempatkan manusia sebagai agen dalam penggunaan simbol-simbol linguistik. Ketiga, sebagai media, bahasa mentransformasi berbagai materi yang ada (*available materials*) menjadi sumber daya (*resources*) sehingga berpotensi menciptakan asimetri dalam hal kontrol dan distribusi informasi untuk dimanfaatkan masing-masing subjek. Situasi ini yang sering kita jumpai dalam masyarakat internasional.[3] Kontribusi Onuf bagi pemikiran Konstruktivis adalah pentingnya simbol-simbol linguistik (bahasa) sebagai media dalam membentuk persepsi hubungan antar subjek yang dapat membentuk "pertemanan" atau "permusuhan", dan sekaligus juga mempopulerkan istilah "Konstruktivisme" sebagai salah satu perspektif reflektivis dalam studi HI.

Pemikiran Konstruktivis, yang ramai diperbincangkan sebagai pemikiran alternatif di luar teori-teori arus utama Hl, mulai berkembang di luar lingkaran akademis Eropa ketika Alexander Wendt - pakar HI Amerika Serikat kelahiran Mainz, Jerman - menyatakan adanya transformasi sistem internasional dari sistem Hobbesian yang bernuansa "konflik/peperangan"[4] ke

2 Martin Griffith, Steven C. Roach, dan M. Scott Solomon (2009). '*Fifty Key Thinkers in International Relations*'. London: Routledge, hlm. 126.

3 Nicolas Onuf (1989). '*World of Our Making: Rules and Rule in Social Theory and International Relations*'. Columhia: University of South Carolina Press, hlm. 18-23.

4 Sistem Hobbesian diperkenalkan oleh Wendt untuk merujuk pada sistem "*power politics*" yang dikembangkan dari pemikiran Thomas Hobbes dan Nicolo Machiavelli yang mengacu pada konflik/peperangan sebagai sarana penyelesaian persoalan.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

sistem Lockean yang bernuansa "rivalitas/persaingan",[5] dan ke sistem Kantian yang bernuansa "persahabatan/kerja sama".[6]

Manakala sistem Hobbesian yang penuh konflik dan peperangan telah punah sejalan dengan munculnya peradaban modern yang lebih memberi tempat bagi kerja sama saling menguntungkan, maka sistem yang patut mendapat perhatian adalah sistem Lockean (rivalitas) dan sistem Kantian (kerja sama). Maka, dinamika hubungan internasional kontemporer selalu berwujud perubahan dari sistem Lockean ke Kantian dan sebaliknya. Dalam praktiknya perubahan dari sistem Lockean ke sistem Kantian lebih sering terjadi karena itu patut mendapat perhatian lebih karena dapat menjelaskan banyak hal penting yang tidak dijelaskan oleh teori-teori arus utama HI.[7]

Menurut Wendt, transformasi dari sistem "rivalitas" ala John Locke ke sistem "persahabatan/kerja sama" ala Immanuel Kant dapat dimungkinkan dengan adanya "tiga variabel utama" (*three master variables*), yakni: (1) saling ketergantungan (*interdependence*) yang merekatkan negara-negara dalam kerja sama saling menguntungkan di atas segala-galanya; (2) perasaan sepenanggungan (*common fate*) yang membentuk semacam solidaritas di tingkat regional dan global; dan (3) kesamaan identitas (*homogeneity*) yang mendorong negara-negara untuk saling memahami dan menerima perbedaan.[8] Maka, tidak seperti argumen Neo-Realisme bahwa kondisi anarki memhuat negara harus bertindak secara mandiri (*self-help*) untuk memperjuangkan keselamatan masing-masing, ketiga variabel utama – *interdependence, common fate*, dan *homogeneity* – inilah yang menurut Wendt lebih menentukan apakah suatu negara menjadi "rival" atau "kawan" bagi negara lain untuk kemudian menjalin aksi-aksi bersama.[9] Ketiadaan ketiga variabel utama akibat kurangnya intensitas hubungan, komunikasi yang tidak lancar, dan ketidakselarasan intensi, dapat mengakibatkan suatu negara menganggap negara lain sebagai rivalnya. Logika ini dapat memberikan jawaban terhadap pertanyaan mengapa pada masa Perang Dingin Amerika Serikat tidak merasa terancam dengan penguatan militer

5 Sistem Lockean dikembangkan dari pemikiran John Locke yang merujuk pada fenomena persaingan antar subjek yang dapat diselesaikan secara damai atau kekerasan.

6 Sistem Kantian dikaitkan dengan filsafat Immanuel Kant yang menekankan pada persahabatan dan kerja sama sebagai cara yang paling diinginkan dalam hubungan antar bangsa.

7 Alexander Wendt (1999). '*Social Theory of International Politics*'. Cambridge: Cambridge University Press, hlm. 335-339.

8 *Ibid.*, hlm. 347-348.

9 Hidemi Suganami (2011). '*Wendt, IR, and Philosophy: A Critique*', Dalam Stefano Guzzini dan Anna Leander (ed.). '*Constructivism and International Relations*'. London: Routledge, hlm. 58-59.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

tetangganya di Utara, Kanada, tetapi merasa terancam dengan penguatan militer Uni Soviet, daripada jawaban ala Neo-Realisme yang menekankan pada konsep perimbangan kekuatan (*Balance of Power*). Seolah-olah menegaskan pemikiran Kratochwil dan Onuf, Alexander Wendt menyatakan bahwa unsur-unsur identitas sosial, intensi, kepentingan, dan bahasa dapat menentukan apakah suatu negara menjalin "permusuhan" atau "persahabatan" dengan negara lain.[10]

Tampak bahwa para pemikir Konstruktivis mencoba mengingatkan kita bahwa studi HI tidak hanya kajian tentang bagaimana teori-teori arus utama - terutama neo-Realisme sebagai produk positivisme yang paling dominan - menjelaskan berbagai fenomena internasional, tetapi studi HI seharusnya juga memberi peluang kepada teori-teori kontemplatif atau "reflektivis" untuk memberikan eksplanasi mengapa permusuhan dan persahabatan dalam hubungan antar-bangsa dapat terjadi. Jika Neo-Realisme lebih menekankan pada struktur anarki dan distribusi kekuasaan sebagai faktor yang menentukan karakter hubungan antar-negara, di mana anarki akan mendorong sikap saling bermusuhan sementara perimbangan kekuatan (*Balance of Power*) dapat menciptakan sikap menahan diri untuk tidak saling menyerang, maka Konstruktivisme lebih melihat pada masalah identitas budaya, intensi (maksud), dan kepentingan yang dikomunikasikan melalui simbol-simhol linguistik (bahasa) sebagai faktor penentu apakah suatu negara menganggap negara lain sebagai "kawan" atau "lawan". Dengan demikian, kita dapat mernperoleh penjelasan berbeda mengenai sikap keberatan Amerika Serikat dan sejumlah negara Barat lainnya terhadap pengembangan teknologi nuklir Iran. Bagi Neo-Realisme, keberatan Amerika Serikat didasarkan pada pertimbangan bahwa kepemilikan nuklir oleh Iran akan merusak "*Balance of Power*" di Timur Tengah; sedangkan bagi Konstruktivisme, keberatan Amerika Serikat merupakan akibat dari tidak adanya afinitas identitas dan kurangnya interaksi simbolik yang membuat Amerika Serikat tidak mengetahui dengan jelas maksud (*intention*) dan kepentingan (*interest*) Iran sehingga Amerika Serikat cenderung memandang Iran sebagai "rival" bukannya "kawan".[11]

10 Alexander Wendt (1992). 'Anarchy is What Stares Make of It: Social Construction of Power Politics'. *International Organization*, Vol. 46 No. 2, hlm. 397-400.

11 Julian Dawson (2011). *'A Constructivist Approach to the US-Iranian Nuclear Problem'*. Tesis Master di Strategic Studies, University of Calgary, Kanada, hlm. 90-106.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

Aspek-aspek Penting Konstruktivisme

Untuk mendapat pemahaman lebih mendalam tentang Konstruktivisme, barangkali tidak berlebihan untuk membahas apa persepsi para pakar HI tentang pendekatan ini dan juga konsep-konsep apa saja yang merupakan penanda bagi Konstruktivisme. Dari asal-usulnya banyak kalangan meyakini bahwa Konstruktivisme adalah pendekatan dalam studi HI yang berakar dari peristiwa "pembelokan linguistik" (*the linguistic turn*) dalam ilmu filsafat yang digagas oleh Richard Rorti sebagaimana telah dibahas pada Bab 9 buku ini. Namun tidak sedikit pula kalangan yang menuduh Konstruktivisme sebagai penjelmaan baru dari perspektif Liberal-Institusionalisme dengan penampilan berbau post-strukturalis.[12] Terlepas dari kontroversi tersebut, Konstruktivisme saat ini dikenal luas justru karena posisinya yang sedikit ambigu dan konsep-konsep baru yang ditawarkannya untuk tidak saja memberikan pemahaman baru terhadap fenomena internasional melainkan juga memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan mendasar yang tidak mampu dijawab oleh teori-teori arus utama, seperti: mengapa pada masa Perang Dingin penguatan militer Inggris dan Kanada bukan merupakan ancaman bagi Amerika Serikat, sedangkan penguatan militer Uni Soviet dan Kuba merupakan ancaman bagi Amerika Serikat? Atau mengapa Amerika Serikat curiga terhadap pengembangan teknologi nuklir untuk tujuan damai oleh Iran pada masa pemerintahan pemimpin garis keras Ahmadinejad, tetapi Amerika Serikat bersikap melunak ketika Iran dipimpin oleh pemimpin moderat Hassan Rouhani, sehingga membatalkan sanksi terhadap Iran?

Pendekatan "Jalan Tengah" (Middle Ground)

Dari apa yang telah kita pelajari tentang Konstruktivisme, dapat kita simpulkan bahwa pendekatan ini merupakan "jalan tengah" antara pendekatan rasionalis dan post-strukturalis dalam studi HI, suatu posisi yang kurang lebih sama dengan posisi mazhab Inggris (*the English School*) yang telah dibahas pada Bab 6 buku ini. Posisi "jalan tengah" ini dapat dilihat dari dasar filosofis pendekatan Konstruktivisme itu sendiri. Dengan mengusung dasar ontologi *inter-subjective* (antar-subjek), penekanan pada pentingnya norma-norma, signifikansi agen-agen sosial (*social agents*), dan pengembangan identitas

12 KM. Fierke (2013). '*Constructivism*', dalam Tim Dunne, Milja Kurki, dan Steve Smith (ed.). '*International Relations Theories: Discipline and Diversity Edisi Ketiga*'. Oxford: Oxford University Press, hlm. 194.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

secara timbal balik (*mutual constitution of identities*) Konstruktivisme dapat dikatakan memiliki landasan filosofis yang post-strukturalis atau post-modernis. Namun demikian, pengakuan terhadap pentingnya pengujian hipotesis, penekanan pada kausalitas, kebenaran *inter-subjective*, dan klaim tentang dasar "naturalis" bagi ilmu pengetahuan telah menempatkan Konstruktivisme pada kubu positivisme. Bagi Peter J. Katzenstein, Robert Keohane, dan Stephen Krasner (1998), kecenderungan Konstruktivisme untuk menerima premis kaum positivis tidak lebih dari upaya kaum Konstruktivis untuk memperoleh legitimasi dan dukungan dalam rangka untuk memperoleh tempat yang layak dalam khazanah studi HI yang didominasi oleh kaum saintifik, terutama di Amerika Serikat.[13] Dengan demikian tampak bahwa sikap ambigu inilah yang menciptakan kesan bagi banyak kalangan bahwa Konstruktivisme adalah pendekatan "jalan tengah" dalam studi HI untuk membuat semua kalangan tidak berkeberatan untuk memberinya tempat yang layak.

Pendekatan atau Teori

Dasar ontologis/epistemologis yang telah disinggung di atas pada gilirannya mendorong kita untuk bertanya: apakah Konstruktivisme merupakan suatu "pendekatan" atau "teori"? Dalam kaitan dengan pertanyaan tersebut, salah satu pencetus Konstruktivisme Nicolas Onuf (1989) menyatakan secara eksplisit bahwa Konstruktivisme bukanlah teori, melainkan suatu cara untuk mempelajari hubungan sosial (*social relations*).[14] Dengan nada yang sangat berbeda, pencetus Konstruktivisme lainnya Alexander Wendt (1999) menyatakan dalam bukunya bahwa dia berupaya untuk membangun sebuah teori Konstruktivis yang berasumsi bahwa hampir semua fenomena internasional: diplomasi, peperangan, perdamaian, dan sebagainya adalah merupakan konstruksi sosial buatan manusia. Karena merupakan produk manusia, maka semua peristiwa tersebut dapat dibuat dan dihilangkan jika manusia berkenan melakukannya.[15]

Jika kita mengikuti pendapat Wendt bahwa Konstruktivisme merupakan sebuah teori, maka dalam konteks studi HI mau tidak mau kita harus membandingkannya dengan teori HI yang sudah lebih mapan, yakni Realisme dan Neo-realisme yang sebagai sebuah teori substantif telah teruji

13 Peter J. Katzenstein, Robert O. Keohane, dan Stephen D. Krasner (1998). 'International Organization and the Study of World Politics', *International Organization*, Vol. 52 No. 4, hlm. 683.
14 Nicolas Onuf (1989). *Op cit.*, hlm. 1.
15 Alexander Wendt (1999). *Op cit.*, hlm. 6-8.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

validitasnya, baik secara akademik maupun praktik politik. Realisme klasik yang berasumsi bahwa hakikat manusia yang agresif akan menciptakan politik kekuasaan (*power politics*) yang diwarnai oleh perjuangan untuk kekuasaan (*struggle for power*) telah teruji validitasnya ketika kita melihat hampir semua negara di dunia terjebak pada politik kekuasaan. Begitu pula ketika Kenneth Waltz memperkenalkan Neo-realisme dengan argumennya yang terkenal tentang 3 peringkat analisis untuk melihat perilaku negara: (1) *first image* (peringkat individual) bahwa hakikat manusia yang agresif yang membuat negara cenderung terlibat konflik satu sama lain; (2) *second image* (peringkat nasional) bahwa negara bisa memulai peperangan karena alasan domestik (untuk memuaskan para pendukung pemerintahan, untuk memindahkan konflik domestik ke luar, untuk memperoleh sumberdaya alam, untuk memperluas daerah kekuasaan, dan sebagainya; dan (3) *third image* (peringkat internasional) bahwa peperangan dapat terjadi karena tidak adanya perimbangan kekuasaan di dunia di mana negara yang lebih kuat (secara ekonomi dan militer) cenderung menyerang negara yang lebih lemah demi perluasan daerah pengaruh (*sphere of influence*), perebutan sumberdaya alam, penaklukan, dan pendudukan.[16]

Konstruktivisme belum mampu menghasilkan argumen substantif seperti yang dilakukan oleh Realisme dan Neo-realisme. Karena itu kita tidak serta merta sependapat dengan Alexander Wendt bahwa Konsruktivisme merupakan sebuah teori sebagaimana halnya Realisme dan neo-realisme, namun kita dapat menerima pendapat Onuf bahwa Konstruktivisme adalah sebuah cara memandang fenomena hubungan internasional dengan cara baru yang tidak lagi hanya bersandar pada pencapaian kepentingan (*interests*) saja, melainkan juga dipengaruhi oleh unsur-unsur lainnya seperti maksud (*intention*), identitas (*identity*), dan juga alat komunikasi (*language*). Ketiga unsur tambahan ini dan juga kepentingan (*interests*) akan berpengaruh pada hubungan antar aktor, apakah sebagai "rival" atau "sahabat". Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dalam perjalanannya untuk memenuhi syarat dan ketentuan sebagai sebuah teori, Konstruktivisme dapat dianggap sebagai suatu pendekatan (*approach*) dalam memandang hubungan-hubungan sosial-politik sebagaimana dinyatakan oleh Nicolas Onuf.

16 Kenneth Waltz (1954). '*Men, the State and War: A Theoretical Analysis*'. New York: Columbia University Press, hlm. 12-13.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

Konstruksi Realitas Sosial

Sebagaimana kita ketahui Konstruktivisme berpendapat bahwa hubungan internasional merupakan hasil konstruksi sosial. Sebagai hasil konstruksi manusia, peristiwa-peristiwa internasional seperti konflik, peperangan, perundingan, dan perdamaian terjadi karena maksud dan tujuan tertentu. Peristiwa-peristiwa tersebut sangat dipengaruhi oleh kepentingan, norma, identitas budaya, dan simbol-simbol linguistik sehingga walaupun peristiwa-peristiwa tersebut dimaksudkan menjadi sesuatu yang bersifat ajeg namun sebagai hasil konstruksi semuanya itu dapat berubah sesuai dengan kebutuhan dan konteks tertentu.[17]

Dalam membahas tentang peristiwa-peristiwa dalam hubungan internasional sebagai sebuah konstruksi sosial, Konstruktivisme membaginya ke dalam beberapa tema yang saling berkaitan. Pertama, hasil konstruksi sosial bukanlah realitas objektif yang tunggal melainkan merupakan suatu produk yang bersifat multi bentuk (*polymorphic*) sesuai dengan konteks yang ada.[18] Dalam pemahaman kontruktivisme tidak ada fenomena tunggal yang bersifat universal dan konstan dalam dimensi ruang dan waktu. Berbeda dengan Realisme dan Neo-realisme yang meyakini bahwa peperangan dan perdamaian adalah bersifat konstan dan pasti dan tidak terpengaruh oleh faktor sejarah dan tempat (perang dan damai sejak zaman dahulu hingga sekarang, di wilayah negara maju maupun berkembang tetap sama), Konstruktivisme melihat bahwa baik peperangan maupun perdamaian dapat berubah sesuai dengan konteks historis dan konteks budaya tertentu. Sebagai contoh, jika pada masa Perang Dunia dan Perang Dingin, peperangan dipersepsi sebagai instrumen untuk menjamin kelangsungan hidup (*survival*) dan perluasan daerah pengaruh (*sphere of influence*), namun pada masa pasca Perang Dingin peperangan lebih dipersepsi sebagai sumber terjadinya bencana kemanusiaan sehingga menjadi pilihan terakhir setelah cara-cara persuasif gagal dilakukan. Demikian halnya dari dimensi tempat, kita dapat melihat perbedaan signifikan antara tindakan militerisasi Jepang yang cenderung minimalis untuk membentuk kekuatan militer esensial (*essential military power*) dan tindakan Tiongkok dalam melakukan militerisasi maksimal untuk membangun kekuatan militer hegemonik (*hegemonic military power*) di Asia. Perbedaan-perbedaan tersebut

17 Emanuel Adler (1997). 'Seizing the Middle Ground: Constructivism in World Politics'. *European Journal of International Relations*, Vol. 3 No. 3, hlm. 326.

18 K.M. Fierke (2013). *Op cit.*, hlm. 189.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

merupakan akibat dari perkembangan nilai-nilai, norma, kepentingan, dan intensi manusia dalam berhubungan satu sama lain.

Kedua, Konstruktivisme menekankan pada pentingnya dimensi sosial dalam hubungan internasional dengan mengacu pada faktor norma, nilai, aturan, identitas budaya, dan simbol linguistik sebagai penentu karakter hubungan internasional. Dalam konteks ini, Konstruktivisme, sebagaimana dikatakan Christian Reus-Smit (2005), meyakini bahwa *agents* (aktor / tokoh) dan *structures* (struktur) bersifat saling memperkuat (*mutually constituted*). Norma, nilai budaya, dan simbol linguistik membentuk identitas, kepentingan dan intensi aktor / tokoh, namun struktur (kekuasaan, ketertiban, rivalitas, dan persahabatan) tidak akan bekerja dengan baik tanpa adanya upaya para aktor/tokoh untuk mewujudkannya.[19] Sejarah membuktikan bahwa berakhirnya Perang Dingin tidak dapat dipisahkan dari bagaimana nilai, norma, dan simbol linguistik telah mendorong pemimpin Uni Soviet, Mikhail Gorbachev (sebagai *agents*), untuk mengubah struktur otokratis Uni Soviet melalui *Glasnost* (keterbukaan) dan *Perestroika* (reformasi ekonomi-politik) yang mengakibatkan runtuhnya Uni Soviet dan kemudian meredanya perang ideologi Barat-Timur. Fenomena ini menegaskan bahwa sejarah dibentuk oleh proses saling menguatkan antara *agents* dan *structures* sebagaimana digagas oleh para pencetus pendekatan Konstruktivisme.

Ketiga, Konstruktivisme meyakini bahwa politik internasional bukanlah realitas objektif yang berdiri sendiri, melainkan merupakan sebuah "dunia yang kita buat" (*a world of our making*) sebagaimana dinyatakan oleh Nicolas Onuf (1989).[20] Dengan demikian, berbeda dengan Neo-realisme dan Neo-liberalisme yang percaya bahwa politik internasional dibentuk oleh realitas objektif yang menempatkan struktur sebagai unsur paling penting hubungan antar aktor. Konstruktivisme meyakini bahwa politik internasional merupakan hasil proses interaksi antar *agents* (aktor/tokoh) yang dibentuk oleh kepentingan, identitas, intensi, dan simbol linguistik sehingga membentuk struktur "pertemanan" atau "rivalitas". Status sebagai "teman" atau "rival" ditentukan oleh kualitas interaksi yang melibatkan keempat unsur tersebut. Jadi kata kunci bagi proses politik internasional dalam pandangan Konstruktivisme adalah "interaksi antar-subjek" (*inter-subjective interactions*) yang melibatkan kepentingan, identitas,

19 Christian Reus-Smit (2005). '*Constructivism*', dalam Scott Burchill, *et.al* (ed.), '*Theories of International Relations* Edisi Ketiga'. London: Palgrave, hlm. 197.

20 Nicolas Onuf (1989). *Op.cit*, hlm. 3-4.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

intensi, dan bahasa. Dalam konteks inilah kita bisa memahami mengapa pendekatan interaksi antar-subjek yang diterapkan Presiden AS Barack Obama dalam mendekati Iran dan dunia Islam pada umumnya tampak lebih mampu meredakan ketegangan dibanding dengan pendekatan *hard core* Realisme yang diterapkan presiden sebelumnya. Demikian halnya, interaksi antar-subjek yang diterapkan Indonesia dalam drama penyanderaan awak kapal di Selat Malaka yang memanfaatkan dialog sosial-kultural mampu memberikan hasil positif berupa pembebasan sandera dalam waktu relatif singkat.

Komunikasi Simbolik (Language) dan Keajegan (Rules)

Salah satu hal yang tampak acapkali dilupakan dalam berbagai pembahasan tentang fenomena politik internasional adalah komunikasi simbolik atau bahasa. Sejak dari "perdebatan besar pertama" hingga ke "perdebatan besar keempat", faktor bahasa tidak pernah dibahas secara memadai. Teori-teori arus utama tampak sengaja mengesampingkan faktor bahasa karena mereka mencoba menjaga jarak dengan segala sesuatu yang mengandung unsur budaya karena mereka tidak ingin diasosiasikan dengan perspektif post-strukturalis yang mengedepankan "relativisme interpretatif" (*interpretive relativism*). Bagi Neo-Realisme dan Neo-Liberalisme "relativisme interpretatif" dapat menghambat proses validasi, pengujian hipothesis, dan penetapan parameter penelitian yang dituntut dalam penelitian dengan kaidah ilmiah.[21] Sebaliknya, teori-teori arus utama lebih menekankan pada keajegan (*rules*) karena lebih mengandung kepastian dan relatif bebas dari interpretasi subjektif. Bagi para pendukung teori-teori arus utama, keajegan adalah satu-satunya cara untuk memperlakukan fakta sosial sebagai realitas objektif yang memudahkan pemenuhan kaidah ilmiah dalam penelitian.

Konstruktivisme memiliki pandangan berbeda tentang hal ini. Bagi kaum Konstruktivis, komunikasi simbolik menjaga originalitas gagasan para agen. Dalam bahasa penelitian, komunikasi simbolik yang mengandung kepentingan, intensi dan identitas merupakan "bahan mentah" sehingga mengandung otentisitas dan originalitas tinggi, sementara itu fakta-fakta yang ajeg merupakan "bahan jadi" yang sudah mengalami penyederhanaan, dengan mengeliminasi elemen-elemen yang absurd dan tidak masuk akal. Dalam praktiknya "bahan mentah" dapat kita telusuri dari pernyataan para agen

21 K.M. Frierke (2013). *Op cit*, hlm. 196.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

(*speech acts*), sementara itu "bahan jadi" dapat kita telusuri dari dokumen resmi suatu lembaga (kebijakan, peraturan, perjanjian, dan lain-lain). Konstruktivisme menyarankan agar peneliti HI lebih melihat pada "bahan mentah" yang lebih otentik daripada merujuk pada "bahan jadi" yang penuh rekayasa. Sebagai contoh, saat kita melibat fenomena konflik etnis di Balkan kita tidak bisa menemukan "kebencian etnis" jika merujuk pada dokumen resmi pemerintah Serbia, Kroasia, maupun Bosnia karena dokumen tersebut sudah direkayasa sedemikian rupa untuk diterima publik. Kita dapat menemukan "kebenciaan etnis" justru ketika kita menyimak pernyataan para agen (*speech acts*) tokoh-tokoh penting yang terlibat dalam konflik tersebut seperti komandan militer, pemimpin milisi, dan pemimpin separatis. Hal ini membenarkan pendapat kaum Konstruktivis bahwa norma, nilai, identitas, dan intensi direfleksikan secara eksplisit dalam bahasa yang dipakai oleh subjek penelitian.[22] Dengan nada hampir sama Wittgenstein (1958) mengatakan: "*An intention is embedded in its situation, human customs and institutions*" (suatu maksud selalu melekat pada situasi, kebiasaan manusia, dan lembaga).[23]

Alasan (*Reason*) dan *Penyebab* (*Causes*)

Salah satu persoalan yang dihadapi teori Konstruktivis adalah bahwa teori ini acapkali mendasarkan analisisnya pada kausalitas yang menjadi ciri khas penelitian saintifik perspektif positivisme yang sering dikritik oleh para pakar Konstruktivis. Secara sepintas tampak bahwa kausalitas dalam teori Konstruktivis hanya menyangkut pemilihan istilah yang dimaksudkan untuk menggantikan kata alasan (*reason*) yang memotivasi aktor untuk melakukan tindakan tertentu. Namun pada kenyataannya persoalannya tidak sesederhana itu karena terdapat beda yang signifikan antara penyebab (*causes*) - yang dilandasi oleh logika dan hukum-hukum tertentu – dengan alasan (*reason*) yang menyangkut intensi subjektif. [24]

Sebagai contoh, dalam kasus invasi Amerika Serikat ke Irak pada tahun 2003, para peneliti saintifik-positivis akan lebih melihat pada hubungan kausal antara ketergantungan AS pada suplai minyak dari Timur Tengah dengan ancaman gangguan suplai minyak jika Irak terus-menerus berada dalam kekuasaan Saddam Husein yang sangat antiAS; atau skenario lain hubungan

22 *Ibid*, hlm. 197.
23 L. Wittgenstein (1958). '*Philosophical Investigation*'. Oxford: Blackwell, hlm. 337.
24 K.M. Fierke (2013). *Op cit*, hlm. 198.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

kausalitas antara serangan mematikan kelompok teroris Al Qaeda ke *World Trade Center* pada peristiwa 9/11 dengan fakta bahwa Irak - yang mendukung operasi Al Qaeda - memiliki senjata pemusnah massal (*weapons of mass destruction/ WMD*) yang dapat digunakan Al Qaeda untuk menyerang AS di masa mendatang. Sebaliknya peneliti Konstruktivis - walaupun memakai istilah penyebab (*causes*) - tetapi sesungguhnya lebih melihat pada maksud (*intention*) dan alasan (*reason*) Presiden AS George W. Bush untuk melanjutkan upaya pendahulunya/ayahnya, George Bush, Sr., yang tidak berhasil melengserkan Saddam Husein dalam *Gulf War I* satu dekade yang lalu; atau skenario lain bahwa Presiden George W. Bush memiliki alasan kuat untuk melenyapkan senjata pemusnah massal yang ditengarai dipakai oleh Saddam Husein untuk melenyapkan para pemberontak Kurdi di Irak bagian Utara. Dalam konteks ini, invasi AS ke Irak dapat dikatakan dilandasi oleh intensi negara tersebut untuk menghindari penggunaan senjata pemusnah massal dalam perang di Timur Tengah dan sekitarnya.

Contoh kasus di atas menunjukkan logika yang sangat berbeda antara penyebab (*causes*) dan alasan (*reason*). Penyebab (*causes*) membutuhkan logika kausalitas, di mana dua variabel saling berhubungan atas dasar alasan yang rasional. Sedangkan alasan (*reason*) tidak memerlukan pembuktian logis-rasional bahwa dua hal saling berhubungan. Dengan demikian, perbedaan menonjol antara analisis rasionalis-positivis adalah pada cara mereka menghubungkan dua faktor dalam penelitian. Jika analisis rasionalis-positivis berkewajiban untuk menunjukkan korelasi antar variabel penelitian, maka analisis Konstruktivis hanya perlu menujukkan alasan (*reason*) dan maksud (*intention*) dari para aktor dalam melakukan tindakan tertentu terlepas dari istilah yang mereka pakai.

Teks-teks Utama Konstruktivisme

Sebagai perspektif yang berkembang pada masa pasca Perang Dingin, teori Konstruktruktivis dalam studi HI seolah-olah muncul sebagai obat pemberi semangat bagi para pakar HI yang frustrasi dengan kegagalan teori-teori arus utama HI - terutama Realisme dan Neorealisme - dalam memprediksi runtuhnya Uni Soviet dan Blok Timur yang menandai berakhirnya Perang Dingin. Karena itu, Konstruktivisme mendapat sambutan sangat luas dan tidak sedikit yang menyebutnya sebagai "teori Hubungan Internasional Abad ke-21". Maka tidak mengherankan jika banyak deretan nama pakar Hubungan Internasional yang

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

tadinya pengikut setia teori arus utama mencoba mempelajari Konstruktivisme dan kemudian berubah menjadi pemuja teori ini. Karena itu, selain nama-nama yang tergolong sebagai pencetus teori Konstruktivis seperti Friedrich Kratochwil, Nicolas Onuf, dan Alexander Wendt, masih ada sejumlah nama lain yang ikut memberikan sumbangan bagi popularitas Konstruktivisme seperti Martha Finnemore, Peter J. Katzenstein, dan John G. Ruggie. Di bawah ini akan dibahas secara ringkas pemikiran beberapa tokoh Konstruktivis dan karyanya masing-masing yang sering menjadi rujukan dalam studi HI kontemporer. Tentu saja masih banyak sederetan nama lainnya, tetapi keterbatasan ruang tidak memungkinkan untuk membahas semua karya mereka satu persatu.

Kratochwil adalah pemikir HI kelahiran Jerman yang mendapat pendidikan doktoral di Universitas Princeton, Amerika Serikat. Teori Konstruktivis yang dikembangkannya banyak dipengaruhi oleh pemikiran Teori Kritis (*critical theory*) terutama dalam mempertanyakan dominasi teori arus utama (*mainstream*) yang dianggapnya bersalah dalam dua hal. Pertama, pandangan teori arus utama bahwa pengetahuan dibentuk melalui "formulasi positivis" (*positivist formulation*) yang meyakini bahwa pengetahuan ilmiah tentang realitas sosial didapat melalui metode objektif dan saintifik dengan melibatkan proses uji hipotesis dan pemisahan fakta dari nilai-nilai. Kedua, kenyataan bahwa teori dan konsep bukan merupakan sesuatu yang "tidak dapat diubah" (*fixed*) karena keduanya harus senantiasa menyesuaikan dengan pengalaman dan perubahan sosial yang ada. Maka, dapat disimpulkan bahwa teori dan konsep bukanlah suatu konstruksi *fixed* sehingga tidak ada teori atau konsep yang mengandung kebenaran mutlak.[25]

Di dalam karyanya *Rules, Norms and Decisions*, Kratochwil membedakan antara alasan ilmiah (*scientific reasoning*) dengan alasan praktis (*practical reasoning*). Menurut dia segala hal yang menyangkut tindakan aktor internasional cenderung dibentuk oleh alasan praktis (*practical reasoning*) melalui proses pembelajaran (*learning*) dan interaksi antar-subjek (*inter-subjective interactions*) yang dituntun oleh kepentingan (*interests*), identitas (*identity*), maksud (*intention*), dan bahasa (*language*). Proses pembelajaran dan interaksi antar-subjektif inilah yang kemudian menentukan apakah suatu negara memandang negara tertentu sebagai "rival" atau "kawan" baginya. Jadi dapat dikatakan bahwa semakin tinggi kedekatan identitas dan bahasa serta makin

25 Martin Griffith, Steven C. Roach dan M. Scott Solomon (2009). *Op cit.*, hlm. 126.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

jelas pemahaman suatu negara akan maksud negara tertentu, maka semakin mudah pula bagi negara tersebut untuk memutuskan bahwa negara tetentu itu dapat menjadi "kawan" baginya. Sebaliknya semakin besar perbedaan identitas dan semakin tidak jelas maksud negara tertentu, maka semakin mudah pula bagi suatu negara untuk memutuskan negara tersebt sebaga "rival" baginya.[26]

Alasan praktis tersebut dapat digunakan untuk menjelaskan mengapa AS merasa terusik dengan pengembangan kekuatan militer Rusia, tetapi sama sekali tidak terganggu dengan pengauatan militer Kanada; atau mengapa AS merasa terganggu dengan proyek pengayaan Uraniuin oleh Iran pada masa pemerintahan Ahmadinejad, tetapi dapat bersikap lunak terhadap proyek teknologi nuklir pada masa pemerintahan Hassan Rouhani. Dalam kasus pertama dari sisi identitas, kepentingan, dan maksud Rusia tampak sangat berbeda di mata AS; sementara pada kasus kedua figur Ahamadinejad sebagai pemimpin radikal yang sangat anti-Barat menunjukkan maksud kepemilikan teknologi nuklir yang tidak jelas, sedangkan Hassan Rouhani yang moderat lebih dipercaya oleh AS bahwa pengembangan teknologi nuklir oleh Iran memang untuk tujuan damai, yakni mengatasi kekurangan energi listrik.

Nicholas Onuf adalah tokoh Konstruktivis keturunan Jerman yang mengenyam pendidikan di Universitas Johns Hopkins, Amerika Serikat. Sebelum menghasilkan karya-karya yang penting bagi perkembangan studi Hubungan Internasional, Onuf banyak mendalami bidang hukum internasional. Dalam mengembangkan teori Konstruktivisnya, Onuf banyak mendapat inspirasi dari Teori Strukturasi (*structuration theory*) Anthony Giddens dan Teori Lingusitik (*lingusitic theory*) Ludwig Wittgenstein. Menurut dia, agen (manusia) dan struktur (segala bentuk pranata sosial yang ajeg) bersifat saling memperkuat (*mutually constituted*) satu sama lain.Walaupun pendapat ini tampak sederhana tetapi penting bagi munculnya pemahaman baru dalam studi Hubungan Internasional. Jika sebelumnya studi HI didominasi oleh pandangan bahwa "realitas" politik merupakan suatu hal yang pasif dan dibentuk oleh logika internal (*inner logic*) dari realitas itu sendiri tanpa campur tangan manusia. Sebagai contoh, Realisme sangat meyakini bahwa situasi anarkis (tiadanya pemimpin berkarakter *Leviathan*) dalam politik internasional adalah produk dari *inner logic* realitas politik internasional yang penuh dengan perjuangan untuk kekuasaan (*struggle for power*). Berbeda dengan pandangan tersebut, Onuf

26 Friedrich Kratochwil (1989). *Op cit.*, hlm. 6-8.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

menyatakan bahwa manusia (individu) ikut terlibat aktif dalam menciptakan realitas politik seperti peperangan, perdamaian, dan bahkan kondisi anarki.[27]

Realitas politik bentukan manusia, menurut Onuf, tidak saja bersifat konstitutif (membangun) tetapi juga bersifat regulatif (mengatur) karena agen (manusia) cenderung membentuk rules (aturan) yang memiliki tiga karakter: *assertive* (memaksa), *directive* (menghimbau), dan *commissive* (menyarankan). Melalui ketiga macam karakter aturan inilah Onuf menyatakan kita melihat bagaiamana bahasa yang diwujudkan dalam bentuk pembicaraan (*speech act*) mempunyai kekuatan konstitutif. Maka, Onuf sekali lagi mengingatkan bahwa untuk mengetahui motivasi dan intensi seseorang kita harus merujuk pada *speech act* yang mereka tampilkan. Hal ini juga berlaku dalam hubungan internasional, di mana seorang negarawan harus mampu menangkap motivasi dan intensi negara tertentu dengan mengikuti *speech act* para pemimpinnya, bukannya membaca dokumen tertulis yang sudah terkontaminasi oleh berbagai kepentingan sehingga tidak orisinil.

Alexander Wendt adalah pakar Hubungan Internasional kelahiran Mainz, Jerman, pada tahun 1958 yang mendalami studi HI di *Macalaster College* dan Universitas Minnesota di Amerika Serikat dan kemudian menjadi professor ilmu politik di Universitas Yale, Amerika Serikat. Sebelum menulis buku *Social Theory of International Politics* yang membuatnya makin terkenal sebagai salah satu pencetus teori Konstruktivis dalam studi HI, Wendt telah menulis sejumlah artikel di jurnal-jurnal terkemuka Hubungan Internasional seperti *International Organization, Review of International Studies, American Political Science Review*, dan beberapa Bab dalam buku. Salah satu artikelnya yang sangat berpengaruh adalah tulisannya berjudul "*Anarchy is What States Make of it: The Social Construction of Power Politics*" di jurnal *International Organization* edisi tahun 1992 yang membahas tentang bagaimana suatu negara menentukan negara tertentu sebagai "rival" atau "teman" dalam pergaulan internasional yang sudah dibahas pada awal Bab ini.[28]

Buku yangdia tulis 7 tahun setelah terbitnya artikel yang menggemparkan itu dinilai oleh banyak pengamat sebagai upaya Wendt untuk memberikan "pukulan telak" (*final blow*) terhadap Neo-Realisme - khususnya konsep "sistem internasional" yang digagas Kenneth Waltz - dengan menyatakan bahwa karakter hubungan antar negara (bermusuhan atau bersahabat) tidak

27 Nicholas Onuf (1989). *Op cit.*, hlm. 111-112.
28 Alexander Wendt (1999). *Op cit.*, hlm. 415-416.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

ditentukan oleh unsur material berupa kekuatan ekonomi dan kekuatan militer saja, melainkan lebih ditentukan oleh unsur budaya setiap negara yang terbentuk melalui interaksi antar-subjek. Sebagai suatu teori berbasis budaya, teori Konstruktivis yang dikembangkan Wendt memiliki 3 karakter utama. Pertama, dalam rubrik "*ideas all the way down*" Wendt menyatakan bahwa politik global dituntun oleh ide-ide, norma-norma, dan nilai-nilai yang diyakini para aktor dan terdistribusikan secara antar-subjek (*intersubjectively shared*). Maka berbeda dengan Neo-Realisme yang meyakini bahwa unsur material yang menentukan kiprah negara dalam politik global, teori Konstruktivis Wendt lebih melihat pada ide, norma, dan nilai yang dibentuk dari interaksi antarsubjek yang lebih menentukan karakter politik global. Kedua, ideide yang terstruktur tidak saja menimbulkan efek regulatif, melainkan juga efek konstitutif bagi para aktor politik global. Artinya, stuktur ide-ide tersebut dapat mendorong para aktor untuk terus memperbarui definisi kepentingan melalui proses interaksi. Dalam keadaan demikian aktor menentukan kiprahnya dalam politik global melalui proses "sosialisasi" dan "pembelajaran" terus-menerus. Berbeda dengan Neo-Realisme yang menonjolkan karakter *rigid* (kaku) dari sistem internasional, Wendt menyatakan bahwa aktor politik global terus-menerus menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan melalui proses sosialisasi dan pembelajaran. Ketiga, struktur ide-ide dan aktor saling mempengaruhi (*co-determine*) satu sama lain. Struktur mempengarruhi aktor dalam hal penetapan kepentingan dan pembentukan identitas. Sebaliknya, aktor mempengaruhi struktur dalam hal produksi, reproduksi, dan perubahan terhadap tindakan-tindakan diskursif yang menjadi pilihan aktor tersebut. Jadi berbeda dengan premis Neo-Realisme yang meyakini bahwa sistem/struktur internasional anarkis lah yang mempengaruhi tindakan aktor politik global, teori Konstruktivis memandang bahwa struktur dan aktor saling mempengaruhi.[29]

Berangkat dari ketiga pandangan tentang aktor dan struktur ide-ide tersebut, Wendt membuat tiga kategori tentang struktur ide-ide dalam politik global. Pertama, struktur "permusuhan" yang diilhami oleh pemikiran Thomas Hobbes bahwa hakikat manusia adalah egoistik dan agresif sehingga memunculkan budaya "peperangan". Namun, proses sosialisasi dan pembelajaran aktor melalui proses interaksi antar-subjek dalam peradaban modern membuat manusia belajar bahwa sikap agresif adalah budaya primitif yang dianggap ketinggalan

29 Dale C. Copeland (2000). 'The Constructivist Challenge to Srructural Realism'. *International Security*, Vol. 25 No. 2, hlm. 189-190.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

jaman sehingga pada jaman modern, peperangan makin tidak dianggap sebagai pilihan rasional. Dengan demikian, dewasa ini struktur budaya peperangan dapat dikatakan telah punah. Kedua, stuktur budaya "persaingan" (rivalitas) yang diinspirasi oleh pemikiran John Locke tentang kompetisi. Ketika aktor politik global menyadari bahwa konsep negara-bangsa yang diinisiasi dalam Perjanjian Westphalia 1648 telah memberikan pengakuan terhadap setiap negara atas wilayah teritorial tertentu. Maka, hakikat agresif manusia sebagaimana digagas Hobbes diredam menjadi "rivalitas" yang memicu ketegangan namun tidak harus berujung pada peperangan. Ketiga struktur budaya "kerja sama" yang diinspirasi oleh pemikiran Immanuel Kant. Melalui serangkaian proses sosialisasi dan pembelajaran struktur budaya "persahabatan" tercipta karena aktor politik global merasakan adanya kebutuhan untuk saling bekerja sama. Dalam konteks keamanan, aktor politik global yang mengembangkan struktur budaya ini lebih memilih konsep "keamanan kolektif" (*collective security*), daripada konsep "keamanan nasional" (*national security*) yang diusung oleh dua struktur budaya sebelumnya.[30]

Dari gambaran di atas, Wendt menyatakan bahwa dalam politik global, ada kemungkinan perubahan dari struktur budaya "persaingan" (Lockean) menjadi struktur budaya "kerja sama" (Kantian) melalui proses sosialisasi dan pembelajaran yang dituntun oleh empat varaiabel utama (*master variables*) meliputi: (1) saling ketergantunan (*interdependence*): situasi saling bergantung akibat kerja sama yang mendalam; (2) nasib yang sama (*common fate*): menyangkut kelangsungan hidup, ketahanan dan pengalaman sejarah; (3) kesamaan identitas (*homogeneity*): meliputi kesamaan bentuk (*isomorphism*) lembaga, sistem pemerintahan dan struktur kekuasaan serta kesamaan nilai-nilai yang dianut; dan (4) sikap menahan diri (*self restraint*): kecenderungan negara untuk mengembangkan sikap defensif dan menghindari sifat ofensif. Keempat variabel ini, menurut Wendt, dapat membantu proses sosialisasi dan pembelajaran oleh para aktor politik global untuk mengubah karakter hubungan dari struktur budaya "persaingan" menjadi struktur budaya "kerja sama".[31]

Martha Finnemore adalah salah satu dari sedikit pemikir teori Konstruktivis yang tidak memiliki koneksi langsung dengan Jerman. Lahir pada tahun 1959, Finnemore mendalami pendidikan studi Hubungan Internasional

30 Alexander Wendt (1999). *Op cit.*, hlm. 260-299.
31 *Ibid.*, hlm. 336-363.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

di Universitas Harvard, Universitas Sydney dan Universitas Stanford. Saat ini dia bekerja sebagai professor ilmu politik dan masalah internasional di *Elliot School of International Affairs*, Universitas George Washington, Amerika Serikat. Dalam bukunya yang membuatnya termasuk dalam barisan pemikir Konstruktivis itu Finnemore menunjukkan kepada kita bagaimana negara melakukan proses sosialisasi dan pembelajaran tentang norma dan nilai baru dalam politik internasional yang dikembangkan oleh organisasi internasional. Proses sosialisasi dan pembelajaran tersebut kemudian mendorong negara untuk mengubah kepentingan nasionalnya dari kepentingan yang bersifat sempit dan egoistik menjadi kepentingan yang lebih berdimensi luas dan lebih diterima secara global.[32]

Untuk membuktikan premisnya tentang proses konstruksi sosial kepentingan nasional tersebut, Finnemore mengajukan tiga studi kasus. Pertama, kasus UNESCO (*United Nations Educational and Scientific Organization*) yang berperan dalam membentuk diskursus dalam birokrasi bidang keilmuan terutama bagi negara-negara berkembang yang sama sekali tidak mengenal biokrasi bidang keilmuan. Antara dekade 1950-an hingga 1960-an, Finnemore mendapatkan bahwa para pejabat UNESCO merujuk pada pengalaman Inggris, Amerika Serikat dan Perancis memberikan pembelajaran bagi negara-negara berkembang untuk merancang kebijakan yang menempatkan peran pemerintah dalam birokrasi bidang keilmuan. Pada waktu itu UNESCO secara agresif memberikan konsultasi kepada para pemimpin negara berkembang dan melobi para pejabat yang terkait pada bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan untuk membentuk lembaga yang mengatur peran pemerintah dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta pengadopsian kaidah-kaidah keilmuan terbaru. Dengan demikian UNESCO membuka peluang bagi negara-negara berkembang untuk membangun birokrasi bidang keilmuan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka.

Kedua, kasus dalam konstruksi keamanan yang melibatkan usaha keras ICRC (*International Committee of the Red Cross*) dalam memperjuangkan agar pengaturan tentang peperangan sebagaimana diatur dalam Konvensi Jenewa (*the Geneva Convention*) dapat diterima secara luas. Konvensi Jenewa, menurut Finnemore, memuat sejumlah prinsip dasar kemanusiaan seperti perlakuan khusus dalam artian pelarangan tindak kekerasan terhadap non-

32 Martha Finnemore (1996). *'The National Interests of International Society'*. Ithaca: Cornell University Press, hlm. 33.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

kombatan, petugas medis, tahanan perang, dan musuh yang terluka. Finnemore melihat adanya kesulitan manakala kepatuhan terhadap norma-norma dasar kemanusiaan menuntut negara yang terlibat peperangan untuk bersikap menahan diri (*self restaint*), padahal negara tersebut sedang mempertahankan kelangsungan hidupnya. Dalam kasus tersebut Finnemore menemukan bahwa keinginan untuk memberlakukan prinsip-prinsip kemanusiaan dalam peperangan seringkali tidak datang dari pemerintah negara tersebut, melainkan acapkali datang dari inisiatif masyarakat yang paham tentang kekejian akibat perang.

Terakhir, kasus ketiga Finnemore membahas tentang peran Bank Dunia (*the World Bank*) dalam mengubah definisi dan lingkup konsep pembangunan dan dalam menggeser definisi dan ukuran kemiskinan. Walaupun Finnemore menyadari banyak pakar pembangunan di universitas dan lembaga donor ikut berperan dalam merevisi definisi pembangunan dan ukuran kemiskinan, namun bagi dia orang yang paling bertanggung jawab dalam melembagakan perubahan tersebut adalah Robert McNamara (Direktur Bank Dunia pada dekade 1980-an). Melalui McNamara, Finnemore meyakini, prinsip pembangunan berkelanjutan, pemberantasan kemiskinan dan pemberdayaan dapat diterima baik oleh negara maju maupun negara berkembang. Bahkan melalui Robert McNamara, konsep-konsep tersebut diangkat sebagai standar kebijakan pembangunan yang disarankan oleh Bank Dunia kepada seluruh negara anggotanya.

Melalui ketiga kasus tersebut Finnemore menunjukkan kepada kita bagaimana ide-ide yang dikembangkan oleh lembaga internasional mempengaruhi negara dalam menformulasikan kebijakannya sesuai dengan kepentingan nasionalnya yang telah mengalami redefinisi. Melalui kepiawaiannya dalam merangkai ketiga kasus tersebut di dalam bukunya Finnemore tidak saja menunjukkan cara baru dalam melihat bagaimana negara terus-menerus meredefinisi kepentingannya, tetapi juga melakukan terobosan dengan cara "membawa agen kembali" (*Bringing Agents Back In*) ke dalam analisis politik internasional setelah dinafikan oleh teori arus utama, yakni Neo-Realisme dan Neo-Liberalisme.

Peter Joachim Katzenstein lahir di Hamburg, Jerman, pada tahun 1945. Setelah menamatkan pendidikan sekolah menengah di Jerman, dia meneruskan studi dan karir akademiknya di berbagai universitas di Inggris dan Amerika Serikat. Katzenstein mendapatkan gelar sarjana ilmu politik dari *Swarthmore College*, Philadelphia; gelar magister politik internasional dari *London School*

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

of Economics and Politics (LSE), dan gelar doktor masalah internasional dari Universitas Harvard. Katzenstein kemudian memulai karir sebagai akademisi di Unversitas Cornell, Amerika Serikat. Buku suntingannya *The Culture of National Security* (1996) yang akan kita bahas ini terpilih oleh majalah *Choice* sebagai salah satu dari 10 buku terbaik studi Hubungan Internasional pada tahun 1997.[33]

Pada bagian pendahuluan buku tersebut, Katzenstein menyatakan bahwa terdapat dua faktor yang merupakan determinan bagi kebijakan keamanan nasional suatu negara: (1) konteks kultural-institusional: segala norma, nilai, dan prinsip yang membentuk budaya; dan (2) identitas kolektif aktor politik global yang mengalami konstruksi dan rekonstruksi. Dengan merujuk pada kedua faktor tersebut Katzenstein menawarkan cara pandang yang selama ini diabaikan oleh teori-teori arus utama – Neo-Realisme dan Neo-Liberalisme – tentang bagaimana budaya dan identitas mempengaruhi pembuatan kebijakan keamanan. Katzenstein membagi proses konstruksi kebijakan keamanan nasional suatu negara menjadi dua tahap. Tahap pertama, lingkungan budaya internasional berupa norma yang diusung oleh lembaga internasional (NATO, komisi perlucutan senjata, rezim non-proliferasi nuklir, dan lain-lain), prinsip politik internasional tentang kedaulatan, dan pola-pola pertemanan atau permusuhan yang disosialisasi kepada para pemimpin negara mempengaruhi pola pikir suatu negara mengenai kelangsungan hidupnya dan pendefinisian perilaku bernegara (*statehood*) yang sangat menentukan konstruksi kebijakan keamanan nasional mereka. Sebagai contoh, ketika NATO dan berbagai rezim keamanan internasional lainnya mulai memasukkan unsur keamanan non-tradisional dalam cakupannya beberapa negara ikut memasukkan aspek keamanan non-tradisional dalam kebijakan keamanan nasional mereka sebagaimana yang dilakukan oleh Kanada, Jepang, Uni Eropa dan Tiongkok. Pada tahap kedua, manakala Neo-Realisme dan Neo-Liberalisme sangat yakin bahwa struktur internasional – anarki dan distribusi kekuasaan – mempengaruhi preferensi aktor dalam penentuan kebijakan keamanan nasional suatu negara, Konstruktivisme justru sebaliknya meyakini bahwa identitas aktor – yang dibentuk melalui proses interaksi antar subjek – lebih menentukan konstruksi kebijakan keamanan nasional suatu negara. Sebagai contoh, para pemimpin politik Kanada yang acapkali melakukan interaksi dalam proses

33 Peter J. Katzenstein (ed.) (1996). '*The Culture of National Security: Norms and Identity in World Politics*'. New York: Columbia University Press, hlm. ix.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

perdamaian dalam konflik identitas (etnis, agama, dan bahasa) di berbagai belahan dunia memiliki preferensi kebijakan keamanan yang lebih menekankan pada perlindungan Hak Asasi Manusia, penerapan prinsip kemanusiaan, pelarangan penggunaan senjata pembunuh massal, dan penggunaan dialog dalam penyelesaian konflik.

Sumbangan Katzenstein terhadap perkembangan teori Hubungan Internasional adalah bahwa lingkungan budaya dan proses sosialisasi dan pembelajaran dari para tokoh dapat mengubah secara drastis orientasi kebijakan keamanan suatu negara. Norma-norma yang diusung oleh rezim keamanan internasional (NATO, OSCE, ARF, dan lain-lain.) dan hasil interaksi para pemimpin dalam berbagai proses resolusi konflik dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap cara negara mempersepsi keamanan, terutama dalam mengidentifikasi sumber ancaman dan menentukan cara mengatasinya.

John Gerard Ruggie lahir di Graz, Austria, pada tahun 1944 dan bermigrasi ke Kanada, menamatkan pendidikan Sarjana studi Hubungan Internasional di Universitas McMaster, Kanada, Magister dari Universitas California Berkeley, dan Doktor juga dari Universitas California Berkeley. Karirnya sebagai akademisi dimulai sebagai dosen di *School of Public and International Affairs* Universitas Columbia, dosen di Jurusan Hubungan Internasional Universitas California San Diego, dan sebagai profesor di *Kennedy School of Government*, Universitas Harvard, Amerika Serikat. Dalam tulisannya, Ruggie berpendapat bahwa teori Konstruktivis berakar dari ajaran klasik Emile Durkheim yang menyatakan bahwa ide terbentuk dari faktor-faktor *ideational* dalam kehidupan sosial yang membentuk semacam "preferensi yang menonjol" (*revealed preferences*) yang menjadi inti dari perspektif positivis dan dari ajaran Max Weber yang menyatakan pentingnya menginterpretasi bagaimana aktor sosial mengkaitkan tindakannya dengan berbagai pemahaman yang dikomunikasikan (*shared meanings*) yang merupakan hasil proses interaksinya dengan lingkungan sosialnya.[34]

Dengan merujuk pada karya penting para petnikir konstruktivis seperti Kratochwil, Onuf, Wendt, dan Katzenstein, Ruggie menyimpulkan adanya beberapa konsep penting yang merupakan inti dari pemikiran Konstruktivisme Sosial: (1) Kepentingan dan Identitas (*interests and identities*): bagaimana aktor mengkonstruksi kepentingan dan identitasnya melalui proses sosialisasi

34 John G. Ruggie (1998). 'What Makes the World Hang Together? Neo-Utilitarianism and Social Constructivist Challenge. *International Organization*. Vol. 52, No. 4, hlm. 855-885.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

dan pembelajaran yang berkelanjutan; (2) Kausalitas Ideal (*ideal causation*): pandangan dunia (*world views*) yang diusung oleh kelompok "komunitas epistemik" (*epistemic communities*) atau kaum profesional lintas negara yang bekerja untuk tujuan tertentu merupakan faktor penting yang membentuk kepentingan dan identitas suatu negara; (3) Intensi Kolektif (*collective intentionality*): ide-ide tidak dimiliki secara individu, melainkan merupakan milik kolektif suatu kelompok melalui proses "pemahaman antar-subjek" (*intersubjective understanding*) yang menciptakan hak dan kewajiban baru; (4) Aturan Konstitutif (*constitutive rules*): norma yang mendefinisikan suatu tidakan sebagai hal penting yang memberi penibenaran pada tindakan tersebut (*what counts as that activity*); (5) Transformasi (*transformation*): berbeda dengan Neo-Realis yang menyatakan bahwa sistem internasional akan selalu stabil, Konstruktivis menyadari bahwa struktur akan mengalami proses evolusi sejarah secara mikro maupun makro; dan (6) Pertanyaan tentang Agen (*question of agency*): aktor politik global menginterpretasi dan mengkonstruksi realitas dalam arti tidak hanya bersikap pasif atas apa yang terjadi di sekelilingnya.[35]

Berdasarkan pilihan konsep-konsep dasar yang menjadi preferensi setiap pemikir Konstruktivis, Ruggie membagi pemikiran Konstruktivisme ke dalam tiga kategori. Pertama, Konstruktivisme Neo-klasik yang dikaitkan dengan karya Peter J. Katzenstein, Friedrich Kratochwil, Nicolas Onuf, Martha Finnemore, Emanuel Adler, dan John Gerard Rugia yang memiliki kedekatan epistemologis dengan perspektif klasik yang pragmatis. Kedua, Konstruktivisme Postmodernis yang dikaitkan dengan karya Richard Ashley, R.B.J. Walker, James Der Derian, dan Spike Peterson yang berakar dari pemikiran Nietzsche, Foucault, dan Derrida dalam menentang hegemoni. Ketiga, Konstruktivisme Naturalis yang diasosiasikan dengan karya Alexander Wendt, Roy Bhaskar, dan David Dessler yang berada di tengah-tengah antara Konstruktivisme Neo-klasik dan Konstruktivisme Postmodernis.[36]

Kesimpulan

Berbeda dengan teori-teori arus utama - Neo-Realisme dan Neo-Liberalisme - yang menyatakan bahwa sistem/struktur politik internasional yakni anarki dan *Balance of Power* yang mendorong aktor politik global untuk melakukan

35 John G. Ruggie (1998). *Op cit.*, hlm. 862-877.
36 *Ibid.*, hlm. 881-882.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

tindakan tertentu, Konstruktivisme lebih melihat pada peran aktor yang telah mengalami proses sosialisasi dan pembelajaran dari norma, nilai, dan prinsip yang berlaku dari lingkungan budaya sekitarnya dan juga lembaga internasional yang menentukan konstruksi kepentingan dan intensi mereka sebagai hal yang menentukan preferensi mereka untuk melaukan kebijakan/tindakan tertentu. Dengan demikian, Konstruktivisme meyakini bahwa aktor politik global cenderung terus-menerus belajar dari pengalaman dan interaksi dengan lembaga internasional dalam menginternalisasi norma, nilai, dan prinsip baru untuk kemudian diterapkan sebagai kebijakan negara.

Berbeda dengan Realisme yang lebih mengedepankan perilaku negara yang dilandasi tujuan untuk mencapai kepentingan nasional, Konstruktivisme meyakini bahwa motif suatu negara dalam menjalin hubungan dengan aktor lain (negara maupun non-negara) tidak semata pencapaian kepentingan, tetapi juga dilandasi oleh intensi, identitas, dan hasil interaksi antar-subjek yang dilakukannya. Jika Realisme merupakan pendekatan yang sangat didominasi oleh teori politik, maka Konstruktivisme tampak sebagai pendekatan yang mengusung teori kebudayaan dalam menganalisis hubungan antar aktor dalam studi Hubungan Internasional.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

REFERENSI

Acharya, Amitav. (2001). *Constructing a Security Community in Southeast Asia: ASEAN and the Problem of Regional Order.* London: Routledge.

Acharya, Amitav (2011 [1997]). 'Third World and Security Studies'. Dalam Hughes, Christoper W., dan Ming, Lay Yew (ed.). *Security Studies: A Reader.* London: Routledge, hlm. 53-56.

Adler, Emmanuel (1997). 'Seizing the Middle Ground: Constructivism in World Politics'. *European Journal of International Relations*, Vol. 3, No. 3, hlm. 326.

Alderson, Kai, Hurrell, Andrew. (ed.) (2000). 'International Society and The Academic Study of International Relations'. *Hedley Bull on International Society.* London: MacMillan, hlm. 3.

Alexander Wendt (1999). *Social Theory of International Politics.* Cambridge: Cambridge University Press di bawah tulisan Alexander Wendt yang sudah ada.

Annan, Kofi. (2001). *Nobel Lecture.* Oslo: 10 Desember.

Anonim. 'Pierre Bourdieu (1930-2002)'. *New Left Review*, No. 14.

Ashley, Richard K. (2006 [1987]). 'The Geopolitics and Geopolitical Space: Towards a Critical Social Theory in International Politics'. *Alternatives,* Vol. 12, dicetak kembali dalam Stephen Chan dan Cerwyn Moore (2006) (ed.) *Theories of International Relations Vol IV: Contemporary Reflexive Approaches in International Relations.* London: SAGE hlm.1.

Ashley, RichardK. (1984). 'The Poverty of Neorealism'. *International Organization*, Vol. 38 No. 2, hlm. 235-286.

Ashworth, Lucian. M. (2002) 'Did Realist-Idealist Great Debate Really Happen? A Revisionist History of International Relations'. *International Relations*, Vol. 16 No.1, hlm. 34-35.

Ball, Terence. (ed.) (1987). 'Idioms of Inquiry'. *Critique and Renewal of in Political Science.* Albany: New York University Press, hlm. 34.

Blazt, William E. (1966). *Human Security: Some Reflections.* Toronto: University of Toronto Press, hlm. 112-116.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

Baudrillard, Jean (1981). *Simulacra and Simulation.* Ann Arbor: University of Michigan Press, hlm. 41-42.

Bleiker, Ronald (2006 [2001]). 'The Aesthetic Turn in International Political Theory'. *Millenium*, Vol. 30 No. 3 dalam Stephen Chan dan Cerwyn Moore (2006) (ed.). *'Theories of International Relations Vol IV: Contemporary Reflexive Approaches in International Relations'*. London: SAGE, hlm. 299-300.

Booth, Ken (2005). 'Roundtable: the Battle Rages On'. *International Relations*, Vol. 13 No.3, hlm. 351-352.

Bourdieu, Pierre, Wacquant, Lois J. D. (1992). *An Invitation to Reflexive Sociology.* Chicago: University of Chicago Press, hlm. 97.

Bourdieu, Pierre (1999) *The Logic of Practice.* Cambridge: Polity Press, hlm. 53.

Brown, Chris (2005). 'Roundtable: the Battle Rages On'. *International Relations*, Vol.19, No.3. hlm. 348-349.

Bull, Hedley (1966). 'International Relations Theory: The Case of Classical Approarch'. *World Politics*, Vol.18, No.3, hlm. 363

Bull, Hedley (1984). *'Justice and International Relations: The Hagey Lectures'*. Ontario: University of Waterloo, sebagaimana dikutip dalam Andrew Linklater (2007). 'Realism, Marxism and Critical International Theory'. *Review of International Studies*, Vol. 12 No. 1, hlm. 39.

Bull, Hedley (1977). 'The Anarchical Society: a Study of World Order'. *World Politics.* London: MacMillan, hlm. 8-10.

Burchill, Scott. (2005). *The National Interest in International Relations Theory, Vol. 38.* Basingstoke: Palgrave Macmillan, hlm. 55.

Butterfield, H., Wight, M. (ed.). *Diplomatic Investigations.* London: George Allen and Unwin, hlm. 25

Buzan, Barry (2004). 'From International to World Society? English School Theory and the Social Structure of Globalisation'. *Cambridge Studies in International Relations.* Cambridge: Cambridge University Press, hlm. 16-24.

Buzan, Barry (1991) 'New Patterns of Global Security in the Twentieth Century'. *International Affairs*, Vol. 67 No. 3, hlm. 439-451.

Bull, Hedley (1977). *The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics.* London: MacMillan, hlm. 26-35.

Buzan, Barry, Little, Richard (2000). *International Systems in World History: Remaking the Study of International Relations.* Oxford: Oxford University Press, hlm. 1.

Buzan, Barry, Waever, Ole dan de Wilde, Jaap (1998). *Security: A New Framework for Analysis.* Boulder: Lynne Riener Publisher, Inc., hlm. 1.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

Caballero-Anthony, M. (2005). *Regional Security in Southeast Asia: Beyond the ASEAN Way*. Singapura: Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS).

Campbell, David (2006 [2001]). 'International Engagements: The Politics of North American International Relations Theory' Dalam Stephen Chan dan Cerwyn Moore (2006) (ed.). *Theories of International Relations Vol IV: Contemporary Reflexive Approaches in International Relations*. London: SAGE, hlm. 230-235.

Carr, Edward H. (1947). *International Relations Between The Two World Wars, 1919-1939*. London: Macmillan, hlm. 63-88.

Carr, Edward H. (1945). *Nationalism and After*. London: MacMillan

Carr, Edward H. (1961). 'The Historian and His Facts'. *What Is History?*. London: Harmondsworth, hlm. 11.

Carr, Edward H. (1939). 'The Twenty Years Crisis, 1919-1939'. *An Introduction to the Study of International Relations, edisi kedua*. New York: Harper Torchbook, hlm. 69-86.

Chan, Stephen dan Moore, Cerwyn (2006). 'Approaches to International Relations: Contemporary Reflexive Approach', dalam Stephen Chan dan Cerwyn Moore (ed.). *Theories of International Relations Vol. IV: Contemporary Reflexive Approaches in International Relations*. London: SAGE, hlm. vii-viii.

Chan, Stephen. (1984). *International Relations in Perspective: The Pursuit of Security, Welfare, and Justice*. Macmillan Publishing Company, hlm. 5.

Chan, Stephen, Moore, Cerwyn (ed.). *Theories of International Relations Vol. I*. London: SAGE Publication Ltd., hlm. 140-142.

Chan, Stephen, Moore, Cerwyn (ed.) (2006). *Theories of International Relations Vol. III*. London: Sage, hlm. 39.

Colas, Alejandro (2002). *International Civil Society*. Cambridge: Polity Press.

Constantinou, C. (1994). 'Diplomatic Representation, or, Who framed the Ambassadors?'. *Millenium*, Vol.23, No.1, hlm. 22-23.

Copeland, Dale C. (2000). 'The Constructivist Challenge to Structural Realism'. *International Security*, Vol. 25, No. 2, hlm. 189-190.

Cox, Robert W. (1987). *Production, Power and World Order: Social Forces in the Making of History Vol. 1*. New York: Columbia University Press.

Dawson, Julian (2011). 'A Constructivist Approach to the US-Iranian Nuclear Problem'. Master's thesis for Strategic Studies, University of Calgary, Canada, hlm. 90-106.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

Deleuze, Giles, Guattari, Felix (1987). *A Thousand Prateus.* Minneapolis: University of Minnesota Press, hlm. 376 sebagaimana dikutip dalam Michael J. Shapiro (2006 [1998]). 'The Events of Discourse and Ethics of Global Hospitality'. *Millenium,* Vol. 27 No. 3. dalam Stephen Chan dan Cerwyn Moore (2006). '*Theories of International Relations Vol. IV*', hlm. 43.

Derian, James Der (2006 [2000]). 'Virtuous War/Virtual Theory'. Dalam Stephen Chan dan Cerwyn Moore (2006) (ed.). *Theories of International Relations Vol IV: Contemporary Reflexive Approaches in International Relations. London: SAGE*, hlm. 211-214.

Devlen, Balkan, Özdamar, Özgür. (2009). *Rethinking Realism in International Relations: Between Tradition and Innovation.* Baltimore: The John Hopkins University Press, hlm. 142-143.

Donelly, Jack (2006). 'Sovereign Inequalities and Hierarchy in Anarchy: American Power and International Society'. *European Journal of International Relations*, Vol. 12 No. 2, hlm. 32.

Dunne, Tim (2010). 'The English School'. Dalam Tim Dunne, Mirja Kurki, dan Steve Smith (ed.). *International Relations Theories: Discipline and Diversity.* Oxford: Oxford University Press, hlm.139-140.

Eco, Umberto (1983). '*Travels in Hyperreality*'. New York: Harvest Book, hlm. 48.

Elias, Norbert (2000). *The Civilizing Process: Sociogenetic and Psychogenetic Investigations.* Oxford: Basil Blackwell sebagaimana dikutip dalam Andrew Linklater (2007). 'Realism, Marxism and Critical International Theory'. *Review of International Studies*, Vol.12 No.1, hlm.42.

Enloe, Cynthia (1990). *Bananas, Beaches and Bases: Making Feminist Sense of International Politics.* Los Angeles: University of California Press, hlm. 15-18.

Evers, Hans Dieter. (2000) 'Globalization, Local Knowledge, and the Growth of Ignorance', *Southeast Asia Journal of Social Science*, Vol. 28 No. 1, hlm. 13-22.

Fierke, K. M. (2013). 'Constructivism', dalam Tim Dunne, Milja Kurki, dan Steve Smith (ed.). '*International Relations Theories: Discipline and Diversity 3rd Edition*'. Oxford: Oxford University Press, hlm. 194.

Foucault, Michel (1977). '*Power / Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972-1977*'. New York: Pantheon Books, hlm. 110-114.

Frank, Andre Gunder (1978). 'The Post-War Boom: Boon for the West and Bust for the South'. *Millenium: Journal of International Studies*,Vol.7 No. 2, hlm.151-161.

Fukuyama, Francis. (1992). *The End of History and the Last Man.* New York: Avon Books, hlm. xi.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

Gills, Barry K. (1987). 'Historical Materialism and International Relations Theory'. *Millenium: Journal of International Studies,* Vol. 16 No. 2 sebagaimana dipublikasi kembali dalam Stephen Chan dan Cerwyn Moore (ed.) (2006). *Theories of International Relations Vol. III.* London: Sage, hlm. 39.

Goldstein, Joshua S. (1996). 'International Relations and Everyday Life'. *Occupational science: The Evolving Discipline*, hlm. 5

Grass, Gunther, Bourdieu, Pierre (2002). 'The Progressive Restoration: A Franco-German Dialogue'. *New Left Review* No. 14, hlm. 66.

Griffith, Martin, Roach, Steven C., Solomon, M. Scott (2009). *Fifty Key Thinkers in International Relations.* London: Routledge, hlm. 126.

Guzzini, Stefano dan Leader, Anna (2006). 'Wendt's Constructivism: A Relentless Quest for Synthesis', dalam Stefano Guzzini dan Anna Leader (ed.). *Constructivism and International Relations.* London: Routledge, hlm. 73-91.

Haas, Ernst B. (2008). 'Beyond the Nation State: Functionalism and International Organization'. London: ECPR Press, hlm. 11.

Habermas, Jurgen (1972). *Knowledge and Human Interests.* London: Heinemann sebagaimana dikutip oleh Andrew Linkalater (1990). *Beyond Realism and Marxism: Critical Theory and International Relations.* London: MacMillan, hlm. 9-10.

Hadiwinata, Bob S. (2002). Politik Bisnis Internasional *(The Politics of International Business).* Yogyakarta: Kanisius.

Hadiwinata, Bob S. (2016). 'Poverty and Economic Security'. Dalam Mely Caballero-Anthony (ed.). *An Introduction to Non-Traditional Security Studies.* London: SAGE, hlm. 90-91.

Hadiwinata, Bob S. (2007) 'Transformasi Isu dan Aktor di Dalam Studi Hubungan Internasional: Dari Realisme hingga Konstruktivisme (*Transformation of issues and actor in the study of international realism: from realism to constructivism*)', dalam Y.P. Hermawan (ed.), Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional: Aktor, Isu dan Metodologi *(Transformations in the Study of International Relations: Actors, Issues, and Methodology).*Yogyakarta: Graha Ilmu.

Hadiz, V.R. (2006) 'The Left and Indonesia's 1960s: the Politics of Remembering and Forgetting'. *Inter-Asia Cultural Studies,* Vol. 7 No. 4, hlm. 554–568.

Hadiz, V.R. dan Dhakidae, D. (2005) 'Introduction', dalam V.R. Hadiz dan D. Dhakidae (ed.), *Social Science and Power in Indonesia.* Singapura: Equinox Publishing dalam Hermawan, Y.P. (ed.) (2007) 'Transformasi dalam Studi Hubungan

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

Internasional: Aktor, Isu dan Metodologi' *(Transformations in the Study of International Relations: Actors, Issues, and Methodology)*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Haggard, Stephens, Simmons, Beth A. (1987). 'Theories of International Regimes'. *International Organization*, Vol. 41No. 03, hlm. 492.

Heryanto, A. (2003) 'Public Intellectuals, Media and Democratization: Cultural Politics of The Middle Classes in Indonesia', dalam A. Heryanto dan S.K. Mandal (ed.), *Challenging Authoritarianism in Southeast Asia: Comparing Indonesia and Malaysia*. London: Routledge-Curzon.

Heryanto, A. (2007) 'Can there be Southeast Asians in Southeast AsianStudies?', dalam L.J. Sears (ed.). *Knowing Southeast Asian Subjects*. Singapura: National University of Singapore Press.

Hill, Christopher (2005). 'Roundtable: the Battle Rages On'. *International Relations*. Vol.19, No. 3, hlm. 345-347.

Hoffman, Stanley (2006 [1986]) 'Hedley Bull and His Contribution to International Relations'. *International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944)*, Vol. 62, No. 2, hlm. 179-195.

Horkheimer, Max (1972*). Critical Theory: Selected Essays Vol. 1*. New York: Hammondsworth sebagaimana dikutip dalam Andrew Linklater (1990). *Beyond Realism and Marxim: Critical Theory and International Relations*. London: MacMillan, hlm. 1-2.

Huntington, Samuel P. (1993). *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth CenturyVol. 4*. Oklahoma: University of Oklahoma press, hlm. 3-4.

Irvine, D. (1982) 'Making Haste Slowly: ASEAN from 1975', in A. Broinowski (ed.), *Understanding ASEAN*. London: MacMillan.

Irwan, A. (2005) 'Institutions, Discourses and Conflicts in Economic Thought', dalam V.R. Hadiz dan D. Dhakidae (ed.), *Social Science and Power in Indonesia*. Singapura: Equinox Publishing.

Jackson, Robert (1992). 'Pluralism in International Political Theory'. *Review of International Studies*,Vol. 18, No. 3, hlm. 271.

Jones, Roy E. (1981) 'The English School of International Relations: a Case for Closure'. *Review of International Studies*Vol.7 No.1, hlm. 1-13.

Kaplan, Morton A. (1966). 'The New Great Debate: Traditionalism vs. Science in International Relations'. *World Politics*, Vol. 19 No.1, hlm. 2.

Karns, Margaret P, dan Mingst, Karen A. (2004). 'International Organizations'. *The Politics and Processes of Global Governance 2*, hlm. 36.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

Katzenstein, Peter J. (ed.) (1996). *The Culture of National Security: Norms and Identity in World Politics*. New York: Columbia University Press.

Katzenstein, Peter J., Keohane, Robert O., dan Krasner, Stephen D. (1998). 'International Organization and the Study of World Politics'. *International Organization*, Vol. 52, No. 4, hlm. 683.

Keohane, Robert O., Nye, Joseph. (1989). 'Council on Foreign Relations'. *Power and Complex Interdependence Edisi Kedua*. Boston: Scott Foresman and Company, hlm. 24-25.

Keohane, Robert O. (1988). 'International Institutions: Two Approaches'. *International Studies Quarterly*, Vol. 32 No. 4, hlm. 379-381.

Keohane, Robert O. (ed.) (1986). 'Theory of World Politics.' *Neorealism and Its Critics*. New York: Columbia University Press.

Kleden, I. (1986) 'Alternative Social Science as an Indonesian Problematique',*New Asian Visions*, Vol. 3 No. 2, hlm. 6-22.

Kratochwil, Friedrich (1989). *Rules, Norms, and Decisions: On the Conditions of Practical and Legal Reasoning in International Relations and Domestic Affairs*. Cambridge: Cambridge University Press, hlm. 20-25.

Krause, Keith, Williams, Michael (1996). 'Broadening the Agenda of Security Studies: Politics and Methods'. *Mershon International Studies Review* No. 40, hlm. 232.

Kresner, Stephen D. (1983). *International Regimes*. London: Cornell University Press, hlm. 185

Kubalkova, V., Cruickshank, A. (1989). *Marxism and International Relations*. Oxford: Oxford University Press, hlm. 205-222.

Kurki, Milja, Wright, Colin. (2013). 'International Relations and Social Science'. Dalam Tim Dunne, *et.al.* (ed.). *International Relations Theories: Discipline and Diversity*. Oxford: Oxford University Press, hlm. 20.

Lake, David A. (2013). 'Theory is Dead, Long Live Theory: The End of the Great Debates and the Rise of Eclecticism in International Relations'. *European Journal of International Relations*, Vol. 19 No. 3, hlm. 568.

Laksono, P.M. (2005) 'Social Science Associations', dalam V.R. Hadiz dan D. Dhakidae (ed.), *Social Science and Power in Indonesia*. Singapura: Equinox Publishing.

Lapid, Yosef. (1989). 'The Third Debate: On the Prospects of International Theory in a Post-Positivist Era'. *International Studies Quarterly*, Vol. 33 No. 3, hlm. 236.

Leifer, M. (1983). *Indonesia's Foreign Policy*. London: The Royal Institute of International Affairs and George Allen and Unwin.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

Linklater, Andrew (1990). *Beyond Marxism and Realism: Critical Theory and International Relations.* London: MacMillan, hlm. 12-14.

Linklater, Andrew (2007). *Critical Theory and World Politics: Citizenship, Sovereignty and Humanity.* London: Routledge, hlm. 104-108.

Linkalater, Andrew (1986). 'Realism, Marxism and Critical International Theory'. *Review of International Studies*, Vol.12 No.1, dalam Chan, Stephen dan Moore, Cerwyn (ed.) (2006). *Theories of International Relations.* London: SAGE, hlm.113-117.

Little, Richard (2005). 'Roundtable: The Battle Rages On'. *International Relations*, Vol.19, No. 3, hlm. 341-342.

Lowe, C. (2007) 'Recognizing Scholarly Subjects: Collaboration, Area Studies,and the Politics Of Nature', dalam L.J. Sears (ed.), *Knowing Southeast Asian Subjects.* Singapura: National University of Singapore Press.

MacLean, John (1988). 'Marxism and International Relations: a Strong Case of Mutual Neglect'. *Millenium: Journal of International Studies*, Vol. 17 No. 2 sebagaimana dipublikasi kembali dalam Stephen Chan dan Cerwyn Moore (ed.) (2006). '*Theories of International Relations Vol. III*'. London: Sage, hlm. 48.

Martha, Finnemore. (1996). *The National Interests of International Society.* Ithaca: Cornell University Press.

Mead, George H. (1910). 'Social Consciousness and the Consciousness of Meaning'. *Psychological Bulletin*, No. 7, hlm. 397-405.

Mearsheimer, John (2005). 'E.H. Carr vs. Idealism: the Battle Rages On'. *International Relations*, Vol. 19 No. 2, hlm. 139.

Mearsheimer, John (2005). 'Roundtable: the Battle Rages On'. *International Relations*, Vol. 13 No. 3, hlm. 358-359.

Mesquita, Bruce Bueno de. (1997). 'Capabilities, perception, and escalation'. *American Political Science Review*, Vol. 91 No. 1, hlm. 54.

Miller, Benjamin (2001). 'The Concept of Security: Should It be Redifined?'. *Journal of Strategic Studies*, Vol. 24 No. 2, hlm. 14.

Mingst, Karen A. (2004). *Essentials of International Relations.* New York: W.W. Norton & Company, hlm. 2.

Mitrany, David. (1948). 'The Functional Approach to World Organization'. *International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944)*, Vol. 24 No. 3, hlm. 360-361.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

Morada, N.M. (2007) '*APA and Track Two-And-A-Half Diplomacy: The Role of ASEAN People's Assembly in Building an ASEAN Community*', makalah dipresentasikan di ASEAN 40th Anniversary Conference, Singapura, 31 Juli-1Agustus.

Moravcsik, Andrew (2003). 'Theory Synthesis in International Relations: Real Not Metaphysical'. *International Studies Review,* Vol. 5 No. 1. hlm. 162.

Morgenthau, H.J. (1978 [1948]). *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace.* New York: Alfred P. Knopf, hlm.10-11.

Murphy, Raymond (1988). *Social Closure: The Theory of Monopolisation and Closure.* Oxford: Oxford University Press.

Nugroho, Adi (2005). Analisis dan Perancangan Sistem Informasi dengan Metodologi Beriorientasi Objek. Bandung: Informatika, hlm. 144.

Nugroho, H. (2005) 'The Political Economy of Higher Education: The University as an Arena for the Struggle for Power', dalam V.R. Hadiz dan D. Dhakidae (ed.). *Social Science and Power in Indonesia.* Singapura: Equinox Publishing.

Onuf, Nicolas (1989). *World of Our Making: Rules and Rule in Social Theory and International Relations.* Columbia: University of South Carolina Press, hlm. 18-23.

Oye, Kenneth A. (1985). 'Explaining Cooperation Under Anarchy: Hypothesis and Strategies'. *World Politics,* Vol. 38, No. 1, hlm. 1-24.

Pareira, A.H. (ed.) (1999). *Perubahan Global dan Perkembangan Studi Hubungan Internasional.* Bandung: Citra Aditya Bakti.

Pikiran Rakyat (2008). 'Sertifikasi Dosen Bakal Ternui Kendala' (*Lecturers Certification Will Face Obstacles*), Bandung, 23 Juli.

Popoviciu, A. (2010). 'David Mitrany and Functionalism: The beginnings of functionalism'. *Revista Româna de Geografie Politica,* Vol. 1, No. 12, hlm. 162.

Ransom, D. (1970). 'The Berkeley Mafia and the Indonesian Massacre'. *Ramparts,* Vol. 9 No. 4, hlm. 27-49.

Rawls, John, Freeman, Samuel. (1999). *John Rawls: Collected Papers.* Belknap: Harvard University Press, hlm. 49.

Renner, Michael (2005). 'Security Redefined'. Dalam Worldwatch Institute. *State of the World 2005: Redefining Global Security.* New York: W.W. Norton, hlm. 3-19.

Reus-Smit, Christian (2005). 'Constructivism', dalam Scott Burchill, *et.al* (ed.). *Theories of International Relations Edisi Ketiga.* London: Palgrave, hlm. 197.

Rogers, Paul (2005). 'Roundtable: the Battle Rages On'. *International Relations,* Vol.19, No.3, hlm. 339-340.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

Rorty, Richard (1967). 'Introduction: Metaphilosophical Difficulties of Linguistic Philosophy', dalam Richard Rorty (ed.) *The Linguistic Turn: Essays in Philosophical Method*. Chicago: University of Chicago Press, hlm. 9-10

Rose, Gideon. (1998). 'Neoclassical Realism And Theories Of Foreign Policy'. *World Politics*, Vol. 51 No. 1, hlm. 146-147.

Rosenau, Pauline (1992). *Post-Modernism and the Social Sciences: Insights, Inroads, and Intrusions*. Princeton: Princeton University Press, hlm. 3.

Ricardo, David (1891). *Principles of Political Economy and Taxation*. London: George Bell and Sons.

Ruggie, John G. (1998). 'What Makes the World Hang Together? Neo-Utilitarianism and Social Constructivist Challenge'. *International Organization*,Vol. 52, No. 4, hlm. 855-885.

Schmidt, Brian (2013). *International Relations and the First Great Debate*. London: Routledge.

Schumpeter, Joseph. (1983). *Capitalism, Socialism and Democracy (1943). Volume 99, No. 307*. UK: George Allen and Unwin, hlm. 25.

Schweder, Richard (1984). 'Anthropology's Romantic Rebellion against the Enlightenment, or There's More to Thinking than Reason and Evidence', dalam Richard Schweder dan Robert LeVine (ed.) *Culture Theory: Essays on Mind, Self and Emotion*. Cambridge: Cambridge University Press, hlm. 28.

Shue, Henry (1988) 'Mediating Ethics'. *Ethics*,Vol. 98 No. 4 sebagaimana dikutip oleh Andrew Linklater (2007). 'Realism, Marxism and Critical International Theory'. *Review of International Studies*, Vol.12 No.1, hlm. 35.

Smith, Hazel (1996). 'The Silence of the Academics: International Social Theory, Historical Materialism and Political Values'. *Review of International Studies*, Vol. 22 No.2 sebagaimana dipublikasi kembali dalam Stephen Chan dan Cerwyn Moore (ed.) (2006). *Theories of International Relations Vol. III*. London: Sage, hlm. 76.

Suganami, Hidemi (2006). 'Wendt, IR, and Philosophy', dalam Stefano Guzzini dan Anna Leander (ed.). *Constructivism and International Relations*. London: Routledge, hlm. 58-59.

Thakur, Ramesh, Newman, Edwards (ed.) (2004). *Broadening Asia's Security Discourse and Agenda: Political, Social and Environmental Perspectives*. Tokyo: United Nations University Press.

Tjhin, C.S. (2005) 'Menjalin Demokrasi Lokal dengan Regional: Membangun Indonesia, Membangun ASEAN (Weaving Democratization on Local and Regional Level:

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

Building Indonesia, Building ASEAN)', *Political and Social Change Working Paper Series No. 54,* Jakarta: Centre for Strategic and Security Studies.

Turner, Bryan S. (ed.) (1986). *Citizenship and Social Theory.* London: Sage, hlm. 127-131.

Uhlin, A. (1997). *Indonesia and the Third Wave of Democratization.* Surrey: Curzon.

Ullman, Richard (2011). 'Redefining Security'. Dalam Christoper W. Hughes dan Lai Yew Ming (ed.). *Security Studies: A Reader.* London: Routledge, hlm. 11.

United Nations Development Program (1994). *Human Developement Reports.* New York: Oxford University Press.

University of Parahyangan (2006). *Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Akademik2006/2007 (A Guide to Academic Activities 2006/2007).* Bandung: Faculty of Social and Political Sciences.

Vigneswaran, D., dan Quirk, J. (2004). *International Relations' First Great Debate: Context and Tradition'.* Canberra: Australian National University.

Vincent, R. J. (1988). 'Hedley Bull and Order in International Politics'. *Millenium Journal of International Studies,*Vol. 17, No. 2, hlm. 196.

Viotti, Paul R., Kauppi, Mark V. (1999). *International Relations Theory: Realism, Pluralism, Globalism, and Beyond No. 327.* Boston: Allyn and Bacon, hlm. 3

Waever, Ole (1996). 'The Rise and Fall of the Inter-Paradigm Debate'. *International Theory: Positivism and Beyond,* hlm. 149-150

Walker, R. B. J. (1993). *Inside/Outside: International Relations as Political Theory.* Cambridge: Cambridge University Press, hlm. 10-13.

Wallerstein, Immanuel (1979). *The Capitalist World Economy.* Cambridge: Cambridge University Press dalam Stephen Chan dan Cerwyn Moore (ed.). *Theories of International Relations Vol. III.* London: Sage., hlm. 41.

Waltz, Kenneth (1954). *Men, the State and War: a Theoretical Analysis.* New York: Columbia University Press.

Waltz, Kenneth N. (1979). *Neorealism and Its Critics.* New York: Random House, hlm.102-128.

Waltz, Kenneth N. (1979). '*Theory of International Politics*'. New York: Random House, hlm.163-170.

Wanandi, J. (1984) 'Security Issues In The Southeast Asia Region', dalam K.D.Jackson dan H. Soesastro (ed.). 'ASEAN Security and Economic Development'. *Research Papers and Policy Studies.* Berkeley, CA: Institute of East Asian Studies, University of California.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

Wendt, Alexander (1992). 'Anarchy is What States Make of It: The Social Construction of Power Politics'. *International Organization*, Vol. 46, No.2, hlm. 391425.

Wendt Alexander (1999). *Social Theory of International Politics*. Cambridge: Cambridge Unversity Press.

Waltz, Kenneth (1954). *Men, the State and War: a Theoretical Analysis*. New York: Columbia University Press.

Wheeler, Nicholas J., Dunne, Timothy. (2006 [1996]). 'Hedley Bull's Pluralism of the Intellect and Solidarism of the Will'. *International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944)*.

Wight, Martin (1978). *Power Politics*. Leicester: Leicester University Press , sebagaimana dikutip oleh Andrew Linklater (2007). 'Realism, Marxism and Critical International Theory'. *Review of International Studies*, Vol.12 No.1, hlm. 42.

Wight, Martin (1960). Why There Is No International 'Theory?'. *International Relations*,Vol. 2 No.1, hlm. 35-48

Wiriaatmadja, S. (1981). *Pengantar Hubungan Internasional (Introduction to International Relations). Diktat Kuliah (Course Outline)*. Bandung: University of Padjadjaran.

Wittgensein, L. (1958). *Philosophical Investigation*. Oxford: Blackwell, hlm. 337.

Zehfuss, Maja (2006). 'Constructivism and Identity: A Dangerous Liaison', dalam Stefano Guzzini dan Anna Leader (ed.). *Constructivism and International Relations*. London: Routledge, hlm. 92-116

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

INDEKS

A

Aberystwyth 15, 70, 73, 74, 192
Acharya, Amitav 33, 183, 186
Aditjondro, George J. 43
Adorno, Theodor 155, 201
Almond, Gabriel 110
Amal, Ichlasul 32
Angell, Norman 16, 55, 60, 62, 79, 84, 85, 102, 246
Anwar, Dewi Fortuna 35, 36
Arus Utama viii, 5, 6, 7, 19, 20, 56, 59, 69, 75, 103, 125, 126, 129, 135, 148, 150, 153, 161, 173, 191, 201, 202, 203, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 213, 214, 215, 216, 219,221, 223,224,233, 234, 245, 247, 251, 253, 260, 261, 262, 263, 264, 269, 271, 272, 278, 279, 281
ASEAN (*Association of Southeast Asia Nations*) 25, 33, 35, 38, 39, 95, 139, 147
Ashley, Richard 71, 201, 205, 233, 243, 248, 250, 251, 252, 259, 281
Axeworthy, Lloyd 185

B

Balance of Power (Perimbangan Kekuatan) 2, 17, 19, 100, 103, 108, 113, 117, 124, 132, 150, 163, 171, 203, 204, 207, 217, 225,233,257,263,281
Baudrillard, Jean 234, 235, 238, 239, 240, 250, 258
Bipolar 2, 103, 117, 203, 204
Black Widows (Janda Korban Perang) 229
Blazt, William Ernerst 177
Bleiker, Roland 248, 256, 257, 258, 259
Bodin, Jean 79
Booth, Kenneth 57, 59, 60, 70, 73, 74, 192
Bordieu, Pierre 234, 235, 236, 237, 238, 258
British Commonwealth (Persemakmuran Inggris) 88, 208
Brown, Chris 57, 70, 72, 73
Budiman, Arif 41, 43
Bull, Hedley 18, 55, 63, 64, 73, 111, 123, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 142, 144, 147, 149152, 167, 200, 201, 208
Burchill, Scott 5, 79, 90, 219, 223, 268
Butterfield, Herbert 123, 138, 159
Buzan, Barty 21, 58, 73, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144,
145, 146, 147, 148, 149, 152, 153, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 186, 193, 199, 206, 208, 227

C

Campbell, David 233
Capital 235, 236
Carr, Edward Hallet 17, 18, 22, 55, 56, 60, 62, 63, 65, 66, 70, 71, 73, 74, 89,

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

102, 105, 106, 107, 109, 118, 169, 170, 200, 246, 254, 257
Chan, Stephen 6, 12, 20, 136, 158, 160, 161, 209, 210, 214, 233, 251, 254, 257
Colas, Alejandro 20, 161, 210
Collective Security (Keamanan Kolektif) 15, 88, 106, 134, 276
Common Fate (Nasib yang sama) 8, 262, 276
Common Interest (Kepentingan Bersama) 131, 146
Complex Interdependence (Ketergantungan yang Kompleks) 23, 80, 92, 98
Cooperation Under Anarchy (Kerja sama di bawah situasi anarki) 71, 94, 95, 96, 125, 135, 207
Copenhagen School (Mazhab Kopenhagen) 3, 20, 26, 176, 179, 182, 227
Cox, Michael 59, 60
Cox, Robert W. 160, 210, 224
Cruickshank, Albert 20, 159, 160, 161
CSIS (*Center for Strategic and International Studies*) 33, 36, 38, 39, 42

D

Deepening (Pendalaman) 75, 182, 195, 227
Defensive Realism (Realisme Defensif) 113
Dekonstruksi 66, 222, 223, 234, 242, 243
De Mesquita, Bruce Bueno 23, 110
Dependency (Ketergantungan) 160, 252, 253
Der Derian, James 201, 233, 240, 248, 249, 250, 281
Derrida, Jacques 235, 238, 242, 243, 245, 247, 251, 281
Determinisme 7, 66, 67, 68, 69, 159, 174, 201, 210, 233
Deterrence (Penggetar) 19, 98, 110
Deutsch, Karl W. 55, 110
Devetak, Ricard 5
Dewan Keamanan PBB 93, 94, 137, 170
De Wilde, Jaap 180, 181, 227
Dhakidae, Daniel 39, 40, 42, 48, 49, 50
Distorted Thoughts (Pemikiran-pemikiran Menyimpang) 5, 155, 156, 157, 162, 163, 164, 174, 201, 209, 211
Donelly, Jack 5, 104
Doyle, Michael 81, 85
Dunne, Tim 5, 60, 70, 126, 136, 219, 226, 264
Durkheim, Emile 18, 110, 166, 167, 280

E

Easton, David 18, 110, 203
Elsthain, Jean 213, 214
English School (Mazhab Inggris) 3, 5, 6, 7, 21, 26, 56, 60, 69, 123, 124, 125, 126, 138, 148, 149, 206, 211, 264
Enlightenment (Abad Pencerahan) 79, 200, 201, 204, 232, 248
Enloe, Cynthia 205, 213, 220, 224, 225
Eulau, Heinz 110
Evers, Hans Dieter 29, 52, 216

F

Faucault, Michelle 234, 235
Femininity (Femininitas) 7, 216, 228
Feminisme 5, 6, 7, 36, 56, 69, 202, 203, 208, 209, 211, 213, 214, 215, 216, 219, 220, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 231, 247
Feminisme Analitis 220, 222, 223
Feminisme Empiris 220

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

Feminisme Normatif 224
Field 236
First Great Debate (Debat Besar Pertama) 17, 56, 57, 71, 200
Finnemore, Martha 272, 276, 277, 278, 281
Foundasionalisme 246
Fourth Great Debate 57
Freedom from Fear (Kebebasan dari Rasa Takut) 93, 141, 167, 185, 192, 223
Freedom of Maintaining Dignity (Kebebasan untuk Mempertahankan Martabat) 167, 192
Freedom from Pursuing Needs (Kebebasan Memenuhi Kebutuhan) 83, 93, 192
Frankfurt School (Mazhab Frankfurt) 154, 155, 201
Friendship (Persahabatan) 3, 21, 23, 24
Fukuyama, Francis 80, 81

G

GAD (*Gender and Development*) 216
Gaddis, John L. 66
Game Theory (Teori Permainan) 113, 114, 115
Genosida 93, 94, 126, 137, 151, 186, 193
Gills, Barry K. 158, 160
Gilpin, Robert P. 80
Goldstein, Joshua 13
Great Debates (Perdebatan Besar) 54, 57, 58, 75
Grotius, Hugo 5, 124, 128
Guzzini, Stefano 211, 262

H

Haas, Ernst B. 31, 97
Habermas, Jurgen 154, 155, 158, 201, 251
Habitus 235, 236, 251
Hadiz, Vedi 39, 40, 41, 42, 48, 49, 50
Harmony of Interest (Harmoni Kepentingan) 17, 61, 106
Heryanto, Ariel 30, 37, 40, 43
High Politics (Politik Tingkat Tinggi) 20, 92, 130, 138, 139, 161
Hill, Christopher 57, 70, 72
Hiper-Realitas 234, 238, 239, 240, 258
Historical Tracing (Penelusuran Sejarah) 2, 11, 18, 148
Historisitas 248, 259
Hobbes, Thomas 2, 3, 5, 17, 26, 70, 104, 105, 123, 127, 131, 132, 134, 142, 149, 160, 200, 261, 275, 276
Hoffman, Stanley 135, 136
Homogeneity (kemiripan budaya) 8, 262, 276
Horkheimer, Max 154, 155, 156, 201
Human Emancipation (Emansipasi Manusia) 20, 161, 210
Human Security (Keamanan Manusia) 93, 140, 177, 184, 185, 186
Huntington, Samuel P. 80

I

ICC (*International Criminal Court*) 186
ICISS (*International Commission of Intervention and State Sovereignty*) 94
Identity (identitas) 3, 4, 8, 19, 21, 23, 24, 65, 86, 128, 157, 166, 168, 169, 174, 178, 183, 193, 201, 202, 205, 206, 208, 218, 219, 220, 224, 242, 255, 256, 260, 262, 263, 264, 266, 267, 268, 269, 270, 272, 273, 275, 279, 280, 281, 282
ILO (*International Labor Organization*) 97, 99
Intention (maksud/niat) 3, 8, 21, 224, 242, 260, 263, 266, 271, 272

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

Interest (kepentingan) 3, 8, 21, 23, 24, 107, 151, 224, 260, 263, 266, 272, 280
Inter-Human Society (Masyarakat Antar Manusia) 144
Internasionalisme 17, 18, 19, 62, 86, 89, 123, 148, 151, 158
International Society (Masyarakat Internasional) 24, 64, 94, 124, 126, 127, 128, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 141, 142, 144, 145, 146, 147, 151, 152, 153, 173, 207, 208, 261
Interpedendence (Saling Ketergantungan) 8, 22, 61, 80, 83, 85, 87, 88, 90, 91, 92, 98, 251, 252, 262
Inter-State Society (Masyarakat Antar Negara) 144, 147
Intertekstualitas 7, 234, 244, 246

J

Jabri, Viviane 214

K

Kant, Immanuel 2, 3, 5, 16, 70, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 90, 123, 128, 134, 141, 142, 149, 160, 164, 253,254,255, 262,276
Kantian Triangle (Segitiga Kantian) 86, 88, 254
Kaplan, Morton A. 18, 19, 55, 63, 64, 65, 110, 111, 130, 200, 201, 203
Katzenstein, Peter J. 265, 272, 278, 279, 280, 281
Keamanan Nasional 19, 33, 62, 72, 117, 119, 170, 176, 177, 179, 181, 183, 217, 233, 276, 279
Keamanan Non-Tradisional 3, 4, 5, 19, 21, 26, 28, 36, 152, 171, 181, 186, 195, 223, 227, 279
Keamanan Regional 113, 117, 119, 181, 192
Kekuatan Nasional 2, 23, 24, 31, 32, 62, 103, 117
Keliat, Makmur 36
Kennan, George F. 31, 32, 102
Keohane, Robert 19, 56, 58, 68, 91, 92, 98, 111, 132, 146, 201, 206, 261, 265
Kepentingan Nasional 2, 22, 23, 24, 31, 32, 62, 83, 89, 95, 100, 103, 108, 117, 126, 130, 146, 150, 160, 172, 202, 217, 233, 249, 277, 278, 282
Konsep *Knowledge/Power* 241
Konsep Trilogi 235, 258
Konstruktivis 8, 21, 59, 179, 182, 224, 260, 261, 263, 265, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 280, 281
Konstruktivisme 4, 5, 6, 8, 16, 23, 24, 26, 28, 44, 56, 69, 191, 192, 202, 203, 208, 209, 211, 212, 219, 260, 261, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 279, 280, 281, 282
Konvergensi 71, 100, 159
Krasner, Stephen D. 89, 86, 132, 146, 265
Kratochwil, Friedrich 3, 4, 8, 21, 26, 260, 261, 263, 272, 273, 280, 281
Kubalkova, Vendulka 20, 159, 160, 161
Kuhn, Thomas 23, 58, 68
Kurki, Milja 5, 58, 70, 126, 219, 226, 264
Kusumaatmadja, Mochtar 40

L

Lake, David A. 54, 59
Language (bahasa) 3, 8, 21, 23, 24, 266, 269, 272
Lapid, Joseph 56, 58, 59, 66, 67, 68, 69, 208, 209

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

League of Nations (Liga Bangsa-Bangsa) 15, 16, 60, 61, 79, 84, 88
Leander, Anna 211, 262
Leifer, Michael 34, 35
Liberalisme 1, 3, 5, 6, 16, 17, 22, 23, 24, 26, 44, 55, 56, 57, 58, 60, 63, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 79, 80, 81, 84, 85, 86, 87, 89, 95, 100, 101, 102, 107, 125, 128, 129, 150, 200, 201, 206, 207, 248
Linklater, Andrew 3, 5, 19, 20, 26, 83, 141, 148, 153, 155, 156, 157, 158, 161, 162, 163. 164, 165, 166, 167, 168, 169, 171, 173, 174, 201, 202, 209, 210, 223
Little, Richard 57, 70, 71, 93, 145, 173, 199
Logosentrisme 7, 233, 234, 244, 245
Low Politics (Politik Tingkat Bawah) 92, 138, 139
Lowe, Celia 40

M

Machiavelli, Niccolo16, 17, 70, 85, 86, 105, 127,261
MacLean, John 158
Madison, Angus 16
Malik, Adam 35
Manning, Charles 123, 132, 142, 152, 206, 208
Marx, Karl 16, 20, 41, 154, 158, 160, 167
Marxisme 5, 20, 40, 41, 51, 154, 157, 158, 159, 160, 161, 164, 174, 242
Mas'oed, Mohtar viii, 15, 32
Masculinity (Maskulinitas) 7, 213, 214, 216, 219, 222, 225, 228, 231
Materialisme Sejarah 19, 23, 154, 159, 160, 174, 210
McNamara, Robert 278
Mearsheimer, John 56, 57, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 112, 113
Mill, J.S 16, 79
Mingst, Karen 13, 14, 80, 148
Mitrany, David 91, 99, 100
Modelski, George 110
Moore, Cerwyn 6, 20, 136, 158, 160, 161, 209, 210, 214, 233, 251, 254, 257
Morgenstern, Oskar 114
Morgenthau, H.J 18, 31, 32, 60, 62, 73, 74, 102, 107, 109, 118, 124, 222, 224, 254, 257
Muhaimin, Yahya viii, 32

N

Negative Peace (Perdamaian Negatif) 98, 103
Neoliberal Institusionalisme 4, 79, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101
Neo-Realisme 2, 3, 19, 22, 26, 56, 59, 60, 71, 113, 116, 124, 125, 129, 132, 141, 148, 151, 153, 162, 163, 164, 173, 174, 178, 201, 202, 204, 205, 206, 207, 209, 211, 233, 247, 257, 262, 263, 265, 266, 267, 268, 269, 274, 275, 278, 279, 281
Newman, Edward 185
Non Zero Sum Game 114, 115
Nuclear Disarmament (Perlucutan Senjata Nuklir) 74, 221
Nugroho, Heru 40, 49, 50
Nye, Joseph S.

O

Offensive Realism (Realisme Ofensif) 112, 113
Offen, Karen 214
Olla Communes (Dapur Umum) 221, 230
Onuf, Nicolas 3, 4, 8, 21, 26, 202, 261, 263, 265, 266, 268, 272, 273, 274, 280, 281

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

Oye, Kenneth 95, 96

P

PACIS (*Parahyangan Center for International Studies*) 49, 50
Patterson, Matthew 5
Pembersihan Etnis 93, 94, 137, 151
Perang Dingin 2, 12, 13, 27, 30, 31, 34, 59, 62, 80, 92, 98, 103,110, 136, 153, 176, 177, 178, 183, 184, 186, 204, 209, 220, 225, 262, 264, 267, 268, 271
Perang Dunia Kedua 1, 17, 55, 57, 60, 61, 63, 80, 88, 89, 102, 103, 105, 113, 200, 217, 220, 254
Perang Dunia Pertama 16, 17, 55, 59, 61, 63, 74, 79, 88, 217
Perang Nuklir 103, 117
Piagam PBB 93, 94, 171
Pluralisme 6, 101, 140
Posmodernisme 4, 5, 6, 7, 26, 56, 202, 203, 208, 209, 211, 219, 224, 232,233, 234, 235, 243, 244, 247, 252, 255, 258
Post-Westphalia 158
Problem of Citizenship (Problematika Kewarganegaraan) 165, 168
Problem of Community (Problematika Komunitas) 165, 166, 168
Problem of Harm (Problematika Pencideraan) 165, 170, 172

R

Rais, Amien viii, 32, 43
Rasionalisme 3, 5, 26, 73, 123, 128, 139, 140, 141, 142,149, 151, 152, 160, 211
Rational Choice Theory (Teori Pilihan Rasional) 113, 115
Realisme 2, 3, 4, 5, 6, 7, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 35, 36, 44, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 80, 92, 95, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 117, 118, 119, 120, 123, 124, 125, 127, 129, 132, 135, 138, 139, 142, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 158, 160, 161, 162, 164, 169, 170, 173, 174, 178, 193, 200, 201, 204, 205, 206, 207, 209, 211, 213, 216,217, 219, 222, 223, 226, 231, 233, 247, 248, 249, 251, 252,253, 254, 257, 260, 265, 266, 267, 269, 271, 273, 275, 282
Reflektivisme 6
Reflektivis 7, 56, 57, 59, 66, 69, 70, 199, 202, 203, 208, 209, 210, 211, 215, 219, 261, 263
Renner, Michael 178
Reus-Smit, Chris 5, 268
Revolusi Behavioralisme 18, 110, 200, 202
Rivalitas 3, 6, 21, 23, 24, 116, 179, 224, 262, 268,276
Rogers, Paul 57, 70, 71
Rorti, Richard 247, 264
Rosecrance, Richard 91
Rousseau, J.J 16, 79
R-to-P (*Responsibility to Protect*) 94, 171, 186
Ruggie, John G. 146,272,280,281
Rules of Coexistence (Aturan Koeksistensi) 124, 134, 144, 145, 150, 151, 207
Rules of Cooperation (Aturan Kerja Sama) 145
Russet, Bruce 81

S

SARS (*Severe Acute Respiratory Syndrome*) 181, 183, 189
Schelling, Thomas 110

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

Second Great Debate (Perdebatan Besar Kedua) 18, 130, 200
Security Dilemma (Dilema Keamanan) 112, 113, 116
Sekuritisasi 3, 4, 7. 20, 26, 176. 179, 180, 181, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195
Self-Restrain (sikap menahan diri) 124, 126, 207
Shapiro, Michael J. 248, 253, 254, 255, 259
Sistem Hobbesian 261, 262
Sistem Kantian 262
Sistem Lockean 262
Smith, Adam 16, 79
Smith, Steve 5, 126, 219, 226, 264
Snyder, Jack 58
Spasialitas 248, 249, 259
Speech Act (Pernyataan) 3, 20, 179, 180, 181, 187, 189, 190, 191, 261, 270, 274
Stearn, Jill 214
Struggle for Power (Perjuangan untuk Kekuasaan) 18, 24, 40, 49, 50, 62, 107, 109, 119, 124, 163, 255, 266, 273
Sudarsono, Juwono 35
Suganami, Hidemi 211, 262
Sukma, Rizal 36
Sullivan, Michael P. 6
Sun Tzu 1, 14
Symbolic Interactionism (Interaksionisme Simbolik) 202

T

Teori Kritis viii, 5, 6, 7, 19, 20, 56, 59, 69, 83, 125, 128, 141, 148, 151, 154, 155, 156, 157, 158, 160, 161, 162, 164, 165, 167, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 191, 192, 201, 202, 203, 207, 209, 210, 219, 223, 224, 242, 243, 247, 250, 251, 272
Thakur, Ramesh 185
The Linguistic Turn (Pembelokan Linguistik) 7, 67, 69, 199, 201, 202, 204, 205, 206, 210, 264
Thick Description (Penggambaran yang meyakinkan) 11, 53
Third Great Debate (Perdebatan Besar *Ketiga) 201, 213*
Three Master Variables (Tiga Variabel Utama) 8, 262
Three Traditions (Tiga Tradisi) 127, 139, 142, 160
Thucydides 1, 14, 104, 105, 118, 200
Tickner, J. Ann 201, 213, 214, 216, 217, 218, 219, 220, 223, 226, 227
Toer, Pramudya Ananta 41
Tradisionalis 3, 18, 26, 55, 57, 59, 60, 63, 64, 65, 66, 67, 111, 119, 149, 200, 203, 204
Transnational Society (Masyarakat Transnasional) 45, 144
True, Jacqui 5, 214, 219, 220

U

Ul Haq, Mahbub 184
Ullman, Richard 176, 177, 182, 227

V

Van Evera, Steven 58
Virtual War (Peperangan Virtual) 249
Von Bertalanffy, Ludwig 18, 110
Von Clausewitz 16

W

Waever, Ole 4, 56, 180, 181, 182, 195, 227

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

Walker, R.B.J 109, 233, 243, 248, 249, 259, 281
Waltz, Kenneth N. 2, 18, 19, 31, 55, 58, 110, 112, 113, 116, 124, 162, 163, 203, 204, 205, 213, 217, 219, 222,225, 246, 257, 266, 274
Wanandi, Jusuf 33, 38
Watson, Adam 123, 138, 142, 208
Weber, Cynthia 213
Wendt, Alexander 8, 26, 201, 202, 211, 261, 262, 263, 265, 266, 272, 274, 275, 276, 280, 281
Westphalia 1, 14, 123, 132, 148, 158, 164, 166, 169, 170, 173, 199, 210, 254,276
Wheeler, Nicholas J. 136
WID (*Women in Development*) 216
Widening (Perluasan) 75, 182, 183, 191, 195, 227
Wight, Martin 73, 123, 127, 128, 129, 132, 138, 139, 141, 142, 149, 152, 159, 168, 169, 206, 208
Wilson, Woodrow 15, 79, 88, 102, 164, 199
Wiriaatmadja, Suwardi 32
Women's Decade (Dekade Perempuan) 216
Woolf, Leonard 60, 61
World Citizen (Warga Negara Dunia) 83, 158, 165, 173, 174
World Society (Masyarakat Dunia) 21, 125, 138, 206
World System (Sistem Dunia) 23, 253
Wright, Colin 70

Z

Zehfuss, Maja 211
Zero Sum Game 114, 115
Zimmern, Sir Alfred 1, 15, 16, 55, 60, 61, 79, 88, 102, 199

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional

TENTANG PENULIS

Prof. Drs. Bob Sugeng Hadiwinata, M.A., M.Phil., Ph.D., adalah Guru Besar dalam Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Katolik Parahyangan dan dosen di Pascasarjana FISIP Universitas Padjadjaran, Bandung.

Mendapat gelar sarjana dari Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta; gelar Master of Arts (MA) dari Department of International Relations, Monash University, Australia; gelar Master of Philosophy (M.Phil.) di bidang Sociology and Politics of Development, King's College, Cambridge University dan gelar doktor (Ph.D.) dari Faculty of Social and Political Sciences, King's College, Cambridge University, Inggris.

Bob adalah Georg Forster Research Fellow di bawah Alexander von Humboldt Foundation, Jerman di Universitas Giessen (2004-2005) dan Technical University of Dortmund (2011-2012).

Dia menjadi dosen dan penguji tamu di berbagai perguruan tinggi, antara lain, Australian National University, Canberra; Flinders University, Australia, Curtin University, Perth; Universitas Kebangsaan Malaysia, Leeds University Inggris, Universitas Groningen, Belanda, dan Technical University Dortmund, Jerman; dan menjadi editor tamu di Jurnal Ilmiah *Pacific Affairs*, *Journal of Democracy*, dan *Global Strategic*.

Copy buku ini hanya untuk tujuan pendidikan.
Jika anda menyukai, pertimbangkanlah untuk membeli buku yang asli sebagai dukungan terhadap penulis dan penerbit.
http://obor.or.id/hubungan-internasional